

PERENCANAAN
WILAYAH
PERENCANAAN KOTA
KEBERLANJUTAN
IDENTITAS KULTURAL
KUALITAS HIDUP



KOTA
MANUSIA
BUDAYA
RUANG
MASA DEPAN

Rencana Pembelajaran Semester dan Materi Perkuliahan **Perencanaan Ruang Kultural** Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (S1)



Pembina Matakuliah: Prof. Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT,
Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT, Ir. Tjokorda Nirarta Samadhi, MSP., Ph.D,
dan Endratno Budi Santoso, ST., MT

RUANG
KULTUR
MASYARAKAT
BERKELANJUTAN

DARI
LOKALITAS
MENUJU
KOTA YANG
LEBIH BAIK

RUANG
MENGHUBUNGAN
MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

PERENCANAAN
UNTUK
KEHIDUPAN
YANG LEBIH BERMAKNA



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH

Perencanaan Ruang Kultural berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi **Perencanaan Wilayah dan Kota**. RPS ini disusun dengan mengacu pada prinsip SN-DIKTI, khususnya orientasi capaian pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, dan penjaminan mutu. Catatan regulatif: sejak 2025, rujukan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku adalah **Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025**, yang mengatur SN-DIKTI, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, SPMI, SPME, akreditasi, dan PD-Dikti; regulasi ini menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

A. Identitas Mata Kuliah

Komponen	Uraian
Program Studi	Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang	S1
Mata Kuliah	Perencanaan Ruang Kultural
Kode Mata Kuliah	PW-3219
Bobot	3 SKS
Semester	3 (tiga)
Jenis Mata Kuliah	Keilmuan
Dosen Pengampu	Prof. Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT, Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT, Dr. Ir. Tjokorda Nirarta, MT, dan Endratno B.S., ST., MT
Bentuk Evaluasi	Tugas individu, tugas kelompok, studi kasus, observasi, presentasi, UTS, proyek perencanaan, UAS.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Perencanaan Ruang Kultural merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai keterkaitan antara **budaya, masyarakat, aktivitas, sistem sosial, kepercayaan, pola bermukim, dan pembentukan ruang** dalam konteks perencanaan wilayah dan kota. Mahasiswa mempelajari nilai-nilai budaya masyarakat lokal sebagai dasar untuk memahami proses terbentuknya ruang permukiman serta implikasinya terhadap praktik perencanaan yang sensitif terhadap karakter sosial dan budaya masyarakat.

Pembelajaran mencakup konsep budaya dan kebudayaan, budaya bermukim, unsur-unsur budaya, masyarakat dan dinamika sosial, kekerabatan, struktur sosial, kepercayaan, aspek statistik sosial, pola penggunaan ruang, serta proses pembentukan ruang permukiman. Mahasiswa diarahkan untuk mampu

melakukan pengamatan, identifikasi, analisis, interpretasi, dan pemetaan terhadap fenomena ruang kultural serta mengembangkan alternatif atau rekomendasi perencanaan yang mempertimbangkan **identitas, nilai lokal, keberlanjutan sosial-budaya, dan aspirasi masyarakat**.

Melalui pendekatan OBE, mahasiswa tidak hanya diharapkan menguasai konsep, tetapi juga mampu **menghasilkan kajian saintifik dan produk perencanaan ruang kultural**, mengomunikasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan, serta berinteraksi dengan masyarakat secara etis dan bertanggung jawab.

C. Capaian Pembelajaran Lulusan — CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

CPL-3

Mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja yang ditugaskan dalam konteks Perencanaan Wilayah dan Kota.

CPL-4

Mampu memahami konsep dan teori perencanaan, mengembangkan pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam Perencanaan Wilayah dan Kota; mampu melakukan komunikasi dan mempresentasikan produk Perencanaan Wilayah dan Kota kepada pengguna; serta melakukan interaksi dengan masyarakat untuk mencari informasi dan menyampaikan produk Perencanaan Wilayah dan Kota.

D. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah — CPMK

CPMK-1

Mahasiswa mampu **mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan ruang kultural** dengan mematuhi kaidah dan etika ilmiah serta menghasilkan solusi dan desain yang mempertimbangkan nilai budaya dan kultural lokal, kemudian menyajikannya dalam bentuk laporan yang komprehensif.

CPL terkait: CPL-3.

CPMK-2

Mahasiswa mampu **menyusun deskripsi saintifik hasil kajian perencanaan ruang kultural** dalam bentuk laporan akademik dengan tanggung jawab terhadap kualitas dan ketepatan informasi serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan perencanaan ruang kultural.

CPL terkait: CPL-3.

CPMK-3

Mahasiswa mampu **memahami dan mengaplikasikan konsep serta teori perencanaan ruang kultural** dalam pengembangan pengetahuan dan penyusunan produk perencanaan sesuai karakteristik sosial, budaya, dan

kultural lokal serta mengintegrasikannya dalam konteks Perencanaan Wilayah dan Kota.

CPL terkait: CPL-4.

CPMK-4

Mahasiswa mampu **melakukan komunikasi dan presentasi produk perencanaan ruang kultural secara efektif kepada pemangku kepentingan**, serta berinteraksi secara produktif dan etis dengan masyarakat dalam pengumpulan informasi dan penyampaian hasil perencanaan.

CPL terkait: CPL-4.

E. Sub-CPMK

Saya sarankan digunakan **10 Sub-CPMK** agar ketercapaiannya dapat diukur secara jelas.

Sub-CPMK	Rumusan Kemampuan Akhir yang Diharapkan	CPMK	CPL
Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep budaya, ruang kultural, dan keterkaitan budaya dengan perencanaan wilayah dan kota secara tepat.	CPMK-3	CPL-4
Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk dan unsur kebudayaan yang berpengaruh terhadap pembentukan ruang dan permukiman.	CPMK-3	CPL-4
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu menganalisis budaya bermukim dan hubungan antara aktivitas masyarakat dengan pola pemanfaatan ruang.	CPMK-1, 3	CPL-3, 4
Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik masyarakat, struktur sosial, dan dinamika sosial serta implikasinya terhadap ruang permukiman.	CPMK-1, 3	CPL-3, 4
Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menganalisis sistem kekerabatan dan kaitannya dengan pola bermukim serta organisasi ruang masyarakat.	CPMK-1, 3	CPL-3, 4
Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menggunakan informasi statistik sosial dan data sosial-budaya untuk menjelaskan karakter serta struktur ruang permukiman secara bertanggung jawab.	CPMK-1, 2	CPL-3
Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu menganalisis hubungan kepercayaan, tradisi, simbol, nilai sakral, dan praktik budaya dengan pembentukan ruang permukiman.	CPMK-1, 3	CPL-3, 4
Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu melaksanakan observasi dan interaksi dengan masyarakat secara etis untuk memperoleh informasi mengenai ruang kultural.	CPMK-2, 4	CPL-3, 4
Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu menyusun analisis, peta, konsep, dan alternatif perencanaan ruang kultural berdasarkan karakter masyarakat lokal.	CPMK-1, 2, 3	CPL-3, 4
Sub-CPMK 10	Mahasiswa mampu mengomunikasikan dan mempertanggungjawabkan produk perencanaan ruang kultural secara tertulis, grafis, dan lisan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.	CPMK-2, 4	CPL-3, 4

F. Matriks CPL–CPMK

Keterangan: ● = keterkaitan utama

CPL	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4
CPL-3	●	●	○	○
CPL-4	○	○	●	●

Dengan demikian:

CPL-3 → CPMK-1 + CPMK-2

menekankan **implementasi ilmu, etika ilmiah, analisis, solusi, serta pelaporan saintifik.**

Sedangkan:

CPL-4 → CPMK-3 + CPMK-4

menekankan **penguasaan teori, penerapan perencanaan, komunikasi produk, dan interaksi dengan masyarakat.**

G. Matriks CPMK–Sub-CPMK

Sub-CPMK	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4
1			●	
2			●	
3	●		●	
4	●		●	
5	●		●	
6	●	●		
7	●		●	
8		●		●
9	●	●	●	
10		●		●

H. Bahan Kajian Utama

Bahan kajian mata kuliah meliputi:

1. Pengantar perencanaan ruang kultural.
2. Konsep budaya dan kebudayaan.
3. Hubungan manusia, budaya, aktivitas, dan ruang.
4. Bentuk dan unsur-unsur kebudayaan.
5. Budaya bermukim.
6. Masyarakat dan dinamika sosial.
7. Sistem kekerabatan dan pola bermukim.
8. Struktur sosial permukiman.
9. Statistik sosial dalam kajian ruang.
10. Sistem kepercayaan dalam permukiman.
11. Ruang sakral dan profan.
12. Simbol, identitas, dan makna tempat.
13. Proses pembentukan ruang permukiman.
14. Pemetaan ruang kultural.
15. Analisis ruang kultural.
16. Perumusan konsep dan alternatif perencanaan.
17. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan.
18. Komunikasi produk perencanaan ruang kultural.

I. Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mg	Sub-CPMK	Materi Pembelajaran	Strategi/ Metode	Aktivitas/ Tugas	Asesmen
1	1	Pengantar Perencanaan Ruang Kultural: definisi, ruang lingkup, budaya dan ruang; urgensi nilai budaya lokal dalam PWK	Ceramah interaktif, diskusi, brainstorming	Identifikasi fenomena ruang kultural di lingkungan sekitar	Partisipasi
2	1, 2	Konsep Budaya: pengertian budaya, sistem budaya, nilai, norma, simbol, artefak, budaya material dan nonmaterial	Case-Based Learning, diskusi	Kajian contoh budaya lokal	Tugas individu
3	2	Unsur-unsur Budaya: bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, mata pencaharian, kepercayaan, kesenian	Diskusi kelompok, studi literatur	Matriks unsur budaya dan ekspresi spasial	Tugas kelompok
4	3	Budaya Bermukim: hubungan pola hidup, aktivitas, lingkungan, dan bentuk permukiman	Studi kasus, problem-based learning	Analisis budaya bermukim pada kasus tertentu	Tugas analisis
5	4	Masyarakat dan Dinamikanya: struktur sosial, kelompok sosial, perubahan sosial, modernisasi, migrasi dan perubahan ruang	Ceramah interaktif, diskusi kasus	Analisis perubahan masyarakat dan ruang	Kuis/tugas
6	5	Aspek Keekerabatan dan Bermukim: sistem keluarga, keekerabatan, komunitas, territoriality, privasi, pola hunian	Case-Based Learning	Pemetaan hubungan keekerabatan dan pola ruang	Tugas
7	6	Aspek Statistik Sosial dalam Permukiman: penduduk, struktur umur, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, sosial ekonomi dan interpretasi spasial	Praktik analisis data, collaborative learning	Analisis profil sosial kawasan	Tugas praktik
8	1–6	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	Tes tertulis/ studi kasus	Analisis fenomena sosial-budaya dan ruang	UTS
9	7	Sistem Kepercayaan dan Ruang Permukiman: nilai, religi, tradisi, ritual, ruang sakral–profan	Studi kasus, diskusi	Analisis sistem kepercayaan dan ruang	Tugas

Mg	Sub-CPMK	Materi Pembelajaran	Strategi/ Metode	Aktivitas/ Tugas	Asesmen
10	7	Identitas, Simbol, Makna dan Sense of Place: landmark budaya, simbol ruang, place attachment, genius loci	Case-Based Learning	Identifikasi identitas ruang kultural	Tugas kelompok
11	3, 5, 7	Pembentukan Ruang Permukiman: proses sosial-kultural, adaptasi lingkungan, pola aktivitas, morfologi dan struktur ruang	Problem-Based Learning	Diagram proses pembentukan ruang	Tugas
12	8	Teknik Kajian Ruang Kultural: observasi, wawancara, pemetaan sosial, behavioral mapping, cognitive mapping dan etika interaksi masyarakat	Praktikum/simulasi	Penyusunan instrumen observasi dan wawancara	Penilaian praktik
13	8, 9	Survei/Observasi Ruang Kultural dan Pemetaan: pengumpulan, pengorganisasian, interpretasi data sosial-spasial	Project-Based Learning/field study	Pengumpulan data lapangan atau studi kasus	Proyek
14	9	Analisis dan Perumusan Konsep Perencanaan Ruang Kultural: potensi, masalah, nilai budaya, kebutuhan masyarakat, konsep pengembangan	Studio/project-based learning	Penyusunan konsep dan alternatif perencanaan	Proyek
15	9, 10	Presentasi Produk Perencanaan Ruang Kultural: komunikasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; refleksi dan evaluasi	Presentasi, peer review, panel discussion	Presentasi proyek dan laporan	Presentasi + proyek
16	1–10	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian/studi kasus komprehensif	Sintesis konsep budaya, masyarakat, ruang dan perencanaan	UAS

J. Strategi Pembelajaran

Pembelajaran menggunakan pendekatan **Student-Centered Learning (SCL)** yang dikombinasikan dengan pembelajaran berbasis kasus dan proyek.

1. Case-Based Learning

Mahasiswa menganalisis kasus nyata seperti:

- kampung adat;
- desa tradisional;
- kawasan permukiman etnis;
- kampung kota;
- kawasan bersejarah;
- permukiman masyarakat pesisir;
- permukiman berbasis kekerabatan;
- kawasan dengan ritual atau tradisi tertentu.

Tujuannya agar mahasiswa mampu menghubungkan **konsep budaya** → **fenomena sosial** → **bentuk ruang** → **persoalan perencanaan**.

2. Problem-Based Learning

Mahasiswa diberikan permasalahan seperti konflik antara:

modernisasi kawasan ↔ **pelestarian nilai budaya lokal**.

Mahasiswa kemudian merumuskan:

masalah → **analisis** → **alternatif** → **rekomendasi perencanaan**.

3. Project-Based Learning

Proyek semester berupa:

Kajian dan Konsep Perencanaan Ruang Kultural pada Suatu Permukiman/Kawasan.

Produk proyek sekurang-kurangnya meliputi:

- profil masyarakat;
- profil budaya;
- unsur budaya;
- sistem aktivitas;
- kekerabatan;
- sistem kepercayaan;
- pola penggunaan ruang;
- peta ruang kultural;
- permasalahan dan potensi;
- konsep;
- alternatif perencanaan;
- rekomendasi.

4. Collaborative Learning

Digunakan untuk meningkatkan kemampuan:

- kerja tim;
- pembagian tugas;
- argumentasi;
- diskusi;
- sintesis informasi;
- komunikasi profesional.

5. Experiential/Field-Based Learning

Mahasiswa melakukan observasi lingkungan atau studi kasus untuk memahami bagaimana **nilai budaya diwujudkan dalam pola ruang nyata**.

K. Bentuk Pembelajaran

Bentuk	Implementasi
Tatap muka	Penjelasan konsep dan teori
Tutorial	Pendalaman konsep
Diskusi	Analisis masalah budaya dan ruang
Studi kasus	Kasus ruang kultural nyata
Praktikum	Analisis data dan pemetaan
Studio	Penyusunan konsep perencanaan
Observasi lapangan	Pengumpulan data sosial-spasial
Presentasi	Penyampaian produk perencanaan
<i>Project-Based Learning</i>	Proyek akhir ruang kultural
Pembelajaran mandiri	Literatur dan analisis kasus

L. Komponen Penilaian

Bobot berikut dapat langsung digunakan:

No.	Komponen	Bobot
1	Kehadiran, aktivitas dan partisipasi pembelajaran	5%
2	Tugas individu	10%
3	Tugas kelompok/studi kasus	10%
4	Kuis/analisis data sosial-kultural	5%
5	UTS	20%
6	Proyek Perencanaan Ruang Kultural	25%
7	Presentasi dan komunikasi produk	10%
8	UAS	15%
	TOTAL	100%

M. Keterkaitan Penilaian dengan CPMK

Komponen	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4
Tugas individu	○	○	●	
Studi kasus	●		●	
Analisis data	●	●	○	
UTS	●	●	●	
Proyek	●	●	●	●
Presentasi		●	○	●
UAS	●	●	●	●

N. Rubrik Penilaian Ringkas

1. Rubrik Tugas Analisis/Studi Kasus

Aspek	Bobot
Ketepatan identifikasi budaya dan ruang	20%
Penguasaan konsep/teori	20%
Kedalaman analisis	30%
Argumentasi dan sintesis	20%
Sistematika dan sumber ilmiah	10%

2. Rubrik Proyek Perencanaan Ruang Kultural

Aspek	Bobot
Ketepatan identifikasi karakter budaya	15%
Kualitas data sosial dan spasial	15%
Analisis hubungan budaya–aktivitas–ruang	20%

Ketepatan perumusan masalah	10%
Kualitas konsep perencanaan	20%
Sensitivitas terhadap budaya lokal	10%
Kualitas peta/grafis/laporan	10%

3. Rubrik Presentasi

Aspek	Bobot
Penguasaan materi	25%
Logika dan struktur argumentasi	20%
Kualitas media/grafis	15%
Kemampuan komunikasi	20%
Kemampuan menjawab pertanyaan	15%
Ketepatan waktu	5%

O. Skala Kinerja Rubrik OBE

Skor	Kategori	Deskripsi
4	Sangat Baik	Menguasai konsep secara komprehensif, analisis mendalam, argumentasi kuat, produk inovatif dan sensitif budaya
3	Baik	Menguasai konsep dengan baik, analisis tepat, produk relevan dan dapat dipertanggungjawabkan
2	Cukup	Menguasai konsep dasar tetapi analisis dan integrasi masih terbatas
1	Kurang	Penguasaan konsep dan analisis belum memadai serta produk belum memenuhi kriteria
0	Tidak Memenuhi	Tidak menunjukkan bukti pencapaian kemampuan yang dinilai

P. Indikator Ketercapaian CPMK

Untuk kepentingan evaluasi OBE, ketercapaian CPMK tidak hanya dilihat dari nilai akhir mahasiswa.

Contoh kriteria:

CPMK dinyatakan tercapai apabila sekurang-kurangnya 75% mahasiswa memperoleh nilai ≥ 70 pada instrumen asesmen yang mengukur CPMK tersebut.

CPMK	Indikator Utama
CPMK-1	Mampu menganalisis dan menghasilkan solusi perencanaan yang responsif terhadap budaya lokal
CPMK-2	Mampu menyusun laporan saintifik secara sistematis, valid, etis, dan bertanggung jawab
CPMK-3	Mampu menerapkan teori budaya dan ruang dalam analisis/perencanaan kawasan
CPMK-4	Mampu berinteraksi dengan masyarakat dan mengomunikasikan produk perencanaan secara efektif

Q. Mekanisme Pengukuran CPMK

Secara OBE, alur pengukurannya:

Instrumen Penilaian

↓

Nilai Sub-CPMK

↓

Agregasi Sub-CPMK

↓

Ketercapaian CPMK

↓

Kontribusi terhadap CPL

↓

Evaluasi

↓

Tindak Lanjut/Continuous Quality Improvement

Secara sederhana:

$$K_{CPMK} = \frac{\sum \text{Nilai Instrumen CPMK} \times \text{Bobot}}{\sum \text{Bobot}}$$

Hasil asesmen kemudian digunakan untuk menentukan:

- CPMK tercapai;
- CPMK belum tercapai;
- materi yang perlu diperbaiki;
- metode pembelajaran yang perlu ditingkatkan;
- bentuk asesmen yang perlu disesuaikan.

R. Peta Pembelajaran OBE

Peta pembelajaran mata kuliah dapat digambarkan sebagai berikut:

CPL-3 + CPL-4

↓

CPMK-1 + CPMK-2 + CPMK-3 + CPMK-4

↓

Sub-CPMK 1–10

↓

Pemahaman Konsep Budaya

↓

Unsur-unsur Budaya

↓

Budaya Bermukim

↓

Masyarakat & Dinamika Sosial

↓

Kekerabatan & Pola Bermukim

↓

Statistik Sosial

↓

Kepercayaan, Simbol & Identitas Ruang

↓

Pembentukan Ruang Permukiman

↓

Observasi dan Interaksi Masyarakat

↓

Analisis & Pemetaan Ruang Kultural

↓

Konsep dan Alternatif Perencanaan

↓

Produk Perencanaan Ruang Kultural

↓

Presentasi & Komunikasi kepada Pemangku Kepentingan

↓

Ketercapaian CPMK

↓

Kontribusi CPL-3 dan CPL-4

S. Peta Tahapan Kompetensi Mahasiswa

Struktur kompetensi juga dapat diringkas ke dalam **empat tahap OBE**:

Tahap 1 — KNOW

Minggu 1–3

Mahasiswa:

- memahami budaya;
- mengenali unsur budaya;
- memahami hubungan budaya dan ruang.

Dominan: CPMK-3.

Tahap 2 — ANALYZE

Minggu 4–11

Mahasiswa menganalisis:

- budaya bermukim;
- masyarakat;
- dinamika sosial;
- kekerabatan;
- statistik sosial;
- sistem kepercayaan;
- identitas;
- pembentukan ruang.

Dominan: CPMK-1 dan CPMK-3.

Tahap 3 — APPLY & CREATE

Minggu 12–14

Mahasiswa:

- melakukan observasi;
- berinteraksi dengan masyarakat;
- mengolah data;
- memetakan ruang;
- merumuskan konsep;
- membuat alternatif perencanaan.

Dominan: CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4.

Tahap 4 — COMMUNICATE & EVALUATE

Minggu 15–16

Mahasiswa:

- menyusun produk;
- mempresentasikan hasil;
- mempertahankan argumentasi;

- mengevaluasi alternatif;
- mempertanggungjawabkan produk.

Dominan: CPMK-2 dan CPMK-4.

T. Proyek Utama Mata Kuliah

Untuk memperkuat karakter OBE, proyek utama dapat diberi judul:

"Kajian dan Konsep Perencanaan Ruang Kultural Berbasis Nilai Budaya Masyarakat Lokal."

Tahap 1 — Identifikasi

Mahasiswa mengidentifikasi:

Masyarakat → Budaya → Aktivitas → Nilai → Ruang.

Tahap 2 — Pengumpulan Data

Data meliputi:

sosial + budaya + demografi + aktivitas + kekerabatan + kepercayaan + spasial.

Tahap 3 — Analisis

Mahasiswa menganalisis:

Nilai Budaya → Pola Aktivitas → Pola Bermukim → Struktur Ruang.

Tahap 4 — Sintesis

Mahasiswa merumuskan:

Potensi + Masalah + Nilai Kultural + Aspirasi Masyarakat.

Tahap 5 — Produk Perencanaan

Hasil akhirnya:

Konsep → Alternatif → Arahan → Rekomendasi Perencanaan Ruang Kultural.

Dengan desain tersebut, mata kuliah tidak berhenti pada kemampuan mahasiswa **"mengetahui budaya"**, melainkan membawa mahasiswa hingga kemampuan **menggunakan pengetahuan budaya sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan.**

U. REFERENSI UTAMA

Buku Referensi Utama

1. Altman, I., & Chemers, M. M. (1980). *Culture and environment*. Brooks/Cole.
2. Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
3. Hall, E. T. (1966). *The hidden dimension*. Doubleday.
4. Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. Macmillan.
5. Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
6. Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.
7. Lynch, K. (1960). *The image of the city*. MIT Press.
8. Norberg-Schulz, C. (1980). *Genius loci: Towards a phenomenology of architecture*. Rizzoli.
9. Rapoport, A. (1969). *House form and culture*. Prentice-Hall.
10. Rapoport, A. (1977). *Human aspects of urban form: Towards a man-environment approach to urban form and design*. Pergamon Press.

11. Rapoport, A. (1982). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach*. Sage Publications.
12. Relph, E. (1976). *Place and placelessness*. Pion.
13. Tuan, Y.-F. (1977). *Space and place: The perspective of experience*. University of Minnesota Press.

Buku Referensi Regulasi

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.**
2. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.** Regulasi ini mencakup SN-Dikti serta sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi; SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME dan dilaksanakan berdasarkan PD-Dikti.
3. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.** Regulasi perubahan ini ditetapkan 14 Juli 2026 dan diundangkan 16 Juli 2026.



MATERI PERKULIAHAN

POKOK BAHASAN MINGGU KE-1

Pengantar Perencanaan Ruang Kultural: definisi, ruang lingkup, budaya dan ruang; urgensi nilai budaya lokal dalam PWK

1. Pengertian Perencanaan Ruang Kultural

Perencanaan ruang kultural (*cultural spatial planning*) merupakan pendekatan perencanaan wilayah dan kota yang menempatkan **budaya sebagai salah satu unsur utama pembentuk, pemberi makna, dan pengarah perkembangan ruang**. Ruang dalam pendekatan ini tidak hanya dipahami sebagai wadah fisik bagi bangunan, jaringan jalan, permukiman, dan berbagai aktivitas manusia, tetapi juga sebagai produk kehidupan sosial yang mengandung nilai, simbol, sejarah, memori kolektif, tradisi, kepercayaan, serta sistem perilaku masyarakat. Dengan demikian, ruang kultural merupakan ruang yang terbentuk melalui interaksi antara manusia, lingkungan, aktivitas, nilai budaya, dan proses sejarah yang berlangsung secara terus-menerus. (Lefebvre, 1991; Tuan, 1977).

Dalam perspektif humanistik, istilah **ruang (*space*)** dan **tempat (*place*)** mempunyai pengertian yang berbeda. *Space* cenderung menunjukkan dimensi lokasi, jarak, bentuk, dan hubungan spasial, sedangkan *place*

merupakan ruang yang telah memperoleh **makna melalui pengalaman manusia**. Ketika masyarakat menggunakan suatu ruang untuk aktivitas sosial, ritual, perdagangan tradisional, kegiatan keagamaan, interaksi komunitas, atau perayaan tertentu secara berulang, ruang tersebut memperoleh identitas dan secara bertahap berkembang menjadi tempat yang memiliki nilai budaya. Oleh sebab itu, perencanaan ruang kultural berkaitan erat dengan proses transformasi *space into place*. **(Tuan, 1977; Relph, 1976).**

Perencanaan ruang kultural juga dapat dipahami sebagai proses mengidentifikasi, memetakan, melindungi, mengelola, dan mengembangkan **sumber daya budaya (*cultural resources*)** sebagai bagian integral dari pembangunan wilayah dan kota. Sumber daya tersebut bukan hanya berupa bangunan bersejarah atau benda cagar budaya, tetapi mencakup pola permukiman tradisional, ruang publik, tempat ritual, kampung tradisional, lanskap budaya, pola aktivitas, kesenian, tradisi, pengetahuan lokal, sistem sosial, hingga simbol dan makna yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan *urban cultural planning* dengan demikian menghubungkan sumber daya budaya dengan pembangunan manusia, komunitas, dan kualitas kawasan. **(Evans, 2001; Setijawan, Subagyo, & Arani, 2021).**

2. Ruang Lingkup Perencanaan Ruang Kultural

Ruang lingkup perencanaan ruang kultural dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi utama, yaitu **budaya berwujud (*tangible cultural heritage*)** dan **budaya tidak berwujud (*intangible cultural heritage*)**. Dimensi berwujud meliputi bangunan bersejarah, struktur, monumen, kawasan kota lama, situs arkeologi, pola jalan, ruang terbuka, permukiman tradisional, lanskap, dan artefak. Sementara itu, dimensi tidak berwujud mencakup tradisi, ritual, bahasa, pengetahuan lokal, seni pertunjukan, keterampilan tradisional, sistem nilai, makna simbolik, memori kolektif, serta hubungan sosial yang berlangsung dalam ruang tertentu. Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan karena makna suatu ruang sering kali justru berasal dari aktivitas dan nilai yang melekat pada masyarakat yang menggunakannya. **(Ahmad, 2006; Bandarin & van Oers, 2012).**

Dalam konteks PWK, cakupan perencanaan ruang kultural dapat meliputi **kawasan pusaka, kampung tradisional, desa adat, pusat kota bersejarah, ruang publik budaya, koridor budaya, kawasan religi, lanskap budaya, kawasan perdagangan tradisional, kawasan seni dan kreatif, serta ruang kehidupan sehari-hari masyarakat**. Pendekatan ini menghendaki perencana tidak hanya mengidentifikasi objek budaya secara terpisah, tetapi memahami hubungan objek tersebut dengan struktur ruang, aktivitas masyarakat, sejarah kawasan dan jaringan sosial-ekonomi yang mendukung keberlangsungannya. Karena itu, suatu kawasan budaya sebaiknya dipandang sebagai satu kesatuan sistem ruang dan bukan sekadar kumpulan objek cagar budaya. **(Bandarin & van Oers, 2012; Egam & Mishima, 2014).**

Ruang lingkup tersebut juga mencakup **cultural mapping atau pemetaan budaya**, yaitu proses mengidentifikasi lokasi, aktivitas, aktor, artefak, memori, nilai, dan sumber daya budaya dalam suatu kawasan. Pemetaan budaya penting karena banyak unsur budaya lokal tidak tercantum dalam peta

tata ruang konvensional. Sebuah tempat yang secara administratif hanya dikategorikan sebagai permukiman atau ruang terbuka, misalnya, mungkin bagi masyarakat memiliki fungsi sebagai tempat ritual, titik pertemuan komunitas, ruang historis, atau simbol identitas. Studi mengenai *municipal cultural planning* di Kecamatan Klojen, Kota Malang, memperlihatkan bahwa identifikasi sumber daya budaya, *cultural mapping*, pengelompokan kawasan, dan penentuan pusat fungsi dapat menjadi dasar penyusunan konsep ruang budaya perkotaan. (Setijawan, Subagyo, & Arani, 2021).

3. Hubungan Budaya dan Ruang

Budaya dan ruang mempunyai hubungan **timbal balik**. Budaya memengaruhi cara masyarakat membentuk dan menggunakan ruang, sedangkan karakter ruang pada gilirannya memengaruhi perilaku, interaksi sosial, dan reproduksi budaya masyarakat. Pola rumah, orientasi bangunan, struktur desa, letak ruang sakral, hierarki ruang publik–privat, penggunaan jalan, dan keberadaan ruang komunal sering kali merupakan manifestasi dari nilai budaya tertentu. Karena itu, bentuk lingkungan binaan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor teknologi atau kondisi alam; sistem nilai, struktur keluarga, agama, pola kehidupan, dan pandangan masyarakat terhadap lingkungan merupakan faktor penting dalam proses pembentukan ruang. (Rapoport, 1969).

Hubungan tersebut menjelaskan bahwa ruang bukanlah sesuatu yang netral. Lefebvre menegaskan bahwa ruang merupakan **produk sosial (*social production of space*)**. Artinya, ruang terbentuk melalui hubungan antara kondisi fisik, praktik kehidupan sehari-hari, struktur sosial, kekuasaan, ekonomi, representasi, dan simbol budaya. Dari perspektif PWK, pandangan ini penting karena intervensi terhadap tata guna lahan atau struktur ruang tidak semata-mata mengubah konfigurasi fisik, tetapi juga berpotensi mengubah pola interaksi, identitas dan sistem kehidupan masyarakat yang telah terbentuk dalam jangka panjang. (Lefebvre, 1991).

Secara konseptual, hubungan budaya dan ruang dapat dipahami melalui alur:

BUDAYA → NILAI & NORMA → PERILAKU/AKTIVITAS → POLA PENGGUNAAN RUANG → BENTUK RUANG → IDENTITAS TEMPAT → PELESTARIAN/TRANSFORMASI BUDAYA

Hubungan tersebut bersifat siklik. Nilai budaya memengaruhi perilaku manusia, perilaku membentuk pola aktivitas, aktivitas menghasilkan konfigurasi ruang, dan konfigurasi tersebut selanjutnya memperkuat identitas serta memori masyarakat. Apabila konfigurasi ruang berubah secara drastis tanpa mempertimbangkan nilai budaya masyarakat, ikatan masyarakat terhadap tempat juga dapat mengalami pelemahan. (Rapoport, 1969; Tuan, 1977; Relph, 1976).

4. Budaya, Identitas, dan *Sense of Place*

Konsep penting dalam perencanaan ruang kultural adalah **sense of place**, yaitu hubungan kognitif, emosional, dan fungsional antara manusia dengan suatu tempat. Dalam konteks kawasan pusaka, *sense of place* dapat

dijelaskan melalui tiga dimensi utama, yakni **place identity**, yaitu tempat sebagai bagian dari identitas individu atau kelompok; **place attachment**, yaitu keterikatan emosional terhadap tempat; dan **place dependence**, yaitu ketergantungan fungsional terhadap karakter dan sumber daya suatu tempat. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa nilai ruang tidak hanya terletak pada bentuk fisiknya, tetapi juga pada hubungan manusia dengan tempat tersebut. **(Dameria, Akbar, Indradjati, & Tjokropandojo, 2020).**

Temuan tersebut relevan bagi PWK karena perencanaan sering kali terlalu menitikberatkan pada dimensi fisik, misalnya kepadatan, aksesibilitas, jaringan jalan, penggunaan lahan, dan intensitas bangunan. Padahal kualitas sebuah tempat juga ditentukan oleh pengalaman masyarakat, memori, identitas, aktivitas dan maknanya. Literatur *urbanism* menunjukkan bahwa *sense of place* merupakan konsep multidimensional yang harus dihubungkan dengan proses desain dan perencanaan jika sebuah ruang hendak dikembangkan menjadi tempat yang bermakna bagi masyarakat. **(Beidler & Morrison, 2016).**

Pada konteks Indonesia, hubungan antara budaya dan *sense of place* menjadi semakin penting karena kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki keragaman sejarah, adat, agama, arsitektur, tradisi dan pola kehidupan lokal. Penelitian tentang kota Bali, misalnya, menunjukkan bahwa desain kawasan yang menghasilkan tempat yang layak huni secara kultural membutuhkan pengakuan terhadap unsur-unsur budaya seperti hubungan manusia–lingkungan, konsep pusat, organisasi dan struktur ruang, pengelolaan lingkungan, serta simbol dan makna. Dengan demikian, keberhasilan desain kota tidak cukup diukur dari efisiensi fungsi, tetapi juga kemampuannya mempertahankan **identitas budaya dan rasa tempat**. **(Samadhi, 2001).**

5. Cultural Landscape sebagai Objek Perencanaan

Hubungan manusia, budaya dan lingkungan dalam jangka panjang menghasilkan apa yang disebut sebagai **cultural landscape atau lanskap budaya**. Lanskap budaya tidak hanya berupa pemandangan fisik, melainkan hasil interaksi antara masyarakat dan lingkungan yang tercermin melalui pola permukiman, penggunaan lahan, sistem pertanian, jaringan jalan, ruang sakral, vegetasi, struktur sosial serta berbagai praktik kehidupan. Oleh karena itu, perencanaan lanskap budaya memerlukan pemahaman terhadap unsur fisik sekaligus nilai, persepsi, pengalaman, dan pengetahuan lokal masyarakat. **(Bandarin & van Oers, 2012).**

Kajian kontemporer menunjukkan bahwa bahasa, persepsi, pengalaman, dan hubungan masyarakat dengan suatu lanskap dapat digunakan untuk memahami *sense of place* dan jasa ekosistem budaya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa nilai suatu lanskap tidak selalu dapat diukur hanya dengan indikator ekonomi atau fisik. Ada nilai estetika, identitas, spiritualitas, rekreasi, pengetahuan dan memori yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan. **(Wartmann & Purves, 2018).**

6. Urgensi Nilai Budaya Lokal dalam PWK

Integrasi nilai budaya lokal dalam PWK diperlukan karena proses urbanisasi, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan globalisasi dapat menghasilkan perubahan ruang yang sangat cepat. Perubahan yang tidak sensitif terhadap konteks budaya dapat menimbulkan hilangnya bangunan bersejarah, perubahan pola ruang tradisional, berkurangnya ruang komunal, melemahnya aktivitas budaya, homogenisasi bentuk kawasan, serta hilangnya identitas suatu tempat. UNESCO menegaskan bahwa pendekatan *Historic Urban Landscape* perlu melampaui pelestarian lingkungan fisik semata dan memasukkan warisan tidak berwujud, keragaman budaya, kondisi sosial-ekonomi, faktor lingkungan dan nilai-nilai masyarakat lokal dalam perencanaan kota. **(Bandarin & van Oers, 2012; UNESCO, 2011).**

Nilai budaya lokal juga penting dalam mendukung **pembangunan berkelanjutan**. Keberlanjutan tidak hanya mempunyai dimensi ekologis dan ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan budaya. Sebuah kawasan dapat dianggap berkelanjutan apabila mampu beradaptasi terhadap kebutuhan masa depan tanpa kehilangan identitas, pengetahuan lokal dan sistem sosial yang menjadi fondasi masyarakatnya. Dalam pendekatan *Historic Urban Landscape*, konservasi bahkan tidak dimaknai sebagai pembekuan kota pada kondisi tertentu, tetapi sebagai **management of change**, yaitu mengelola perubahan agar perkembangan baru tetap kompatibel dengan nilai dan karakter tempat. **(Bandarin & van Oers, 2012).**

Perencanaan berbasis budaya juga meningkatkan **legitimasi sosial perencanaan**. Masyarakat lokal bukan hanya objek pembangunan, melainkan pemilik pengetahuan dan pengalaman mengenai ruangnya. Informasi mengenai tempat yang dianggap penting, batas kawasan budaya, aktivitas masyarakat, memori, serta nilai lanskap sering kali hanya dapat diperoleh melalui proses partisipatif. Karena itu, *participatory mapping*, wawancara, observasi, diskusi komunitas, *mental mapping*, dan Public Participation GIS dapat menjadi metode penting untuk memasukkan persepsi lokal ke dalam proses perencanaan spasial. **(Ducci, Janssen, Burgers, & Rotondo, 2023).**

Selain sebagai dasar konservasi, sumber daya budaya dapat menjadi **modal pembangunan wilayah dan kota** apabila dikelola dengan tepat. Bangunan pusaka, seni, kuliner, tradisi, kampung bersejarah, ruang publik budaya dan ekonomi kreatif dapat mendukung pariwisata, kewirausahaan lokal, penciptaan lapangan kerja serta penguatan citra kota. Namun, pemanfaatan ekonomi budaya harus tetap mempertimbangkan kapasitas lingkungan, hak masyarakat lokal, otentisitas dan keberlanjutan budaya agar tidak berubah menjadi komodifikasi yang justru menghilangkan makna asli tempat tersebut. **(Bandarin & van Oers, 2012; Setijawan et al., 2021).**

7. Implikasi bagi Perencanaan Wilayah dan Kota

Dalam praktik PWK, integrasi nilai budaya lokal berarti bahwa analisis perencanaan sebaiknya tidak berhenti pada komponen **fisik–lingkungan–ekonomi**, tetapi diperluas dengan komponen **sosial–budaya–historis**. Perencana perlu mengidentifikasi siapa komunitas yang menggunakan ruang, aktivitas apa yang dianggap penting, tempat mana yang mempunyai nilai

simbolis, bagaimana pola ruang terbentuk secara historis, tradisi apa yang masih berlangsung, serta perubahan apa yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan menjadi lebih kontekstual serta mampu menghindari penerapan model pembangunan yang seragam terhadap kawasan yang memiliki karakter budaya berbeda. (**Sandercock, 1998; Bandarin & van Oers, 2012**).

Secara operasional, pendekatan perencanaan ruang kultural dapat dilaksanakan melalui tahapan **identifikasi nilai budaya → inventarisasi sumber daya budaya → pemetaan ruang budaya → analisis sejarah dan morfologi → identifikasi aktor dan aktivitas → analisis sense of place → penentuan signifikansi budaya → formulasi zonasi dan strategi → partisipasi masyarakat → pengendalian perubahan → monitoring dan evaluasi**. Pendekatan tersebut menggeser paradigma dari sekadar *object-based conservation* menjadi *area-based* dan *value-based planning*, sehingga objek, ruang, aktivitas, masyarakat dan makna dipahami sebagai satu sistem. (**Bandarin & van Oers, 2012; Dameria et al., 2020**).

8. Konteks Indonesia dan Kota Malang

Konteks Indonesia sangat relevan untuk penerapan perencanaan ruang kultural karena hampir setiap daerah mempunyai karakter budaya, sejarah, pola permukiman dan tradisi yang berbeda. Kota-kota Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan wilayah kepulauan lainnya mempunyai sistem ruang yang berkembang dari interaksi antara budaya lokal, kolonialisme, agama, perdagangan dan modernisasi. Dengan demikian, penerapan perencanaan yang hanya mengandalkan standar universal berpotensi mengabaikan kekayaan lokal yang justru menjadi pembeda dan modal pembangunan masing-masing wilayah. (**Rapoport, 1969; Bandarin & van Oers, 2012**).

Kota Malang memberikan contoh yang sangat relevan untuk pembelajaran Perencanaan Ruang Kultural. Sejarah perkembangan kota menghasilkan lapisan ruang yang terkait dengan kawasan kolonial, permukiman pribumi, Pecinan, kawasan Arab, ruang pemerintahan, alun-alun, bangunan pusaka, kampung-kampung kota serta berbagai pusat aktivitas budaya. Kajian di Kecamatan Klojen memperlihatkan bahwa sumber daya budaya tersebut dapat dipetakan dan diintegrasikan ke dalam konsep *Urban Cultural Planning*, dengan kawasan dibentuk dalam klaster sesuai karakter dan fungsi budayanya. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya objek untuk dikenang, melainkan dapat menjadi basis penyusunan struktur, identitas dan strategi pengembangan ruang kota kontemporer. (**Setijawan, Subagyo, & Arani, 2021**).

9. Prinsip Dasar Perencanaan Ruang Kultural

Berdasarkan pembahasan tersebut, mahasiswa PWK perlu memahami beberapa prinsip pokok. **Pertama**, ruang merupakan produk interaksi manusia, budaya dan lingkungan. **Kedua**, budaya mempunyai dimensi berwujud dan tidak berwujud. **Ketiga**, masyarakat mempunyai ikatan dengan ruang melalui identitas, keterikatan dan ketergantungan terhadap tempat. **Keempat**, perubahan ruang harus dikelola tanpa menghilangkan nilai dan identitas lokal. **Kelima**, masyarakat harus dilibatkan dalam pengenalan dan penentuan nilai

budaya. **Keenam**, pelestarian dan pembangunan bukan dua kepentingan yang selalu bertentangan, tetapi dapat diintegrasikan melalui perencanaan yang adaptif dan berbasis nilai. (Dameria et al., 2020; Bandarin & van Oers, 2012).

Dengan demikian, **Perencanaan Ruang Kultural** dapat dirumuskan sebagai proses perencanaan yang mengintegrasikan **ruang, manusia, budaya, sejarah, aktivitas, lingkungan, identitas, dan pembangunan** untuk menghasilkan kawasan yang berkelanjutan sekaligus bermakna bagi masyarakat. Bagi calon perencana wilayah dan kota, pemahaman terhadap ruang kultural sangat penting agar keputusan tata ruang tidak hanya menghasilkan kota yang secara teknis efisien, tetapi juga kota dan wilayah yang memiliki identitas, mempertahankan memori kolektif, memperkuat kohesi sosial, menghormati kearifan lokal, serta mampu meneruskan nilai budaya kepada generasi berikutnya. (Tuan, 1977; Bandarin & van Oers, 2012; Setijawan et al., 2021).

A. Kerangka Konseptual untuk Perkuliahan BUDAYA LOKAL



Dengan formula sederhana:

RUANG KULTURAL = RUANG FISIK + AKTIVITAS + NILAI BUDAYA + MAKNA + MEMORI + IDENTITAS

Sedangkan dalam perspektif PWK:

CULTURAL VALUES → CULTURAL MAPPING → SPATIAL ANALYSIS → COMMUNITY PARTICIPATION → CULTURAL SPATIAL PLAN → PLACE-BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT

B. Pokok Pemahaman Mahasiswa

Setelah mengikuti materi minggu pertama, mahasiswa diharapkan memahami bahwa **perencanaan ruang kultural bukan hanya perencanaan kawasan cagar budaya**. Cakupannya lebih luas, karena membahas bagaimana budaya

menghasilkan ruang, bagaimana masyarakat memberi makna pada ruang, bagaimana suatu tempat membangun identitas, dan bagaimana nilai tersebut diintegrasikan dalam kebijakan serta produk perencanaan wilayah dan kota.

Mahasiswa juga diharapkan mampu membedakan tiga konsep dasar:

Space → ruang sebagai wadah/lokasi.

Place → ruang yang telah diberi makna oleh manusia.

Cultural Space → tempat yang makna, penggunaan, bentuk, dan identitasnya dibentuk secara kuat oleh nilai serta praktik budaya masyarakat.

Dengan demikian:

SPACE + HUMAN EXPERIENCE + CULTURAL MEANING = PLACE

Dan

PLACE + CULTURAL VALUES + COLLECTIVE MEMORY + CONTINUOUS PRACTICE = CULTURAL SPACE

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad, Y. (2006). The scope and definitions of heritage: From tangible to intangible. *International Journal of Heritage Studies*, 12(3), 292–300. <https://doi.org/10.1080/13527250600604639>
2. Bandarin, F., & van Oers, R. (2012). *The historic urban landscape: Managing heritage in an urban century*. Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781119968115>
3. Beidler, K. J., & Morrison, J. M. (2016). Sense of place: Inquiry and application. *Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability*, 9(3), 205–215. <https://doi.org/10.1080/17549175.2015.1056210>
4. Dameria, C., Akbar, R., Indradjati, P. N., & Tjokropandojo, D. S. (2020). A conceptual framework for understanding sense of place dimensions in the heritage context. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 139–163. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.3>
5. Ducci, M., Janssen, R., Burgers, G. J., & Rotondo, F. (2023). Mapping local perceptions for the planning of cultural landscapes. *International Journal of E-Planning Research*, 12(1), 1–27. <https://doi.org/10.4018/IJEPR.317378>
6. Egam, P. P., & Mishima, N. (2014). Local cultural heritage sites and spatial planning for the Bantik ethnic community in Indonesia. *Journal of Engineering, Project, and Production Management*, 4(2), 60–73. <https://doi.org/10.32738/JEPPM.201407.0002>
7. Evans, G. (2001). *Cultural planning: An urban renaissance?* Routledge.
8. Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell. (Original work published 1974).
9. Rapoport, A. (1969). *House form and culture*. Prentice-Hall.
10. Relph, E. (1976). *Place and placelessness*. Pion.

11. Samadhi, T. N. (2001). Urban design concept for achieving a livable Balinese town. *Journal of Regional and City Planning*.
12. Sandercock, L. (1998). *Towards cosmopolis: Planning for multicultural cities*. John Wiley & Sons.
13. Setijawan, A., Subagyo, W. H., & Arani, T. D. (2021). Konsep municipal cultural planning dalam ruang budaya di Kecamatan Klojen, Kota Malang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(2), 230–239. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.36527>
14. Tuan, Y.-F. (1977). *Space and place: The perspective of experience*. University of Minnesota Press.
15. UNESCO. (2011). *Recommendation on the Historic Urban Landscape*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
16. Wartmann, F. M., & Purves, R. S. (2018). Investigating sense of place as a cultural ecosystem service in different landscapes through the lens of language. *Landscape and Urban Planning*, 175, 169–183. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.03.021>

POKOK BAHASAN MINGGU KE-2

Konsep Budaya: pengertian budaya, sistem budaya, nilai, norma, simbol, artefak, budaya material dan nonmaterial

1. Pengertian budaya

Budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar serta dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya tidak hanya mencakup kesenian, adat istiadat, atau upacara tradisional, tetapi juga mencakup bahasa, pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, sistem mata pencaharian, dan sistem kepercayaan. Dengan demikian, budaya merupakan kerangka yang membantu manusia memahami lingkungan, membangun hubungan sosial, serta menentukan cara memanfaatkan dan mengorganisasi ruang (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam perspektif antropologi interpretatif, budaya dipahami sebagai jaringan makna yang dibentuk manusia dan digunakan untuk menafsirkan kehidupan. Manusia hidup di dalam sistem makna yang diekspresikan melalui bahasa, ritual, simbol, perilaku, dan lingkungan binaan. Oleh karena itu, penelitian kebudayaan tidak hanya mengidentifikasi benda atau kegiatan budaya, tetapi juga menafsirkan makna yang terkandung di balik benda, perilaku, dan praktik sosial tersebut (Geertz, 1973).

Budaya juga memiliki sifat dinamis. Nilai dan tradisi diwariskan antargenerasi, tetapi penerapannya dapat berubah akibat pendidikan, teknologi, urbanisasi, migrasi, globalisasi, perubahan ekonomi, dan interaksi dengan kelompok lain. Dalam perencanaan wilayah dan kota, budaya tidak tepat diperlakukan sebagai objek statis yang hanya perlu dilestarikan, melainkan sebagai sistem hidup yang terus dinegosiasikan dan disesuaikan oleh masyarakat (Hofstede et al., 2010).

2. Sistem budaya

Sistem budaya adalah susunan gagasan, nilai, pengetahuan, keyakinan, dan norma yang saling berkaitan serta menjadi pedoman bagi perilaku anggota masyarakat. Sistem ini berada pada tingkat abstrak karena tidak selalu dapat diamati secara langsung. Meskipun demikian, keberadaannya dapat dikenali melalui pola tindakan, pembagian peran, pelaksanaan ritual, bentuk permukiman, orientasi bangunan, pembagian ruang sakral–profan, serta aturan pemanfaatan sumber daya alam (Koentjaraningrat, 2009).

Secara konseptual, kebudayaan dapat dipahami melalui tiga wujud yang saling berhubungan. Pertama, budaya sebagai kompleks gagasan, nilai, norma, dan aturan. Kedua, budaya sebagai sistem sosial berupa tindakan dan interaksi berpola. Ketiga, budaya sebagai kebudayaan fisik berupa benda, bangunan, ruang, dan teknologi. Dalam perencanaan ruang, ketiga wujud tersebut perlu dianalisis secara terpadu karena lingkungan fisik pada dasarnya merupakan manifestasi dari gagasan dan praktik sosial masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Sistem budaya juga memiliki tingkatan, mulai dari asumsi dasar yang relatif tidak disadari, nilai yang dinyatakan oleh masyarakat, sampai artefak yang dapat diamati. Artefak budaya memang mudah dikenali, tetapi maknanya tidak selalu mudah dipahami tanpa mengetahui nilai dan asumsi yang mendasarinya. Sebagai contoh, orientasi rumah tradisional tidak hanya merupakan pilihan teknis, tetapi dapat berhubungan dengan kosmologi, status sosial, hubungan kekerabatan, dan pemaknaan terhadap arah yang dianggap sakral (Schein & Schein, 2017).

3. Nilai budaya

Nilai budaya merupakan konsepsi bersama mengenai sesuatu yang dianggap baik, penting, benar, pantas, dan diharapkan oleh masyarakat. Nilai memberikan arah bagi pilihan individu maupun kolektif, misalnya nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, keseimbangan dengan alam, kesucian, keterbukaan, privasi, dan gotong royong. Karena sifatnya abstrak, nilai budaya biasanya dikenali melalui keputusan, kebiasaan, ritual, aturan, simbol, dan bentuk ruang yang dipertahankan masyarakat (Schwartz, 2012).

Dalam perencanaan ruang, nilai budaya dapat memengaruhi penentuan pusat permukiman, hierarki ruang, orientasi bangunan, penggunaan ruang komunal, perlindungan kawasan keramat, dan pengaturan hubungan manusia dengan alam. Sebagai contoh, nilai kolektivitas dapat diwujudkan melalui keberadaan balai adat, halaman bersama, ruang pertemuan, jalur prosesi, atau ruang publik yang mendukung interaksi sosial. Sebaliknya, perencanaan yang hanya mengutamakan efisiensi ekonomi berisiko menghilangkan ruang yang memiliki nilai sosial dan spiritual bagi masyarakat (Rapoport, 1969).

Nilai budaya tidak selalu tunggal atau disepakati seluruh anggota masyarakat. Dalam satu kawasan dapat terdapat perbedaan nilai antara kelompok adat, generasi muda, pendatang, pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok rentan. Oleh sebab itu, perencana perlu mengidentifikasi keragaman nilai serta relasi kekuasaan yang menentukan nilai siapa yang diakui dalam kebijakan ruang. Pendekatan partisipatif diperlukan agar rencana tata ruang

tidak hanya merepresentasikan kepentingan kelompok yang paling dominan (Healey, 1997).

4. Norma budaya

Norma adalah aturan atau standar perilaku yang menjelaskan tindakan yang dianggap boleh, wajib, dianjurkan, atau dilarang dalam suatu masyarakat. Norma merupakan bentuk operasional dari nilai budaya. Apabila nilai menjelaskan sesuatu yang dianggap penting, norma mengarahkan bagaimana anggota masyarakat harus bertindak untuk mempertahankan nilai tersebut. Norma dapat berbentuk kebiasaan, tata kelakuan, adat, aturan agama, maupun hukum formal (Koentjaraningrat, 2009).

Norma budaya mempunyai mekanisme pengendalian sosial. Pelanggaran terhadap norma dapat menimbulkan sanksi berupa teguran, rasa malu, pengucilan sosial, kewajiban melaksanakan ritual tertentu, denda adat, atau sanksi hukum. Dalam pemanfaatan ruang, norma dapat mengatur lokasi yang boleh dibangun, larangan memasuki kawasan tertentu, waktu penggunaan ruang, batas antara ruang laki-laki dan perempuan, pembagian warisan tanah, serta tata cara pemanfaatan hutan, mata air, dan lahan komunal (Rapoport, 1982).

Bagi perencanaan wilayah dan kota, norma lokal perlu dipahami bersama dengan regulasi formal. Ketidaksesuaian antara aturan adat dan peraturan pemerintah dapat menimbulkan konflik penggunaan tanah, ketidakjelasan hak pengelolaan, dan penolakan terhadap program pembangunan. Sebaliknya, pengakuan terhadap norma lokal dapat memperkuat legitimasi rencana, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan mendukung pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (Ostrom, 1990).

5. Simbol budaya

Simbol adalah objek, bentuk, warna, bunyi, tindakan, bahasa, atau tempat yang mewakili makna tertentu berdasarkan kesepakatan suatu masyarakat. Hubungan antara simbol dan maknanya tidak selalu bersifat alamiah, tetapi dibentuk melalui proses sosial dan diwariskan melalui pembelajaran budaya. Simbol memungkinkan masyarakat menyampaikan identitas, status, ingatan kolektif, keyakinan, dan hubungan dengan lingkungan (Geertz, 1973).

Dalam ruang kultural, simbol dapat berupa orientasi gunung–laut, sumbu ruang, gerbang, monumen, makam leluhur, pohon keramat, pola ukiran, warna bangunan, nama jalan, atau rute prosesi. Suatu ruang dapat memiliki fungsi sehari-hari sekaligus makna simbolik. Jalan, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai prasarana pergerakan, tetapi juga dapat menjadi jalur ritual yang menghubungkan tempat-tempat sakral dalam struktur permukiman (Rapoport, 1982).

Simbol juga berperan dalam membentuk identitas tempat atau *place identity*. Identitas tempat muncul melalui hubungan antara karakter fisik, pengalaman sosial, ingatan, dan makna yang dilekatkan masyarakat pada suatu lokasi. Penelitian mengenai identitas tempat menunjukkan bahwa persepsi terhadap ruang bersifat multidimensional serta dipengaruhi oleh dimensi fisik,

sosial, psikologis, dan temporal. Karena itu, perencana perlu memahami makna simbolik suatu tempat sebelum melakukan perubahan bentuk atau fungsi ruang.

6. Artefak budaya

Artefak budaya adalah hasil material dari aktivitas dan pengetahuan manusia yang dapat diamati secara langsung. Artefak meliputi bangunan, rumah tradisional, tempat ibadah, alat produksi, pakaian, karya seni, sistem irigasi, jaringan jalan, pola persil, monumen, dan lanskap budaya. Artefak bukan sekadar benda fisik, tetapi merupakan pembawa informasi mengenai teknologi, struktur sosial, nilai, keyakinan, dan cara hidup masyarakat yang menciptakannya (Schein & Schein, 2017).

Dalam bidang PWK, pola permukiman dapat dipandang sebagai artefak budaya berskala kawasan. Susunan rumah, ruang terbuka, pusat kegiatan, tempat ritual, batas kampung, serta orientasi jalan menunjukkan bagaimana suatu masyarakat mengatur hubungan sosial dan memaknai lingkungannya. Penelitian di Desa Puyung, Lombok Tengah, memperlihatkan bahwa struktur ruang permukiman masyarakat Sasak berkaitan dengan ritual daur hidup, kegiatan keagamaan, hubungan kekerabatan, serta penggunaan ruang yang dapat bersifat tetap maupun temporal (Sasongko, 2005).

Artefak perlu ditafsirkan berdasarkan konteks budayanya. Mempertahankan bentuk bangunan tanpa menjaga aktivitas, pengetahuan, dan hubungan sosial yang mendukungnya dapat menghasilkan pelestarian yang bersifat dekoratif. Pelestarian ruang kultural seharusnya melindungi keterkaitan antara objek fisik, fungsi sosial, praktik budaya, memori kolektif, dan komunitas pemilik kebudayaan tersebut (Smith, 2006).

7. Budaya material dan nonmaterial

Budaya material mencakup seluruh hasil kebudayaan yang mempunyai bentuk fisik dan dapat diamati, disentuh, digunakan, atau diwariskan. Contohnya meliputi bangunan tradisional, pakaian, alat pertanian, karya seni, jaringan irigasi, pola jalan, ruang publik, dan lanskap permukiman. Budaya material memperlihatkan bagaimana pengetahuan, teknologi, nilai, dan struktur sosial diwujudkan ke dalam bentuk fisik (Rapoport, 1969).

Budaya nonmaterial terdiri atas unsur yang tidak berbentuk benda, seperti bahasa, pengetahuan lokal, nilai, norma, kepercayaan, mitos, cerita rakyat, ritual, sistem kekerabatan, dan tata cara pemanfaatan ruang. Walaupun tidak berwujud fisik, budaya nonmaterial berperan penting dalam memberi makna, fungsi, dan aturan penggunaan terhadap artefak dan ruang. Sebuah mata air, misalnya, merupakan unsur material, sedangkan keyakinan mengenai kesucian serta aturan pemanfaatannya merupakan unsur nonmaterial (Koentjaraningrat, 2009).

Budaya material dan nonmaterial tidak dapat dipisahkan secara tegas karena keduanya saling membentuk. Nilai dan kepercayaan menghasilkan bangunan, pola ruang, serta artefak tertentu; sebaliknya, keberadaan artefak dan ruang membantu mempertahankan ingatan serta praktik budaya. Perubahan pada lingkungan fisik dapat mengubah praktik sosial, sedangkan perubahan nilai

dan pola hidup dapat menyebabkan artefak kehilangan fungsi atau memperoleh makna baru (Lefebvre, 1991).

8. Hubungan unsur budaya dengan ruang

Hubungan antara unsur budaya dan manifestasi spasialnya dapat diringkas sebagai berikut.

Unsur budaya	Pengertian ringkas	Manifestasi dalam ruang
Sistem budaya	Keterkaitan gagasan, nilai, pengetahuan, dan keyakinan	Struktur permukiman, pembagian ruang, orientasi kawasan
Nilai	Sesuatu yang dianggap baik, penting, dan ideal	Prioritas pelestarian, ruang komunal, kawasan sakral
Norma	Aturan perilaku masyarakat	Larangan membangun, batas pemanfaatan, aturan akses
Simbol	Bentuk yang mewakili makna tertentu	Gerbang, sumbu, monumen, warna, nama tempat
Artefak	Hasil fisik kegiatan manusia	Rumah adat, candi, masjid, jalan, sistem irigasi
Budaya material	Unsur budaya yang berwujud	Bangunan, benda, infrastruktur, lanskap
Budaya nonmaterial	Unsur budaya yang tidak berwujud	Ritual, bahasa, pengetahuan lokal, memori kolektif

Ruang bukan hanya wadah netral tempat aktivitas berlangsung, tetapi merupakan hasil interaksi antara praktik sosial, pengetahuan, kekuasaan, teknologi, dan nilai budaya. Ruang dibentuk oleh masyarakat dan pada saat yang sama turut membentuk perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan struktur ruang dapat memengaruhi pola interaksi, akses terhadap sumber daya, identitas kelompok, dan keberlanjutan praktik budaya (Lefebvre, 1991).

Kajian lanskap budaya juga memperlihatkan bahwa pola kota, kebiasaan hidup, memori kolektif, dan identitas regional tersimpan dalam struktur fisik kawasan. Penilaian ruang bersejarah karenanya perlu memperhatikan nilai material dan nonmaterial, bukan hanya usia atau keindahan bangunan. Ruang publik kultural dapat menjadi media yang menghubungkan sejarah, kehidupan sehari-hari, dan pembentukan identitas masyarakat (Zhang et al., 2023).

9. Implikasi bagi perencanaan ruang kultural

Perencanaan ruang kultural merupakan proses mengenali, melindungi, mengembangkan, dan mengintegrasikan nilai budaya ke dalam kebijakan serta desain ruang. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi sebagai pemilik pengetahuan dan pelaku utama pembentukan ruang. Identifikasi budaya perlu dilakukan sejak tahap analisis melalui observasi, wawancara, pemetaan partisipatif, penelusuran sejarah, dokumentasi ritual, dan inventarisasi artefak (Healey, 1997).

Analisis ruang kultural setidaknya perlu mencakup: nilai yang dianggap penting; norma yang mengatur pemanfaatan ruang; simbol dan artefak pembentuk identitas; tempat sakral dan profan; rute ritual; ruang komunal; lanskap bersejarah; serta kelompok sosial yang memiliki kepentingan terhadap ruang tersebut. Analisis juga harus memperhatikan unsur budaya yang bersifat

temporal, misalnya jalan yang berubah menjadi ruang prosesi atau halaman yang berubah menjadi ruang upacara pada waktu tertentu (Sasongko, 2005).

Dalam praktiknya, integrasi budaya ke dalam perencanaan dapat dilakukan melalui penetapan kawasan budaya, zonasi perlindungan, pengaturan intensitas bangunan, perlindungan koridor pandangan, desain berbasis identitas lokal, penyediaan ruang bagi kegiatan tradisional, dan pengakuan terhadap sistem pengelolaan berbasis masyarakat. Kajian mutakhir mengenai dinamika budaya perkotaan menegaskan bahwa unsur budaya perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari perencanaan kontemporer, bukan sekadar tambahan estetis setelah rencana disusun (Sarkar & Sinha, 2024).

Dengan demikian, pemahaman terhadap budaya memungkinkan calon perencana membaca ruang sebagai teks sosial yang mengandung nilai, norma, simbol, artefak, memori, dan identitas. Keputusan perencanaan yang sensitif terhadap budaya akan lebih mampu menjaga keberlanjutan identitas tempat, mengurangi konflik, memperkuat keterikatan masyarakat, dan menghasilkan ruang yang sesuai dengan cara hidup penggunanya (Tuan, 1977).

Rangkuman Konseptual

Budaya → sistem nilai dan pengetahuan → norma dan praktik sosial → simbol dan artefak → pola serta makna ruang.

Budaya material menunjukkan bentuk fisik suatu kebudayaan, sedangkan budaya nonmaterial memberikan aturan dan makna terhadap bentuk tersebut. Keduanya perlu dibaca secara bersama-sama agar perencanaan tidak hanya melindungi objek fisik, tetapi juga mempertahankan praktik, pengetahuan, dan komunitas yang menghidupkan ruang budaya.

Pertanyaan Diskusi

1. Apakah suatu bangunan tradisional masih dapat disebut sebagai warisan budaya apabila aktivitas budayanya sudah hilang?
2. Bagaimana perencana membedakan nilai budaya masyarakat dengan kepentingan kelompok tertentu?
3. Bagaimana konflik antara norma adat dan regulasi formal sebaiknya diselesaikan?
4. Apakah modernisasi selalu mengancam budaya lokal?
5. Unsur budaya material dan nonmaterial apa saja yang dapat ditemukan pada kampung tradisional di daerah mahasiswa?
6. Bagaimana nilai, norma, dan simbol budaya dapat diterjemahkan menjadi arahan zonasi?

Tugas Pembelajaran

Mahasiswa memilih satu kampung atau kawasan budaya, kemudian menyusun peta sederhana yang menunjukkan:

- nilai budaya utama;
- norma pemanfaatan ruang;
- ruang sakral dan profan;
- simbol dan artefak budaya;
- budaya material dan nonmaterial;

- potensi konflik atau perubahan ruang; serta
- rekomendasi awal pelestarian dan pengembangan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
2. Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. Macmillan.
3. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and organizations: Software of the mind* (3rd ed.). McGraw-Hill.
4. Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
5. Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.
6. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
7. Peng, J., Strijker, D., & Wu, Q. (2020). Place identity: How far have we come in exploring its meanings? *Frontiers in Psychology*, 11, 294. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00294>
8. Rapoport, A. (1969). *House form and culture*. Prentice-Hall.
9. Rapoport, A. (1982). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach*. Sage Publications.
10. Sarkar, S., & Sinha, A. (2024). Urban cultural dynamics in planning: A bibliometric analysis. *Discover Cities*, 1, Article 8. <https://doi.org/10.1007/s44243-024-00042-1>
11. Sasongko, I. (2005). Pembentukan struktur ruang permukiman berbasis budaya: Studi kasus Desa Puyung–Lombok Tengah. *Dimensi Teknik Arsitektur*, 33(1), 1–8.
12. Schein, E. H., & Schein, P. A. (2017). *Organizational culture and leadership* (5th ed.). Jossey-Bass.
13. Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1). <https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116>
14. Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
15. Tuan, Y.-F. (1977). *Space and place: The perspective of experience*. University of Minnesota Press.
16. Zhang, Y., Li, Y., & Zhang, H. (2023). Spatial identification of public cultural space from the perspective of spatial values: A case study of the historic district in Jinan, China. *Frontiers in Built Environment*, 9, Article 1328157. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2023.1328157>

POKOK BAHASAN MINGGU KE-3

Unsur-unsur Budaya: bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, mata pencaharian, kepercayaan, kesenian

1. Pengantar

Budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, nilai, serta hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar dan diwariskan antargenerasi. Dalam antropologi Indonesia, kebudayaan dapat dipahami melalui tujuh unsur universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi atau kepercayaan, serta kesenian. Ketujuh unsur tersebut terdapat dalam setiap masyarakat, meskipun bentuk, fungsi, dan ekspresi keruangannya berbeda sesuai kondisi sejarah, geografis, sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat (Koentjaraningrat, 2009).

Bagi perencanaan wilayah dan kota, budaya tidak hanya dipandang sebagai warisan tidak berwujud, tetapi juga sebagai kekuatan yang menghasilkan bentuk ruang. Pola permukiman, lokasi pusat kegiatan, jaringan jalan, orientasi bangunan, ruang sakral, kawasan produksi, dan ruang publik pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan ruang kultural perlu mengidentifikasi bagaimana setiap unsur budaya membentuk penggunaan, penguasaan, pemberian makna, dan pengelolaan ruang oleh masyarakat (Rapoport, 1969; Low, 2017).

2. Hubungan Unsur Budaya dan Ruang

Ruang kultural bukan sekadar ruang geografis yang ditempati manusia, melainkan ruang yang telah diberi nilai, identitas, simbol, ingatan, dan aturan sosial. Suatu tempat dapat berfungsi sekaligus sebagai ruang ekonomi, ruang interaksi sosial, tempat pelaksanaan ritual, dan simbol identitas masyarakat. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa ruang tidak bersifat netral, melainkan diproduksi melalui praktik kehidupan sehari-hari dan hubungan kekuasaan yang berlangsung di dalam masyarakat (Lefebvre, 1991; Low, 2017).

Ketujuh unsur budaya tidak bekerja secara terpisah. Bahasa menyimpan pengetahuan lokal; pengetahuan memengaruhi teknologi; teknologi mendukung mata pencaharian; mata pencaharian membentuk organisasi sosial; organisasi sosial mengatur pemanfaatan ruang; kepercayaan memberikan nilai sakral; sedangkan kesenian mengekspresikan identitas masyarakat secara visual dan performatif. Karena itu, analisis ruang kultural harus melihat hubungan antarelemen sebagai satu sistem budaya yang utuh (Koentjaraningrat, 2009; Geertz, 1973).

3. Bahasa

Bahasa merupakan sistem simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan pengetahuan, mengelompokkan lingkungan, dan mewariskan kebudayaan. Bahasa tidak hanya berbentuk bahasa lisan dan tulisan,

tetapi juga mencakup istilah lokal, ungkapan, cerita rakyat, nama tempat, tanda, gestur, dan simbol yang dipahami bersama oleh suatu komunitas. Melalui bahasa, masyarakat membangun cara tertentu dalam mengenali dan menginterpretasikan wilayah tempat tinggalnya (Koentjaraningrat, 2009; Geertz, 1973).

Dalam perspektif keruangan, bahasa dapat ditemukan pada sistem toponimi atau penamaan tempat. Nama kampung, sungai, gunung, jalan, kawasan pertanian, dan tempat sakral biasanya memuat informasi tentang sejarah, kondisi ekologis, tokoh masyarakat, peristiwa penting, atau aktivitas yang pernah berlangsung di suatu lokasi. Hilangnya nama lokal karena standardisasi atau pembangunan baru dapat menyebabkan terputusnya hubungan antara masyarakat, sejarah, dan lanskapnya (Alderman, 2008; Low, 2017).

Perencanaan ruang kultural perlu mendokumentasikan istilah dan nama lokal melalui wawancara, pemetaan partisipatif, penelusuran sejarah, dan penyusunan basis data toponimi. Nama lokal sebaiknya dipertahankan dalam peta, papan informasi, nama jalan, sistem penunjuk arah, dan dokumen rencana. Penggunaan bahasa lokal dalam komunikasi perencanaan juga meningkatkan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Alderman, 2008; Sulistyawan et al., 2018).

4. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan mencakup kumpulan pemahaman masyarakat mengenai alam, ruang, waktu, cuaca, tanah, air, tumbuhan, hewan, kesehatan, pembangunan, serta hubungan sosial. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman panjang, pengamatan terhadap lingkungan, praktik sehari-hari, dan proses pewarisan antargenerasi. Pengetahuan lokal bukan sekadar kumpulan informasi, tetapi juga berisi nilai, aturan, klasifikasi, dan cara masyarakat mengambil keputusan dalam menghadapi perubahan lingkungan (Berkes, 2018; Koentjaraningrat, 2009).

Dalam perencanaan ruang, pengetahuan lokal dapat terlihat pada cara masyarakat menentukan lokasi permukiman, mengenali kawasan rawan bencana, mengatur pola tanam, mengelola sumber air, mempertahankan hutan adat, serta menentukan waktu dan lokasi kegiatan tertentu. Masyarakat pesisir, misalnya, dapat memiliki pengetahuan mengenai arah angin, arus, pasang surut, dan musim tangkap yang tidak selalu tercatat dalam data perencanaan formal (Berkes, 2018; Tengberg et al., 2012).

Integrasi pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah dapat memperkuat kualitas perencanaan, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Namun, integrasi tersebut harus dilakukan secara setara dan tidak menjadikan masyarakat hanya sebagai sumber data. Metode yang dapat digunakan meliputi pemetaan partisipatif, transek wilayah, kalender musim, sejarah lanskap, wawancara tokoh adat, dan verifikasi bersama masyarakat (Gavin et al., 2015; Sulistyawan et al., 2018).

5. Organisasi Sosial

Organisasi sosial merupakan sistem hubungan yang mengatur kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan interaksi antaranggota masyarakat. Unsur ini mencakup keluarga, kekerabatan, kelompok adat, lembaga keagamaan, kelompok profesi, organisasi ekonomi, komunitas lingkungan, serta lembaga pemerintahan lokal. Organisasi sosial memungkinkan masyarakat membangun kerja sama sekaligus menyelesaikan konflik mengenai kepentingan dan pemanfaatan sumber daya (Koentjaraningrat, 2009; Ostrom, 1990).

Organisasi sosial memiliki ekspresi keruangan yang nyata. Sistem kekerabatan dapat memengaruhi pengelompokan rumah, pola pekarangan, pembagian tanah, dan lokasi fasilitas komunal. Lembaga adat dapat menentukan batas wilayah, ruang sakral, jalur ritual, kawasan larangan, serta aturan pemanfaatan hutan atau sumber air. Dengan demikian, struktur ruang suatu permukiman sering mencerminkan struktur sosial masyarakat yang menempatinnya (Rapoport, 1969; Sasongko, 2005).

Dalam proses perencanaan, pemetaan organisasi sosial diperlukan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, pola kepemimpinan, kelompok rentan, mekanisme musyawarah, serta potensi konflik. Perencana tidak cukup hanya melibatkan tokoh formal, tetapi juga perlu mendengarkan perempuan, pemuda, kelompok adat, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan kelompok lain yang sering tidak terwakili dalam forum resmi. Pendekatan ini mendukung perencanaan ruang yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan (Healey, 1997; Innes & Booher, 2010).

6. Sistem Teknologi dan Peralatan Hidup

Sistem teknologi mencakup alat, teknik, keterampilan, bahan, dan cara masyarakat mengubah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi tradisional dapat ditemukan dalam teknik konstruksi rumah, pengolahan lahan, sistem irigasi, penyimpanan hasil panen, pengelolaan air, transportasi, serta pembuatan peralatan rumah tangga. Teknologi tersebut berkembang melalui adaptasi terhadap iklim, ketersediaan bahan, kondisi geografis, dan struktur sosial setempat (Koentjaraningrat, 2009; Oliver, 2006).

Teknologi lokal berpengaruh langsung terhadap bentuk dan karakter ruang. Rumah panggung, misalnya, dapat merupakan respons terhadap banjir, kelembapan, sirkulasi udara, atau ancaman binatang. Terasering mencerminkan penyesuaian teknologi pertanian terhadap kemiringan lahan, sedangkan sistem subak di Bali memperlihatkan keterkaitan antara teknologi irigasi, organisasi sosial, kepercayaan, dan struktur lanskap budaya (Rapoport, 1969; Lansing, 2006).

Perencanaan ruang kultural tidak berarti menolak teknologi modern, tetapi mendorong adaptasi teknologi yang tetap mempertahankan pengetahuan dan identitas lokal. Teknologi baru perlu dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan lingkungan, kemampuan masyarakat untuk mengoperasikannya, efisiensi sumber daya, keterjangkauan, dan pengaruhnya terhadap lanskap budaya. Pendekatan hibrida dapat memadukan teknik tradisional dengan inovasi modern untuk meningkatkan ketahanan wilayah tanpa menghilangkan karakter tempat (Oliver, 2006; UNESCO, 2011).

7. Sistem Mata Pencaharian

Sistem mata pencaharian merupakan cara masyarakat memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mempertahankan keberlangsungan hidup. Bentuknya antara lain pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, kerajinan, jasa, industri rumah tangga, pariwisata, dan pekerjaan sektor informal. Mata pencaharian selalu berhubungan dengan ketersediaan sumber daya, keterampilan, teknologi, jaringan sosial, serta akses terhadap lahan dan pasar (Koentjaraningrat, 2009; Scoones, 1998).

Setiap mata pencaharian menghasilkan kebutuhan dan pola ruang tertentu. Pertanian memerlukan sawah, ladang, saluran irigasi, jalan produksi, serta tempat penyimpanan hasil. Perikanan memerlukan wilayah tangkap, tambatan perahu, tempat pelelangan, kawasan pengolahan, dan permukiman nelayan. Perdagangan membentuk pasar, koridor komersial, ruang bongkar muat, serta simpul transportasi. Dengan demikian, perubahan mata pencaharian dapat mengubah struktur dan fungsi ruang secara signifikan (Scoones, 1998; Plieninger et al., 2013).

Rencana tata ruang perlu melindungi ruang-ruang produktif yang menjadi dasar penghidupan masyarakat. Pengembangan pariwisata, kawasan industri, atau properti tidak seharusnya memutus akses masyarakat terhadap lahan, pesisir, hutan, pasar, dan sumber air. Strategi perencanaan dapat meliputi perlindungan kawasan produksi tradisional, penyediaan ruang bagi ekonomi informal, peningkatan aksesibilitas, pengembangan rantai nilai lokal, serta diversifikasi mata pencaharian yang sesuai dengan karakter budaya wilayah (Tengberg et al., 2012; Duxbury et al., 2016).

8. Sistem Kepercayaan atau Religi

Sistem kepercayaan mencakup pandangan masyarakat tentang hubungan manusia dengan Tuhan, leluhur, alam, kehidupan, kematian, dan kekuatan yang dianggap suci. Sistem ini diwujudkan melalui nilai, mitos, pantangan, ritual, upacara, benda sakral, pemimpin keagamaan, dan tempat peribadatan. Kepercayaan memberikan dasar moral sekaligus pedoman perilaku bagi masyarakat dalam mengatur kehidupan sosial dan lingkungannya (Geertz, 1973; Koentjaraningrat, 2009).

Dalam ruang kultural, kepercayaan dapat menentukan orientasi bangunan, lokasi tempat ibadah, batas ruang sakral, jalur prosesi, kawasan pemakaman, dan hierarki permukiman. Gunung, mata air, pohon, hutan, atau batu tertentu dapat dipandang sebagai bagian dari lanskap sakral. Karena memiliki nilai spiritual, tempat tersebut tidak dapat diperlakukan hanya sebagai objek fisik atau komoditas ekonomi (Rapoport, 1969; Carmichael et al., 1994).

Perencana perlu mengenali sistem kepercayaan agar intervensi ruang tidak merusak situs sakral, jalur ritual, orientasi kosmologis, atau praktik keagamaan masyarakat. Perlindungan tidak cukup dilakukan melalui penetapan batas fisik, tetapi juga harus menjaga suasana, akses, hubungan visual, serta kesinambungan ritual. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep lanskap kota

bersejarah yang melihat warisan budaya sebagai hubungan antara bentuk fisik, nilai sosial, memori, dan praktik kehidupan masyarakat (UNESCO, 2011; Stephenson, 2008).

9. Kesenian

Kesenian merupakan ekspresi estetis dan simbolis yang diwujudkan melalui seni rupa, musik, tari, teater, sastra, arsitektur, kerajinan, pakaian, kuliner, serta berbagai bentuk pertunjukan. Kesenian tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi, pendidikan, ritual, kritik sosial, pembentukan identitas, dan pewarisan nilai budaya (Koentjaraningrat, 2009; Geertz, 1973).

Kesenian memiliki hubungan erat dengan ruang karena membutuhkan tempat untuk produksi, latihan, pertunjukan, pameran, dan interaksi. Alun-alun, balai adat, sanggar, jalan, halaman rumah, pasar, ruang terbuka, dan bangunan bersejarah dapat berfungsi sebagai ruang seni. Sebaliknya, motif, ornamen, warna, bentuk arsitektur, dan tata lanskap juga merupakan ekspresi seni yang memperkuat karakter visual serta identitas suatu kawasan (Duxbury et al., 2016; Evans, 2005).

Perencanaan ruang kultural perlu menyediakan dan melindungi ruang bagi kegiatan seni yang hidup, bukan hanya membangun monumen atau pusat kebudayaan yang bersifat representatif. Strateginya dapat berupa pemanfaatan adaptif bangunan bersejarah, penyediaan ruang pertunjukan terbuka, penguatan kampung seni, perlindungan sentra kerajinan, serta integrasi seni publik ke dalam penataan kawasan. Pengembangan tersebut perlu menghindari komersialisasi berlebihan yang dapat memisahkan kesenian dari komunitas penciptanya (Evans, 2005; Duxbury et al., 2016).

10. Sintesis Unsur Budaya dalam Perencanaan Ruang

Unsur budaya	Ekspresi dalam ruang	Data yang perlu diidentifikasi	Implikasi perencanaan
Bahasa	Toponimi, papan nama, simbol dan narasi tempat	Nama lokal, cerita tempat, istilah zonasi tradisional	Pelestarian toponimi dan penggunaan bahasa lokal
Pengetahuan	Pengelolaan air, tanah, musim dan bencana	Peta pengetahuan lokal, kalender musim, sejarah lingkungan	Integrasi pengetahuan lokal dan data ilmiah
Organisasi sosial	Ruang komunal, wilayah adat, pola kekerabatan	Lembaga, aktor, hak kelola dan mekanisme musyawarah	Perencanaan partisipatif dan perlindungan hak komunal
Teknologi	Rumah tradisional, irigasi, terasering dan alat produksi	Teknik konstruksi, bahan lokal dan infrastruktur tradisional	Adaptasi teknologi lokal dan inovasi berkelanjutan
Mata pencaharian	Sawah, pasar, pelabuhan, sentra kerajinan	Rantai aktivitas, akses lahan, sumber daya dan pasar	Perlindungan ruang produksi dan ekonomi lokal
Kepercayaan	Situs sakral, tempat ibadah, jalur ritual	Nilai spiritual, aturan adat, kalender ritual	Zonasi perlindungan dan pengendalian pemanfaatan

Kesenian	Sanggar, ruang pertunjukan, arsitektur dan seni publik	Pelaku seni, kegiatan, artefak dan ruang kreatif	Penyediaan ruang budaya dan penguatan identitas kawasan
----------	--	--	---

Ketujuh unsur tersebut perlu dianalisis dalam hubungan yang saling memengaruhi. Sebagai contoh, sistem irigasi tradisional bukan hanya merupakan teknologi pengairan, tetapi dapat berkaitan dengan pengetahuan ekologis, organisasi petani, sistem kepercayaan, pola mata pencaharian, istilah bahasa lokal, dan estetika lanskap. Analisis yang hanya melihat bentuk fisik akan mengabaikan sistem budaya yang menjamin keberlangsungan ruang tersebut (Lansing, 2006; Plieninger et al., 2013).

Perencanaan ruang kultural sebaiknya menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis tempat. Tahapannya meliputi identifikasi komunitas, inventarisasi unsur budaya, pemetaan ruang budaya, penilaian nilai dan kerentanan, penyusunan alternatif rencana, serta validasi bersama masyarakat. Pemetaan partisipatif penting karena dapat mengungkap ruang yang bermakna bagi masyarakat tetapi belum tercatat dalam peta formal, termasuk ruang ritual, jalur tradisional, wilayah kelola, dan kawasan sumber penghidupan (Stephenson, 2008; Sulistyawan et al., 2018).

11. Contoh Analisis untuk Mahasiswa

Mahasiswa dapat memilih satu desa, kampung kota, atau kawasan tradisional, kemudian mengidentifikasi ketujuh unsur budaya dan ekspresi keruangannya. Analisis perlu menjawab tiga pertanyaan utama: unsur budaya apa yang masih berlangsung, ruang apa yang mendukung keberlangsungannya, dan tekanan apa yang mengancam hubungan budaya dengan ruang tersebut. Hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk peta budaya, matriks unsur budaya, diagram hubungan antarelemen, dokumentasi visual, dan rekomendasi perencanaan (Low, 2017; UNESCO, 2011).

Contoh objek yang dapat dianalisis meliputi kampung nelayan, desa wisata, kawasan keraton, kampung adat, sentra kerajinan, kawasan Pecinan, kampung Arab, permukiman masyarakat Tengger, desa adat Bali, atau kawasan bersejarah di pusat kota. Mahasiswa perlu menghindari pandangan bahwa budaya selalu bersifat statis; perubahan budaya merupakan proses yang wajar, tetapi perlu diarahkan agar tidak menghilangkan identitas, hak masyarakat, pengetahuan lokal, dan keberlanjutan ruang hidupnya (Duxbury et al., 2016; Low, 2017).

12. Kesimpulan

Bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, mata pencaharian, kepercayaan, dan kesenian merupakan unsur budaya yang secara bersama-sama membentuk identitas dan struktur ruang suatu masyarakat. Unsur-unsur tersebut dapat dikenali melalui nama tempat, praktik pengelolaan lingkungan, pola permukiman, ruang produksi, situs sakral, teknologi bangunan, serta ruang pertunjukan dan ekspresi seni. Oleh karena itu, pemahaman budaya merupakan prasyarat penting bagi penyusunan rencana ruang yang kontekstual, inklusif,

berkelanjutan, dan berakar pada identitas lokal (Koentjaraningrat, 2009; Rapoport, 1969).

Perencanaan ruang kultural harus bergerak dari paradigma “merencanakan untuk masyarakat” menuju “merencanakan bersama masyarakat”. Budaya tidak hanya dicatat sebagai objek pelestarian, tetapi diperlakukan sebagai sumber pengetahuan, dasar pengambilan keputusan, dan kekuatan untuk membangun ketahanan wilayah. Rencana yang baik adalah rencana yang dapat mengakomodasi perubahan tanpa memutus hubungan masyarakat dengan sejarah, identitas, penghidupan, dan ruang budayanya (Healey, 1997; UNESCO, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

1. Alderman, D. H. (2008). Place, naming, and the interpretation of cultural landscapes. In B. Graham & P. Howard (Eds.), *The Ashgate research companion to heritage and identity* (pp. 195–213). Ashgate.
2. Berkes, F. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). Routledge.
3. Carmichael, D. L., Hubert, J., Reeves, B., & Schanche, A. (Eds.). (1994). *Sacred sites, sacred places*. Routledge.
4. Duxbury, N., Hosagrahar, J., & Pascual, J. (2016). *Why must culture be at the heart of sustainable urban development?* United Cities and Local Governments.
5. Evans, G. (2005). Measure for measure: Evaluating the evidence of culture’s contribution to regeneration. *Urban Studies*, 42(5–6), 959–983. <https://doi.org/10.1080/00420980500107102>
6. Gavin, M. C., McCarter, J., Mead, A., Berkes, F., Stepp, J. R., Peterson, D., & Tang, R. (2015). Defining biocultural approaches to conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, 30(3), 140–145. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.12.005>
7. Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
8. Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. Macmillan.
9. Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). *Planning with complexity: An introduction to collaborative rationality for public policy*. Routledge.
10. Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
11. Lansing, J. S. (2006). *Perfect order: Recognizing complexity in Bali*. Princeton University Press.
12. Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.
13. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
14. Oliver, P. (2006). *Built to meet needs: Cultural issues in vernacular architecture*. Architectural Press.
15. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
16. Plieninger, T., Dijks, S., Oteros-Rozas, E., & Bieling, C. (2013). Assessing, mapping, and quantifying cultural ecosystem services at

- community level. *Land Use Policy*, 33, 118–129.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.12.013>
17. Rapoport, A. (1969). *House form and culture*. Prentice-Hall.
 18. Sasongko, I. (2005). Pembentukan struktur ruang permukiman berbasis budaya: Studi kasus Desa Puyung, Lombok Tengah. *DIMENSI: Journal of Architecture and Built Environment*, 33(1), 1–8.
 19. Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis* (IDS Working Paper No. 72). Institute of Development Studies.
 20. Stephenson, J. (2008). The cultural values model: An integrated approach to values in landscapes. *Landscape and Urban Planning*, 84(2), 127–139. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.07.003>
 21. Sulistyawan, B. S., Verweij, P. A., Boot, R. G. A., Purwanti, B., Rumbiak, W., Wattimena, M. C., Rahawarin, P., & Adzan, G. (2018). Integrating participatory GIS into spatial planning regulation: The case of Merauke District, Papua, Indonesia. *International Journal of the Commons*, 12(1), 26–59. <https://doi.org/10.18352/ijc.759>
 22. Tengberg, A., Fredholm, S., Eliasson, I., Knez, I., Saltzman, K., & Wetterberg, O. (2012). Cultural ecosystem services provided by landscapes: Assessment of heritage values and identity. *Ecosystem Services*, 2, 14–26. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.07.006>
 23. UNESCO. (2011). *Recommendation on the historic urban landscape*. UNESCO.

POKOK BAHASAN MINGGU KE-4

Budaya Bermukim: hubungan pola hidup, aktivitas, lingkungan, dan bentuk permukiman

1. Pengertian Budaya Bermukim

Budaya bermukim merupakan keseluruhan nilai, pengetahuan, kebiasaan, aturan sosial, serta cara hidup yang digunakan suatu masyarakat dalam memilih lokasi, membangun tempat tinggal, mengatur ruang, dan menjalankan kehidupan sehari-hari di lingkungan permukimannya. Bermukim bukan hanya kegiatan menempati rumah, melainkan proses membangun hubungan sosial, ekonomi, ekologis, dan simbolis antara manusia dan tempat. Dengan demikian, rumah dan permukiman merupakan manifestasi fisik dari kebudayaan masyarakat yang menghuninya (Rapoport, 1969; Koentjaraningrat, 2009).

Dalam perspektif perencanaan wilayah dan kota, permukiman harus dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup manusia, kegiatan, lingkungan alam, bangunan, jaringan, serta kelembagaan. Rumah tidak berdiri sebagai objek tunggal, tetapi berhubungan dengan halaman, jalan, tempat bekerja, ruang komunal, tempat ibadah, sumber air, lahan produksi, dan fasilitas pelayanan. Hubungan tersebut membentuk suatu sistem tempat atau *system of settings* yang mewadahi rangkaian aktivitas masyarakat (Doxiadis, 1968; Rapoport, 1990).

Budaya bermukim berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya karena setiap kelompok mempunyai pandangan hidup, struktur keluarga, sistem mata pencaharian, teknologi, kepercayaan, dan cara beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Perbedaan tersebut menghasilkan variasi bentuk rumah, pola jalan, kepadatan, orientasi bangunan, ruang terbuka, hierarki ruang, serta hubungan antara ruang privat dan ruang publik (Oliver, 2006; Rapoport, 1969).

2. Kerangka Hubungan Budaya dan Bentuk Permukiman

Hubungan antara budaya dan permukiman dapat dipahami melalui rangkaian: **nilai dan pandangan hidup** → **pola hidup** → **sistem aktivitas** → **kebutuhan ruang** → **organisasi ruang** → **bentuk rumah dan permukiman**. Nilai budaya membentuk cara hidup masyarakat; cara hidup menghasilkan aktivitas tertentu; aktivitas membutuhkan ruang; dan pengaturan ruang tersebut selanjutnya menghasilkan bentuk fisik permukiman. Bentuk permukiman dengan demikian bukan semata-mata hasil keputusan teknis, tetapi juga representasi budaya masyarakat (Rapoport, 1969; Sasongko, 2005).

Lingkungan alam dan teknologi bertindak sebagai faktor yang memungkinkan atau membatasi perwujudan budaya dalam ruang. Masyarakat dengan nilai budaya yang relatif sama dapat menghasilkan bentuk permukiman berbeda ketika tinggal di lingkungan pantai, dataran tinggi, rawa, atau kawasan perkotaan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal pada lingkungan fisik serupa dapat membangun bentuk permukiman berbeda karena memiliki sistem sosial dan budaya yang berlainan (Rapoport, 1969; Oliver, 2006).

Hubungan tersebut bersifat timbal balik. Budaya dan aktivitas masyarakat membentuk ruang permukiman, tetapi bentuk ruang yang telah terbentuk juga memengaruhi perilaku, interaksi sosial, mobilitas, kesehatan, dan identitas masyarakat. Jalan lingkungan yang sempit, halaman bersama, teras rumah, dan ruang komunal, misalnya, dapat meningkatkan intensitas pertemuan sosial. Sebaliknya, kawasan berpagar dan berorientasi pada kendaraan pribadi cenderung menghasilkan pola interaksi yang berbeda (Hillier & Hanson, 1984; Gehl, 2011).

3. Pola Hidup sebagai Dasar Budaya Bermukim

Pola hidup adalah cara suatu masyarakat mengatur kehidupan keluarga, bekerja, berinteraksi, beribadah, menggunakan waktu, dan memanfaatkan sumber daya. Pola hidup dibentuk oleh nilai budaya, struktur sosial, tingkat ekonomi, teknologi, dan kondisi lingkungan. Dalam permukiman tradisional, kegiatan domestik, produksi, sosial, dan ritual sering berlangsung dalam satu kesatuan ruang, sedangkan pada permukiman modern fungsi tersebut cenderung dipisahkan melalui zonasi (Rapoport, 1990; Oliver, 2006).

Struktur keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap bentuk rumah dan pola permukiman. Masyarakat dengan keluarga besar atau *extended family* cenderung membutuhkan rumah yang dapat menampung beberapa generasi, halaman bersama, serta ruang untuk kegiatan kolektif. Sebaliknya, keluarga inti cenderung menempati unit rumah yang lebih kecil dan mandiri. Sistem kekerabatan juga dapat menghasilkan pengelompokan rumah berdasarkan garis

keturunan, suku, klan, atau hubungan perkawinan (Rapoport, 1969; Waterson, 1990).

Pembagian peran berdasarkan umur dan gender turut menentukan penggunaan ruang. Ruang memasak, ruang menerima tamu, ruang bekerja, halaman, dan ruang tidur dapat memiliki aturan penggunaan yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, anggota keluarga, dan orang luar. Oleh sebab itu, analisis denah rumah dan struktur permukiman perlu disertai kajian mengenai siapa yang menggunakan ruang, untuk kegiatan apa, pada waktu kapan, serta berdasarkan aturan sosial apa (Altman & Chemers, 1980; Rapoport, 1990).

Pola hidup juga berkaitan dengan tingkat privasi dan keterbukaan masyarakat. Sebagian masyarakat memiliki batas tegas antara ruang publik, semi-publik, semi-privat, dan privat. Masyarakat lainnya menggunakan ruang secara lebih fleksibel sehingga halaman, teras, jalan, atau lorong dapat berubah fungsi menjadi tempat bermain, bekerja, berdagang, menerima tamu, dan menyelenggarakan kegiatan sosial. Batas ruang dalam budaya bermukim karena itu tidak selalu berupa dinding atau pagar, tetapi dapat dibentuk melalui norma, simbol, jarak, dan kebiasaan (Altman, 1975; Hall, 1966).

4. Aktivitas dan Pembentukan Ruang Permukiman

Aktivitas merupakan penghubung utama antara pola hidup dan bentuk fisik permukiman. Setiap kegiatan membutuhkan tempat, hubungan ruang, waktu, aksesibilitas, dan kondisi lingkungan tertentu. Aktivitas memasak, bekerja, menerima tamu, berdagang, beribadah, bermain, bermusyawarah, serta menyelenggarakan upacara melahirkan kebutuhan ruang yang berbeda. Susunan aktivitas yang dilakukan secara berulang kemudian membentuk pola spasial yang relatif tetap (Rapoport, 1990; Hillier & Hanson, 1984).

Aktivitas domestik menghasilkan organisasi ruang pada skala rumah. Ruang depan biasanya berkaitan dengan penerimaan tamu dan interaksi dengan lingkungan, bagian tengah digunakan untuk kegiatan keluarga, sedangkan bagian belakang sering berkaitan dengan memasak, mencuci, menyimpan, atau produksi rumah tangga. Susunan tersebut tidak bersifat universal karena dipengaruhi konsep kesopanan, gender, privasi, kepercayaan, dan hubungan kekerabatan masing-masing masyarakat (Rapoport, 1969; Suprijanto, 2002).

Aktivitas ekonomi membentuk hubungan antara rumah, ruang produksi, jaringan transportasi, dan pasar. Pada permukiman petani, rumah berhubungan dengan sawah, ladang, kandang, lumbung, serta saluran irigasi. Pada kampung nelayan, rumah berhubungan dengan pantai, tambatan perahu, tempat pelelangan, ruang pengolahan, dan pasar ikan. Pada kampung pengrajin, rumah dapat sekaligus menjadi bengkel produksi, ruang penyimpanan, galeri, dan tempat penjualan (Oliver, 2006; Scoones, 1998).

Aktivitas sosial dan ritual dapat membentuk struktur ruang yang bersifat permanen maupun temporal. Masjid, balai adat, alun-alun, makam, dan rumah pemimpin merupakan pusat ruang yang relatif permanen. Sementara itu, jalan, halaman rumah, atau ruang terbuka dapat berubah sementara menjadi jalur prosesi, tempat pesta perkawinan, perayaan keagamaan, dan pertunjukan seni. Penelitian di Desa Puyung, Lombok Tengah, menunjukkan bahwa ritual

kelahiran, perkawinan, dan Maulid Nabi membentuk pusat, orientasi, dan hubungan ruang yang hanya dapat dikenali ketika kegiatan budaya berlangsung (Sasongko, 2005).

Ruang aktivitas juga memiliki dimensi waktu. Sebuah jalan dapat berfungsi sebagai jalur kendaraan pada pagi hari, ruang berdagang pada sore hari, serta ruang interaksi sosial pada malam hari. Lapangan dapat digunakan untuk olahraga, pasar mingguan, upacara, dan pertunjukan. Oleh karena itu, perencanaan perlu memetakan tidak hanya fungsi formal suatu ruang, tetapi juga pola waktu, intensitas penggunaan, pelaku, dan fungsi informal yang berkembang di dalamnya (Rapoport, 1990; Gehl, 2011).

5. Lingkungan sebagai Faktor Pembentuk Permukiman

Lingkungan alam meliputi topografi, iklim, tanah, air, vegetasi, kondisi geologi, serta potensi bencana. Faktor-faktor tersebut memengaruhi pemilihan lokasi, orientasi bangunan, bentuk atap, elevasi lantai, material, kepadatan, pola jalan, dan sistem drainase. Masyarakat mengembangkan berbagai strategi adaptasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan antargenerasi (Oliver, 2006; Berkes, 2018).

Di kawasan tropis lembap, rumah tradisional umumnya menggunakan atap dengan kemiringan cukup tinggi, bukaan lebar, teritis panjang, ventilasi silang, dan material yang dapat mengurangi panas. Di kawasan rawa atau rawan banjir berkembang rumah panggung dan jalur sirkulasi yang ditinggikan. Di daerah pegunungan, permukiman dapat mengikuti kontur untuk mengurangi pekerjaan tanah serta melindungi kawasan produksi dan sumber air (Rapoport, 1969; Oliver, 2006).

Lingkungan tidak hanya memiliki dimensi fisik, tetapi juga dimensi kultural. Gunung, laut, sungai, hutan, mata air, dan arah mata angin dapat diberi makna sakral, profan, aman, berbahaya, atau produktif. Makna tersebut kemudian memengaruhi orientasi rumah, lokasi tempat ibadah, pemakaman, ruang produksi, dan batas kawasan yang boleh atau tidak boleh dimanfaatkan (Tuan, 1977; Sasongko, 2005).

Hubungan manusia dan lingkungan menghasilkan lanskap budaya, yaitu bentang alam yang terbentuk melalui interaksi panjang antara proses alam dan aktivitas manusia. Sawah berteras, jaringan irigasi tradisional, kebun campuran, kampung nelayan, dan desa adat merupakan contoh lanskap yang memadukan fungsi ekologis, ekonomi, sosial, dan simbolis. Perlindungan permukiman budaya karena itu tidak cukup hanya melestarikan bangunan, tetapi juga harus mempertahankan hubungan antara bangunan, masyarakat, aktivitas, dan lingkungan pendukungnya (Plieninger et al., 2013; UNESCO, 2011).

6. Bentuk dan Pola Permukiman

Bentuk permukiman merupakan konfigurasi fisik yang dihasilkan oleh susunan bangunan, jalan, ruang terbuka, fasilitas umum, batas wilayah, dan unsur alam. Secara umum, pola permukiman dapat berbentuk memusat, linier, menyebar, mengelompok, radial, atau berbentuk jaringan. Pola tersebut muncul melalui kombinasi kondisi lingkungan, sistem transportasi, keamanan, mata pencaharian, struktur sosial, dan nilai budaya (Doxiadis, 1968; Rapoport, 1969).

a. Pola memusat

Pola memusat terbentuk ketika rumah dan kegiatan berorientasi pada satu pusat penting, seperti alun-alun, tempat ibadah, balai adat, pasar, sumber air, atau rumah pemimpin. Pusat tersebut mempunyai fungsi sosial dan simbolis yang kuat. Pola memusat dapat memperkuat interaksi dan identitas komunitas, tetapi perlu diimbangi dengan akses yang baik serta pengelolaan kepadatan (Kostof, 1991; Sasongko, 2005).

b. Pola linier

Pola linier berkembang mengikuti unsur memanjang seperti jalan, sungai, garis pantai, lembah, atau saluran irigasi. Pada kampung nelayan, pola linier memungkinkan hubungan langsung antara rumah dan pantai, sedangkan pada kawasan perdagangan pola tersebut memberikan akses terhadap koridor ekonomi. Namun, perkembangan linier yang tidak dikendalikan dapat menghasilkan kemacetan, risiko bencana, serta keterbatasan akses menuju bagian belakang kawasan (Kostof, 1991; Doxiadis, 1968).

c. Pola mengelompok

Pola mengelompok biasanya terbentuk berdasarkan hubungan kekerabatan, kesamaan pekerjaan, etnis, agama, atau kebutuhan keamanan. Rumah-rumah disusun dalam kelompok yang berbagi halaman, fasilitas, atau ruang komunal. Pola ini mendukung solidaritas dan saling membantu, tetapi dapat mengalami tekanan ketika jumlah penduduk bertambah sementara lahan tidak bertambah (Rapoport, 1969; Waterson, 1990).

d. Pola menyebar

Pola menyebar umumnya dijumpai pada wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, atau daerah dengan kepadatan penduduk rendah. Rumah ditempatkan dekat dengan lahan produksi sehingga memudahkan pengawasan dan pekerjaan sehari-hari. Konsekuensinya adalah tingginya kebutuhan jaringan jalan dan utilitas serta besarnya jarak menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan (Doxiadis, 1968; Kostof, 1991).

7. Rumah sebagai Representasi Budaya Bermukim

Rumah merupakan ruang fisik sekaligus ruang sosial dan simbolis. Secara fisik, rumah memberikan perlindungan terhadap cuaca dan gangguan lingkungan. Secara sosial, rumah menjadi tempat reproduksi keluarga, pendidikan, interaksi, dan kegiatan ekonomi. Secara simbolis, rumah dapat menunjukkan identitas, status, hubungan leluhur, kepercayaan, dan posisi seseorang dalam masyarakat (Rapoport, 1969; Waterson, 1990).

Susunan ruang rumah sering mencerminkan klasifikasi budaya seperti depan-belakang, atas-bawah, publik-privat, laki-laki-perempuan, bersih-kotor, dan sakral-profane. Pada rumah tradisional Osing, misalnya, organisasi ruang terdiri atas *bale*, *jrumah*, dan *pawon* yang memperlihatkan urutan fungsi dari bagian depan menuju belakang. Susunan ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan praktis, tetapi juga mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat penghuninya (Suprijanto, 2002).

Rumah juga dapat bersifat adaptif. Penambahan anggota keluarga, perubahan mata pencaharian, kegiatan usaha, serta kebutuhan teknologi dapat menyebabkan perluasan atau perubahan fungsi ruang. Teras berubah menjadi

warung, ruang tamu menjadi tempat produksi, halaman menjadi tempat parkir, dan kamar baru dibangun untuk keluarga muda. Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa rumah merupakan proses yang terus berkembang, bukan produk yang selesai dalam satu tahap pembangunan (Turner, 1976; Tipple, 2000).

8. Ruang Publik, Komunal, dan Privat

Ruang publik merupakan ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat luas, sedangkan ruang komunal digunakan bersama oleh anggota kelompok tertentu. Ruang privat dikuasai oleh individu atau keluarga. Dalam permukiman berbasis budaya, batas antara ketiga jenis ruang tersebut sering bersifat lentur. Halaman rumah dapat menjadi ruang privat sehari-hari, tetapi berubah menjadi ruang komunal ketika diselenggarakan upacara atau musyawarah (Altman, 1975; Sasongko, 2005).

Teras, jalan kampung, gang, warung, tempat ibadah, dan ruang terbuka kecil merupakan ruang perantara yang penting bagi kehidupan sosial. Ruang tersebut memungkinkan terjadinya pertemuan, pengawasan informal, pertukaran informasi, bermain, dan kegiatan ekonomi skala lingkungan. Keberhasilan permukiman karena itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas rumah, tetapi juga oleh tersedianya jaringan ruang sosial yang mudah diakses dan nyaman digunakan (Gehl, 2011; Jacobs, 1961).

Privasi tidak selalu dihasilkan melalui jarak dan pagar fisik. Masyarakat dapat menggunakan perbedaan elevasi, orientasi pintu, susunan vegetasi, aturan waktu, tanda simbolis, serta norma perilaku untuk mengendalikan interaksi. Perencanaan perumahan yang mengabaikan mekanisme lokal tersebut dapat menghasilkan ruang yang secara teknis baik, tetapi tidak sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan sosial penghuninya (Hall, 1966; Altman & Chemers, 1980).

9. Transformasi Budaya Bermukim

Budaya bermukim selalu mengalami perubahan karena urbanisasi, pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, perubahan pekerjaan, pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan pengaruh gaya hidup global. Perubahan tersebut dapat terlihat melalui peningkatan kepadatan, perubahan material, pergeseran orientasi rumah, hilangnya halaman, komersialisasi ruang, serta berubahnya pola hubungan antara tempat tinggal dan tempat bekerja (Tipple, 2000; Low, 2017).

Transformasi tidak selalu berarti hilangnya budaya. Masyarakat dapat mempertahankan prinsip utama sambil mengubah bentuk fisiknya. Sebuah rumah tradisional dapat menggunakan material modern tetapi tetap mempertahankan hierarki ruang, orientasi, serta fungsi sosialnya. Sebaliknya, bentuk tradisional dapat dipertahankan secara visual untuk kepentingan pariwisata, tetapi kehilangan aktivitas, pengetahuan, dan komunitas yang dahulu memberinya makna (Oliver, 2006; UNESCO, 2011).

Perubahan menjadi bermasalah ketika menghilangkan akses masyarakat terhadap ruang hidup, memutus jaringan sosial, merusak lingkungan, atau menjadikan budaya hanya sebagai komoditas. Relokasi permukiman yang hanya menyediakan unit rumah tanpa memperhatikan mata pencaharian, ruang sosial,

tempat ibadah, dan pola kekerabatan dapat menimbulkan ketidakcocokan antara lingkungan baru dan budaya penghuninya (Cernea, 1997; Rapoport, 1990).

10. Implikasi bagi Perencanaan Ruang Kultural

Perencanaan ruang kultural perlu memulai analisis dari pola kehidupan nyata masyarakat, bukan hanya dari standar fisik dan pembagian fungsi lahan. Perencana perlu mengetahui siapa penggunanya, kegiatan yang dilakukan, waktu penggunaan, hubungan antarruang, nilai yang dipertahankan, serta perubahan yang sedang berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan rencana merespons kebutuhan masyarakat secara lebih kontekstual (Rapoport, 1990; Low, 2017).

Aspek analisis	Pertanyaan utama	Ekspresi keruangan
Pola hidup	Bagaimana struktur keluarga dan kebiasaan masyarakat?	Ukuran rumah, privasi, halaman dan pengelompokan hunian
Aktivitas	Kegiatan apa yang berlangsung dan kapan dilakukan?	Ruang domestik, produksi, sosial, ekonomi dan ritual
Lingkungan	Bagaimana masyarakat beradaptasi dengan alam?	Lokasi, orientasi, elevasi, material dan pola jalan
Sosial budaya	Nilai dan aturan apa yang mengendalikan ruang?	Hierarki, batas, pusat, orientasi dan ruang sakral
Mata pencaharian	Bagaimana hubungan rumah dengan pekerjaan?	Sawah, pantai, pasar, bengkel dan jalur produksi
Transformasi	Perubahan apa yang sedang terjadi?	Kepadatan, perubahan fungsi, perluasan dan komersialisasi
Identitas	Unsur apa yang dianggap bermakna?	Toponimi, arsitektur, ruang komunal dan lanskap budaya

Pendekatan partisipatif diperlukan karena masyarakat merupakan pihak yang paling memahami pola aktivitas, sejarah, makna, dan aturan penggunaan ruangnya. Metode yang dapat diterapkan meliputi observasi perilaku, wawancara mendalam, pemetaan partisipatif, pemetaan aktivitas berdasarkan waktu, dokumentasi sejarah, analisis ruang rumah, dan diskusi kelompok. Data tersebut kemudian dapat dipadukan dengan analisis penggunaan lahan, jaringan, kepadatan, risiko bencana, dan pelayanan infrastruktur (Sanoff, 2000; Low, 2017).

Perencanaan harus membedakan unsur budaya yang perlu dilindungi, dapat diadaptasi, dan dapat dikembangkan. Situs sakral, ruang komunal, akses menuju sumber penghidupan, serta sistem ekologis penting membutuhkan perlindungan kuat. Bentuk bangunan dan teknologi dapat diadaptasi sesuai kebutuhan keselamatan dan kenyamanan, sedangkan kegiatan ekonomi serta kesenian lokal dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UNESCO, 2011; Oliver, 2006).

11. Contoh Analisis: Permukiman Sasak di Desa Puyung

Permukiman Sasak di Desa Puyung menunjukkan bahwa struktur ruang dapat terbentuk melalui aktivitas budaya dan ritual. Rumah, langgar, masjid, makam, kantor desa, dan rumah pemimpin tidak hanya mempunyai fungsi fisik, tetapi menjadi pusat dan simpul bagi berbagai kegiatan sosial-keagamaan. Beberapa struktur ruang bersifat tetap karena berpusat pada masjid atau

makam, sedangkan struktur lainnya bersifat temporal karena hanya muncul ketika upacara tertentu berlangsung (Sasongko, 2005).

Kasus tersebut membuktikan bahwa struktur ruang tidak selalu dapat dikenali hanya dari peta penggunaan lahan. Perencana perlu mengamati pergerakan pelaku, urutan prosesi, perubahan fungsi ruang, pusat kegiatan, dan orientasi yang muncul pada waktu tertentu. Tanpa memahami aktivitas budaya, ruang yang terlihat biasa dalam peta dapat dianggap tidak penting, padahal mempunyai fungsi sosial dan simbolis yang besar bagi masyarakat (Sasongko, 2005).

12. Latihan Analisis untuk Mahasiswa

Mahasiswa dapat memilih satu kampung kota, desa adat, kampung nelayan, permukiman petani, atau kawasan bersejarah. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola hidup masyarakat, sistem aktivitas, karakter lingkungan, pola ruang, bentuk rumah, pusat kegiatan, ruang komunal, ruang sakral, serta perubahan yang terjadi. Hasilnya dapat disajikan melalui peta aktivitas, diagram hubungan ruang, potongan kawasan, dokumentasi visual, dan matriks budaya bermukim (Rapoport, 1990; Sanoff, 2000).

Analisis perlu menjawab empat pertanyaan: **(1)** bagaimana masyarakat menjalani kehidupannya; **(2)** kegiatan apa yang membentuk penggunaan ruang; **(3)** bagaimana masyarakat beradaptasi dengan lingkungan; dan **(4)** bagaimana ketiga aspek tersebut diwujudkan dalam bentuk permukiman. Berdasarkan temuan tersebut, mahasiswa dapat merumuskan unsur yang harus dilindungi, diperbaiki, diadaptasi, dan dikembangkan dalam rencana kawasan (Oliver, 2006; UNESCO, 2011).

13. Kesimpulan

Budaya bermukim menjelaskan hubungan yang tidak terpisahkan antara manusia, pola hidup, aktivitas, lingkungan, dan bentuk permukiman. Pola hidup menghasilkan sistem aktivitas; aktivitas membutuhkan ruang; lingkungan memberikan peluang dan batasan; sedangkan nilai budaya mengatur cara ruang dipilih, digunakan, dibagi, serta dimaknai. Bentuk permukiman merupakan hasil material dari keseluruhan hubungan tersebut (Rapoport, 1969; Doxiadis, 1968).

Perencanaan ruang kultural tidak cukup hanya mempertahankan bentuk fisik bangunan tradisional. Perencanaan juga harus menjaga komunitas, kegiatan, pengetahuan, penghidupan, ruang sosial, dan hubungan ekologis yang membuat permukiman tetap hidup. Tujuan utamanya bukan membekukan permukiman pada kondisi masa lalu, melainkan mengelola perubahan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup tanpa kehilangan identitas dan hubungan budayanya dengan tempat (UNESCO, 2011; Low, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

1. Altman, I. (1975). *The environment and social behavior: Privacy, personal space, territory, and crowding*. Brooks/Cole.
2. Altman, I., & Chemers, M. M. (1980). *Culture and environment*. Brooks/Cole.
3. Berkes, F. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). Routledge.

4. Cernea, M. M. (1997). The risks and reconstruction model for resettling displaced populations. *World Development*, 25(10), 1569–1587.
[https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)00054-5](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00054-5)
5. Doxiadis, C. A. (1968). *Ekistics: An introduction to the science of human settlements*. Oxford University Press.
6. Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
7. Hall, E. T. (1966). *The hidden dimension*. Doubleday.
8. Hillier, B., & Hanson, J. (1984). *The social logic of space*. Cambridge University Press.
9. Jacobs, J. (1961). *The death and life of great American cities*. Random House.
10. Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
11. Kostof, S. (1991). *The city shaped: Urban patterns and meanings through history*. Thames & Hudson.
12. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
13. Oliver, P. (2006). *Built to meet needs: Cultural issues in vernacular architecture*. Architectural Press.
14. Plieninger, T., Dijks, S., Oteros-Rozas, E., & Bieling, C. (2013). Assessing, mapping, and quantifying cultural ecosystem services at community level. *Land Use Policy*, 33, 118–129.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.12.013>
15. Rapoport, A. (1969). *House form and culture*. Prentice-Hall.
16. Rapoport, A. (1990). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach*. University of Arizona Press.
17. Sanoff, H. (2000). *Community participation methods in design and planning*. John Wiley & Sons.
18. Sasongko, I. (2005). Pembentukan struktur ruang permukiman berbasis budaya: Studi kasus Desa Puyung–Lombok Tengah. *DIMENSI: Journal of Architecture and Built Environment*, 33(1), 1–8. Kajian ini menjelaskan struktur ruang permanen dan temporal yang dibentuk oleh budaya serta ritual masyarakat Sasak. [Artikel tersedia melalui DIMENSI](#).
19. Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis* (IDS Working Paper No. 72). Institute of Development Studies.
20. Suprijanto, I. (2002). Rumah tradisional Osing: Konsep ruang dan bentuk. *DIMENSI: Journal of Architecture and Built Environment*, 30(1), 10–20. [Naskah artikel](#).
21. Tiple, A. G. (2000). *Extending themselves: User-initiated transformations of government-built housing in developing countries*. Liverpool University Press.
22. Tuan, Y.-F. (1977). *Space and place: The perspective of experience*. University of Minnesota Press.
23. Turner, J. F. C. (1976). *Housing by people: Towards autonomy in building environments*. Marion Boyars.
24. UNESCO. (2011). *Recommendation on the historic urban landscape*. UNESCO.

25. Waterson, R. (1990). *The living house: An anthropology of architecture in South-East Asia*. Oxford University Press.

POKOK BAHASAN MINGGU KE-5

Masyarakat dan Dinamikanya: struktur sosial, kelompok sosial, perubahan sosial, modernisasi, migrasi dan perubahan ruang

1. Pengertian Masyarakat dan Dinamika Sosial

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah, melakukan interaksi secara berkelanjutan, serta memiliki norma, nilai, lembaga, dan identitas kolektif. Masyarakat bukan hanya kumpulan penduduk, melainkan suatu sistem hubungan sosial yang mengatur kerja sama, pembagian peran, penguasaan sumber daya, penyelesaian konflik, dan pewarisan budaya antargenerasi. Sistem tersebut selalu bergerak karena dipengaruhi perubahan jumlah penduduk, ekonomi, teknologi, politik, lingkungan, dan hubungan dengan masyarakat lain (Soekanto & Sulistyowati, 2017; Giddens & Sutton, 2021).

Dinamika masyarakat menunjukkan perubahan yang terjadi pada struktur, hubungan, nilai, perilaku, kelembagaan, dan pola kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut dapat berlangsung lambat melalui evolusi kebiasaan sehari-hari atau berlangsung cepat akibat industrialisasi, pembangunan infrastruktur, bencana, konflik, migrasi, dan penetrasi teknologi. Setiap perubahan sosial biasanya mempunyai dimensi spasial karena perubahan cara hidup akan memengaruhi kebutuhan, penggunaan, penguasaan, dan pemaknaan ruang (Sztompka, 1993; Lefebvre, 1991).

Dalam perencanaan wilayah dan kota, masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku yang memproduksi ruang, bukan hanya sebagai pengguna hasil pembangunan. Permukiman, pusat perdagangan, kawasan industri, kampung kota, ruang publik, dan jaringan pergerakan terbentuk melalui interaksi antara keputusan pemerintah, investasi swasta, strategi rumah tangga, praktik komunitas, dan kekuatan pasar. Oleh karena itu, analisis sosial menjadi bagian penting dalam memahami mengapa suatu ruang terbentuk dan berubah (Lefebvre, 1991; Healey, 1997).

2. Struktur Sosial

Struktur sosial adalah pola hubungan yang relatif teratur antara individu, kelompok, lembaga, serta posisi sosial dalam masyarakat. Struktur tersebut mencakup status, peran, kelas sosial, stratifikasi, kekuasaan, pekerjaan, pendidikan, gender, usia, etnisitas, dan hubungan kekerabatan. Struktur sosial mengatur siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang lebih rentan terhadap dampak pembangunan (Giddens & Sutton, 2021; Soekanto & Sulistyowati, 2017).

Status sosial menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran sosial merupakan perilaku dan tanggung jawab yang diharapkan dari posisi tersebut. Seorang kepala adat, pemimpin agama, ketua

lingkungan, pedagang, petani, pekerja informal, perempuan pengelola rumah tangga, dan pemuda mempunyai peran berbeda dalam kehidupan komunitas. Perbedaan peran tersebut memengaruhi pola aktivitas, mobilitas, kebutuhan fasilitas, serta cara kelompok menggunakan ruang (Soekanto & Sulistyowati, 2017; Bourdieu, 1986).

Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara bertingkat berdasarkan kekayaan, kekuasaan, pendidikan, pekerjaan, keturunan, atau kehormatan. Stratifikasi dapat terlihat secara spasial melalui perbedaan lokasi tempat tinggal, kualitas rumah, luas tanah, akses terhadap infrastruktur, serta kedekatan dengan pusat pelayanan. Segregasi permukiman karena itu sering menjadi manifestasi fisik dari ketimpangan sosial dan ekonomi (Harvey, 1973; Marcuse & van Kempen, 2000).

Struktur sosial tidak selalu bersifat formal. Dalam banyak kampung dan desa, pemimpin informal, tokoh agama, tetua adat, kelompok perempuan, serta jaringan kekerabatan dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada lembaga formal. Perencana perlu memetakan struktur formal dan informal agar proses partisipasi tidak hanya melibatkan orang yang memiliki jabatan administratif, tetapi juga mereka yang mempunyai legitimasi sosial dalam masyarakat (Healey, 1997; Innes & Booher, 2010).

A. Struktur sosial dan ruang

Struktur sosial memengaruhi pembagian dan penguasaan ruang. Kelompok yang mempunyai kekuasaan ekonomi dan politik lebih mudah memperoleh lahan strategis, pelayanan infrastruktur, serta perlindungan hukum. Sebaliknya, kelompok berpenghasilan rendah sering tinggal di kawasan yang kurang terlayani, rawan bencana, atau memiliki status lahan tidak pasti. Distribusi ruang dengan demikian mencerminkan distribusi kekuasaan dan kesempatan dalam masyarakat (Harvey, 1973; Soja, 2010).

Dalam masyarakat tradisional, struktur kekerabatan dapat menghasilkan pengelompokan hunian berdasarkan garis keturunan atau klan. Kedudukan pemimpin, tokoh agama, atau tetua juga dapat menentukan pusat dan orientasi permukiman. Penelitian mengenai struktur permukiman Sasak menunjukkan bahwa rumah, masjid, langgar, makam, dan kediaman pemimpin membentuk hubungan spasial yang berkaitan dengan struktur sosial serta ritual masyarakat (Sasongko, 2005).

3. Kelompok Sosial

Kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang berinteraksi, memiliki kesadaran sebagai anggota, berbagi tujuan atau identitas tertentu, dan mengikuti norma yang disepakati. Kelompok sosial dapat berupa keluarga, kelompok kekerabatan, organisasi adat, kelompok keagamaan, kelompok pekerjaan, perkumpulan warga, komunitas hobi, dan organisasi masyarakat sipil. Kelompok tersebut menjadi media bagi individu untuk memperoleh identitas, dukungan, informasi, dan akses terhadap sumber daya (Merton, 1968; Soekanto & Sulistyowati, 2017).

Kelompok primer ditandai oleh hubungan yang erat, personal, dan berlangsung lama, seperti keluarga, tetangga dekat, dan kelompok

persahabatan. Kelompok sekunder dibentuk berdasarkan tujuan atau kepentingan tertentu, seperti organisasi profesi, koperasi, kelompok usaha, dan lembaga pemerintahan. Dalam perencanaan ruang, kedua jenis kelompok tersebut mempunyai peran berbeda: kelompok primer memperkuat solidaritas sehari-hari, sedangkan kelompok sekunder membantu mengorganisasikan tindakan kolektif dalam skala yang lebih luas (Cooley, 1909; Soekanto & Sulistyowati, 2017).

Keberadaan kelompok sosial menghasilkan modal sosial, yaitu jaringan, kepercayaan, dan norma timbal balik yang memungkinkan masyarakat melakukan kerja sama. Modal sosial dapat mendukung pemeliharaan lingkungan, pembangunan fasilitas bersama, kesiapsiagaan bencana, perlindungan kelompok rentan, dan penyelesaian konflik. Akan tetapi, jaringan kelompok yang terlalu tertutup juga dapat membatasi pihak luar atau memperkuat eksklusivitas sosial (Putnam, 2000; Woolcock, 2001).

Kelompok sosial sering mempunyai ruang aktivitas tertentu, misalnya balai warga, rumah ibadah, pasar, lapangan, taman, pos keamanan, ruang pertemuan, dan jalan lingkungan. Ruang tersebut bukan sekadar wadah fisik, tetapi menjadi tempat pembentukan kepercayaan, pertukaran informasi, dan reproduksi identitas. Hilangnya ruang komunal akibat pembangunan dapat melemahkan jaringan sosial meskipun masyarakat secara fisik masih tinggal di lokasi yang sama (Gehl, 2011; Low, 2017).

A. Kelompok sosial dalam perencanaan partisipatif

Perencanaan partisipatif perlu mengenali keberagaman kelompok dan kepentingan dalam masyarakat. Istilah "masyarakat" tidak boleh diperlakukan seolah-olah merujuk pada satu kelompok yang homogen. Perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal, pemilik lahan, penyewa, penduduk asli, dan pendatang dapat memiliki kebutuhan ruang serta tingkat kekuasaan yang berbeda (Healey, 1997; Innes & Booher, 2010).

Pemetaan pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepentingan, pengaruh, sumber daya, kerentanan, dan hubungan antaraktor. Hasilnya digunakan untuk menentukan kelompok yang harus dilibatkan, mekanisme komunikasi, serta cara mencegah dominasi kelompok tertentu. Partisipasi yang bermakna mensyaratkan adanya akses terhadap informasi dan kemampuan masyarakat memengaruhi keputusan, bukan hanya kehadiran dalam forum konsultasi (Arnstein, 1969; Innes & Booher, 2010).

4. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan transformasi pada pola hubungan, nilai, norma, kelembagaan, perilaku, dan struktur masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan dapat terjadi karena pertumbuhan penduduk, inovasi teknologi, perubahan ekonomi, pendidikan, kebijakan pemerintah, konflik, bencana, dan interaksi dengan kebudayaan lain. Perubahan pada satu unsur sosial sering mendorong perubahan pada unsur lainnya karena masyarakat merupakan sistem yang saling terhubung (Sztompka, 1993; Soekanto & Sulistyowati, 2017).

Perubahan sosial dapat bersifat evolutif atau revolusioner. Perubahan evolutif berlangsung secara bertahap, seperti perubahan ukuran keluarga, pergeseran pekerjaan, dan penggunaan teknologi digital. Perubahan revolusioner berlangsung relatif cepat dan mengubah struktur masyarakat secara mendasar, misalnya relokasi akibat bencana, pembangunan kawasan industri, reforma agraria, atau perubahan rezim politik (Giddens & Sutton, 2021; Sztompka, 1993).

Perubahan sosial juga dapat bersifat direncanakan maupun tidak direncanakan. Pembangunan jalan, bendungan, kawasan industri, dan pusat perdagangan merupakan perubahan yang direncanakan, tetapi dapat menghasilkan dampak tidak direncanakan berupa kenaikan harga tanah, spekulasi lahan, migrasi, perubahan pekerjaan, segregasi, dan hilangnya ruang produksi masyarakat. Perencanaan karena itu harus mempertimbangkan konsekuensi sosial langsung, tidak langsung, dan jangka panjang (Cernea, 1997; Harvey, 2008).

A. Faktor pendorong perubahan sosial

Pendidikan meningkatkan kemampuan masyarakat menerima pengetahuan, mengembangkan aspirasi, dan mengubah kedudukan sosial. Teknologi mempercepat komunikasi, mobilitas, dan transformasi ekonomi. Pasar memperluas hubungan produksi dan konsumsi, sedangkan kebijakan pemerintah dapat mengubah sistem penguasaan lahan dan penyediaan pelayanan. Interaksi berbagai faktor tersebut menyebabkan perubahan sosial tidak pernah berlangsung dalam pola yang sepenuhnya linier (Castells, 2010; Giddens & Sutton, 2021).

Konflik juga menjadi salah satu pendorong perubahan sosial. Konflik dapat muncul karena ketimpangan penguasaan lahan, perbedaan kepentingan pembangunan, kompetisi sumber daya, atau ketidakadilan distribusi manfaat. Konflik tidak selalu bersifat negatif karena dapat membuka persoalan yang sebelumnya tersembunyi dan mendorong perbaikan kelembagaan. Namun, konflik yang tidak dikelola dapat menghasilkan fragmentasi masyarakat dan eksklusivitas ruang (Coser, 1956; Healey, 1997).

5. Modernisasi

Modernisasi adalah proses perubahan dari masyarakat yang relatif tradisional menuju sistem yang ditandai oleh industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi pekerjaan, penggunaan teknologi, pendidikan formal, rasionalisasi kelembagaan, serta perluasan pasar. Modernisasi bukan sekadar penggunaan teknologi baru, melainkan perubahan dalam cara masyarakat bekerja, berkomunikasi, mengatur waktu, membentuk keluarga, dan memahami masa depan (Eisenstadt, 1966; Giddens, 1990).

Modernisasi membawa berbagai manfaat berupa peningkatan produktivitas, akses informasi, mobilitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan konektivitas wilayah. Dalam ruang perkotaan, modernisasi dapat menghasilkan sistem transportasi baru, pusat kegiatan ekonomi, infrastruktur digital, serta peningkatan kualitas bangunan dan pelayanan dasar. Perubahan tersebut

membuka kesempatan sosial dan ekonomi yang sebelumnya tidak tersedia (Castells, 2010; Inglehart & Baker, 2000).

Modernisasi juga dapat menimbulkan persoalan ketika pembangunan dipahami sebagai penggantian menyeluruh terhadap nilai dan sistem lokal. Standarisasi bangunan, komersialisasi lahan, penggunaan kendaraan pribadi, dan ekspansi kawasan modern dapat menghilangkan ruang komunal, pengetahuan lokal, arsitektur vernakular, serta hubungan sosial yang sebelumnya mendukung kehidupan masyarakat (Rapoport, 1969; Oliver, 2006).

Masyarakat tidak selalu meninggalkan tradisi ketika mengalami modernisasi. Nilai tradisional dapat bertahan, beradaptasi, atau dikombinasikan dengan teknologi dan institusi modern. Kajian lintas negara menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi mendorong perubahan nilai, tetapi pengaruh sejarah dan kebudayaan tetap menghasilkan lintasan modernisasi yang berbeda. Dengan demikian, tidak terdapat satu bentuk modernisasi yang berlaku universal bagi semua masyarakat (Inglehart & Baker, 2000).

A. Modernisasi dan perubahan ruang

Pada wilayah perkotaan, modernisasi menghasilkan perubahan dari ruang berbasis kedekatan komunitas menuju ruang yang semakin terhubung oleh jaringan transportasi, komunikasi, dan pasar. Pusat perbelanjaan, kawasan industri, perumahan tertutup, pusat bisnis, serta infrastruktur metropolitan menjadi bentuk spasial baru. Ruang tidak lagi hanya ditentukan oleh jarak geografis, tetapi juga oleh konektivitas terhadap jaringan ekonomi dan informasi (Castells, 2010; Graham & Marvin, 2001).

Di wilayah perdesaan, modernisasi dapat mengubah pola produksi, kepemilikan lahan, bentuk rumah, serta hubungan desa–kota. Mekanisasi pertanian mengurangi kebutuhan tenaga kerja, pembangunan jalan meningkatkan akses pasar, dan teknologi komunikasi memperluas aspirasi pekerjaan generasi muda. Akibatnya, desa tidak lagi berdiri sebagai ruang yang sepenuhnya terpisah dari kota, tetapi menjadi bagian dari sistem wilayah yang saling bergantung (McGee, 1991; Firman, 2009).

6. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan menetap sementara atau permanen. Migrasi dapat berlangsung antardesa, desa–kota, antarkota, antarpulau, maupun antarnegara. Selain migrasi permanen, terdapat mobilitas sirkuler, komuter, migrasi musiman, dan perpindahan paksa akibat konflik, bencana, atau pembangunan (Lee, 1966; Castles et al., 2020).

Keputusan migrasi dipengaruhi faktor pendorong di daerah asal, faktor penarik di daerah tujuan, hambatan antara, dan karakteristik individu. Keterbatasan pekerjaan, lahan, pendidikan, dan pelayanan dapat mendorong penduduk meninggalkan daerah asal, sedangkan peluang kerja, upah, pendidikan, fasilitas, dan jaringan keluarga dapat menarik penduduk menuju lokasi tertentu (Lee, 1966).

Migrasi tidak hanya merupakan keputusan individual, tetapi sering menjadi strategi rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi

risiko, dan memperluas jaringan ekonomi. Jaringan migran menyediakan informasi, tempat tinggal awal, pekerjaan, serta dukungan sosial bagi pendatang baru. Ketika jaringan tersebut menguat, migrasi dapat berlanjut meskipun kondisi ekonomi awal yang mendorong perpindahan telah berubah (Massey et al., 1993).

Urbanisasi berkaitan erat dengan migrasi, tetapi keduanya tidak identik. Urbanisasi adalah peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan dapat terjadi melalui migrasi, pertumbuhan alami penduduk, atau perubahan status desa menjadi kawasan perkotaan. Karena itu, pertumbuhan penduduk perkotaan perlu dianalisis bersama perubahan administratif, ekspansi fisik, dan transformasi ekonomi wilayah (Zelinsky, 1971; Mardiansjah et al., 2018).

Statistik migrasi juga harus dibaca secara hati-hati karena perpindahan permanen hanya merupakan salah satu bentuk mobilitas. Komuter harian dan migrasi sirkuler dapat memengaruhi kebutuhan transportasi, perumahan sewa, pelayanan kota, serta hubungan desa–kota meskipun pelakunya tidak tercatat sebagai penduduk tetap di daerah tujuan. Data kependudukan dan migrasi Indonesia dapat ditelusuri melalui tema resmi Kependudukan dan Migrasi BPS (Badan Pusat Statistik, 2024).

7. Dampak Migrasi terhadap Masyarakat Asal dan Tujuan

Di daerah asal, migrasi dapat mengurangi tekanan terhadap lapangan kerja dan menghasilkan remitansi bagi keluarga. Remitansi dapat digunakan untuk pendidikan, perbaikan rumah, investasi usaha, pembelian tanah, dan peningkatan konsumsi. Namun, migrasi juga dapat mengurangi tenaga kerja produktif, mengubah struktur keluarga, serta meningkatkan beban pengasuhan bagi perempuan dan penduduk lanjut usia yang ditinggalkan (de Haas, 2010; Castles et al., 2020).

Di daerah tujuan, migran berkontribusi terhadap pertumbuhan tenaga kerja, kegiatan ekonomi, keberagaman budaya, dan inovasi. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan kebutuhan perumahan, air bersih, sanitasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan ruang publik. Ketika penyediaan lahan dan pelayanan tidak mampu mengikuti pertumbuhan, migran berpenghasilan rendah cenderung mencari hunian informal atau tinggal di kawasan padat dan rentan (Tacoli et al., 2015; UN-Habitat, 2020).

Migrasi juga menghasilkan proses perjumpaan budaya. Pendatang membawa bahasa, makanan, kepercayaan, jaringan sosial, keterampilan, dan praktik ruang dari daerah asal. Interaksi antara pendatang dan penduduk lokal dapat menghasilkan integrasi, hibridisasi budaya, kompetisi, atau konflik. Ruang pasar, tempat kerja, sekolah, rumah ibadah, terminal, dan ruang publik menjadi lokasi penting bagi proses interaksi tersebut (Castles et al., 2020; Low, 2017).

8. Perubahan Ruang

Perubahan ruang adalah transformasi pada fungsi, bentuk, intensitas, akses, penguasaan, dan makna suatu tempat. Perubahan ruang dapat terlihat melalui konversi lahan pertanian menjadi permukiman, peningkatan kepadatan, perluasan kota, pembangunan jaringan jalan, perubahan fungsi rumah,

terbentuknya kawasan komersial, dan pergeseran pusat aktivitas. Perubahan tersebut selalu berhubungan dengan perubahan ekonomi, demografi, teknologi, dan struktur sosial (Lefebvre, 1991; Harvey, 2008).

a. Urbanisasi dan ekspansi perkotaan

Pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi mendorong perluasan kawasan terbangun menuju wilayah pinggiran. Proses ini menghasilkan kawasan peri-urban yang memperlihatkan percampuran penggunaan lahan, pekerjaan, serta karakter desa dan kota. Pada kawasan tersebut, sawah, perumahan, industri, perdagangan, dan infrastruktur berkembang berdampingan serta sering menimbulkan konflik pemanfaatan ruang (McGee, 1991; Hudalah et al., 2007).

Perkembangan metropolitan di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang semakin intensif antara kota inti dan wilayah sekitarnya. Perumahan baru, kawasan industri, jalan tol, serta pusat komersial memperluas wilayah fungsional kota melampaui batas administratif. Transformasi tersebut meningkatkan konektivitas, tetapi juga menimbulkan fragmentasi ruang, ketimpangan pelayanan, dan tekanan terhadap lahan pertanian (Firman, 2009; Mardiansjah et al., 2018).

b. Segregasi dan diferensiasi ruang

Ketimpangan pendapatan dan perbedaan status sosial dapat menghasilkan segregasi ruang, yaitu pemisahan kelompok masyarakat berdasarkan kelas ekonomi, etnisitas, atau status kepemilikan. Segregasi tampak melalui keberadaan kawasan elite, perumahan tertutup, kampung padat, rumah susun, dan permukiman informal dengan kualitas pelayanan yang berbeda (Marcuse & van Kempen, 2000; Firman, 2004).

Segregasi bukan hanya masalah jarak fisik, tetapi juga perbedaan akses terhadap kesempatan. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pekerjaan atau jaringan transportasi harus mengeluarkan biaya dan waktu perjalanan lebih besar. Ketidakadilan ruang terjadi ketika lokasi tempat tinggal menentukan secara kuat akses seseorang terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ruang hijau, dan keamanan (Soja, 2010; Lucas, 2012).

c. Gentrifikasi

Gentrifikasi merupakan perubahan kawasan ketika investasi baru dan masuknya kelompok berpendapatan lebih tinggi menaikkan nilai tanah, harga rumah, dan biaya hidup. Proses tersebut dapat memperbaiki kualitas bangunan dan infrastruktur, tetapi berpotensi menggusur penduduk lama secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan tanpa penggusuran formal, penduduk dapat kehilangan jaringan sosial dan rasa memiliki ketika karakter kawasan berubah (Lees et al., 2008; Zukin, 2010).

d. Perubahan makna ruang

Perubahan ruang tidak selalu berupa pembangunan fisik. Ruang dapat mengalami perubahan makna ketika tempat komunal berubah menjadi objek wisata, pasar tradisional menjadi pusat komersial modern, atau kampung budaya menjadi kawasan konsumsi. Bentuk fisiknya mungkin dipertahankan, tetapi

fungsi sosial dan hubungan masyarakat dengan tempat dapat melemah (Lefebvre, 1991; Zukin, 2010).

9. Hubungan Antarkomponen

Hubungan masyarakat dan ruang dapat diringkas sebagai berikut:

Dinamika sosial	Proses utama	Dampak keruangan
Perubahan struktur sosial	Pergeseran kelas, pekerjaan dan kekuasaan	Segregasi, perubahan penguasaan lahan dan akses pelayanan
Perkembangan kelompok sosial	Pembentukan jaringan dan organisasi	Munculnya ruang komunal dan pusat aktivitas
Perubahan sosial	Perubahan nilai, norma dan kelembagaan	Perubahan fungsi serta makna ruang
Modernisasi	Industrialisasi, teknologi dan konektivitas	Kawasan industri, jaringan transportasi dan pusat ekonomi baru
Migrasi	Perpindahan serta pertumbuhan penduduk	Ekspansi permukiman dan peningkatan kebutuhan pelayanan
Urbanisasi	Konsentrasi penduduk dan kegiatan	Kepadatan, perluasan kota dan kawasan peri-urban
Ketimpangan sosial	Perbedaan pendapatan dan kekuasaan	Segregasi serta ketidakadilan akses
Komersialisasi	Peningkatan investasi dan nilai tanah	Gentrifikasi dan perubahan fungsi kawasan

Dinamika tersebut membentuk siklus yang saling memengaruhi. Modernisasi menciptakan pusat ekonomi dan lapangan kerja; pusat ekonomi menarik migrasi; migrasi mendorong pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ruang; pertumbuhan ruang meningkatkan nilai tanah; dan kenaikan nilai tanah mengubah struktur sosial serta distribusi penduduk. Karena itu, perubahan ruang tidak dapat dijelaskan dengan satu faktor saja (Harvey, 2008; Firman, 2009).

10. Implikasi bagi Perencanaan Ruang Kultural

Perencanaan ruang kultural perlu melakukan analisis sosial sebelum menetapkan zonasi, program pembangunan, atau desain kawasan. Analisis tersebut mencakup komposisi penduduk, kelompok sosial, jaringan kelembagaan, distribusi kekuasaan, pola migrasi, mata pencaharian, kerentanan, serta keterikatan terhadap tempat. Informasi ini membantu perencana memahami pihak yang memperoleh manfaat dan pihak yang menanggung risiko pembangunan (Healey, 1997; Soja, 2010).

Perencanaan juga perlu mengantisipasi perubahan, bukan hanya menggambarkan kondisi saat ini. Proyeksi penduduk harus dilengkapi dengan analisis perubahan rumah tangga, migrasi, komuter, pekerjaan, harga tanah, dan kebutuhan kelompok yang berbeda. Pendekatan skenario dapat digunakan untuk membandingkan dampak sosial dan spasial dari beberapa pilihan pembangunan (Klosterman, 1999; UN-Habitat, 2020).

Kebijakan ruang perlu melindungi kelompok rentan dari penggusuran, kehilangan mata pencaharian, dan berkurangnya akses terhadap fasilitas. Instrumen yang dapat digunakan meliputi perumahan terjangkau, perlindungan penyewa, pengakuan hak komunal, penyediaan ruang usaha informal, peningkatan kampung, serta pembangunan berbasis relokasi minimal. Apabila

relokasi tidak dapat dihindari, pemulihan harus mencakup penghidupan, jaringan sosial, akses pelayanan, dan identitas komunitas (Cernea, 1997; UN-Habitat, 2020).

Ruang publik dan ruang komunal perlu direncanakan sebagai infrastruktur sosial. Ruang yang aman, inklusif, mudah dicapai, serta memungkinkan berbagai aktivitas dapat mempertemukan kelompok berbeda dan memperkuat kohesi sosial. Perencanaan ruang publik harus memperhatikan kebutuhan perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pendatang, dan pekerja informal (Gehl, 2011; Low, 2017).

11. Kerangka Analisis untuk Mahasiswa

Mahasiswa dapat memilih satu desa, kampung kota, kawasan peri-urban, permukiman migran, atau kawasan yang mengalami pembangunan besar. Analisis diawali dengan mengidentifikasi struktur sosial, kelompok utama, distribusi kekuasaan, perubahan mata pencaharian, arus migrasi, dan bentuk perubahan ruang. Hasilnya dapat disajikan melalui peta sosial, peta migrasi, linimasa perubahan, diagram hubungan aktor, dan peta perubahan penggunaan lahan (Healey, 1997; Low, 2017).

Pertanyaan analisis yang dapat digunakan meliputi: siapa kelompok yang dominan dan rentan; perubahan sosial apa yang terjadi; faktor apa yang mendorong migrasi; bagaimana modernisasi mengubah mata pencaharian; ruang apa yang berubah fungsi; siapa yang memperoleh manfaat; serta siapa yang berisiko kehilangan akses. Pertanyaan tersebut membantu mahasiswa menghubungkan fenomena sosial dengan bukti spasial secara kritis (Soja, 2010; Innes & Booher, 2010).

12. Kesimpulan

Masyarakat merupakan sistem dinamis yang dibentuk oleh struktur sosial, kelompok, nilai, kelembagaan, dan hubungan kekuasaan. Perubahan sosial, modernisasi, dan migrasi mengubah komposisi penduduk, pola aktivitas, pekerjaan, serta kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk ekspansi kota, kawasan peri-urban, segregasi, gentrifikasi, perubahan fungsi lahan, dan pembentukan pusat kegiatan baru (Giddens & Sutton, 2021; Harvey, 2008).

Perencanaan ruang kultural harus memahami bahwa perubahan ruang bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga menyangkut keadilan, identitas, hak, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Rencana yang baik tidak sekadar mengakomodasi pertumbuhan, tetapi juga mengendalikan dampak perubahan, melindungi kelompok rentan, menjaga ruang sosial, dan memastikan agar manfaat pembangunan dapat diakses secara adil oleh penduduk lama maupun pendatang (Healey, 1997; Soja, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

1. Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

2. Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik migrasi Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. BPS.
3. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
4. Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
5. Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2020). *The age of migration: International population movements in the modern world* (6th ed.). Guilford Press.
6. Cernea, M. M. (1997). The risks and reconstruction model for resettling displaced populations. *World Development*, 25(10), 1569–1587. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)00054-5](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00054-5)
7. Cooley, C. H. (1909). *Social organization: A study of the larger mind*. Charles Scribner's Sons.
8. Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.
9. de Haas, H. (2010). Migration and development: A theoretical perspective. *International Migration Review*, 44(1), 227–264. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2009.00804.x>
10. Eisenstadt, S. N. (1966). *Modernization: Protest and change*. Prentice-Hall.
11. Firman, T. (2004). New town development in Jakarta Metropolitan Region: A perspective of spatial segregation. *Habitat International*, 28(3), 349–368. [https://doi.org/10.1016/S0197-3975\(03\)00037-7](https://doi.org/10.1016/S0197-3975(03)00037-7)
12. Firman, T. (2009). The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia: A survey of Jakarta–Bandung Region development. *Habitat International*, 33(4), 327–339. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.08.005>
13. Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
14. Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Stanford University Press.
15. Giddens, A., & Sutton, P. W. (2021). *Sociology* (9th ed.). Polity Press.
16. Graham, S., & Marvin, S. (2001). *Splintering urbanism: Networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition*. Routledge.
17. Harvey, D. (1973). *Social justice and the city*. Edward Arnold.
18. Harvey, D. (2008). The right to the city. *New Left Review*, 53, 23–40.
19. Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. Macmillan.
20. Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2007). Peri-urbanisation in East Asia: A new challenge for planning? *International Development Planning Review*, 29(4), 503–519. <https://doi.org/10.3828/idpr.29.4.4>
21. Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 65(1), 19–51. <https://doi.org/10.2307/2657288>
22. Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). *Planning with complexity: An introduction to collaborative rationality for public policy*. Routledge.

23. Klosterman, R. E. (1999). The What If? collaborative planning support system. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 26(3), 393–408. <https://doi.org/10.1068/b260393>
24. Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47–57. <https://doi.org/10.2307/2060063>
25. Lees, L., Slater, T., & Wyly, E. (2008). *Gentrification*. Routledge.
26. Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.
27. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
28. Lucas, K. (2012). Transport and social exclusion: Where are we now? *Transport Policy*, 20, 105–113. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.01.013>
29. Marcuse, P., & van Kempen, R. (Eds.). (2000). *Globalizing cities: A new spatial order?* Blackwell.
30. Mardiansjah, F. H., Handayani, W., & Setyono, J. S. (2018). Pertumbuhan penduduk perkotaan dan perkembangan pola distribusinya pada kawasan metropolitan Surakarta. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(3), 215–233.
31. Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. *Population and Development Review*, 19(3), 431–466. <https://doi.org/10.2307/2938462>
32. McGee, T. G. (1991). The emergence of desakota regions in Asia: Expanding a hypothesis. In N. Ginsburg, B. Koppel, & T. G. McGee (Eds.), *The extended metropolis: Settlement transition in Asia* (pp. 3–25). University of Hawaii Press.
33. Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Free Press.
34. Oliver, P. (2006). *Built to meet needs: Cultural issues in vernacular architecture*. Architectural Press.
35. Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
36. Rapoport, A. (1969). *House form and culture*. Prentice-Hall.
37. Sasongko, I. (2005). Pembentukan struktur ruang permukiman berbasis budaya: Studi kasus Desa Puyung–Lombok Tengah. *DIMENSI: Journal of Architecture and Built Environment*, 33(1), 1–8.
38. Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
39. Soja, E. W. (2010). *Seeking spatial justice*. University of Minnesota Press.
40. Sztompka, P. (1993). *The sociology of social change*. Blackwell.
41. Tacoli, C., McGranahan, G., & Satterthwaite, D. (2015). *Urbanisation, rural–urban migration and urban poverty*. International Institute for Environment and Development.
42. UN-Habitat. (2020). *World cities report 2020: The value of sustainable urbanization*. United Nations Human Settlements Programme.

43. Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 11–17.
44. Zelinsky, W. (1971). The hypothesis of the mobility transition. *Geographical Review*, 61(2), 219–249. <https://doi.org/10.2307/213996>
45. Zukin, S. (2010). *Naked city: The death and life of authentic urban places*. Oxford University Press.

POKOK BAHASAN MINGGU KE-6

Aspek Kekerabatan dan Bermukim: sistem keluarga, kekerabatan, komunitas, territoriality, privasi, pola hunian

1. Pengantar

Bermukim merupakan proses sosial dan budaya, bukan sekadar kegiatan menempati bangunan. Pemilihan lokasi rumah, kedekatan antarrumah, pembagian ruang, orientasi bangunan, dan penggunaan ruang bersama dipengaruhi oleh sistem keluarga, hubungan kekerabatan, organisasi komunitas, serta nilai yang mengatur privasi dan teritorialitas. Bentuk permukiman dengan demikian dapat dibaca sebagai representasi fisik hubungan sosial masyarakat yang menghuninya (Rapoport, 1969; Waterson, 1990).

Dalam perencanaan wilayah dan kota, kekerabatan penting dipelajari karena menjelaskan alasan masyarakat memilih tinggal berdekatan, berbagi halaman, menggunakan fasilitas bersama, dan mempertahankan tanah keluarga. Analisis yang hanya memperhatikan kepadatan, luas kavling, dan jaringan jalan dapat mengabaikan hubungan sosial yang menjadi dasar keberlangsungan suatu permukiman (Altman & Chemers, 1980; Low, 2017).

Hubungan aspek sosial dengan ruang dapat dirumuskan melalui alur: **sistem keluarga → hubungan kekerabatan → pembentukan komunitas → pengaturan teritorialitas → pengendalian privasi → pola rumah dan permukiman.**

Setiap unsur saling memengaruhi dan mengalami perubahan akibat pertumbuhan keluarga, migrasi, modernisasi, peningkatan nilai tanah, dan perubahan mata pencaharian (Rapoport, 1990; Oliver, 2006).

2. Sistem Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial dasar yang terbentuk melalui hubungan perkawinan, keturunan, pengangkatan, atau ikatan sosial lain yang diakui masyarakat. Keluarga menjalankan fungsi reproduksi, pengasuhan, sosialisasi, perlindungan, produksi ekonomi, pewarisan nilai, dan pemberian identitas sosial. Bentuk dan fungsi keluarga memengaruhi kebutuhan ruang, ukuran rumah, pola kepemilikan, serta hubungan rumah dengan lingkungan sekitarnya (Murdock, 1949; Koentjaraningrat, 2009).

a. Keluarga inti

Keluarga inti terdiri atas pasangan dan anak-anak yang belum menikah. Bentuk keluarga ini cenderung membutuhkan unit hunian yang relatif mandiri, meliputi ruang tidur, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, dan ruang penerimaan tamu. Walaupun secara fisik tinggal terpisah, keluarga inti dapat mempertahankan hubungan intensif dengan orang tua dan kerabat melalui kedekatan lokasi atau kegiatan bersama (Murdock, 1949; Fox, 1967).

Pertumbuhan keluarga inti mendorong pembentukan rumah baru dan pemecahan kavling keluarga. Di kawasan perdesaan dan kampung kota, rumah anak yang telah menikah sering dibangun di bagian samping, belakang, atau halaman rumah orang tua. Proses ini dapat menghasilkan kelompok rumah keluarga sekaligus meningkatkan kepadatan secara bertahap (Turner, 1976; Tiple, 2000).

b. Keluarga luas

Keluarga luas terdiri atas beberapa keluarga inti yang terhubung oleh hubungan darah atau perkawinan, seperti orang tua, anak yang telah menikah, cucu, paman, bibi, dan kerabat lain. Keluarga luas dapat tinggal dalam satu rumah besar, beberapa bangunan pada satu pekarangan, atau kelompok rumah yang berdekatan. Kedekatan tersebut memudahkan pembagian pekerjaan, pengasuhan anak, perawatan lansia, dan kegiatan ekonomi rumah tangga (Fox, 1967; Waterson, 1990).

Pola keluarga luas membutuhkan keseimbangan antara kebersamaan dan kemandirian. Ruang komunal seperti halaman, dapur bersama, tempat makan, dan ruang upacara mendukung kebersamaan, sedangkan kamar tidur atau unit rumah terpisah menyediakan privasi bagi setiap keluarga inti. Desain hunian yang tidak menyediakan kedua kebutuhan tersebut dapat menimbulkan konflik dan ketidaknyamanan (Altman, 1975; Rapoport, 1990).

c. Siklus kehidupan keluarga

Kebutuhan ruang keluarga berubah mengikuti siklus kehidupan, mulai dari pasangan baru, kelahiran anak, anak dewasa, perkawinan anak, hingga masa lanjut usia. Rumah dapat diperluas, dibagi, diubah fungsi, atau ditambahkan unit baru sesuai perkembangan keluarga. Oleh karena itu, hunian sebaiknya tidak dipahami sebagai produk yang sepenuhnya selesai, tetapi sebagai struktur yang dapat berkembang secara bertahap (Turner, 1976; Tiple, 2000).

Perencanaan perumahan yang menggunakan satu tipe rumah untuk seluruh keluarga sering tidak mampu merespons variasi ukuran, struktur, pekerjaan, dan siklus kehidupan rumah tangga. Konsep hunian tumbuh, fleksibilitas ruang, dan kemungkinan penambahan unit perlu dipertimbangkan agar rumah dapat menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga tanpa menurunkan kualitas lingkungan (Kendall & Teicher, 2000; Tiple, 2000).

3. Sistem Kekerabatan

Kekerabatan merupakan sistem hubungan sosial yang didasarkan pada keturunan, perkawinan, pengangkatan, atau pengakuan budaya. Sistem ini menentukan identitas seseorang, hak dan kewajiban, pola pewarisan, tempat tinggal setelah perkawinan, serta hubungan dengan kelompok keluarga yang

lebih luas. Kekerabatan bukan hanya hubungan biologis, tetapi juga konstruksi sosial yang diberi makna dan aturan oleh masyarakat (Fox, 1967; Carsten, 2004).

Sistem keturunan dapat berbentuk patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Dalam sistem patrilineal, identitas dan pewarisan terutama mengikuti garis ayah; dalam sistem matrilineal mengikuti garis ibu; sedangkan dalam sistem bilateral hubungan keluarga ayah dan ibu sama-sama diakui. Setiap sistem menghasilkan pola kepemilikan, pewarisan tanah, otoritas keluarga, dan organisasi hunian yang berbeda (Koentjaraningrat, 2009; Fox, 1967).

A. Sistem tempat tinggal setelah perkawinan

Tempat tinggal pasangan setelah menikah mempunyai pengaruh langsung terhadap pola permukiman. Beberapa pola yang umum ditemukan adalah:

Pola bermukim	Pengertian	Implikasi spasial
Patrilokal	Pasangan tinggal dekat keluarga suami	Kelompok hunian berkembang mengikuti garis ayah
Matrilokal	Pasangan tinggal dekat keluarga istri	Rumah dan tanah mengikuti kelompok kerabat ibu
Bilokal	Pasangan dapat tinggal dekat salah satu keluarga	Pola lebih fleksibel sesuai kebutuhan dan sumber daya
Neolokal	Pasangan membentuk hunian baru yang mandiri	Penyebaran rumah dan peningkatan kebutuhan lahan
Avunkulokal	Pasangan tinggal dekat saudara laki-laki ibu	Pengelompokan mengikuti hubungan paman-keponakan
Uxorilokal	Suami tinggal di lingkungan keluarga istri	Penguatan klaster hunian keluarga perempuan

Pilihan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh adat, tetapi juga dipengaruhi ketersediaan lahan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, serta perubahan gaya hidup. Dalam kondisi urbanisasi, pasangan dapat memilih hunian neolokal di dekat tempat kerja, tetapi tetap mempertahankan hubungan sosial dan ekonomi dengan keluarga asal (Fox, 1967; Carsten, 2004).

B. Kekerabatan dan pewarisan ruang

Sistem pewarisan menentukan siapa yang memperoleh rumah, lahan, pekarangan, kebun, atau ruang produksi keluarga. Pewarisan dapat mempertahankan kesinambungan permukiman, tetapi pembagian berulang antargenerasi juga dapat menghasilkan fragmentasi lahan dan peningkatan kepadatan. Kavling yang semula luas dapat berubah menjadi kelompok rumah yang dihubungkan oleh gang sempit dan halaman bersama (Tippie, 2000; Waterson, 1990).

Tanah keluarga sering memiliki nilai yang melampaui nilai ekonomi. Tanah dapat berhubungan dengan leluhur, sejarah keluarga, makam, identitas, dan kewajiban sosial. Penjualan atau pengadaan tanah tersebut tidak hanya berarti perubahan kepemilikan, tetapi juga dapat memutus hubungan genealogis dan simbolis antara keluarga dan tempat (Tuan, 1977; Low, 2017).

C. Kekerabatan dan pola permukiman

Hubungan kekerabatan dapat menghasilkan pola hunian berkelompok atau *kinship-based cluster*. Rumah-rumah kerabat dibangun berdekatan dan berbagi halaman, akses, tempat ibadah, ruang produksi, atau fasilitas domestik. Pola tersebut mendukung kerja sama, keamanan, pengasuhan anak, bantuan ekonomi, dan penyelenggaraan upacara keluarga (Rapoport, 1969; Waterson, 1990).

Pada permukiman tradisional, posisi rumah dapat menunjukkan urutan generasi, status, atau senioritas. Rumah orang tua atau tetua dapat menjadi pusat, sedangkan rumah anak dan keturunannya berkembang di sekelilingnya. Dengan demikian, konfigurasi fisik permukiman dapat dibaca sebagai peta genealogis yang menunjukkan hubungan antarkeluarga (Waterson, 1990; Oliver, 2006).

4. Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki interaksi, identitas, kepentingan, atau keterikatan terhadap wilayah tertentu. Komunitas dapat terbentuk berdasarkan kedekatan tempat tinggal, hubungan kekerabatan, agama, pekerjaan, etnisitas, atau pengalaman bersama. Dalam konteks permukiman, komunitas terbentuk melalui pertemuan sehari-hari, pertukaran bantuan, penggunaan fasilitas bersama, serta keterlibatan dalam kegiatan kolektif (MacQueen et al., 2001; Putnam, 2000).

Komunitas teritorial terbentuk karena para anggotanya tinggal dalam wilayah yang sama, seperti RT, RW, dusun, kampung, atau desa. Komunitas kepentingan terbentuk karena kesamaan aktivitas atau tujuan, seperti kelompok petani, nelayan, pedagang, pengrajin, perempuan, pemuda, dan komunitas pelestari budaya. Kedua jenis komunitas tersebut dapat saling tumpang tindih dan menggunakan ruang yang sama dengan kepentingan berbeda (Soekanto & Sulistyowati, 2017; Low, 2017).

Interaksi komunitas membutuhkan ruang sosial. Teras, halaman bersama, jalan lingkungan, warung, tempat ibadah, balai warga, lapangan, pasar, dan sumber air dapat menjadi tempat bertemu, bertukar informasi, serta membangun kepercayaan. Ruang tersebut berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang mendukung kohesi dan kemampuan masyarakat melakukan tindakan kolektif (Gehl, 2011; Klinenberg, 2018).

Modal sosial yang kuat membantu masyarakat memelihara lingkungan, mengelola sumber daya, menyelenggarakan kegiatan budaya, dan menghadapi bencana. Namun, kohesi internal yang kuat dapat menjadi eksklusif apabila kelompok membatasi akses pendatang atau kelompok minoritas. Perencanaan perlu mendukung ikatan internal sekaligus membangun hubungan lintas kelompok agar komunitas tetap terbuka dan inklusif (Putnam, 2000; Woolcock, 2001).

A. Keterikatan komunitas terhadap tempat

Keterikatan terhadap tempat atau *place attachment* adalah hubungan emosional, kognitif, sosial, dan budaya antara manusia dan lingkungan tertentu. Keterikatan tersebut terbentuk melalui pengalaman hidup, sejarah keluarga,

interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan simbol budaya. Semakin lama masyarakat tinggal dan beraktivitas di suatu tempat, semakin kompleks pula makna yang melekat pada ruang tersebut (Scannell & Gifford, 2010; Tuan, 1977).

Relokasi permukiman dapat menimbulkan kehilangan tempat meskipun masyarakat memperoleh rumah dengan kondisi fisik lebih baik. Kehilangan jaringan tetangga, akses pekerjaan, tempat ibadah, makam leluhur, dan ruang komunal dapat mengganggu kehidupan sosial serta identitas masyarakat. Oleh karena itu, penilaian dampak relokasi harus mencakup kerugian sosial dan budaya, bukan hanya nilai tanah dan bangunan (Cernea, 1997; Scannell & Gifford, 2010).

5. Teritorialitas

Teritorialitas adalah tindakan individu atau kelompok untuk menguasai, menggunakan, menandai, mempertahankan, serta mengatur akses terhadap suatu ruang. Teritorialitas membantu masyarakat menciptakan keteraturan, keamanan, identitas, dan kontrol atas lingkungan. Wilayah teritorial dapat berbentuk rumah, kamar, halaman, jalan lingkungan, ruang komunal, lahan produksi, wilayah adat, atau kawasan sumber daya (Altman, 1975; Sack, 1986).

Teritorialitas berbeda dengan kepemilikan hukum. Suatu ruang dapat dimiliki pemerintah atau pihak lain, tetapi dalam praktik sehari-hari dikuasai dan dirawat oleh komunitas tertentu. Sebaliknya, ruang milik pribadi dapat digunakan bersama berdasarkan kesepakatan sosial. Karena itu, analisis teritorialitas perlu memperhatikan pemilik formal, pengguna aktual, aturan akses, tanda penguasaan, dan legitimasi sosial (Sack, 1986; Low, 2017).

A. Jenis teritorialitas

Altman membedakan teritorialitas menjadi wilayah primer, sekunder, dan publik. Wilayah primer mempunyai kontrol tinggi dan hubungan personal kuat, seperti rumah dan kamar tidur. Wilayah sekunder digunakan secara berkala oleh individu atau kelompok tertentu, seperti teras, tempat duduk tetap, kios, dan ruang kerja. Wilayah publik dapat digunakan masyarakat luas, tetapi tetap mempunyai aturan perilaku dan mekanisme pengawasan (Altman, 1975).

Jenis wilayah	Karakteristik	Contoh dalam permukiman
Primer	Kontrol tinggi dan identitas personal kuat	Rumah, kamar tidur, halaman dalam
Sekunder	Kontrol sedang dan digunakan kelompok tertentu	Teras, halaman bersama, balai warga
Publik	Akses luas dengan aturan sosial tertentu	Jalan, taman, pasar dan lapangan
Sakral/adat	Dikendalikan melalui nilai dan aturan budaya	Makam, hutan adat, tempat ritual
Temporal	Penguasaan muncul pada waktu tertentu	Jalan saat upacara atau pasar mingguan

Batas wilayah dapat dinyatakan secara fisik maupun simbolis. Dinding, pagar, pintu, vegetasi, perbedaan lantai, dan perubahan material merupakan batas fisik. Papan nama, sesajen, aturan adat, orientasi ruang, jarak, serta kebiasaan masyarakat merupakan batas simbolis. Batas simbolis dapat sangat

kuat meskipun tidak terlihat oleh orang luar (Rapoport, 1990; Altman & Chemers, 1980).

Teritorialitas kelompok dapat terlihat pada jalan kampung, gang, pos keamanan, atau ruang komunal yang dirawat masyarakat. Pengawasan informal oleh penghuni menciptakan rasa aman dan rasa memiliki. Namun, penguatan teritorialitas melalui pagar tinggi, gerbang, dan pembatas yang berlebihan dapat memisahkan kelompok sosial serta mengurangi keterhubungan kawasan (Newman, 1972; Low, 2003).

6. Privasi

Privasi adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengatur interaksi dengan orang lain, termasuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana dirinya dapat diakses. Privasi bukan sekadar keadaan menyendiri, tetapi proses dinamis untuk mencapai tingkat interaksi yang diinginkan. Seseorang terkadang membutuhkan keterbukaan dan kebersamaan, tetapi pada waktu lain membutuhkan perlindungan dari gangguan visual, suara, dan sosial (Altman, 1975; de Macedo et al., 2022).

Privasi dipengaruhi budaya, gender, usia, aktivitas, dan hubungan sosial. Ruang yang dianggap privat dalam satu masyarakat dapat dipandang semi-publik dalam masyarakat lain. Teras, halaman, dapur, atau ruang tamu dapat memiliki aturan akses yang berbeda sesuai waktu, kegiatan, serta identitas pengunjung (Rapoport, 1990; Altman & Chemers, 1980).

A. Tingkatan privasi dalam hunian

Hierarki privasi umumnya bergerak dari ruang publik menuju ruang privat: **jalan → halaman atau teras → ruang tamu → ruang keluarga → kamar tidur**. Urutan ini menciptakan proses transisi yang memungkinkan penghuni mengendalikan kedatangan tamu. Jika pintu utama langsung berhadapan dengan ruang keluarga atau kamar tidur, penghuni dapat mengalami gangguan privasi visual dan sosial (Rapoport, 1969; Al-Mohannadi et al., 2022).

Privasi visual dikendalikan melalui orientasi pintu dan jendela, dinding, tirai, vegetasi, serta perbedaan ketinggian. Privasi akustik dipengaruhi material, jarak, ketebalan dinding, dan penempatan ruang. Privasi sosial dikendalikan melalui norma, waktu kunjungan, tata cara menerima tamu, dan pembagian ruang berdasarkan gender atau kedudukan (Hall, 1966; de Macedo et al., 2022).

Kepadatan tidak selalu menyebabkan hilangnya privasi. Permukiman padat dapat tetap menyediakan privasi apabila mempunyai hierarki ruang, batas yang dipahami, orientasi bukaan yang tepat, serta aturan sosial yang efektif. Sebaliknya, lingkungan berkepadatan rendah dapat menghasilkan gangguan privasi ketika susunan rumah dan akses tidak sesuai dengan kebutuhan budaya penghuninya (Rapoport, 1990; Altman, 1975).

B. Privasi keluarga dan kehidupan komunal

Kehidupan komunal dan privasi bukan dua kondisi yang selalu bertentangan. Masyarakat dapat mempertahankan interaksi yang kuat melalui ruang bersama sambil menyediakan batas bagi setiap rumah tangga. Halaman

komunal, misalnya, dapat digunakan bersama pada siang hari, tetapi akses menuju ruang domestik tetap dikendalikan oleh masing-masing keluarga (Baharuddin et al., 2023; Waterson, 1990).

Perencanaan perumahan perlu menyediakan gradasi ruang publik, semi-publik, semi-privat, dan privat. Gradasi tersebut dapat diwujudkan melalui teras, selasar, halaman depan, gang kecil, pagar rendah, dan perubahan elevasi. Ruang transisi membantu mempertemukan kebutuhan interaksi sosial dengan kebutuhan perlindungan diri (Gehl, 2011; Rapoport, 1990).

7. Pola Hunian

Pola hunian adalah susunan rumah, kavling, akses, ruang terbuka, fasilitas bersama, dan unsur lingkungan yang terbentuk melalui kehidupan masyarakat. Pola tersebut dipengaruhi sistem kekerabatan, aturan pewarisan, mata pencaharian, topografi, kepercayaan, keamanan, serta perkembangan jumlah anggota keluarga (Rapoport, 1969; Oliver, 2006).

a. Hunian berkelompok berdasarkan kekerabatan

Dalam pola ini, rumah anggota keluarga dibangun saling berdekatan dan membentuk satu klaster. Rumah orang tua atau leluhur sering menjadi pusat, sedangkan rumah anak berkembang di sekelilingnya. Halaman, akses, tempat penyimpanan, fasilitas domestik, dan ruang ritual dapat digunakan bersama (Waterson, 1990; Fox, 1967).

b. Hunian dalam satu pekarangan

Beberapa keluarga inti dapat tinggal dalam bangunan berbeda pada satu pekarangan. Pola ini memberikan dukungan sosial sekaligus memungkinkan tingkat kemandirian tertentu. Namun, pertumbuhan tanpa pengaturan dapat mengurangi pencahayaan, ventilasi, ruang terbuka, akses darurat, dan kualitas sanitasi (Tippie, 2000; Turner, 1976).

c. Rumah komunal

Rumah komunal menampung beberapa keluarga atau unit kekerabatan dalam satu struktur besar. Pembagian ruang diatur berdasarkan status, gender, generasi, serta fungsi sosial dan ritual. Rumah panjang di beberapa masyarakat Indonesia merupakan contoh bagaimana bangunan sekaligus menjadi tempat tinggal, ruang interaksi, pusat identitas, dan mekanisme pengorganisasian komunitas (Waterson, 1990; Oliver, 2006).

d. Hunian linier

Pola linier berkembang mengikuti jalan, sungai, garis pantai, atau jalur produksi. Hubungan kekerabatan dapat membentuk kelompok-kelompok rumah di sepanjang jalur tersebut. Pola ini memberikan akses langsung terhadap jaringan pergerakan atau sumber penghidupan, tetapi perlu dikendalikan agar tidak menciptakan hambatan akses dan risiko keselamatan (Kostof, 1991; Doxiadis, 1968).

e. Hunian menyebar

Pola menyebar biasanya ditemukan pada masyarakat yang pekerjaannya membutuhkan kedekatan dengan lahan pertanian, kebun, atau peternakan. Rumah tangga dapat tinggal berjauhan secara fisik, tetapi tetap terhubung melalui jaringan kekerabatan, kegiatan ritual, dan institusi komunitas. Jarak

geografis tidak selalu menunjukkan lemahnya hubungan sosial (Doxiadis, 1968; Carsten, 2004).

8. Contoh Indonesia

a. Permukiman Sasak

Struktur ruang permukiman Sasak di Desa Puyung, Lombok Tengah, menunjukkan hubungan antara rumah, keluarga, tokoh masyarakat, masjid, langgar, dan makam. Ritual kelahiran, perkawinan, dan keagamaan membentuk pusat serta orientasi ruang yang bersifat permanen maupun temporal. Kasus ini menunjukkan bahwa struktur kekerabatan dan kegiatan budaya tidak selalu dapat diketahui hanya dari pola fisik bangunan (Sasongko, 2005).

b. Rumah tradisional Osing

Rumah tradisional Osing memperlihatkan urutan ruang *bale*, *jrumah*, dan *pawon*. Urutan tersebut membentuk gradasi dari ruang penerimaan menuju ruang keluarga dan pelayanan. Organisasi ruang mencerminkan hubungan antara kegiatan domestik, aturan menerima tamu, serta kebutuhan privasi keluarga (Suprijanto, 2002).

c. Rumah dan permukiman Asia Tenggara

Rumah tradisional Asia Tenggara umumnya tidak hanya dihuni sebagai unit individual, tetapi menjadi bagian dari jaringan kekerabatan, leluhur, dan komunitas. Bentuk rumah, orientasi, tiang utama, tempat penyimpanan pusaka, serta ruang upacara dapat memiliki makna genealogis dan kosmologis. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus simbol kesinambungan kelompok keluarga (Waterson, 1990).

9. Sintesis Hubungan Kekerabatan dan Ruang

Aspek sosial-budaya	Pengaruh terhadap hunian	Data yang perlu dikaji
Struktur keluarga	Ukuran dan pembagian ruang rumah	Jumlah anggota, usia, gender dan siklus keluarga
Sistem keturunan	Hak tanah dan pola pewarisan	Patrilineal, matrilineal atau bilateral
Tempat tinggal pascaperkawinan	Arah pertumbuhan kelompok rumah	Patrilokal, matrilokal atau neolokal
Komunitas	Kebutuhan ruang bersama	Jaringan sosial, organisasi dan aktivitas kolektif
Teritorialitas	Batas, akses dan kontrol ruang	Pemilik formal, pengguna dan aturan lokal
Privasi	Hierarki dan transisi ruang	Akses tamu, gender, visual dan akustik
Mata pencaharian	Hubungan rumah dengan ruang produksi	Lokasi kerja, penyimpanan dan jalur produksi
Pewarisan	Fragmentasi atau konsolidasi lahan	Sistem pembagian tanah antargenerasi
Transformasi	Perubahan bentuk dan fungsi rumah	Penambahan ruang, kepadatan dan komersialisasi

Hubungan antaraspek tersebut tidak bersifat satu arah. Kekerabatan membentuk pola hunian, tetapi perubahan bentuk hunian juga dapat mengubah hubungan keluarga. Kepindahan ke rumah susun, misalnya, dapat memisahkan keluarga luas, mengurangi ruang berkumpul, atau mengubah pola pengawasan anak.

Sebaliknya, desain yang menyediakan unit berdekatan dan ruang komunal dapat membantu mempertahankan jaringan keluarga (Altman & Chemers, 1980; Low, 2017).

10. Implikasi bagi Perencanaan Ruang Kultural

Perencanaan perlu mengidentifikasi unit sosial yang menjadi dasar permukiman. Unit tersebut tidak selalu sama dengan satu rumah tangga administratif, karena beberapa rumah tangga dapat membentuk satu keluarga luas dan berbagi sumber daya. Pendataan perlu mencakup hubungan kekerabatan, pola pewarisan, tempat tinggal setelah perkawinan, penggunaan ruang bersama, dan kemungkinan pertumbuhan keluarga (Rapoport, 1990; Waterson, 1990).

Penataan kembali atau relokasi sebaiknya mempertahankan kedekatan kelompok keluarga dan jaringan tetangga. Pemindahan berdasarkan nomor rumah secara individual dapat memecah komunitas yang sebelumnya saling membantu. Metode *community mapping* dan pemetaan genealogis dapat digunakan untuk menentukan pengelompokan unit hunian dalam rencana baru (Sanoff, 2000; Cernea, 1997).

Desain lingkungan perlu menyediakan hierarki ruang yang jelas tetapi tidak kaku. Jalan dan ruang publik harus terhubung dengan ruang semi-publik seperti teras, halaman depan, atau selasar sebelum mencapai ruang privat. Hierarki tersebut membantu menciptakan pengawasan alami, interaksi sosial, rasa aman, serta pengendalian privasi (Newman, 1972; Gehl, 2011).

Pola hunian juga harus menyediakan ruang untuk pertumbuhan dan perubahan. Kavling, struktur bangunan, dan jaringan utilitas perlu dirancang agar dapat menerima penambahan ruang secara aman. Fleksibilitas tersebut penting bagi masyarakat yang membangun rumah secara bertahap dan mengembangkan unit baru ketika anak menikah atau kegiatan ekonomi rumah tangga bertambah (Turner, 1976; Kendall & Teicher, 2000).

Perencana perlu membedakan antara teritorialitas positif dan eksklusivitas. Teritorialitas positif menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap lingkungan. Sebaliknya, teritorialitas yang terlalu tertutup dapat menghasilkan segregasi, pembatasan akses, dan konflik antarkelompok. Rencana kawasan harus mendukung identitas lokal sekaligus menjaga konektivitas serta akses publik (Newman, 1972; Low, 2003).

11. Kerangka Analisis untuk Mahasiswa

Mahasiswa dapat memilih satu kampung kota, desa adat, permukiman nelayan, permukiman petani, atau perumahan formal. Pengumpulan data dilakukan melalui pemetaan rumah, wawancara keluarga, penyusunan diagram kekerabatan, pengamatan aktivitas, identifikasi batas teritorial, dan pemetaan tingkat privasi. Hasilnya dapat disajikan dalam bentuk peta klaster keluarga, diagram publik–privat, peta akses, dan linimasa perkembangan hunian (Sanoff, 2000; Rapoport, 1990).

Pertanyaan analisis yang digunakan meliputi: siapa yang tinggal bersama; bagaimana hubungan antarpenghuni; siapa yang mewarisi rumah dan tanah; ruang apa yang digunakan bersama; bagaimana batas ditandai; siapa

yang boleh memasuki suatu ruang; bagaimana privasi dipertahankan; serta bagaimana rumah berkembang ketika keluarga bertambah. Jawaban atas pertanyaan tersebut membantu mahasiswa memahami hubungan antara organisasi sosial dan bentuk permukiman (Altman, 1975; Carsten, 2004).

Rekomendasi perencanaan dapat dikelompokkan menjadi unsur yang harus dilindungi, diperbaiki, diadaptasi, dan dikembangkan. Pola kekerabatan, ruang komunal, situs leluhur, serta akses penghidupan dapat dilindungi; sanitasi dan akses darurat diperbaiki; bentuk hunian diadaptasi terhadap kebutuhan baru; sedangkan ruang usaha dan fasilitas komunitas dapat dikembangkan (Oliver, 2006; UNESCO, 2011).

12. Kesimpulan

Sistem keluarga dan kekerabatan mempunyai pengaruh kuat terhadap lokasi rumah, pengelompokan bangunan, pewarisan tanah, penggunaan ruang bersama, dan pertumbuhan permukiman. Hubungan tersebut membentuk komunitas yang memerlukan ruang untuk interaksi sekaligus mekanisme untuk mempertahankan teritorialitas dan privasi. Pola hunian pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hubungan keluarga dan aturan sosial masyarakat (Rapoport, 1969; Waterson, 1990).

Perencanaan ruang kultural perlu menjaga keseimbangan antara kebersamaan dan kemandirian, keterbukaan dan privasi, serta identitas teritorial dan akses publik. Rencana yang peka terhadap kekerabatan tidak hanya menghasilkan tata ruang yang berfungsi secara teknis, tetapi juga mendukung jaringan pertolongan, keberlanjutan keluarga, identitas komunitas, dan rasa memiliki terhadap tempat (Altman & Chemers, 1980; Low, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Mohannadi, A. S., Furlan, R., & Major, M. D. (2022). The syntax of the Qatari traditional house: Privacy, gender segregation and hospitality. *Journal of Architecture and Urbanism*, 46(1), 1–15.
2. Altman, I. (1975). *The environment and social behavior: Privacy, personal space, territory, and crowding*. Brooks/Cole.
3. Altman, I., & Chemers, M. M. (1980). *Culture and environment*. Brooks/Cole.
4. Baharuddin, F., Said, R., & Majid, N. H. A. (2023). Forming communal spaces in vernacular settlements: Family and territorial privacy. *ISVS e-Journal*, 10(7), 242–256.
5. Carsten, J. (2004). *After kinship*. Cambridge University Press.
6. Cernea, M. M. (1997). The risks and reconstruction model for resettling displaced populations. *World Development*, 25(10), 1569–1587. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)00054-5](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00054-5)
7. de Macedo, P. F., Ornstein, S. W., & Elali, G. A. (2022). Privacy and housing: Research perspectives based on a systematic literature review. *Buildings*, 12(12), 2020. <https://doi.org/10.3390/buildings12122020>
8. Doxiadis, C. A. (1968). *Ekistics: An introduction to the science of human settlements*. Oxford University Press.

9. Fox, R. (1967). *Kinship and marriage: An anthropological perspective*. Penguin Books.
10. Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
11. Hall, E. T. (1966). *The hidden dimension*. Doubleday.
12. Kendall, S., & Teicher, J. (2000). *Residential open building*. E & FN Spon.
13. Klinenberg, E. (2018). *Palaces for the people: How social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life*. Crown.
14. Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
15. Kostof, S. (1991). *The city shaped: Urban patterns and meanings through history*. Thames & Hudson.
16. Low, S. M. (2003). *Behind the gates: Life, security, and the pursuit of happiness in fortress America*. Routledge.
17. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
18. MacQueen, K. M., McLellan, E., Metzger, D. S., Kegeles, S., Strauss, R. P., Scotti, R., Blanchard, L., & Trotter, R. T. (2001). What is community? An evidence-based definition for participatory public health. *American Journal of Public Health*, 91(12), 1929–1938.
<https://doi.org/10.2105/AJPH.91.12.1929>
19. Murdock, G. P. (1949). *Social structure*. Macmillan.
20. Newman, O. (1972). *Defensible space: Crime prevention through urban design*. Macmillan.
21. Oliver, P. (2006). *Built to meet needs: Cultural issues in vernacular architecture*. Architectural Press.
22. Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
23. Rapoport, A. (1969). *House form and culture*. Prentice-Hall.
24. Rapoport, A. (1990). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach*. University of Arizona Press.
25. Sack, R. D. (1986). *Human territoriality: Its theory and history*. Cambridge University Press.
26. Sanoff, H. (2000). *Community participation methods in design and planning*. John Wiley & Sons.
27. Sasongko, I. (2005). Pembentukan struktur ruang permukiman berbasis budaya: Studi kasus Desa Puyung–Lombok Tengah. *DIMENSI: Journal of Architecture and Built Environment*, 33(1), 1–8.
28. Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. *Journal of Environmental Psychology*, 30(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.006>
29. Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
30. Suprijanto, I. (2002). Rumah tradisional Osing: Konsep ruang dan bentuk. *DIMENSI: Journal of Architecture and Built Environment*, 30(1), 10–20.
31. Tiple, A. G. (2000). *Extending themselves: User-initiated transformations of government-built housing in developing countries*. Liverpool University Press.

32. Tuan, Y.-F. (1977). *Space and place: The perspective of experience*. University of Minnesota Press.
33. Turner, J. F. C. (1976). *Housing by people: Towards autonomy in building environments*. Marion Boyars.
34. UNESCO. (2011). *Recommendation on the historic urban landscape*. UNESCO.
35. Waterson, R. (1990). *The living house: An anthropology of architecture in South-East Asia*. Oxford University Press.
36. Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 11–17.

POKOK BAHASAN MINGGU KE-7

Aspek Statistik Sosial dalam Permukiman: penduduk, struktur umur, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, sosial ekonomi dan interpretasi spasial

1. Pengantar

Statistik sosial dalam permukiman merupakan data kuantitatif yang menggambarkan karakteristik penduduk dan kondisi kehidupan masyarakat pada suatu wilayah. Data tersebut mencakup jumlah dan pertumbuhan penduduk, struktur umur, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, kemiskinan, kepemilikan rumah, serta akses terhadap pelayanan dasar. Dalam perencanaan wilayah dan kota, statistik sosial digunakan untuk mengenali kebutuhan penduduk, ketimpangan antarkawasan, kelompok rentan, serta hubungan antara kondisi masyarakat dan karakter ruang permukiman (Weeks, 2020; United Nations, 2017).

Statistik sosial tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan berapa banyak penduduk yang tinggal di suatu wilayah, tetapi juga menjelaskan siapa mereka, bagaimana kondisi kehidupannya, kegiatan apa yang dilakukan, dan pelayanan apa yang dibutuhkan. Dua kawasan dengan jumlah penduduk sama dapat memerlukan kebijakan berbeda karena mempunyai struktur umur, ukuran rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, serta latar belakang budaya yang berbeda (Rowland, 2003; Badan Pusat Statistik, 2023).

Dalam perencanaan ruang kultural, data statistik perlu dipadukan dengan informasi kualitatif mengenai nilai, identitas, pola kekerabatan, aktivitas, dan pemaknaan tempat. Angka dapat menunjukkan bahwa suatu kawasan berkepadatan tinggi, tetapi tidak langsung menjelaskan apakah kepadatan tersebut diterima masyarakat, bagaimana ruang digunakan, dan apa hubungan sosial yang berlangsung di dalamnya. Oleh sebab itu, statistik sosial harus dipahami sebagai salah satu lapisan informasi dalam pembacaan permukiman (Rapoport, 1990; Low, 2017).

2. Penduduk sebagai Dasar Analisis Permukiman

Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau biasanya tinggal pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Data penduduk menjadi dasar untuk

menghitung kebutuhan perumahan, air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, ruang terbuka, dan fasilitas sosial. Analisis penduduk meliputi jumlah, distribusi, kepadatan, pertumbuhan, komposisi, mobilitas, serta proyeksi pada masa mendatang (United Nations, 2017; Weeks, 2020).

Jumlah penduduk menunjukkan besarnya populasi, sedangkan distribusi penduduk menunjukkan persebarannya. Jumlah penduduk yang besar belum tentu menimbulkan masalah apabila tersebar secara seimbang dan didukung infrastruktur memadai. Sebaliknya, konsentrasi penduduk pada lahan terbatas dapat meningkatkan tekanan terhadap ruang, pelayanan, kualitas lingkungan, dan aksesibilitas (Rowland, 2003; UN-Habitat, 2020).

a. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Secara sederhana, perubahan jumlah penduduk dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$P_t = P_0 + (B - D) + (I - O)$$

Keterangan:

- P_t = jumlah penduduk pada akhir periode;
- P_0 = jumlah penduduk pada awal periode;
- B = jumlah kelahiran;
- D = jumlah kematian;
- I = migrasi masuk;
- O = migrasi keluar.

Pertumbuhan penduduk alami berasal dari selisih kelahiran dan kematian, sedangkan pertumbuhan total juga memperhitungkan migrasi. Dalam kawasan perkotaan dan peri-urban, migrasi serta perubahan status desa menjadi perkotaan sering berperan besar dalam peningkatan jumlah penduduk. Pemahaman terhadap komponen pertumbuhan diperlukan agar kebijakan tidak hanya merespons besarnya pertambahan, tetapi juga faktor penyebabnya (Lee, 1966; Mardiansjah et al., 2018).

b. Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan geometrik dapat dihitung dengan rumus:

$$r = \left[\left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \times 100\%$$

Keterangan:

- r = laju pertumbuhan penduduk per tahun;
- P_t = penduduk pada tahun akhir;
- P_0 = penduduk pada tahun awal;
- n = selisih tahun pengamatan.

Laju pertumbuhan perlu dibandingkan antarkelurahan atau antardesa untuk mengenali wilayah yang tumbuh cepat, stagnan, atau kehilangan penduduk. Pertumbuhan tinggi dapat menandakan daya tarik pekerjaan dan

perumahan, tetapi juga dapat mengindikasikan tekanan terhadap lahan dan infrastruktur. Pertumbuhan negatif dapat menunjukkan migrasi keluar, penurunan kegiatan ekonomi, atau perubahan fungsi kawasan dari hunian menjadi komersial (Weeks, 2020; Firman, 2009).

c. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah:

$$K_p = \frac{P}{L}$$

Keterangan:

- K_p = kepadatan penduduk;
- P = jumlah penduduk;
- L = luas wilayah.

Kepadatan bruto menggunakan seluruh luas wilayah, sedangkan kepadatan netto menggunakan luas lahan permukiman atau lahan hunian. Perencana harus menyebutkan jenis kepadatan yang digunakan karena hasilnya dapat berbeda jauh. Kawasan yang memiliki hutan, sawah, perairan, atau fasilitas skala besar dapat terlihat berkepadatan rendah secara bruto, walaupun kawasan huniannya sangat padat (UN-Habitat, 2020; Bertaud, 2018).

Kepadatan tidak boleh langsung disamakan dengan kekumuhan. Kepadatan tinggi dapat mendukung efisiensi transportasi umum, kedekatan pelayanan, dan kehidupan sosial apabila dirancang dengan baik. Kekumuhan lebih berkaitan dengan kekurangan ruang, buruknya kualitas bangunan, status lahan tidak pasti, serta keterbatasan air bersih, sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah (UN-Habitat, 2020; Angel et al., 2021).

3. Struktur Umur Penduduk

Struktur umur adalah komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia. Pengelompokan yang umum digunakan adalah usia belum produktif 0–14 tahun, usia produktif 15–64 tahun, dan usia lanjut 65 tahun ke atas. Struktur umur membantu perencana memahami kebutuhan pelayanan dan potensi sumber daya manusia di suatu wilayah (Weeks, 2020; Badan Pusat Statistik, 2023).

Kawasan dengan proporsi anak tinggi memerlukan fasilitas pendidikan, ruang bermain, layanan kesehatan ibu dan anak, serta lingkungan jalan yang aman. Kawasan dengan penduduk usia produktif tinggi membutuhkan lapangan kerja, transportasi, perumahan terjangkau, dan fasilitas pengembangan keterampilan. Kawasan dengan penduduk lanjut usia tinggi membutuhkan pelayanan kesehatan, aksesibilitas universal, ruang publik yang nyaman, dan dukungan sosial berbasis lingkungan (Rowland, 2003; WHO, 2007).

a. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan beban relatif penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif:

$$RK = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$$

Nilai rasio ketergantungan 45 berarti setiap 100 penduduk usia produktif secara demografis menanggung sekitar 45 penduduk usia belum produktif dan lanjut usia. Namun, indikator ini harus ditafsirkan hati-hati karena tidak semua penduduk usia produktif bekerja dan sebagian penduduk berusia lanjut masih aktif secara ekonomi (Weeks, 2020; Rowland, 2003).

b. Piramida penduduk

Piramida penduduk menggambarkan jumlah atau persentase penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Bentuk ekspansif menunjukkan dominasi usia muda dan pertumbuhan relatif tinggi; bentuk stasioner menunjukkan komposisi lebih seimbang; sedangkan bentuk konstrikatif menunjukkan kelahiran rendah dan kecenderungan penuaan penduduk. Piramida penduduk membantu perencanaan memperkirakan perubahan kebutuhan fasilitas dalam jangka menengah dan panjang (Weeks, 2020; United Nations, 2017).

Analisis umur perlu dilakukan pada skala permukiman karena komposisi penduduk dapat berbeda antarkawasan. Kawasan perumahan baru mungkin didominasi keluarga muda, kampung lama dapat memiliki lebih banyak penduduk lanjut usia, sedangkan kawasan pendidikan atau industri dapat memiliki konsentrasi penduduk usia produktif dan pendatang. Variasi tersebut menghasilkan pola kebutuhan ruang yang berbeda (Rowland, 2003; Low, 2017).

4. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan biasanya tinggal bersama serta mengelola kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga berbeda dari keluarga karena anggota rumah tangga tidak selalu mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Rumah kontrakan bersama, asrama pekerja, atau sekelompok mahasiswa dapat membentuk rumah tangga nonkeluarga (United Nations, 2017; Badan Pusat Statistik, 2023).

Jumlah rumah tangga merupakan dasar yang lebih tepat daripada jumlah penduduk untuk memperkirakan kebutuhan unit hunian. Pertumbuhan jumlah rumah tangga dapat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk apabila ukuran rumah tangga mengecil akibat peningkatan keluarga inti, perceraian, migrasi, atau bertambahnya penduduk yang tinggal sendiri (Buzar et al., 2005; United Nations, 2017).

a. Ukuran rata-rata rumah tangga

$$URT = \frac{\text{Jumlah penduduk dalam rumah tangga}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$$

Ukuran rumah tangga memengaruhi kebutuhan luas dan konfigurasi hunian. Rumah tangga besar memerlukan lebih banyak ruang tidur dan ruang domestik, sedangkan rumah tangga kecil membutuhkan unit yang lebih kompak. Namun, standar ruang tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah anggota karena perlu mempertimbangkan usia, gender, hubungan keluarga, aktivitas produktif, dan kebutuhan privasi (Rapoport, 1990; Tipple, 2000).

b. Kepala rumah tangga dan kelompok rentan

Data rumah tangga perlu dianalisis berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga, keberadaan anak, lansia, penyandang disabilitas, dan anggota yang bekerja. Rumah tangga dengan satu pencari nafkah, kepala rumah tangga perempuan, atau anggota bergantung yang banyak dapat mempunyai tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap kenaikan biaya perumahan, kehilangan pekerjaan, dan bencana (Chant, 2008; UN-Habitat, 2020).

c. Hunian bersama dan kepadatan penghuni

Kepadatan hunian dapat diukur menggunakan jumlah orang per rumah, orang per kamar tidur, atau luas lantai per kapita. Indikator ini lebih tepat untuk menilai kepadatan internal daripada kepadatan penduduk per hektare. Kepadatan penghuni yang berlebihan dapat berkaitan dengan kurangnya privasi, risiko kesehatan, gangguan belajar, dan konflik domestik (Evans, 2003; WHO, 2018).

5. Pekerjaan dan Mata Pencaharian

Data pekerjaan menunjukkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, status bekerja, jenis pekerjaan, lapangan usaha, serta posisi dalam pekerjaan. Indikator ketenagakerjaan membantu perencana mengidentifikasi basis ekonomi lokal, tingkat ketergantungan terhadap sektor tertentu, serta hubungan antara tempat tinggal dan tempat kerja (International Labour Organization, 2013; Badan Pusat Statistik, 2023).

Penduduk usia kerja dapat dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja serta penganggur yang aktif mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja mencakup pelajar, pengurus rumah tangga, pensiunan, dan penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan (International Labour Organization, 2013; Badan Pusat Statistik, 2023).

b. Tingkat partisipasi angkatan kerja

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan kerja}}{\text{Penduduk usia kerja}} \times 100\%$$

TPAK menunjukkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja. Analisis sebaiknya dipisahkan menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan karena angka agregat dapat menyembunyikan rendahnya partisipasi

perempuan, pemuda, atau kelompok tertentu (International Labour Organization, 2013; Klasen, 2019).

c. Tingkat pengangguran terbuka

$$TPT = \frac{\text{Jumlah penganggur}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$$

TPT perlu ditafsirkan bersama kualitas pekerjaan. Kawasan dengan pengangguran rendah belum tentu mempunyai kondisi ekonomi baik apabila sebagian besar penduduk bekerja pada sektor informal dengan pendapatan rendah, jam kerja tidak menentu, dan tanpa perlindungan sosial. Oleh sebab itu, analisis perlu mencakup pekerjaan formal–informal, status pekerjaan, jam kerja, dan pendapatan (International Labour Organization, 2013; Chen, 2012).

c. Hubungan pekerjaan dan ruang

Jenis pekerjaan memengaruhi pola ruang permukiman. Petani membutuhkan akses terhadap lahan dan irigasi; nelayan membutuhkan akses ke pantai dan tempat tambat; pedagang membutuhkan kedekatan dengan pasar; pekerja industri membutuhkan hubungan transportasi dengan kawasan kerja; sedangkan pekerja rumahan memerlukan ruang produksi di dalam atau dekat rumah (Scoones, 1998; Rapoport, 1990).

Perubahan pekerjaan dapat mengubah fungsi rumah dan kawasan. Rumah dapat berkembang menjadi warung, bengkel, tempat produksi, kos, atau kantor. Apabila perubahan tersebut tidak diakomodasi dalam perencanaan, dapat muncul konflik penggunaan ruang, gangguan lalu lintas, dan penurunan kualitas lingkungan. Namun, pemisahan fungsi yang terlalu kaku juga dapat menghambat ekonomi rumah tangga dan kehidupan kampung (Tippel, 2000; Jacobs, 1961).

6. Pendidikan

Statistik pendidikan mencakup kemampuan membaca dan menulis, partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang sedang ditempuh, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, serta rata-rata lama sekolah. Pendidikan berkaitan dengan peluang kerja, pendapatan, kesehatan, partisipasi sosial, dan kemampuan masyarakat mengakses informasi serta terlibat dalam proses perencanaan (Sen, 1999; UNESCO, 2021).

Angka partisipasi sekolah menunjukkan proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang masih bersekolah. Angka partisipasi murni membandingkan peserta didik pada jenjang yang sesuai dengan kelompok umur resmi, sedangkan angka partisipasi kasar dapat mencakup siswa yang lebih muda atau lebih tua. Perbedaan kedua indikator dapat membantu mengidentifikasi keterlambatan masuk sekolah, pengulangan kelas, atau kesenjangan akses pendidikan (UNESCO Institute for Statistics, 2018; Badan Pusat Statistik, 2023).

Tingkat pendidikan suatu kawasan perlu dihubungkan dengan ketersediaan sekolah, jarak, transportasi, kondisi ekonomi rumah tangga, gender, disabilitas, dan norma sosial. Rendahnya partisipasi sekolah tidak selalu disebabkan kekurangan fasilitas; penyebabnya dapat berupa biaya, kebutuhan

bekerja, pernikahan dini, keamanan perjalanan, atau ketidaksesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat (UNESCO, 2021; Sen, 1999).

A. Pendidikan dan interpretasi spasial

Pemetaan pendidikan dapat menunjukkan kawasan dengan konsentrasi penduduk berpendidikan rendah, angka putus sekolah tinggi, atau akses sekolah terbatas. Peta tersebut perlu ditumpangtindihkan dengan jaringan jalan, waktu tempuh, transportasi, kepadatan anak usia sekolah, dan kondisi sosial ekonomi agar rekomendasi tidak berhenti pada pembangunan gedung sekolah semata (UNESCO, 2021; Páez et al., 2012).

7. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi menggambarkan kemampuan individu atau rumah tangga memenuhi kebutuhan dan mengakses sumber daya. Indikatornya dapat mencakup pendapatan, pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, kepemilikan aset, kondisi rumah, akses pelayanan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Karena kesejahteraan mempunyai banyak dimensi, satu indikator tidak cukup untuk menggambarkan seluruh kondisi masyarakat (Sen, 1999; Alkire & Foster, 2011).

Pendapatan menunjukkan aliran sumber daya ekonomi yang diterima rumah tangga, sedangkan pengeluaran menggambarkan penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Dalam survei rumah tangga, pengeluaran sering digunakan sebagai pendekatan kesejahteraan karena lebih stabil dan relatif lebih mudah diingat dibandingkan pendapatan, terutama pada pekerja informal dan rumah tangga dengan pendapatan tidak tetap (Deaton, 1997; Badan Pusat Statistik, 2023).

Kemiskinan moneter umumnya diukur melalui ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Namun, rumah tangga yang berada di atas garis kemiskinan masih dapat mengalami kekurangan air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, keamanan tenurial, atau kualitas hunian. Pendekatan kemiskinan multidimensi digunakan untuk membaca berbagai kekurangan tersebut secara bersamaan (Alkire & Foster, 2011; Sen, 1999).

a. Indikator sosial ekonomi permukiman

Dimensi	Contoh indikator	Implikasi perencanaan
Demografi	Jumlah, pertumbuhan, kepadatan	Kebutuhan lahan dan pelayanan
Umur	Anak, usia produktif, lansia	Sekolah, pekerjaan dan layanan lansia
Rumah tangga	Ukuran, komposisi, kepala rumah tangga	Tipe hunian dan dukungan sosial
Pekerjaan	TPAK, TPT, formal–informal	Ruang kerja dan akses transportasi
Pendidikan	Partisipasi dan pendidikan tertinggi	Lokasi serta kapasitas fasilitas
Ekonomi	Pendapatan dan pengeluaran	Perumahan terjangkau dan bantuan
Perumahan	Kepemilikan, kualitas, kepadatan penghuni	Peningkatan kualitas permukiman
Infrastruktur	Air, sanitasi, listrik dan internet	Prioritas investasi pelayanan
Kerentanan	Disabilitas, lansia dan kemiskinan	Desain inklusif dan perlindungan sosial

b. Indeks komposit

Beberapa indikator dapat digabungkan menjadi indeks komposit, seperti indeks kerentanan sosial atau indeks kesejahteraan permukiman. Sebelum

digabungkan, setiap indikator perlu dinormalisasi karena menggunakan satuan berbeda. Pembobotan harus mempunyai dasar teoritis, empiris, atau kesepakatan pemangku kepentingan dan tidak ditetapkan secara sembarangan (OECD, 2008; Nardo et al., 2008).

Indeks komposit memudahkan perbandingan wilayah, tetapi dapat menyembunyikan variasi internal. Dua wilayah dapat memperoleh skor sama meskipun masalah utamanya berbeda: wilayah pertama mungkin menghadapi pengangguran, sedangkan wilayah kedua mengalami kekurangan sanitasi. Oleh karena itu, nilai indeks harus selalu dibaca bersama indikator pembentuknya (OECD, 2008; Alkire & Foster, 2011).

8. Sumber Data Statistik Sosial

Data primer dikumpulkan langsung melalui sensus lokal, survei rumah tangga, wawancara, observasi, pemetaan partisipatif, dan pencatatan fasilitas. Data primer memungkinkan variabel disesuaikan dengan kebutuhan studi, tetapi memerlukan biaya, waktu, instrumen yang valid, dan prosedur pengambilan sampel yang baik (Creswell & Creswell, 2018; Groves et al., 2009).

Data sekunder berasal dari Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Potensi Desa, registrasi penduduk, profil desa dan kelurahan, data sektoral, serta dokumen rencana. Setiap sumber mempunyai unit analisis, cakupan, waktu, metode, dan tingkat ketelitian berbeda sehingga tidak dapat digabungkan tanpa pemeriksaan metadata (Badan Pusat Statistik, 2023; United Nations, 2017).

Sensus mencakup seluruh penduduk dan dapat menyediakan informasi untuk wilayah kecil, tetapi dilaksanakan dalam interval relatif panjang. Survei menyediakan variabel lebih rinci dan lebih sering, tetapi estimasinya mungkin hanya representatif pada tingkat wilayah tertentu. Data administratif dapat diperbarui secara rutin, tetapi kualitasnya bergantung pada kelengkapan pencatatan dan konsistensi definisi (Groves et al., 2009; United Nations, 2017).

9. Interpretasi Spasial Statistik Sosial

Interpretasi spasial adalah proses menghubungkan statistik sosial dengan lokasi geografis untuk memahami pola persebaran, konsentrasi, ketimpangan, hubungan, dan perubahan antarruang. Dalam Sistem Informasi Geografis, data sosial dihubungkan dengan unit spasial seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, blok sensus, atau lingkungan permukiman (Longley et al., 2015; Fotheringham et al., 2000).

Peta jumlah penduduk dan peta persentase memberikan informasi berbeda. Jumlah menunjukkan besarnya populasi atau beban pelayanan, sedangkan persentase menunjukkan komposisi relatif. Sebuah kelurahan dapat memiliki jumlah lansia besar tetapi persentasenya rendah karena jumlah penduduk totalnya sangat besar. Karena itu, pemilihan indikator harus disesuaikan dengan pertanyaan perencanaan (Dent et al., 2009; Longley et al., 2015).

a. Peta koroplek

Peta koroplek menggunakan perbedaan warna atau gradasi untuk menunjukkan nilai pada wilayah administratif. Jenis peta ini sesuai untuk rasio, persentase, dan kepadatan, tetapi kurang tepat untuk jumlah absolut karena luas wilayah dapat mendominasi persepsi visual. Jumlah penduduk lebih baik dipetakan dengan simbol proporsional atau metode dasimetrik (Dent et al., 2009; Mennis, 2009).

Klasifikasi nilai—seperti interval sama, kuantil, dan *natural breaks*—dapat menghasilkan tampilan pola yang berbeda. Karena itu, metode klasifikasi, jumlah kelas, tahun data, satuan, dan sumber harus dicantumkan. Peta sosial tidak boleh dirancang hanya agar tampak menarik karena pilihan kartografis dapat memengaruhi kesimpulan pembaca (Dent et al., 2009; Brewer, 2016).

b. Overlay spasial

Teknik *overlay* menggabungkan beberapa lapisan, misalnya kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, akses air bersih, risiko banjir, dan lokasi fasilitas. Hasilnya dapat digunakan untuk menentukan kawasan prioritas. Sebagai contoh, kawasan dengan kemiskinan tinggi, sanitasi rendah, dan risiko banjir tinggi memerlukan intervensi yang berbeda dari kawasan yang hanya mengalami kekurangan fasilitas pendidikan (Longley et al., 2015; UN-Habitat, 2020).

c. Autokorelasi spasial

Autokorelasi spasial menunjukkan kecenderungan nilai pada lokasi berdekatan untuk saling berkaitan. Moran's I digunakan untuk mengukur pola pengelompokan secara global, sedangkan *Local Indicators of Spatial Association* dapat mengidentifikasi kelompok nilai tinggi–tinggi, rendah–rendah, dan pencilan spasial. Metode ini membantu membedakan apakah pola sosial tersebar acak atau membentuk konsentrasi tertentu (Moran, 1950; Anselin, 1995).

Pola tinggi–tinggi dapat menunjukkan konsentrasi kemiskinan, kepadatan, atau pengangguran yang melintasi batas administratif. Pola rendah–rendah dapat menunjukkan kawasan dengan kondisi relatif baik, sedangkan pola tinggi–rendah atau rendah–tinggi dapat menjadi pencilan yang memerlukan pemeriksaan lapangan. Namun, pengelompokan spasial menunjukkan asosiasi dan bukan secara otomatis membuktikan sebab-akibat (Anselin, 1995; Fotheringham et al., 2000).

10. Kehati-hatian dalam Interpretasi

a. Kekeliruan ekologis

Kekeliruan ekologis terjadi ketika karakteristik wilayah dianggap berlaku bagi setiap individu di dalamnya. Apabila suatu kelurahan mempunyai tingkat pendidikan rendah, tidak berarti setiap penduduknya berpendidikan rendah. Data agregat digunakan untuk menjelaskan karakter kawasan, bukan untuk menyimpulkan karakter individual tanpa data pendukung (Robinson, 1950; Openshaw, 1984).

b. Masalah unit wilayah

Hasil analisis dapat berubah ketika batas atau skala wilayah diubah. Fenomena ini dikenal sebagai *modifiable areal unit problem*. Pola kemiskinan pada tingkat kecamatan dapat terlihat berbeda ketika dianalisis pada tingkat kelurahan atau blok sensus. Oleh karena itu, unit analisis harus sesuai dengan

proses sosial dan keputusan perencanaan yang diteliti (Openshaw, 1984; Fotheringham et al., 2000).

c. Perbedaan waktu data

Data sosial dari tahun berbeda tidak boleh langsung ditumpangtindihkan tanpa mempertimbangkan perubahan penduduk, batas administratif, definisi, dan metode pengumpulan. Wilayah yang tumbuh cepat dapat mengalami perubahan besar hanya dalam beberapa tahun. Analisis harus mencantumkan tahun data dan, jika memungkinkan, menggunakan periode yang sama atau melakukan penyesuaian (United Nations, 2017; Longley et al., 2015).

d. Stigmatisasi kawasan

Peta kemiskinan, kriminalitas, atau permukiman informal dapat menimbulkan stigmatisasi apabila disajikan tanpa konteks. Wilayah dengan indikator buruk juga memiliki modal sosial, kegiatan ekonomi, pengetahuan lokal, dan jaringan komunitas yang penting. Interpretasi perlu menggunakan bahasa yang menghormati masyarakat serta melibatkan warga dalam validasi temuan (Low, 2017; UN-Habitat, 2020).

e. Korelasi dan kausalitas

Hubungan spasial antara dua indikator tidak selalu menunjukkan hubungan sebab-akibat. Kawasan dengan pendidikan rendah dan kemiskinan tinggi mungkin memperlihatkan korelasi, tetapi hubungan tersebut dapat dipengaruhi akses transportasi, kualitas sekolah, pasar kerja, diskriminasi, atau sejarah kebijakan lahan. Penjelasan kausal memerlukan analisis tambahan, data longitudinal, dan penelitian lapangan (Fotheringham et al., 2000; Creswell & Creswell, 2018).

11. Contoh Interpretasi Spasial Terpadu

Misalnya, Kelurahan A memiliki kepadatan tinggi, proporsi anak besar, rumah tangga berukuran besar, pekerjaan informal dominan, serta akses sanitasi rendah. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan ruang bermain, sekolah, peningkatan sanitasi, perlindungan ekonomi informal, dan perbaikan hunian. Kesimpulan bahwa kawasan harus dikurangi kepadatannya tidak dapat dibuat hanya dari satu indikator karena penyebab dan kebutuhan masyarakat harus diteliti terlebih dahulu (UN-Habitat, 2020; Rapoport, 1990).

Kelurahan B mempunyai kepadatan sedang, proporsi lansia tinggi, pendidikan relatif baik, dan ukuran rumah tangga kecil. Prioritasnya mungkin bukan penambahan sekolah, melainkan fasilitas kesehatan, jalur pedestrian aman, hunian yang mudah diakses, ruang sosial, dan transportasi publik. Contoh ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang sama dapat menghasilkan kebutuhan perencanaan berbeda ketika struktur sosialnya berbeda (WHO, 2007; Weeks, 2020).

Kelurahan C memiliki penduduk usia produktif tinggi, tingkat pengangguran tinggi, dan lokasi relatif jauh dari pusat pekerjaan. Intervensinya dapat mencakup peningkatan konektivitas, pelatihan kerja, pengembangan pusat ekonomi lokal, dan penyediaan ruang usaha. Namun, apabila pengangguran terutama dialami lulusan pendidikan tertentu, strategi harus disesuaikan dengan karakter tenaga kerja tersebut (International Labour Organization, 2013; Lucas, 2012).

12. Tahapan Analisis Statistik Sosial Permukiman

Analisis dapat dimulai dengan menentukan tujuan, wilayah, unit analisis, dan periode data. Tahap berikutnya adalah memilih indikator, mengumpulkan data, memeriksa kelengkapan, menyamakan definisi, menghitung rasio atau persentase, memetakan hasil, serta melakukan interpretasi. Hasil awal perlu diverifikasi melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan masyarakat (Groves et al., 2009; Sanoff, 2000).

Alur analisis yang dapat digunakan mahasiswa adalah:

1. Menentukan persoalan permukiman.
2. Menentukan unit spasial dan periode analisis.
3. Memilih indikator sosial yang relevan.
4. Mengumpulkan serta memeriksa metadata.
5. Menghitung jumlah, rasio, persentase, dan indeks.
6. Membuat tabel, grafik, dan peta tematik.
7. Menganalisis pola, konsentrasi, dan ketimpangan.
8. Melakukan *overlay* dengan data fisik dan pelayanan.
9. Memverifikasi hasil melalui observasi lapangan.
10. Merumuskan prioritas dan rekomendasi ruang.

Analisis statistik harus menghasilkan argumentasi perencanaan, bukan sekadar kumpulan angka dan peta. Setiap rekomendasi perlu menunjukkan hubungan yang jelas antara temuan data, lokasi persoalan, kelompok yang terdampak, dan bentuk intervensi. Dengan demikian, statistik sosial menjadi dasar pengambilan keputusan yang transparan dan dapat diuji (Longley et al., 2015; Healey, 1997).

13. Latihan untuk Mahasiswa

Mahasiswa dapat memilih satu desa atau kelurahan dan mengumpulkan data jumlah penduduk, struktur umur, ukuran rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi. Setiap indikator dihitung dan dibandingkan dengan rata-rata kecamatan atau kota. Hasilnya disajikan melalui tabel profil, piramida penduduk, grafik pekerjaan, dan peta tematik (Weeks, 2020; Badan Pusat Statistik, 2023).

Selanjutnya, mahasiswa diminta mengidentifikasi minimal tiga pola spasial, misalnya konsentrasi anak usia sekolah, kawasan dominan pekerja informal, atau lingkungan dengan kerentanan sosial ekonomi tinggi. Temuan tersebut harus diverifikasi melalui observasi dan wawancara singkat agar mahasiswa tidak menyimpulkan kondisi sosial hanya dari data agregat (Robinson, 1950; Sanoff, 2000).

Rekomendasi akhir harus menjelaskan kelompok sasaran, lokasi prioritas, jenis pelayanan atau penataan ruang, dan alasan pemilihannya. Contohnya adalah penyediaan ruang bermain di lingkungan dengan proporsi anak tinggi, peningkatan akses universal di kawasan lansia, atau ruang usaha bersama di kawasan pekerja informal. Pendekatan ini menghubungkan statistik sosial dengan keputusan spasial secara langsung (UN-Habitat, 2020; Gehl, 2011).

14. Kesimpulan

Statistik sosial memberikan gambaran mengenai jumlah, komposisi, kegiatan, kemampuan, dan kerentanan penduduk dalam suatu permukiman. Indikator penduduk, struktur umur, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi membantu perencana memahami kebutuhan yang berbeda antarkelompok dan antarwilayah. Namun, setiap indikator harus ditafsirkan berdasarkan definisi, satuan, sumber, waktu, dan skala wilayahnya (United Nations, 2017; Weeks, 2020).

Interpretasi spasial mengubah data statistik menjadi pengetahuan mengenai lokasi, konsentrasi, ketimpangan, dan keterhubungan suatu persoalan. Peta bukan hasil akhir, melainkan sarana untuk merumuskan pertanyaan, menentukan prioritas, dan memeriksa kondisi di lapangan. Integrasi antara data statistik, analisis spasial, dan pengetahuan masyarakat akan menghasilkan perencanaan permukiman yang lebih tepat, adil, inklusif, dan peka terhadap konteks budaya (Longley et al., 2015; Low, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

1. Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
2. Angel, S., Blei, A. M., Parent, J., Lamson-Hall, P., Galarza Sánchez, N., & Civco, D. L. (2021). *Atlas of urban expansion: The 2016 edition*. Lincoln Institute of Land Policy.
3. Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association—LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>
4. Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
5. Bertaud, A. (2018). *Order without design: How markets shape cities*. MIT Press.
6. Brewer, C. A. (2016). *Designing better maps: A guide for GIS users* (2nd ed.). Esri Press.
7. Buzar, S., Ogden, P. E., & Hall, R. (2005). Households matter: The quiet demography of urban transformation. *Progress in Human Geography*, 29(4), 413–436. <https://doi.org/10.1191/0309132505ph558oa>
8. Chant, S. (2008). The “feminisation of poverty” and the “feminisation” of anti-poverty programmes. *Journal of Development Studies*, 44(2), 165–197. <https://doi.org/10.1080/00220380701789810>
9. Chen, M. A. (2012). *The informal economy: Definitions, theories and policies* (WIEGO Working Paper No. 1). Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing.
10. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE.
11. Deaton, A. (1997). *The analysis of household surveys: A microeconomic approach to development policy*. World Bank.
12. Dent, B. D., Torguson, J. S., & Hodler, T. W. (2009). *Cartography: Thematic map design* (6th ed.). McGraw-Hill.

13. Evans, G. W. (2003). The built environment and mental health. *Journal of Urban Health*, 80(4), 536–555. <https://doi.org/10.1093/jurban/jtq063>
14. Firman, T. (2009). The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia: A survey of Jakarta–Bandung Region development. *Habitat International*, 33(4), 327–339. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.08.005>
15. Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., & Charlton, M. (2000). *Quantitative geography: Perspectives on spatial data analysis*. SAGE.
16. Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
17. Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey methodology* (2nd ed.). Wiley.
18. Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. Macmillan.
19. International Labour Organization. (2013). *Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization*. ILO.
20. Jacobs, J. (1961). *The death and life of great American cities*. Random House.
21. Klasen, S. (2019). What explains uneven female labor force participation levels and trends in developing countries? *The World Bank Research Observer*, 34(2), 161–197. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkz005>
22. Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47–57. <https://doi.org/10.2307/2060063>
23. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic information science and systems* (4th ed.). Wiley.
24. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
25. Lucas, K. (2012). Transport and social exclusion: Where are we now? *Transport Policy*, 20, 105–113. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.01.013>
26. Mardiansjah, F. H., Handayani, W., & Setyono, J. S. (2018). Pertumbuhan penduduk perkotaan dan perkembangan pola distribusinya pada kawasan metropolitan Surakarta. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(3), 215–233.
27. Mennis, J. (2009). Dasymetric mapping for estimating population in small areas. *Geography Compass*, 3(2), 727–745. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009.00220.x>
28. Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, 37(1–2), 17–23. <https://doi.org/10.2307/2332142>
29. Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffman, A., & Giovannini, E. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing.
30. OECD. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing.
31. Openshaw, S. (1984). *The modifiable areal unit problem*. Geo Books.
32. Páez, A., Scott, D. M., & Morency, C. (2012). Measuring accessibility: Positive and normative implementations of various accessibility

- indicators. *Journal of Transport Geography*, 25, 141–153.
<https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.03.016>
33. Rapoport, A. (1990). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach*. University of Arizona Press.
 34. Robinson, W. S. (1950). Ecological correlations and the behavior of individuals. *American Sociological Review*, 15(3), 351–357.
<https://doi.org/10.2307/2087176>
 35. Rowland, D. T. (2003). *Demographic methods and concepts*. Oxford University Press.
 36. Sanoff, H. (2000). *Community participation methods in design and planning*. John Wiley & Sons.
 37. Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis* (IDS Working Paper No. 72). Institute of Development Studies.
 38. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
 39. Tipple, A. G. (2000). *Extending themselves: User-initiated transformations of government-built housing in developing countries*. Liverpool University Press.
 40. UN-Habitat. (2020). *World cities report 2020: The value of sustainable urbanization*. United Nations Human Settlements Programme.
 41. UNESCO. (2021). *Global education monitoring report 2021/2: Non-state actors in education—Who chooses? Who loses?* UNESCO.
 42. UNESCO Institute for Statistics. (2018). *Quick guide to education indicators for SDG 4*. UNESCO.
 43. United Nations. (2017). *Principles and recommendations for population and housing censuses* (Revision 3). United Nations.
 44. Weeks, J. R. (2020). *Population: An introduction to concepts and issues* (13th ed.). Cengage.
 45. World Health Organization. (2007). *Global age-friendly cities: A guide*. WHO.
 46. World Health Organization. (2018). *WHO housing and health guidelines*. WHO.

PERTEMUAN MINGGU KE-8
STUDI KASUS:
Analisis fenomena sosial-budaya
dan ruang
UJIAN TENGAH SEMESTER(UTS)

POKOK BAHASAN MINGGU KE-9

Sistem Kepercayaan dan Ruang Permukiman: nilai, religi, tradisi, ritual, ruang sakral–profan

1. Pengertian sistem kepercayaan dalam ruang permukiman

Sistem kepercayaan merupakan seperangkat gagasan, nilai, simbol, dan praktik yang digunakan masyarakat untuk memahami hubungan antara manusia, alam, leluhur, dan kekuatan transenden. Dalam konteks permukiman, sistem kepercayaan tidak hanya hadir dalam bentuk ajaran keagamaan, tetapi juga diwujudkan melalui orientasi bangunan, pembagian zona, penempatan tempat ibadah, pemakaman, sumber air, pohon keramat, ruang upacara, dan larangan penggunaan ruang tertentu. Ruang permukiman karena itu bukan sekadar wadah fisik bagi aktivitas manusia, melainkan juga bagian dari tatanan kosmologis masyarakat (Geertz, 1973; Rapoport, 1969).

Sistem kepercayaan dapat mencakup agama formal, kepercayaan lokal, penghormatan terhadap leluhur, mitologi asal-usul, pandangan kosmologis, serta aturan adat yang diwariskan antargenerasi. Unsur-unsur tersebut membentuk suatu sistem makna yang membantu masyarakat menentukan ruang yang boleh dihuni, dimanfaatkan, dilalui, dibangun, atau dilindungi. Dengan demikian, struktur ruang permukiman tradisional umumnya merupakan hasil hubungan antara kebutuhan praktis dan keyakinan simbolis masyarakat (Koentjaraningrat, 2009; Waterson, 1990).

2. Nilai budaya sebagai dasar pembentukan ruang

Nilai budaya adalah gagasan kolektif mengenai sesuatu yang dianggap baik, penting, benar, pantas, dan bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan ruang hidupnya. Dalam permukiman, nilai tersebut dapat diterjemahkan menjadi prinsip kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, keselarasan dengan alam, hierarki sosial, kesucian, privasi, dan tanggung jawab komunal (Kluckhohn, 1951; Koentjaraningrat, 2009).

Nilai budaya memengaruhi keputusan spasial, seperti pemilihan lokasi permukiman, arah hadap rumah, pola jalan, batas pekarangan, hubungan antara rumah dan tempat ibadah, serta penempatan fasilitas komunal. Pada masyarakat yang menjunjung kebersamaan, misalnya, ruang bersama dan halaman komunal biasanya memiliki kedudukan penting. Sebaliknya, pada masyarakat dengan struktur sosial yang hierarkis, bentuk dan lokasi rumah dapat menunjukkan kedudukan pemiliknya dalam komunitas (Rapoport, 1982; Sasongko, 2005).

Nilai tidak selalu terlihat secara langsung dalam bentuk fisik. Nilai dapat tersimpan dalam aturan mengenai siapa yang boleh memasuki suatu ruang, kapan ruang boleh digunakan, pakaian yang harus dikenakan, arah pergerakan dalam upacara, dan tata cara bertingkah laku di tempat tertentu. Oleh karena itu, analisis ruang kultural perlu mengkaji tidak hanya bentuk ruang, tetapi juga

norma, makna, dan aturan sosial yang mengendalikan penggunaannya (Hall, 1966; Low, 2017).

3. Religi dan kosmologi permukiman

Religi memberikan kerangka bagi masyarakat untuk memahami keberadaan manusia di dalam alam semesta. Pemahaman tersebut sering diwujudkan melalui kosmologi, yaitu konsepsi mengenai struktur dunia, arah mata angin, pusat, batas, dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Kosmologi kemudian diterjemahkan ke dalam organisasi ruang, sehingga pola permukiman dapat dipahami sebagai gambaran kecil atau mikrokosmos dari tatanan alam semesta yang dipercayai masyarakat (Eliade, 1959; Waterson, 1990).

Dalam sejumlah permukiman tradisional Indonesia, orientasi ruang tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan teknis, seperti pencahayaan, topografi, dan sirkulasi, tetapi juga oleh arah yang dianggap memiliki makna religius. Gunung, laut, matahari terbit, tempat asal leluhur, atau pusat kekuasaan adat dapat menjadi orientasi utama. Orientasi tersebut menghasilkan sumbu simbolis yang menghubungkan rumah, tempat ibadah, ruang upacara, jalan utama, kawasan produksi, dan pemakaman (Nas, 1998; Sasongko, 2005).

Konsep kosmologi juga dapat menghasilkan klasifikasi ruang berdasarkan nilai yang berlawanan tetapi saling melengkapi, seperti atas–bawah, hulu–hilir, gunung–laut, pusat–pinggiran, dalam–luar, laki-laki–perempuan, bersih–kotor, dan sakral–profan. Klasifikasi ini bukan semata-mata pembagian geografis, melainkan sistem simbolik yang mengatur lokasi bangunan dan aktivitas masyarakat dalam permukiman (Lévi-Strauss, 1963; Waterson, 1990).

4. Tradisi sebagai mekanisme reproduksi ruang

Tradisi merupakan pengetahuan, nilai, aturan, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam perkembangan permukiman, tradisi berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga kesinambungan pola ruang dan identitas tempat. Aturan adat mengenai pembangunan rumah, penggunaan bahan, upacara pendirian bangunan, pembagian tanah, serta perlindungan terhadap lokasi tertentu membantu masyarakat mempertahankan struktur ruangnya (Rapoport, 1969; Oliver, 2006).

Tradisi tidak bersifat sepenuhnya statis. Masyarakat dapat menyesuaikan tradisi dengan perubahan jumlah penduduk, teknologi, mata pencaharian, agama, sistem pemerintahan, dan kebutuhan pembangunan. Namun, perubahan tersebut umumnya berlangsung melalui proses seleksi budaya: unsur ruang tertentu dipertahankan karena dianggap penting, sedangkan unsur lainnya diubah atau diberikan fungsi baru. Oleh sebab itu, permukiman tradisional perlu dipahami sebagai ruang hidup yang dinamis, bukan sebagai artefak yang tidak boleh berubah (Oliver, 2006; Salura, 2015).

Dalam perencanaan wilayah dan kota, keberlanjutan tradisi perlu ditempatkan dalam kerangka pelestarian yang adaptif. Pelestarian tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan bentuk bangunan, tetapi harus menjaga hubungan antara ruang, aktivitas, kelembagaan adat, pengetahuan lokal, dan kelompok masyarakat yang menghidupkan tradisi tersebut. Pemisahan bangunan

dari praktik sosialnya dapat mengubah kawasan hidup menjadi sekadar objek visual atau komoditas wisata (Smith, 2006; UNESCO, 2011).

5. Ritual sebagai praktik pembentuk ruang

Ritual merupakan tindakan simbolis yang dilakukan menurut aturan tertentu untuk menegaskan hubungan manusia dengan Tuhan, leluhur, komunitas, alam, atau tahapan kehidupan. Ritual dapat berupa upacara kelahiran, perkawinan, kematian, panen, penyucian, pergantian musim, pendirian rumah, dan peringatan asal-usul permukiman. Pelaksanaan ritual menyebabkan ruang sehari-hari memperoleh fungsi dan makna khusus pada waktu tertentu (Turner, 1969; Bell, 1992).

Ritual membentuk ruang melalui penetapan titik berkumpul, jalur prosesi, arah pergerakan, batas peserta, lokasi persembahan, pusat kegiatan, serta hubungan antara ruang privat dan ruang publik. Jalan desa, halaman rumah, lapangan, sumber air, dan tempat ibadah dapat menjadi suatu jaringan ruang ritual. Dengan demikian, ruang ritual tidak selalu berbentuk satu tempat yang tertutup, tetapi dapat berupa rangkaian lokasi yang dihubungkan oleh gerak, waktu, simbol, dan ingatan kolektif (Turner, 1969; Seamon, 2015).

Makna ritual juga bersifat temporal. Suatu ruang yang pada hari biasa digunakan untuk kegiatan sosial atau ekonomi dapat berubah menjadi ruang sakral ketika digunakan untuk upacara. Setelah ritual selesai, ruang tersebut dapat kembali menjalankan fungsi sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakter ruang tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisiknya, tetapi juga oleh waktu, pelaku, aturan penggunaan, dan peristiwa yang berlangsung di dalamnya (Bell, 1992; Low, 2017).

6. Pengertian ruang sakral dan ruang profan

Ruang sakral adalah ruang yang dipisahkan dari ruang biasa karena diyakini memiliki kesucian, kekuatan spiritual, nilai sejarah, atau hubungan khusus dengan Tuhan dan leluhur. Kesakralan suatu ruang dapat ditandai oleh keberadaan tempat ibadah, makam leluhur, batu, mata air, gunung, hutan, pohon, atau bangunan adat. Ruang sakral biasanya memiliki batas, aturan, larangan, serta tata perilaku tertentu yang harus dipatuhi oleh penggunaanya (Durkheim, 1995; Eliade, 1959).

Ruang profan merupakan ruang yang digunakan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti hunian, perdagangan, produksi, transportasi, pendidikan, dan rekreasi. Namun, profan tidak berarti buruk atau tidak penting. Istilah tersebut menunjukkan bahwa ruang digunakan untuk kegiatan umum yang tidak memerlukan aturan kesucian secara khusus. Ruang sakral dan profan membentuk suatu sistem relasional: keberadaan ruang sakral dikenali karena terdapat ruang sehari-hari di sekitarnya, sedangkan ruang profan memperoleh batas melalui aturan yang melindungi ruang sakral (Eliade, 1959; Durkheim, 1995).

Pemisahan sakral dan profan tidak selalu diwujudkan dengan dinding atau pagar. Batas dapat berbentuk perubahan elevasi, gerbang, vegetasi, sungai, jalan, jarak, aturan pakaian, tanda simbolis, atau larangan memasuki suatu kawasan. Pada beberapa permukiman, tingkat kesakralan ruang tersusun secara

berlapis, dari ruang publik menuju ruang yang hanya dapat dimasuki oleh tokoh agama, tetua adat, kelompok kekerabatan tertentu, atau masyarakat pada waktu ritual tertentu (Norberg-Schulz, 1980; Waterson, 1990).

7. Hierarki dan struktur ruang

Sistem kepercayaan sering menghasilkan hierarki ruang yang menunjukkan perbedaan nilai antara pusat dan pinggiran, tinggi dan rendah, depan dan belakang, serta dalam dan luar. Ruang yang dianggap paling suci biasanya ditempatkan pada lokasi yang memiliki kualitas khusus, seperti tempat yang lebih tinggi, dekat pusat simbolis, menghadap arah tertentu, atau memiliki hubungan dengan unsur alam yang disucikan. Ruang hunian dan kegiatan ekonomi kemudian ditempatkan mengikuti hierarki tersebut (Rapoport, 1982; Norberg-Schulz, 1980).

Hierarki ruang dapat dikenali melalui urutan akses. Seseorang mungkin bergerak dari jalan umum menuju halaman, serambi, ruang keluarga, lalu ruang khusus keluarga atau leluhur. Semakin tinggi tingkat kesakralan dan privasinya, semakin terbatas akses terhadap ruang tersebut. Pola ini menunjukkan hubungan antara sistem kepercayaan, struktur sosial, kekerabatan, gender, usia, dan kedudukan adat dalam organisasi permukiman (Hall, 1966; Waterson, 1990).

Dalam skala kawasan, tempat ibadah atau bangunan adat sering berfungsi sebagai pusat orientasi simbolis sekaligus pusat kehidupan sosial. Namun, pusat geometris dan pusat simbolis tidak selalu berada di lokasi yang sama. Sebuah tempat yang terletak di pinggir permukiman dapat menjadi pusat simbolis karena berkaitan dengan sejarah, leluhur, atau mitologi masyarakat. Karena itu, analisis struktur ruang kultural tidak cukup hanya menggunakan ukuran jarak dan kepadatan, tetapi juga harus membaca makna yang diberikan masyarakat kepada setiap lokasi (Tuan, 1977; Nas, 1998).

8. Contoh dalam permukiman tradisional Indonesia

Pada permukiman Bali, hubungan antara agama Hindu, kosmologi, dan ruang diwujudkan melalui prinsip orientasi *kaja-kelod* serta pembagian nilai ruang berdasarkan arah gunung dan laut. Tempat yang mengarah ke gunung atau *kaja* cenderung dipandang lebih utama dan suci, sedangkan arah laut atau *kelod* digunakan untuk fungsi yang secara simbolik dianggap lebih rendah. Pada tingkat pekarangan, pembagian ruang juga memperlihatkan hubungan antara tempat suci keluarga, hunian, ruang sosial, dapur, dan pintu masuk (Reuter, 2002; Parimin, 1986).

Pada masyarakat Toraja, tongkonan bukan hanya rumah tinggal, melainkan pusat identitas, kekerabatan, kekuasaan adat, dan hubungan dengan leluhur. Orientasi bangunan, hubungan tongkonan dengan lumbung, serta keberadaan ruang upacara dan situs pemakaman memperlihatkan kesatuan antara kehidupan sosial, ritual, dan struktur ruang permukiman. Upacara kematian juga mengaktifkan berbagai ruang dalam skala rumah, halaman, permukiman, dan bentang alam (Waterson, 1990; Kis-Jovak et al., 1988).

Pada masyarakat Tengger, struktur ruang permukiman dipengaruhi oleh hubungan antara agama, adat, orientasi terhadap Gunung Bromo, tempat pemujaan, dukun adat, dan pelaksanaan upacara komunal. Ruang desa

berfungsi tidak hanya sebagai lingkungan tempat tinggal, tetapi juga sebagai bagian dari lanskap budaya yang menghubungkan permukiman dengan gunung, lahan pertanian, pura, makam, dan jalur ritual (Sasongko, 2005; Hefner, 1985).

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa bentuk permukiman tradisional Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan iklim, bahan bangunan, atau topografi. Bentuk ruang juga merupakan produk sistem kepercayaan, hubungan leluhur, aturan adat, struktur sosial, dan praktik ritual. Setiap komunitas memiliki konfigurasi yang berbeda sehingga perencanaan perlu menghindari generalisasi dan melakukan pembacaan budaya secara kontekstual (Rapoport, 1969; Oliver, 2006).

9. Transformasi dan konflik ruang

Modernisasi, urbanisasi, pariwisata, pembangunan infrastruktur, perubahan agama, dan komersialisasi tanah dapat mengubah hubungan antara masyarakat dan ruang sakralnya. Jalan baru, kawasan wisata, perumahan, atau fasilitas komersial dapat memotong jalur ritual, mengurangi jarak pelindung, mengubah orientasi bangunan, atau meningkatkan tekanan pembangunan di sekitar situs sakral. Perubahan fisik semacam ini dapat menghasilkan konflik apabila perencanaan hanya memperhitungkan nilai ekonomi dan legal formal tanah (Smith, 2006; Taylor & Lennon, 2011).

Konflik juga dapat muncul karena perbedaan cara pandang terhadap ruang. Pemerintah atau pengembang mungkin melihat suatu lahan sebagai ruang kosong yang tersedia untuk pembangunan, sementara masyarakat lokal memandangnya sebagai tempat asal-usul, wilayah leluhur, ruang ritual, atau bagian dari bentang alam sakral. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ruang memiliki nilai instrumental sekaligus nilai simbolis, sosial, historis, dan spiritual (Tuan, 1977; Low, 2017).

Transformasi tidak selalu berarti hilangnya seluruh nilai budaya. Masyarakat dapat melakukan negosiasi, reinterpretasi, dan adaptasi, misalnya dengan memindahkan sebagian aktivitas ritual, menggunakan teknologi baru, atau memberikan fungsi ekonomi terbatas pada ruang tradisional. Akan tetapi, adaptasi seharusnya ditentukan melalui partisipasi komunitas pemilik budaya agar perubahan tidak menghilangkan makna utama dan hak masyarakat atas ruangnya (Smith, 2006; UNESCO, 2011).

10. Implikasi bagi perencanaan ruang kultural

Perencanaan ruang kultural perlu mengidentifikasi tempat sakral, ruang profan, zona transisi, jalur prosesi, pusat orientasi, batas adat, lanskap leluhur, serta waktu pelaksanaan ritual. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama, pemetaan partisipatif, penelusuran sejarah, dokumentasi ritual, serta analisis perilaku ruang. Data spasial perlu dipadukan dengan narasi dan pengetahuan lokal karena sebagian nilai budaya tidak dapat diketahui hanya melalui peta administratif (Low, 2017; UNESCO, 2011).

Pemetaan ruang sakral harus dilakukan secara etis. Tidak semua lokasi, pengetahuan, dan praktik ritual boleh dipublikasikan secara terbuka. Beberapa informasi mungkin bersifat rahasia, hanya dimiliki kelompok tertentu, atau

berisiko disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Oleh sebab itu, perencana perlu memperoleh persetujuan masyarakat, menghormati hak atas pengetahuan tradisional, dan menentukan bersama informasi yang dapat atau tidak dapat dicantumkan dalam dokumen perencanaan (Smith, 2006; UNESCO, 2011).

Strategi perlindungan tidak cukup hanya menetapkan satu bangunan sebagai objek cagar budaya. Perlindungan perlu mencakup lingkungan pendukungnya, seperti jalur ritual, ruang berkumpul, hubungan visual dengan gunung atau laut, sumber air, vegetasi keramat, makam, dan kawasan penyangga. Pendekatan lanskap budaya lebih tepat karena memandang unsur alam, bangunan, aktivitas, nilai, dan ingatan kolektif sebagai satu kesatuan (Taylor & Lennon, 2011; UNESCO, 2011).

Dengan demikian, perencanaan ruang kultural harus menghasilkan keseimbangan antara perlindungan nilai spiritual, kebutuhan hidup masyarakat, perubahan sosial, dan pembangunan kawasan. Perencana tidak bertugas membekukan kebudayaan, melainkan menciptakan kerangka perubahan yang menghormati identitas, menjamin keberlanjutan praktik budaya, dan memberikan ruang bagi komunitas untuk menentukan masa depan lingkungan hidupnya sendiri (Rapoport, 1982; Smith, 2006).

11. Kerangka Analisis untuk Mahasiswa

Unsur analisis	Pertanyaan kunci	Data yang diperlukan
Nilai budaya	Nilai apa yang mendasari pengaturan ruang?	Norma, cerita lokal, aturan adat
Religi dan kosmologi	Bagaimana masyarakat memahami hubungan manusia, alam, dan Tuhan?	Orientasi, simbol, mitologi
Tradisi	Praktik apa yang diwariskan dan masih dijalankan?	Sejarah, kebiasaan, kelembagaan adat
Ritual	Di mana, kapan, dan oleh siapa ritual dilakukan?	Kalender ritual, pelaku, jalur prosesi
Ruang sakral	Ruang apa yang dianggap suci dan mengapa?	Tempat ibadah, makam, sumber air, hutan
Ruang profan	Ruang apa yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari?	Hunian, pasar, jalan, lahan produksi
Batas dan hierarki	Bagaimana tingkat akses dan kesucian dibedakan?	Gerbang, elevasi, zona, larangan
Transformasi	Perubahan apa yang mengancam atau memperkuat nilai budaya?	Infrastruktur, pariwisata, perubahan lahan
Strategi perencanaan	Bagaimana ruang budaya dapat dilindungi secara adaptif?	Zonasi, kawasan penyangga, aturan lokal

12. Kesimpulan

Sistem kepercayaan merupakan salah satu kekuatan utama yang membentuk pola, orientasi, hierarki, batas, dan pemaknaan ruang permukiman. Nilai dan religi memberikan dasar konseptual; tradisi mewariskan aturan ruang; ritual mengaktifkan dan memperbarui makna tempat; sedangkan klasifikasi sakral–profan mengatur tingkat kesucian, akses, dan perilaku pengguna. Oleh karena itu, perencanaan ruang kultural harus membaca permukiman sebagai sistem fisik, sosial, simbolis, dan spiritual yang saling berhubungan (Eliade, 1959; Rapoport, 1982).

A. Pertanyaan Diskusi

2. Apakah ruang sakral selalu harus berupa tempat ibadah?
3. Dapatkah ruang profan berubah menjadi ruang sakral pada waktu tertentu?
4. Bagaimana pembangunan jalan baru dapat memengaruhi jalur ritual masyarakat?
5. Apakah semua lokasi sakral perlu dicantumkan dalam peta perencanaan?
6. Bagaimana melindungi ruang sakral tanpa menghambat kebutuhan perkembangan permukiman?
7. Siapa yang paling berhak menentukan batas dan aturan pemanfaatan ruang sakral?
8. Bagaimana pariwisata dapat memberikan manfaat tanpa mengurangi kesakralan ruang?

DAFTAR PUSTAKA

1. Bell, C. (1992). *Ritual theory, ritual practice*. Oxford University Press.
2. Durkheim, E. (1995). *The elementary forms of religious life* (K. E. Fields, Trans.). Free Press. (Original work published 1912).
3. Eliade, M. (1959). *The sacred and the profane: The nature of religion*. Harcourt, Brace & World.
4. Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
5. Hall, E. T. (1966). *The hidden dimension*. Doubleday.
6. Hefner, R. W. (1985). *Hindu Javanese: Tengger tradition and Islam*. Princeton University Press.
7. Kis-Jovak, J. I., Nooy-Palm, H., Schefold, R., & Schulz-Dornburg, U. (1988). *Banua Toraja: Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja, Sulawesi, Indonesia*. Royal Tropical Institute.
8. Kluckhohn, C. (1951). Values and value-orientations in the theory of action. In T. Parsons & E. A. Shils (Eds.), *Toward a general theory of action* (pp. 388–433). Harvard University Press.
9. Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
10. Lévi-Strauss, C. (1963). *Structural anthropology*. Basic Books.
11. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
12. Nas, P. J. M. (Ed.). (1998). *Indonesian houses: Tradition and transformation in vernacular architecture*. KITLV Press.
13. Norberg-Schulz, C. (1980). *Genius loci: Towards a phenomenology of architecture*. Rizzoli.
14. Oliver, P. (2006). *Built to meet needs: Cultural issues in vernacular architecture*. Architectural Press.
15. Parimin, A. P. (1986). *Fundamental study on spatial formation of island village: Environmental hierarchy of sacred-profane concept in Bali* (Doctoral dissertation, Osaka University).
16. Rapoport, A. (1969). *House form and culture*. Prentice-Hall.
17. Rapoport, A. (1982). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach*. SAGE Publications.

18. Reuter, T. A. (2002). *Custodians of the sacred mountains: Culture and society in the highlands of Bali*. University of Hawai'i Press.
19. Salura, P. (2015). Sundanese architecture: The concept of patempatan. *International Journal of Academic Research*, 7(1), 139–143.
20. Sasongko, I. (2005). Pembentukan struktur ruang permukiman berbasis budaya: Studi kasus Desa Puyung, Lombok Tengah. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 33(1), 1–8.
21. Seamon, D. (2015). Situated cognition and the phenomenology of place: Lifeworld, environmental embodiment, and immersion-in-world. *Cognitive Processing*, 16(S1), 389–392. <https://doi.org/10.1007/s10339-015-0678-9>
22. Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
23. Taylor, K., & Lennon, J. (2011). Cultural landscapes: A bridge between culture and nature? *International Journal of Heritage Studies*, 17(6), 537–554. <https://doi.org/10.1080/13527258.2011.618246>
24. Tuan, Y.-F. (1977). *Space and place: The perspective of experience*. University of Minnesota Press.
25. Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Aldine Publishing.
26. UNESCO. (2011). *Recommendation on the historic urban landscape*. UNESCO.
27. Waterson, R. (1990). *The living house: An anthropology of architecture in South-East Asia*. Oxford University Press.

POKOK BAHASAN MINGGU KE-10

Identitas, Simbol, Makna dan Sense of Place: landmark budaya, simbol ruang, place attachment, genius loci

1. Pengertian ruang dan tempat

Dalam kajian perencanaan ruang kultural, istilah ruang dan tempat memiliki pengertian yang berbeda. Ruang pada awalnya dapat dipahami sebagai wadah fisik tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Ruang berubah menjadi tempat ketika manusia memberikan nama, pengalaman, nilai, fungsi, ingatan, dan makna kepadanya. Dengan demikian, tempat bukan hanya lokasi geografis, melainkan ruang yang telah dialami dan menjadi bagian dari kehidupan individu maupun masyarakat (Tuan, 1977; Relph, 1976).

Sebuah jalan, lapangan, pasar, tempat ibadah, sumber air, atau persimpangan dapat berkembang menjadi tempat bermakna karena digunakan secara berulang, menjadi lokasi peristiwa penting, atau berhubungan dengan sejarah komunitas. Pengalaman manusia mengubah lokasi yang sebelumnya bersifat abstrak menjadi tempat yang dikenali, dirasakan, dan diingat. Semakin

kuat pengalaman dan pemaknaan masyarakat terhadap suatu ruang, semakin kuat pula karakter tempat tersebut (Tuan, 1977; Cresswell, 2015).

Makna tempat dapat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sebuah lapangan kota, misalnya, dapat dimaknai sebagai ruang rekreasi oleh pengunjung, ruang ekonomi oleh pedagang, ruang sejarah oleh masyarakat lokal, serta ruang kekuasaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tempat tidak mempunyai makna tunggal, tetapi dapat mengandung berbagai makna yang terbentuk melalui interaksi sosial, sejarah, kekuasaan, dan pengalaman masyarakat (Massey, 1994; Low, 2017).

2. Identitas tempat

Identitas tempat merupakan karakter yang membuat suatu tempat dapat dikenali dan dibedakan dari tempat lain. Identitas tersebut dapat terbentuk oleh unsur fisik, seperti pola jalan, bentuk bangunan, bentang alam, material, warna, vegetasi, dan landmark, serta unsur nonfisik, seperti sejarah, tradisi, bahasa, aktivitas ekonomi, ritual, ingatan kolektif, dan hubungan sosial masyarakat (Relph, 1976; Montgomery, 1998).

Identitas tempat tidak hanya melekat pada lingkungan fisik. Identitas juga terbentuk dari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Masyarakat membentuk tempat melalui aktivitas, nilai, dan kebudayaannya, sedangkan tempat turut membentuk cara masyarakat memahami dirinya. Identitas kawasan dengan demikian merupakan hasil hubungan berkelanjutan antara bentuk fisik, aktivitas manusia, dan makna yang dilekatkan pada lingkungan (Canter, 1977; Punter, 1991).

Dalam psikologi lingkungan dikenal pula konsep *place identity*, yaitu bagian dari identitas diri yang terbentuk melalui hubungan seseorang dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Rumah, kampung halaman, sekolah, tempat ibadah, pasar tradisional, dan ruang publik dapat menjadi bagian dari cara seseorang mendefinisikan dirinya. Ketika tempat tersebut berubah atau hilang, seseorang dapat merasa kehilangan sebagian identitas personal maupun sosialnya (Proshansky et al., 1983; Twigger-Ross & Uzzell, 1996).

Identitas tempat dapat bersifat individual dan kolektif. Identitas individual terbentuk melalui pengalaman pribadi, sedangkan identitas kolektif berkembang melalui sejarah, simbol, cerita, dan praktik yang dimiliki bersama oleh komunitas. Dalam kawasan bersejarah, identitas kolektif sering dipelihara melalui perayaan tradisional, nama jalan, bangunan pusaka, kuliner, pola permukiman, serta cerita mengenai tokoh dan peristiwa lokal (Lalli, 1992; Low, 2017).

3. Unsur pembentuk identitas tempat

Identitas suatu tempat dapat dianalisis melalui tiga unsur utama, yaitu bentuk fisik, aktivitas, dan makna. Bentuk fisik mencakup tata ruang, bangunan, jalan, ruang terbuka, vegetasi, dan elemen alam. Aktivitas mencakup kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan ritual. Makna mencakup nilai, simbol, memori, rasa memiliki, dan penafsiran masyarakat terhadap tempat tersebut (Canter, 1977; Montgomery, 1998).

Ketiga unsur tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan. Kawasan yang memiliki bangunan tradisional tetapi tidak lagi menjadi ruang kehidupan masyarakat dapat kehilangan sebagian identitasnya. Sebaliknya, kegiatan budaya yang tidak memiliki ruang pendukung juga menghadapi risiko terputus dari konteks tempatnya. Pelestarian identitas karena itu perlu menjaga hubungan antara bentuk fisik, aktivitas sosial, dan makna budaya (Montgomery, 1998; Smith, 2006).

Identitas tempat juga memiliki dimensi waktu. Karakter suatu kawasan merupakan hasil lapisan sejarah yang terbentuk melalui proses pembangunan, perubahan fungsi, migrasi penduduk, konflik, dan adaptasi budaya. Identitas yang kuat tidak selalu berarti mempertahankan semua unsur masa lalu secara utuh, tetapi memerlukan kesinambungan antara warisan sejarah dan kebutuhan masyarakat masa kini (Lynch, 1972; Pendlebury, 2013).

4. Landmark budaya

Landmark adalah elemen lingkungan yang memiliki bentuk atau kedudukan menonjol sehingga mudah dikenali dan digunakan sebagai titik orientasi. Landmark dapat berupa bangunan, monumen, gunung, pohon besar, menara, tempat ibadah, gerbang, alun-alun, atau unsur lain yang terlihat dari berbagai arah. Dalam citra kota, landmark membantu masyarakat mengenali lokasi dan menyusun gambaran mental mengenai struktur ruang kota (Lynch, 1960; Purwanto, 2001).

Landmark budaya berbeda dari landmark yang hanya menonjol secara visual. Landmark budaya memiliki hubungan dengan sejarah, kepercayaan, tradisi, identitas, atau ingatan kolektif masyarakat. Sebuah bangunan mungkin tidak terlalu besar, tetapi dapat mempunyai nilai budaya tinggi karena berkaitan dengan asal-usul permukiman, perjuangan masyarakat, tokoh lokal, atau kegiatan ritual yang terus dilaksanakan (Rapoport, 1982; Smith, 2006).

Keberadaan landmark budaya memiliki fungsi spasial sekaligus sosial. Secara spasial, landmark membantu orientasi dan keterbacaan kawasan. Secara sosial, landmark dapat menjadi tempat berkumpul, pusat kegiatan, penanda identitas kelompok, serta media pewarisan sejarah. Oleh sebab itu, nilai landmark tidak cukup dinilai berdasarkan skala dan bentuk fisiknya, tetapi juga

berdasarkan keterikatan masyarakat serta perannya dalam kehidupan sehari-hari (Lynch, 1960; Nas, 1998).

Landmark budaya dapat memiliki tingkatan yang berbeda. Pada skala kota, landmark dapat berupa masjid agung, keraton, gereja tua, tugu, atau gunung. Pada skala kawasan, landmark dapat berupa pasar, gerbang kampung, balai adat, atau pohon keramat. Pada skala lingkungan, sumur, persimpangan, teras rumah, dan warung tertentu juga dapat menjadi landmark bagi masyarakat setempat (Lynch, 1960; Rapoport, 1982).

Landmark budaya perlu dilindungi bersama konteks ruangnya. Bangunan bersejarah dapat kehilangan perannya sebagai landmark apabila tertutup oleh bangunan baru, terputus dari jalur tradisional, atau kehilangan kegiatan budaya yang sebelumnya menyertainya. Perlindungan landmark perlu mempertimbangkan koridor pandang, skala bangunan sekitar, ruang terbuka, akses publik, kegiatan sosial, dan narasi sejarahnya (Lynch, 1972; UNESCO, 2011). Lihat gambar dibawah : landmark skala Kota, Kawasan, dan Lingkungan.



5. Simbol ruang

Simbol ruang adalah unsur fisik, bentuk, warna, orientasi, atau susunan ruang yang mewakili gagasan dan nilai tertentu. Gerbang dapat melambangkan batas, alun-alun dapat melambangkan pusat kekuasaan, gunung dapat melambangkan kesucian, dan rumah adat dapat melambangkan kekerabatan serta asal-usul komunitas. Simbol memungkinkan suatu kebudayaan menyampaikan makna melalui lingkungan binaan tanpa harus menggunakan bahasa verbal (Rapoport, 1982; Waterson, 1990).

Makna simbol ruang tidak selalu dapat dipahami hanya dengan mengamati bentuknya. Bentuk fisik yang sama dapat mempunyai arti berbeda

pada kebudayaan yang berbeda. Warna, arah hadap, jumlah tiang, posisi pintu, tingkat lantai, atau susunan bangunan dapat mengandung makna tertentu berdasarkan kepercayaan lokal. Karena itu, penafsiran simbol ruang memerlukan pemahaman terhadap sejarah, mitologi, sistem kepercayaan, dan pengetahuan masyarakat setempat (Geertz, 1973; Rapoport, 1982).

Simbol juga dapat menunjukkan struktur sosial dan kekuasaan. Ukuran rumah, lokasi bangunan, penggunaan material, serta kedekatan dengan pusat adat dapat menandai kedudukan seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Tata ruang karena itu tidak selalu bersifat netral, tetapi dapat menjadi media yang merepresentasikan hierarki, norma, identitas, serta hubungan kekuasaan (Bourdieu, 1977; Low, 2017).

Dalam konteks perkotaan kontemporer, simbol ruang dapat diciptakan melalui monumen, taman tematik, ornamen tradisional, nama jalan, mural, dan elemen desain jalan. Namun, penggunaan simbol budaya tanpa memahami makna dan konteksnya dapat menghasilkan simbolisme yang dangkal. Identitas kawasan tidak dapat dibentuk hanya dengan menempelkan ornamen tradisional pada bangunan modern jika aktivitas, memori, dan kehidupan komunitas lokal diabaikan (Relph, 1976; Zukin, 1995).

6. Makna tempat

Makna tempat adalah gagasan, perasaan, nilai, dan penafsiran yang dilekatkan manusia pada suatu lingkungan. Makna terbentuk melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, sejarah keluarga, praktik budaya, serta narasi yang diwariskan. Sebuah tempat menjadi bermakna ketika memiliki hubungan dengan kehidupan orang atau kelompok yang menggunakannya (Tuan, 1977; Williams & Stewart, 1998).

Makna tempat dapat dikelompokkan menjadi makna fungsional, sosial, budaya, historis, ekonomi, politik, spiritual, dan ekologis. Pasar tradisional, misalnya, bukan hanya ruang transaksi ekonomi, tetapi juga ruang interaksi sosial, pewarisan kuliner, pertemuan antarkelompok, dan pembentukan ingatan kolektif. Perencanaan yang hanya melihat fungsi ekonominya berisiko menghilangkan dimensi budaya dan sosial yang menjadikan pasar tersebut bermakna (Rapoport, 1982; Low, 2017).

Makna tempat dapat bersifat positif maupun negatif. Suatu tempat dapat membangkitkan rasa bangga, nyaman, aman, dan memiliki, tetapi juga dapat menghadirkan rasa takut, trauma, keterasingan, atau diskriminasi. Perencana perlu memahami keragaman pengalaman tersebut karena revitalisasi ruang tidak selalu dinilai sama oleh seluruh kelompok masyarakat (Tuan, 1979; Manzo, 2005).

Makna tempat juga dapat diperebutkan. Pemerintah dapat memaknai kawasan sebagai objek pembangunan, investor memandangnya sebagai komoditas ekonomi, wisatawan memandangnya sebagai destinasi, sedangkan masyarakat lokal melihatnya sebagai ruang hidup dan warisan leluhur. Konflik penataan ruang sering muncul karena perbedaan makna dan kepentingan tersebut tidak dibicarakan secara terbuka (Massey, 1994; Smith, 2006).

7. Pengertian *sense of place*

Sense of place merupakan keseluruhan cara manusia mengenali, mengalami, merasakan, dan memberikan makna kepada suatu tempat. Konsep ini mencakup aspek kognitif, afektif, sosial, budaya, dan perilaku. *Sense of place* tidak hanya menjelaskan karakter sebuah lingkungan, tetapi juga hubungan antara karakter tersebut dan pengalaman manusia (Tuan, 1977; Jorgensen & Stedman, 2001).

Secara konseptual, *sense of place* dapat dipahami melalui tiga komponen, yaitu identitas tempat, keterikatan emosional, dan ketergantungan terhadap fungsi tempat. Identitas tempat menjelaskan hubungan tempat dengan konsep diri; keterikatan menjelaskan ikatan emosional; sedangkan ketergantungan tempat menunjukkan kemampuan suatu lokasi dalam mendukung kebutuhan dan aktivitas penggunaannya (Jorgensen & Stedman, 2001; Kyle et al., 2005).

Sense of place berkembang melalui durasi tinggal, pengalaman sehari-hari, hubungan sosial, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, pengetahuan sejarah, dan kualitas lingkungan. Penduduk lama tidak selalu mempunyai *sense of place* yang lebih kuat daripada pendatang karena kekuatan hubungan juga bergantung pada intensitas pengalaman dan partisipasi seseorang dalam kehidupan kawasan (Hay, 1998; Lewicka, 2011).

Tempat dengan *sense of place* kuat umumnya memiliki karakter yang dapat dikenali, kegiatan yang berkesinambungan, ruang sosial yang aktif, sejarah yang dipahami, serta kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Sebaliknya, standardisasi bangunan, hilangnya landmark, pemindahan penduduk, dan dominasi fungsi komersial dapat menghasilkan *placelessness*, yaitu kondisi ketika suatu tempat kehilangan keunikan dan keterhubungannya dengan masyarakat (Relph, 1976; Arefi, 1999).

8. *Place attachment*

Place attachment adalah ikatan emosional dan psikologis yang berkembang antara manusia dan tempat. Ikatan tersebut dapat terjadi pada berbagai skala, mulai dari rumah, lingkungan, kampung, kota, kawasan budaya, hingga wilayah asal. *Place attachment* terbentuk melalui pengalaman pribadi,

hubungan keluarga, interaksi sosial, kebiasaan, memori, serta nilai budaya yang diasosiasikan dengan tempat (Altman & Low, 1992; Hidalgo & Hernández, 2001).

Model tiga unsur menjelaskan *place attachment* melalui dimensi orang, proses psikologis, dan karakter tempat. Dimensi orang mencakup individu dan kelompok; proses psikologis mencakup emosi, pengetahuan, dan perilaku; sedangkan dimensi tempat mencakup lingkungan fisik dan sosial. Model tersebut memperlihatkan bahwa keterikatan tidak hanya dipengaruhi bentuk ruang, tetapi juga hubungan sosial dan pengalaman penggunaanya (Scannell & Gifford, 2010).

Place attachment dapat menghasilkan kepedulian, partisipasi, dan tindakan perlindungan terhadap lingkungan. Masyarakat yang mempunyai ikatan kuat dengan tempatnya cenderung memiliki perhatian terhadap perubahan kawasan dan dapat menolak pembangunan yang dianggap mengancam identitas lokal. Namun, keterikatan juga dapat menimbulkan resistensi terhadap perubahan meskipun perubahan tersebut dibutuhkan, sehingga perencanaan harus mengelola proses perubahan secara partisipatif (Lewicka, 2011; Devine-Wright, 2009).

Keterikatan terhadap tempat berhubungan erat dengan memori. Rumah lama, pohon, warung, jalan, dan ruang bermain dapat menjadi pemicu ingatan personal maupun kolektif. Apabila elemen tersebut hilang akibat penggusuran, bencana, atau pembangunan, masyarakat dapat mengalami rasa kehilangan tempat yang disebut *place loss* atau *solastalgia* (Fullilove, 2004; Albrecht et al., 2007).

9. *Genius loci*

Genius loci secara harfiah berarti "jiwa tempat" atau "roh tempat". Dalam fenomenologi arsitektur, konsep ini menjelaskan karakter khas suatu tempat yang terbentuk dari hubungan antara kondisi alam, lingkungan binaan, sejarah, atmosfer, aktivitas, dan pengalaman manusia. *Genius loci* membuat suatu tempat mempunyai kehadiran dan suasana yang berbeda dari tempat lainnya (Norberg-Schulz, 1980).

Genius loci tidak identik dengan keindahan visual. Jiwa tempat dapat muncul melalui topografi, suara, aroma, cahaya, material, pola aktivitas, ritme kehidupan, hubungan sosial, dan cerita masyarakat. Kampung nelayan, misalnya, dapat dikenali melalui hubungan antara permukiman dan laut, pola jalan, kegiatan perahu, tempat pelelangan ikan, aroma laut, serta pengetahuan lokal masyarakatnya (Norberg-Schulz, 1980; Seamon, 2018).

Dalam perencanaan, mempertahankan *genius loci* berarti menjaga hubungan penting yang membentuk karakter tempat, bukan sekadar meniru bentuk bangunan lama. Bangunan baru dapat menggunakan ekspresi kontemporer selama menghormati skala, pola ruang, iklim, material, kegiatan,

pandangan, dan nilai budaya setempat. Pendekatan ini memungkinkan perubahan berlangsung tanpa memutus kesinambungan identitas kawasan (Norberg-Schulz, 1980; Jiven & Larkham, 2003).

Konsep *genius loci* perlu diterapkan secara kritis karena karakter tempat tidak selalu tunggal dan permanen. Dalam kawasan yang majemuk, kelompok sosial dapat mempunyai pengalaman serta pemaknaan yang berbeda. Oleh sebab itu, “jiwa tempat” sebaiknya dipahami sebagai hasil hubungan yang terus berkembang, bukan sebagai karakter tetap yang hanya ditentukan oleh ahli atau perencana (Massey, 1994; Jiven & Larkham, 2003).

10. Hubungan antarkonsep

Identitas, simbol, makna, landmark, *place attachment*, *sense of place*, dan *genius loci* merupakan konsep yang saling berhubungan. Unsur fisik serta aktivitas membentuk simbol dan landmark; simbol tersebut membawa makna; pengalaman terhadap makna membangun keterikatan; sedangkan keterikatan dan identitas memperkuat *sense of place*. Kesatuan karakter alam, bentuk fisik, kegiatan, dan makna kemudian dapat dipahami sebagai *genius loci* suatu kawasan (Canter, 1977; Montgomery, 1998; Scannell & Gifford, 2010).

Konsep	Pengertian utama	Contoh
Identitas tempat	Karakter pembeda suatu tempat	Pola kampung, arsitektur, tradisi
Landmark budaya	Penanda orientasi yang memiliki nilai budaya	Masjid, keraton, tugu, gunung
Simbol ruang	Elemen yang mewakili nilai atau gagasan	Gerbang, warna, orientasi, alun-alun
Makna tempat	Nilai dan penafsiran terhadap tempat	Sejarah, memori, kesucian
<i>Place identity</i>	Tempat sebagai bagian dari identitas diri	Kampung halaman
<i>Place dependence</i>	Ketergantungan pada fungsi tempat	Pasar sebagai sumber penghidupan
<i>Place attachment</i>	Ikatan emosional manusia–tempat	Rasa memiliki terhadap kampung
<i>Sense of place</i>	Keseluruhan pengalaman dan pemaknaan tempat	Keunikan yang dirasakan masyarakat
<i>Genius loci</i>	Karakter atau jiwa khas tempat	Kesatuan alam, ruang, budaya, dan suasana

11. Ancaman terhadap identitas dan *sense of place*

Globalisasi, pembangunan berskala besar, standardisasi desain, perubahan fungsi lahan, dan komersialisasi warisan dapat melemahkan identitas kawasan. Bangunan baru yang mengabaikan skala, pola, material, aktivitas, dan sejarah lokal dapat menciptakan lingkungan yang secara fisik modern tetapi terputus dari konteks budaya. Kondisi tersebut dapat menghasilkan kawasan yang seragam dan dapat ditemukan di mana saja (Relph, 1976; Arefi, 1999).

Pariwisata budaya juga dapat memberikan dampak ganda. Pariwisata dapat menyediakan pendanaan bagi pelestarian serta memperkenalkan identitas lokal, tetapi dapat pula mengubah ritual, rumah, pasar, dan ruang publik menjadi komoditas pertunjukan. Apabila kebutuhan wisatawan lebih dominan daripada

kehidupan masyarakat, kawasan berisiko kehilangan keaslian sosial dan keterikatan penduduknya (Zukin, 1995; Smith, 2006).

Revitalisasi fisik yang tidak melibatkan masyarakat dapat menyebabkan perpindahan penduduk dan hilangnya jaringan sosial. Meskipun fasad bangunan berhasil diperbaiki, hilangnya penghuni, kegiatan, dan memori sosial dapat mengurangi makna tempat. Oleh sebab itu, keberhasilan revitalisasi tidak cukup diukur melalui perbaikan visual atau peningkatan nilai properti, tetapi juga melalui keberlanjutan komunitas dan aktivitas budaya (Pendlebury, 2013; UNESCO, 2011).

12. Implikasi bagi perencanaan ruang kultural

Analisis identitas kawasan perlu dimulai dengan mengidentifikasi unsur fisik, aktivitas, dan makna. Perencana dapat memetakan landmark, jalur, batas, pusat kegiatan, bangunan bersejarah, ruang ritual, serta elemen alam. Pemetaan tersebut perlu dilengkapi dengan wawancara, observasi, sejarah lisan, peta mental, dokumentasi aktivitas, dan diskusi kelompok untuk mengetahui unsur yang dianggap penting oleh masyarakat (Lynch, 1960; Low, 2017).

Peta mental dapat digunakan untuk mengetahui citra kawasan dalam pikiran masyarakat. Responden dapat diminta menggambar lokasi yang paling diingat, jalur yang sering dilalui, batas kawasan, pusat kegiatan, serta landmark utama. Perbandingan peta mental antarkelompok dapat menunjukkan persamaan dan perbedaan cara warga, pendatang, pedagang, perempuan, anak-anak, dan kelompok usia lanjut mengalami kawasan (Lynch, 1960; Purwanto, 2001).

Pengukuran *place attachment* dapat dilakukan melalui aspek identitas tempat, ketergantungan tempat, ikatan sosial, rasa bangga, keinginan menetap, dan kesediaan melindungi kawasan. Metode kuantitatif melalui kuesioner dapat dipadukan dengan wawancara mendalam, pemetaan partisipatif, dan observasi perilaku agar keterikatan terhadap tempat dapat dipahami secara lebih utuh (Williams & Vaske, 2003; Scannell & Gifford, 2010).

Strategi perencanaan dapat mencakup perlindungan landmark dan koridor pandang, penguatan ruang publik budaya, pemeliharaan nama tempat, penggunaan kembali bangunan bersejarah, perlindungan kegiatan tradisional, serta penyusunan panduan desain berbasis karakter lokal. Intervensi baru seharusnya memperkuat keterhubungan antara bentuk, aktivitas, dan makna, bukan hanya menghasilkan dekorasi yang tampak tradisional (Montgomery, 1998; UNESCO, 2011).

Partisipasi masyarakat merupakan syarat penting karena masyarakat adalah penghasil dan pemilik makna tempat. Perencana harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan elemen yang bernilai, perubahan yang

dapat diterima, serta bentuk pengembangan yang sesuai dengan identitas kawasan. Pendekatan tersebut membuat pelestarian tidak hanya berorientasi pada objek, tetapi juga pada hak, ingatan, dan kehidupan komunitas (Smith, 2006; Low, 2017).

13. Kesimpulan

Identitas tempat terbentuk melalui hubungan antara lingkungan fisik, aktivitas, sejarah, simbol, dan pengalaman masyarakat. Landmark budaya membantu orientasi sekaligus menjadi penanda memori kolektif, sedangkan simbol ruang menyampaikan nilai dan struktur budaya. Ketika manusia berinteraksi secara berkelanjutan dengan unsur-unsur tersebut, terbentuk makna, keterikatan, dan rasa memiliki terhadap tempat (Lynch, 1960; Rapoport, 1982).

Sense of place menggambarkan keseluruhan pengalaman dan pemaknaan manusia terhadap tempat, sedangkan *place attachment* menekankan ikatan emosional, kognitif, dan perilaku. *Genius loci* menggambarkan kesatuan karakter alam, lingkungan binaan, aktivitas, dan suasana yang menjadikan suatu tempat unik. Dalam perencanaan ruang kultural, seluruh konsep tersebut menjadi landasan untuk menghasilkan pembangunan yang kontekstual, inklusif, serta menghormati identitas masyarakat (Norberg-Schulz, 1980; Scannell & Gifford, 2010).

A. Kerangka analisis lapangan

Aspek	Pertanyaan pengamatan	Teknik pengumpulan data
Identitas tempat	Apa yang membedakan kawasan ini dari kawasan lain?	Observasi, wawancara, dokumentasi
Landmark budaya	Elemen apa yang paling mudah dikenali dan dianggap penting?	Pemetaan, peta mental
Simbol ruang	Nilai apa yang diwakili oleh bentuk, warna, atau orientasi?	Wawancara tokoh budaya
Makna tempat	Apa arti tempat bagi kelompok yang berbeda?	Wawancara mendalam, FGD
Aktivitas	Kegiatan apa yang menghidupkan identitas kawasan?	Observasi perilaku
Memori kolektif	Peristiwa dan cerita apa yang melekat pada lokasi?	Sejarah lisan
<i>Place attachment</i>	Seberapa kuat rasa memiliki dan keinginan melindungi tempat?	Kuesioner dan wawancara
<i>Genius loci</i>	Unsur apa yang membentuk suasana dan jiwa tempat?	Analisis fenomenologis
Transformasi	Perubahan apa yang memperkuat atau melemahkan identitas?	Analisis historis-spasial
Arahan perencanaan	Elemen dan hubungan apa yang harus dipertahankan?	Pemetaan partisipatif

B. Pertanyaan diskusi mahasiswa

1. Apa perbedaan antara identitas tempat dan *sense of place*?
2. Apakah setiap bangunan yang tinggi otomatis menjadi landmark budaya?
3. Bagaimana sebuah simbol ruang memperoleh makna?
4. Dapatkah pendatang mempunyai *place attachment* yang lebih kuat daripada penduduk lama?
5. Bagaimana pembangunan modern dapat mempertahankan *genius loci*?
6. Apa akibat revitalisasi yang mempertahankan bangunan tetapi mengurus komunitas?
7. Bagaimana mengukur *sense of place* dalam penelitian perencanaan?
8. Elemen apa yang menjadi landmark budaya dan pembentuk identitas Kota Malang?

DAFTAR PUSTAKA

1. Albrecht, G., Sartore, G.-M., Connor, L., Higginbotham, N., Freeman, S., Kelly, B., Stain, H., Tonna, A., & Pollard, G. (2007). Solastalgia: The distress caused by environmental change. *Australasian Psychiatry*, 15(Suppl. 1), S95–S98. <https://doi.org/10.1080/10398560701701288>
2. Altman, I., & Low, S. M. (Eds.). (1992). *Place attachment*. Plenum Press.
3. Arefi, M. (1999). Non-place and placelessness as narratives of loss: Rethinking the notion of place. *Journal of Urban Design*, 4(2), 179–193. <https://doi.org/10.1080/13574809908724445>
4. Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.
5. Canter, D. (1977). *The psychology of place*. Architectural Press.
6. Cresswell, T. (2015). *Place: An introduction* (2nd ed.). Wiley Blackwell.
7. Damayanti, R., & Kossak, F. (2016). Extending Kevin Lynch's concept of imageability in third space reading: Case study of Kampung, Surabaya–Indonesia. *Procedia—Social and Behavioral Sciences*, 227, 252–257. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.072>
8. Devine-Wright, P. (2009). Rethinking NIMBYism: The role of place attachment and place identity in explaining place-protective action. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 19(6), 426–441. <https://doi.org/10.1002/casp.1004>
9. Fullilove, M. T. (2004). *Root shock: How tearing up city neighborhoods hurts America, and what we can do about it*. One World/Ballantine Books.
10. Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.

11. Hay, R. (1998). Sense of place in developmental context. *Journal of Environmental Psychology*, 18(1), 5–29.
<https://doi.org/10.1006/jevp.1997.0060>
12. Hidalgo, M. C., & Hernández, B. (2001). Place attachment: Conceptual and empirical questions. *Journal of Environmental Psychology*, 21(3), 273–281. <https://doi.org/10.1006/jevp.2001.0221>
13. Jiven, G., & Larkham, P. J. (2003). Sense of place, authenticity and character: A commentary. *Journal of Urban Design*, 8(1), 67–81.
<https://doi.org/10.1080/1357480032000064773>
14. Jorgensen, B. S., & Stedman, R. C. (2001). Sense of place as an attitude: Lakeshore owners' attitudes toward their properties. *Journal of Environmental Psychology*, 21(3), 233–248.
<https://doi.org/10.1006/jevp.2001.0226>
15. Kyle, G., Graefe, A., & Manning, R. (2005). Testing the dimensionality of place attachment in recreational settings. *Environment and Behavior*, 37(2), 153–177. <https://doi.org/10.1177/0013916504269654>
16. Lalli, M. (1992). Urban-related identity: Theory, measurement, and empirical findings. *Journal of Environmental Psychology*, 12(4), 285–303.
[https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(05\)80078-7](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80078-7)
17. Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years? *Journal of Environmental Psychology*, 31(3), 207–230.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.10.001>
18. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
19. Lynch, K. (1960). *The image of the city*. MIT Press.
20. Lynch, K. (1972). *What time is this place?* MIT Press.
21. Manzo, L. C. (2005). For better or worse: Exploring multiple dimensions of place meaning. *Journal of Environmental Psychology*, 25(1), 67–86.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2005.01.002>
22. Massey, D. (1994). *Space, place and gender*. Polity Press.
23. Montgomery, J. (1998). Making a city: Urbanity, vitality and urban design. *Journal of Urban Design*, 3(1), 93–116.
<https://doi.org/10.1080/13574809808724418>
24. Nas, P. J. M. (Ed.). (1998). *Indonesian houses: Tradition and transformation in vernacular architecture*. KITLV Press.
25. Norberg-Schulz, C. (1980). *Genius loci: Towards a phenomenology of architecture*. Rizzoli.
26. Pendlebury, J. (2013). Conservation values, the authorised heritage discourse and the conservation-planning assemblage. *International*

- Journal of Heritage Studies*, 19(7), 709–727.
<https://doi.org/10.1080/13527258.2012.700282>
27. Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place-identity: Physical world socialization of the self. *Journal of Environmental Psychology*, 3(1), 57–83. [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(83\)80021-8](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(83)80021-8)
 28. Punter, J. (1991). Participation in the design of urban space. *Landscape Design*, 200, 24–27.
 29. Purwanto, E. (2001). Pendekatan pemahaman citra lingkungan perkotaan melalui kemampuan peta mental pengamat. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 29(1), 85–92.
 30. Rapoport, A. (1982). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach*. SAGE Publications.
 31. Relph, E. (1976). *Place and placelessness*. Pion.
 32. Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. *Journal of Environmental Psychology*, 30(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.006>
 33. Seamon, D. (2018). *Life takes place: Phenomenology, lifeworlds, and place making*. Routledge.
 34. Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
 35. Tuan, Y.-F. (1977). *Space and place: The perspective of experience*. University of Minnesota Press.
 36. Tuan, Y.-F. (1979). *Landscapes of fear*. Pantheon Books.
 37. Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. (1996). Place and identity processes. *Journal of Environmental Psychology*, 16(3), 205–220.
<https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0017>
 38. UNESCO. (2011). *Recommendation on the historic urban landscape*. UNESCO.
 39. Waterson, R. (1990). *The living house: An anthropology of architecture in South-East Asia*. Oxford University Press.
 40. Williams, D. R., & Stewart, S. I. (1998). Sense of place: An elusive concept that is finding a home in ecosystem management. *Journal of Forestry*, 96(5), 18–23.
 41. Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. *Forest Science*, 49(6), 830–840.
 42. Zukin, S. (1995). *The cultures of cities*. Blackwell.

POKOK BAHASAN MINGGU KE-11

Pembentukan Ruang Permukiman: proses sosial-kultural, adaptasi lingkungan, pola aktivitas, morfologi dan struktur ruang

1. Pengertian pembentukan ruang permukiman

Ruang permukiman merupakan lingkungan tempat manusia membangun rumah, menjalankan kehidupan keluarga, melakukan kegiatan ekonomi, berinteraksi sosial, melaksanakan tradisi, dan membentuk hubungan dengan lingkungan alam. Permukiman tidak hanya terdiri atas kumpulan bangunan, tetapi mencakup manusia, masyarakat, alam, jaringan prasarana, dan sistem kegiatan yang saling berhubungan. Karena itu, pembentukan permukiman merupakan proses multidimensional yang melibatkan unsur fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ekologis (Doxiadis, 1968; Rapoport, 1969).

Pembentukan ruang permukiman dapat dipahami sebagai proses ketika masyarakat memilih lokasi, menguasai dan membagi lahan, membangun hunian, membentuk jaringan jalan, menyediakan ruang bersama, dan menetapkan aturan penggunaan ruang. Proses tersebut dapat berlangsung secara terencana maupun organik. Permukiman terencana lebih banyak dibentuk melalui desain dan regulasi formal, sedangkan permukiman organik berkembang secara bertahap melalui keputusan masyarakat, hubungan kekerabatan, serta penyesuaian terhadap kondisi setempat (Kostof, 1991; Habraken, 1998).

Ruang permukiman selalu mengalami perubahan. Pertumbuhan penduduk, pembentukan rumah tangga baru, perubahan mata pencaharian, perkembangan transportasi, inovasi teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan nilai budaya dapat mengubah pola serta struktur permukiman. Oleh sebab itu, permukiman sebaiknya dipahami sebagai sistem hidup yang terus beradaptasi, bukan sebagai bentuk fisik yang bersifat tetap (Turner, 1976; Oliver, 2006).

2. Komponen pembentuk permukiman

Doxiadis menjelaskan permukiman sebagai suatu sistem yang terdiri atas lima unsur, yaitu alam (*nature*), manusia (*anthropos*), masyarakat (*society*), bangunan atau ruang pelindung (*shells*), dan jaringan (*networks*). Alam menyediakan lokasi dan sumber daya; manusia menjadi pelaku utama; masyarakat membentuk kelembagaan serta aturan; bangunan mewadahi kegiatan; sedangkan jaringan menghubungkan berbagai bagian permukiman (Doxiadis, 1968).

Kelima unsur tersebut memiliki hubungan saling bergantung. Bentuk rumah dipengaruhi oleh iklim dan material, tetapi juga oleh struktur keluarga serta kemampuan ekonomi. Jaringan jalan ditentukan oleh topografi, tetapi sekaligus dipengaruhi oleh pola kepemilikan tanah dan hubungan sosial. Ruang bersama dapat terbentuk karena kebutuhan aktivitas, tetapi juga karena tradisi dan nilai kebersamaan masyarakat (Doxiadis, 1968; Rapoport, 1982).

Dalam perspektif ruang kultural, masyarakat dan kebudayaan menempati posisi penting karena keduanya memberikan aturan dan makna terhadap lingkungan. Masyarakat menentukan ruang yang bersifat publik atau privat, sakral atau profan, laki-laki atau perempuan, serta ruang yang boleh atau tidak boleh dimasuki. Oleh karena itu, konfigurasi permukiman tidak dapat dijelaskan hanya melalui pertimbangan teknis dan lingkungan alam (Rapoport, 1969; Waterson, 1990).

3. Proses sosial-kultural dalam pembentukan permukiman

Proses sosial-kultural adalah proses ketika nilai, norma, sistem kekerabatan, kepercayaan, mata pencaharian, struktur sosial, dan kebiasaan masyarakat diterjemahkan menjadi susunan ruang. Masyarakat tidak membangun permukiman secara acak, tetapi mengikuti konsepsi budaya mengenai kehidupan yang baik, hubungan keluarga, kedudukan sosial, keamanan, kesucian, serta hubungan manusia dengan alam (Rapoport, 1969; Waterson, 1990).

Sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pengelompokan rumah dan pembagian lahan. Masyarakat dengan hubungan keluarga yang kuat cenderung membentuk kelompok hunian berdasarkan garis keturunan atau keluarga besar. Rumah-rumah dapat ditempatkan berdekatan dan dihubungkan oleh halaman, jalan kecil, atau ruang bersama yang mendukung interaksi serta kerja sama antarkeluarga (Waterson, 1990; Oliver, 2006).

Pembentukan rumah tangga baru mendorong pertumbuhan ruang permukiman. Anak yang menikah dapat membangun rumah di dekat rumah orang tua, menambah bagian rumah lama, atau membuka lahan baru. Proses tersebut menghasilkan pertumbuhan inkremental, yaitu perkembangan yang berlangsung sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan dan kemampuan penghuni. Dalam jangka panjang, pertumbuhan tersebut dapat menghasilkan kepadatan, pembentukan lorong baru, serta perubahan batas ruang privat dan komunal (Habraken, 1998; Turner, 1976).

Struktur sosial juga dapat menghasilkan hierarki ruang. Rumah tokoh adat, rumah pemimpin, tempat ibadah, balai pertemuan, dan bangunan komunal dapat menempati lokasi yang lebih menonjol daripada hunian biasa. Perbedaan ukuran, bentuk, material, orientasi, dan posisi bangunan dapat menjadi representasi kedudukan sosial serta pembagian kekuasaan dalam masyarakat (Bourdieu, 1977; Rapoport, 1982).

Sistem kepercayaan dan kosmologi dapat menentukan pusat, arah, batas, serta hierarki permukiman. Gunung, laut, sungai, matahari, tempat ibadah, makam leluhur, dan tempat asal komunitas dapat menjadi orientasi simbolis. Karena itu, struktur ruang permukiman tradisional sering mencerminkan hubungan antara manusia, leluhur, alam, dan kekuatan transenden (Eliade, 1959; Waterson, 1990).

Nilai kebersamaan diwujudkan melalui ruang komunal, seperti halaman bersama, balai adat, lapangan, tempat ibadah, jalan lingkungan, sumber air, dan ruang kerja kolektif. Ruang komunal berfungsi untuk pertemuan, musyawarah, upacara, permainan, produksi, dan penyelesaian konflik. Kehadiran ruang

tersebut memperlihatkan bahwa permukiman merupakan hasil organisasi sosial, bukan sekadar kumpulan rumah individual (Rapoport, 1982; Low, 2017).

4. Penguasaan lahan dan kelembagaan

Pola penguasaan serta pewarisan tanah mempunyai pengaruh besar terhadap bentuk permukiman. Tanah dapat dimiliki secara individual, keluarga, komunal, adat, atau negara. Setiap sistem menghasilkan aturan yang berbeda mengenai pembagian bidang, hak membangun, akses jalan, pemanfaatan sumber daya, dan perubahan fungsi lahan (Payne, 2002; Needham, 2006).

Sistem pewarisan menyebabkan bidang tanah mengalami pembagian, penggabungan, atau perubahan bentuk. Pembagian tanah kepada ahli waris dapat menghasilkan petak yang semakin kecil dan memanjang, sedangkan konsolidasi oleh pemilik modal dapat menghasilkan bidang yang lebih luas. Perubahan tersebut kemudian memengaruhi orientasi bangunan, akses jalan, kepadatan, serta hubungan antara ruang privat dan ruang publik (Conzen, 1960; Moudon, 1997).

Kelembagaan lokal berfungsi mengatur pembentukan dan penggunaan ruang. Aturan adat, kesepakatan kampung, organisasi keagamaan, serta kelompok pengelola sumber daya dapat menentukan lokasi bangunan, batas kawasan, pemanfaatan air, pemeliharaan jalan, dan perlindungan ruang sakral. Keberadaan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa tata ruang permukiman terbentuk melalui norma serta proses pengambilan keputusan kolektif (Ostrom, 1990; Low, 2017).

Dalam permukiman informal, penguasaan ruang sering berkembang sebelum kepastian hukum tanah terbentuk. Masyarakat membangun rumah dan prasarana secara bertahap berdasarkan kesepakatan, jaringan sosial, serta kemampuan ekonomi. Meskipun tidak selalu sesuai dengan standar formal, proses tersebut dapat menghasilkan sistem ruang yang berfungsi dan memiliki keteraturan internal (Turner, 1976; UN-Habitat, 2003).

5. Adaptasi terhadap lingkungan alam

Adaptasi lingkungan adalah kemampuan masyarakat menyesuaikan bentuk permukiman dengan iklim, topografi, tanah, air, vegetasi, sumber daya, dan bahaya alam. Adaptasi tersebut berkembang melalui pengalaman jangka panjang dan diwariskan sebagai pengetahuan lokal. Oleh karena itu, bentuk permukiman tradisional sering mengandung prinsip ekologis yang sesuai dengan kondisi wilayahnya (Rapoport, 1969; Oliver, 2006).

Pada daerah beriklim tropis lembap, rumah umumnya membutuhkan ventilasi silang, perlindungan dari hujan, pengendalian panas, serta ruang peralihan antara bagian dalam dan luar. Atap lebar, teras, bukaan, rumah panggung, halaman, dan vegetasi peneduh merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi tersebut. Susunan bangunan juga dapat mempertimbangkan arah angin dan pergerakan matahari (Olgyay, 1963; Koenigsberger et al., 1974).

Topografi memengaruhi pola jalan, orientasi bangunan, kepadatan, serta arah perkembangan kawasan. Pada daerah pegunungan, bangunan dapat mengikuti kontur untuk mengurangi penggalian dan menjaga kestabilan lereng. Pada dataran, pola permukiman dapat berkembang lebih menyebar atau

membentuk jaringan jalan yang relatif teratur. Pada wilayah pesisir dan rawa, rumah panggung serta jalur air sering menjadi unsur utama struktur ruang (Oliver, 2006; Rapoport, 1969).

Ketersediaan air merupakan faktor dasar dalam pemilihan lokasi permukiman. Sungai, mata air, sumur, dan saluran irigasi berfungsi untuk kebutuhan domestik, pertanian, transportasi, serta kegiatan ritual. Hubungan permukiman dengan air tidak hanya bersifat fungsional, tetapi dapat memiliki makna sosial dan spiritual yang menentukan lokasi ruang komunal serta tempat yang dilindungi (Doxiadis, 1968; Lansing, 1991).

Mata pencaharian juga merupakan bentuk hubungan adaptif antara masyarakat dan lingkungan. Permukiman petani memiliki hubungan erat dengan sawah, ladang, lumbung, dan jaringan irigasi. Permukiman nelayan berorientasi pada laut, tempat tambat perahu, pengolahan ikan, dan pasar. Sementara itu, permukiman pengrajin membutuhkan ruang produksi, penyimpanan, dan distribusi yang dapat menyatu dengan rumah (Rapoport, 1969; Waterson, 1990).

Adaptasi terhadap bencana menghasilkan pola dan aturan ruang tertentu. Masyarakat dapat menghindari kawasan rawan, meninggikan lantai, menggunakan konstruksi fleksibel, membangun jalur evakuasi, atau memanfaatkan ruang terbuka sebagai tempat perlindungan. Pengetahuan tersebut penting dalam perencanaan kontemporer karena menghubungkan kearifan lokal dengan strategi pengurangan risiko bencana (Oliver, 2006; Mercer et al., 2010).

6. Pola aktivitas sebagai pembentuk ruang

Pola aktivitas adalah susunan kegiatan manusia menurut jenis, pelaku, lokasi, waktu, dan hubungan antarkegiatan. Aktivitas domestik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, dan rekreasi membutuhkan ruang yang berbeda. Pengulangan aktivitas dalam jangka waktu tertentu kemudian membentuk pola penggunaan dan struktur ruang permukiman (Rapoport, 1990; Gehl, 2011).

Aktivitas domestik membentuk pembagian ruang dalam rumah dan pekarangan. Kegiatan menerima tamu, memasak, tidur, bekerja, merawat anak, menyimpan hasil panen, dan melaksanakan ritual dapat ditempatkan pada bagian yang berbeda. Pembagian tersebut dipengaruhi oleh privasi, gender, usia, hubungan kekerabatan, serta nilai kesucian yang berlaku dalam masyarakat (Rapoport, 1969; Waterson, 1990).

Aktivitas ekonomi dapat berlangsung di rumah, halaman, jalan, pasar, lahan pertanian, pesisir, atau bengkel. Ketika rumah digunakan sekaligus sebagai tempat produksi dan perdagangan, batas antara fungsi hunian dan ekonomi menjadi fleksibel. Perubahan mata pencaharian dapat menyebabkan penambahan ruang usaha, perubahan fasad, peningkatan akses kendaraan, serta pergeseran fungsi jalan lingkungan (Turner, 1976; Habraken, 1998).

Aktivitas sosial menghasilkan ruang pertemuan. Teras, halaman, warung, persimpangan, tempat ibadah, dan jalan lingkungan dapat menjadi ruang interaksi meskipun tidak dirancang secara formal sebagai ruang publik. Intensitas interaksi dipengaruhi oleh jarak antarrumah, keterbukaan batas,

kenyamanan, keamanan, dan kesempatan untuk melihat serta bertemu orang lain (Gehl, 2011; Hall, 1966).

Aktivitas budaya dan ritual membentuk ruang yang bersifat periodik. Jalan dapat menjadi jalur prosesi, halaman berubah menjadi lokasi upacara, dan ruang terbuka menjadi tempat perayaan pada waktu tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi ruang tidak selalu tetap, melainkan dapat berubah menurut waktu, peristiwa, dan aturan budaya (Turner, 1969; Low, 2017).

Pola aktivitas harian dapat dianalisis melalui hubungan antara rumah, tempat kerja, sekolah, pasar, tempat ibadah, ruang bermain, dan fasilitas pelayanan. Semakin dekat hubungan fungsional tersebut, semakin intensif pergerakan dan interaksi yang terbentuk. Analisis aktivitas membantu perencana memahami ruang yang benar-benar digunakan masyarakat, termasuk ruang informal yang tidak tercatat dalam peta tata guna lahan (Gehl & Svarre, 2013; Rapoport, 1990).

7. Pengertian morfologi permukiman

Morfologi permukiman adalah kajian mengenai bentuk fisik, susunan, asal-usul, dan transformasi suatu kawasan. Kajian ini memperhatikan jaringan jalan, bidang tanah, bangunan, ruang terbuka, kepadatan, orientasi, serta hubungan antarunsur tersebut. Morfologi tidak hanya menggambarkan bentuk pada satu waktu, tetapi juga menjelaskan proses yang menghasilkan dan mengubah bentuk tersebut (Conzen, 1960; Moudon, 1997).

Tiga unsur dasar analisis morfologi adalah jaringan jalan, bidang atau kavling, serta massa bangunan. Jalan membentuk kerangka pergerakan dan akses; bidang tanah menjadi satuan kepemilikan serta pengembangan; sedangkan bangunan menunjukkan cara ruang digunakan. Hubungan ketiganya menghasilkan tekstur atau *urban fabric* yang membedakan satu permukiman dari permukiman lainnya (Conzen, 1960; Kropf, 1996).

Morfologi permukiman dapat berbentuk mengelompok, linear, menyebar, konsentris, radial, kisi-kisi, atau gabungan. Pola mengelompok dapat terbentuk karena keamanan, hubungan kekerabatan, dan keterbatasan lahan. Pola linear dapat mengikuti jalan, sungai, pantai, atau lembah. Pola menyebar sering berhubungan dengan pertanian dan penguasaan lahan yang luas (Kostof, 1991; Doxiadis, 1968).

Bentuk morfologi tidak selalu dirancang secara keseluruhan. Banyak permukiman tumbuh melalui proses agregasi, yaitu penambahan unsur sedikit demi sedikit. Satu rumah bertambah menjadi kelompok rumah, jalan setapak berkembang menjadi jalan lingkungan, dan ruang kosong berubah menjadi fasilitas bersama. Proses kecil yang berulang dapat menghasilkan bentuk kawasan yang kompleks tetapi tetap mempunyai logika internal (Habraken, 1998; Moudon, 1997).

8. Proses transformasi morfologi

Transformasi morfologi dapat terjadi melalui penambahan, pengurangan, pembagian, penggabungan, penggantian, dan perubahan fungsi elemen ruang. Rumah dapat diperluas, pekarangan dibagi, jalan diperlebar, ruang terbuka dibangun, atau bangunan lama diganti. Akumulasi perubahan

tersebut menghasilkan struktur permukiman yang berbeda dari kondisi awalnya (Conzen, 1960; Kropf, 1996).

Pertumbuhan penduduk biasanya mendorong intensifikasi penggunaan lahan. Ruang terbuka privat dapat berubah menjadi bangunan, rumah satu lantai menjadi bertingkat, dan bidang tanah dibagi untuk anggota keluarga baru. Jika tidak dikendalikan, intensifikasi tersebut dapat mengurangi pencahayaan, ventilasi, ruang bermain, resapan air, serta akses keadaan darurat (Habraken, 1998; UN-Habitat, 2003).

Perkembangan jaringan transportasi juga mengubah morfologi. Jalan baru meningkatkan aksesibilitas serta nilai tanah dan kemudian menarik kegiatan perdagangan, jasa, dan perumahan. Bangunan yang sebelumnya menghadap ruang internal dapat beralih menghadap jalan utama. Dalam proses ini, struktur ruang yang semula berbasis kekerabatan dapat berubah menjadi struktur yang berorientasi pada pasar (Kostof, 1991; Moudon, 1997).

Transformasi ekonomi dapat mengubah fungsi sekaligus bentuk ruang. Kawasan hunian dapat berkembang menjadi kawasan campuran, kawasan produksi menjadi destinasi wisata, atau rumah tradisional menjadi penginapan. Perubahan fungsi dapat mempertahankan bangunan, tetapi juga dapat menghilangkan aktivitas dan hubungan sosial yang sebelumnya membentuk identitas kawasan (Smith, 2006; Pendlebury, 2013).

9. Struktur ruang permukiman

Struktur ruang adalah susunan pusat kegiatan, jaringan penghubung, zona fungsi, dan hierarki ruang yang membentuk suatu sistem permukiman. Struktur ruang menunjukkan bagaimana bagian-bagian kawasan saling berhubungan dan bagaimana manusia, barang, informasi, serta kegiatan bergerak di dalamnya (Doxiadis, 1968; Hillier & Hanson, 1984).

Pusat permukiman dapat berupa tempat ibadah, balai adat, pasar, lapangan, sumber air, rumah tokoh masyarakat, atau persimpangan penting. Pusat tersebut tidak selalu berada di tengah secara geometris. Sebuah lokasi dapat menjadi pusat karena memiliki intensitas kegiatan, aksesibilitas, nilai sejarah, atau makna simbolis yang tinggi (Lynch, 1960; Rapoport, 1982).

Jaringan jalan membentuk hubungan antara rumah, ruang bersama, tempat kerja, fasilitas, serta kawasan luar. Jalan utama, jalan lingkungan, gang, dan jalan setapak memiliki tingkat akses serta fungsi yang berbeda. Konfigurasi jaringan turut memengaruhi pola pergerakan, intensitas pertemuan, lokasi kegiatan ekonomi, dan tingkat privasi (Hillier & Hanson, 1984; Hillier, 1996).

Batas permukiman dapat bersifat fisik maupun simbolis. Sungai, jalan, dinding, vegetasi, lereng, dan perubahan penggunaan lahan merupakan batas fisik, sedangkan wilayah adat, larangan, nama tempat, atau perbedaan identitas kelompok merupakan batas simbolis. Batas dapat bersifat tegas, kabur, tetap, atau berubah menurut aktivitas dan waktu (Lynch, 1960; Low, 2017).

Hierarki ruang menunjukkan tingkatan akses dan kepentingan, misalnya publik, semipublik, semiprivat, dan privat. Jalan utama dan pasar cenderung bersifat publik; gang atau halaman bersama dapat bersifat semipublik; teras dan pekarangan menjadi ruang peralihan; sedangkan bagian dalam rumah bersifat

privat. Urutan tersebut membantu masyarakat mengatur interaksi, keamanan, dan privasi (Newman, 1972; Rapoport, 1982).

Dalam permukiman tradisional, hierarki juga dapat dibentuk oleh kategori sakral dan profan, pusat dan pinggiran, hulu dan hilir, atau tinggi dan rendah. Struktur demikian memperlihatkan bahwa organisasi ruang merupakan representasi pandangan hidup masyarakat. Analisis struktur ruang karena itu perlu memperhatikan fungsi, akses, simbol, dan aturan budaya secara bersamaan (Eliade, 1959; Waterson, 1990).

10. Hubungan pola aktivitas, morfologi, dan struktur ruang

Pola aktivitas, morfologi, dan struktur ruang mempunyai hubungan timbal balik. Aktivitas yang dilakukan berulang membentuk kebutuhan ruang dan jalur pergerakan. Kebutuhan tersebut mendorong pembangunan serta perubahan bentuk fisik. Setelah terbentuk, konfigurasi fisik kemudian memengaruhi kemungkinan aktivitas dan interaksi berikutnya (Rapoport, 1990; Hillier, 1996).

Sebagai contoh, keberadaan pasar pada persimpangan meningkatkan arus pergerakan dan mendorong pertumbuhan warung serta jasa di sekitarnya. Perubahan tersebut memperkuat kedudukan persimpangan sebagai pusat kegiatan. Sebaliknya, jalan yang sempit dan berbelok dapat membatasi kendaraan tetapi mendukung interaksi pejalan kaki dan mempertahankan suasana lingkungan (Hillier, 1996; Gehl, 2011).

Hubungan antara ruang dan aktivitas tidak bersifat deterministik. Bentuk ruang memang memengaruhi perilaku, tetapi masyarakat juga dapat menggunakan ruang secara kreatif di luar fungsi yang direncanakan. Jalan dapat menjadi tempat bermain, berjualan, berbincang, dan melakukan upacara. Fenomena ini menunjukkan pentingnya mengamati praktik ruang, bukan hanya membaca peta formal (Lefebvre, 1991; Low, 2017).

11. Contoh pembentukan permukiman di Indonesia

Pada permukiman Bali, struktur ruang dipengaruhi oleh kosmologi, orientasi gunung–laut, sistem banjar, pura, serta pembagian fungsi dalam pekarangan. Struktur tersebut sekaligus merespons iklim melalui penggunaan halaman, paviliun terbuka, vegetasi, dan ruang peralihan. Contoh ini menunjukkan bahwa adaptasi lingkungan dan nilai budaya bekerja secara bersamaan dalam membentuk permukiman (Parimin, 1986; Reuter, 2002).

Pada permukiman Toraja, tongkonan, lumbung, halaman, sawah, dan situs pemakaman membentuk suatu kesatuan sosial-spasial. Orientasi bangunan dan susunan kelompok rumah berhubungan dengan kekerabatan, kedudukan adat, serta ritual kehidupan dan kematian. Morfologi permukiman karenanya tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan kepercayaan masyarakat (Waterson, 1990; Kis-Jovak et al., 1988).

Pada masyarakat Tengger, pembentukan ruang dipengaruhi oleh hubungan antara hunian, lahan pertanian, tempat pemujaan, makam, jalan, dan lanskap Gunung Bromo. Nilai budaya, aktivitas pertanian, kondisi pegunungan, dan praktik ritual membentuk struktur permukiman yang memiliki orientasi serta hierarki tertentu (Hefner, 1985; Sasongko, 2005).

Permukiman nelayan cenderung menunjukkan hubungan kuat antara rumah, pantai, tempat tambat perahu, ruang pengolahan hasil laut, dan jalur distribusi. Keterbatasan lahan serta kebutuhan akses langsung ke laut dapat menghasilkan kepadatan dan pola linear. Namun, bentuk akhirnya tetap berbeda antarkawasan karena dipengaruhi sistem kepemilikan, teknologi penangkapan, hubungan sosial, dan kondisi pesisir (Rapoport, 1969; Oliver, 2006).

Kampung perkotaan berkembang melalui proses inkremental dan swadaya. Rumah dapat berfungsi sebagai hunian sekaligus tempat usaha, jalan kecil menjadi ruang sosial, dan prasarana dibangun melalui kerja sama masyarakat. Meskipun terlihat tidak teratur dari sudut pandang formal, kampung dapat memiliki struktur internal yang efisien berdasarkan kedekatan aktivitas, jaringan sosial, dan penggunaan ruang yang fleksibel (Turner, 1976; Setiawan, 2010).

12. Metode analisis pembentukan ruang permukiman

Analisis pembentukan ruang permukiman perlu menggabungkan pendekatan sinkronik dan diakronik. Pendekatan sinkronik mengkaji kondisi ruang pada satu waktu, sedangkan pendekatan diakronik menelusuri perkembangan ruang dari waktu ke waktu. Perbandingan peta lama, citra udara, dokumen, foto, dan sejarah lisan dapat menjelaskan tahapan perubahan morfologi (Conzen, 1960; Moudon, 1997).

Analisis morfologi dapat dilakukan dengan memetakan jaringan jalan, bidang tanah, tapak bangunan, ruang terbuka, kepadatan, orientasi, serta fungsi lahan. Peta dari beberapa periode kemudian dibandingkan untuk menemukan bagian yang bertahan, berubah, atau hilang. Hasilnya dapat menunjukkan pola ekspansi, pemadatan, fragmentasi, dan perubahan fungsi kawasan (Kropf, 1996; Oliveira, 2016).

Analisis aktivitas dilakukan melalui observasi perilaku, pencatatan jenis kegiatan, lokasi, pelaku, waktu, durasi, dan pola pergerakan. Teknik *behavioral mapping* membantu mengidentifikasi ruang yang aktif, tidak aktif, digunakan bersama, atau berubah fungsi pada waktu tertentu. Analisis ini penting karena peta tata guna lahan formal tidak selalu menggambarkan penggunaan ruang yang sebenarnya (Gehl & Svarre, 2013; Low, 2017).

Analisis sosial-kultural dapat dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok, sejarah lisan, silsilah keluarga, dan pemetaan partisipatif. Data tersebut membantu menjelaskan sistem nilai, kekerabatan, penguasaan tanah, tradisi, konflik, serta makna yang mendasari susunan ruang. Integrasi data fisik dan sosial akan menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh (Rapoport, 1982; Low, 2017).

Analisis konfigurasi ruang dapat menggunakan pendekatan *space syntax* untuk mengukur keterhubungan, kedalaman, integrasi, dan pilihan jalur. Hasil analisis dapat digunakan untuk memahami hubungan konfigurasi jalan dengan pergerakan, lokasi kegiatan, interaksi sosial, dan tingkat aksesibilitas. Namun, interpretasinya tetap perlu dilengkapi data sosial dan budaya agar tidak berhenti pada ukuran geometris (Hillier & Hanson, 1984; Hillier, 1996).

13. Implikasi bagi perencanaan ruang kultural

Perencanaan ruang kultural harus mengenali proses pembentukan permukiman sebelum merumuskan intervensi. Perencana perlu mengetahui unsur yang terbentuk oleh adaptasi lingkungan, struktur sosial, kekerabatan, aktivitas ekonomi, ritual, dan sejarah kawasan. Intervensi yang mengabaikan proses tersebut dapat merusak hubungan ruang yang penting bagi kehidupan masyarakat (Rapoport, 1982; UNESCO, 2011).

Pelestarian permukiman tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan bangunan tertentu. Struktur jalan, bidang tanah, ruang komunal, jalur ritual, hubungan dengan bentang alam, pola aktivitas, dan kelembagaan lokal juga perlu dipertimbangkan. Pendekatan kawasan dan lanskap budaya lebih sesuai untuk menjaga hubungan antarelemen tersebut (Smith, 2006; UNESCO, 2011).

Peningkatan kualitas permukiman sebaiknya menggunakan pendekatan bertahap dan partisipatif. Penyediaan air, sanitasi, akses darurat, ruang terbuka, dan perbaikan rumah dapat dilakukan tanpa menghilangkan jaringan sosial serta pola aktivitas yang telah terbentuk. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menentukan prioritas dan bentuk perubahan agar hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan setempat (Turner, 1976; UN-Habitat, 2003).

Perencanaan juga perlu memberikan ruang bagi perubahan. Mempertahankan identitas tidak berarti membekukan permukiman dalam kondisi masa lalu. Strategi yang dibutuhkan adalah mengarahkan transformasi agar bentuk baru tetap menghargai skala, pola, hubungan sosial, pengetahuan lingkungan, dan nilai budaya kawasan (Habraken, 1998; Pendlebury, 2013).

14. Kerangka konseptual

Pembentukan ruang permukiman dapat diringkas sebagai hubungan berikut:

Nilai dan sistem sosial → pengaturan masyarakat dan lahan → pola aktivitas → kebutuhan ruang → bentuk fisik dan jaringan → struktur ruang → pengalaman masyarakat → adaptasi dan transformasi ruang

Hubungan tersebut bersifat siklis. Kebudayaan dan aktivitas membentuk ruang, sedangkan ruang yang telah terbentuk memengaruhi kegiatan, interaksi, identitas, dan perkembangan kebudayaan berikutnya. Dengan demikian, ruang permukiman merupakan hasil sekaligus media berlangsungnya kehidupan sosial (Lefebvre, 1991; Rapoport, 1990).

15. Matriks analisis lapangan

Aspek	Unsur yang diamati	Pertanyaan analisis
Sejarah pembentukan	Asal-usul, tahapan pertumbuhan	Kapan dan bagaimana permukiman terbentuk?
Sosial-kultural	Kekerabatan, nilai, adat, religi	Aturan budaya apa yang membentuk ruang?
Penguasaan lahan	Kepemilikan dan pewarisan	Bagaimana tanah dibagi dan dialihkan?
Lingkungan	Topografi, air, iklim, vegetasi	Bagaimana masyarakat beradaptasi?

Aktivitas	Domestik, ekonomi, sosial, ritual	Di mana dan kapan kegiatan berlangsung?
Jaringan	Jalan, gang, jalur air	Bagaimana hubungan antarruang terbentuk?
Morfologi	Blok, kavling, bangunan	Pola fisik apa yang dominan?
Struktur ruang	Pusat, jaringan, zona, batas	Bagaimana hierarki kawasan tersusun?
Ruang komunal	Lapangan, halaman, balai	Siapa yang menggunakan dan mengelolanya?
Transformasi	Penambahan dan perubahan fungsi	Unsur apa yang berubah atau bertahan?
Risiko	Banjir, longsor, kebakaran	Bagaimana pola ruang merespons bahaya?
Arahan perencanaan	Pelestarian dan peningkatan	Hubungan ruang apa yang harus dijaga?

16. Kesimpulan

Pembentukan ruang permukiman merupakan hasil interaksi antara masyarakat, kebudayaan, lingkungan, aktivitas, penguasaan lahan, dan perubahan waktu. Proses sosial-kultural membentuk aturan serta makna ruang, sementara kondisi lingkungan mendorong masyarakat mengembangkan strategi adaptasi. Aktivitas yang berlangsung berulang kemudian membentuk kebutuhan ruang, jaringan pergerakan, dan pusat kegiatan (Doxiadis, 1968; Rapoport, 1969).

Morfologi menjelaskan bentuk serta transformasi jaringan jalan, bidang tanah, bangunan, dan ruang terbuka, sedangkan struktur ruang menjelaskan hubungan fungsional dan hierarkis di antara unsur-unsur tersebut. Pemahaman kedua aspek harus dilengkapi dengan analisis sosial-kultural agar perencanaan tidak hanya menghasilkan keteraturan fisik, tetapi juga menjaga kehidupan, identitas, dan keberlanjutan masyarakat (Moudon, 1997; Hillier & Hanson, 1984).

A. Pertanyaan diskusi mahasiswa

2. Mengapa permukiman tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan rumah?
3. Bagaimana sistem kekerabatan memengaruhi pengelompokan bangunan?
4. Apa perbedaan morfologi dan struktur ruang permukiman?
5. Bagaimana pola aktivitas sehari-hari membentuk jalan dan ruang komunal?
6. Mengapa permukiman yang tampak tidak teratur dapat memiliki keteraturan sosial?
7. Bagaimana perubahan mata pencaharian mengubah morfologi kawasan?
8. Unsur ruang apa yang harus dipertahankan ketika kampung ditingkatkan kualitasnya?
9. Bagaimana cara mengintegrasikan kearifan lokal dengan standar keselamatan modern?

DAFTAR PUSTAKA

1. Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.

2. Conzen, M. R. G. (1960). *Alnwick, Northumberland: A study in town-plan analysis*. George Philip.
3. Doxiadis, C. A. (1968). *Ekistics: An introduction to the science of human settlements*. Oxford University Press.
4. Eliade, M. (1959). *The sacred and the profane: The nature of religion*. Harcourt, Brace & World.
5. Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
6. Gehl, J., & Svarre, B. (2013). *How to study public life*. Island Press.
7. Habraken, N. J. (1998). *The structure of the ordinary: Form and control in the built environment*. MIT Press.
8. Hall, E. T. (1966). *The hidden dimension*. Doubleday.
9. Hefner, R. W. (1985). *Hindu Javanese: Tengger tradition and Islam*. Princeton University Press.
10. Hillier, B. (1996). *Space is the machine: A configurational theory of architecture*. Cambridge University Press.
11. Hillier, B., & Hanson, J. (1984). *The social logic of space*. Cambridge University Press.
12. Kis-Jovak, J. I., Nooy-Palm, H., Schefold, R., & Schulz-Dornburg, U. (1988). *Banua Toraja: Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja, Sulawesi, Indonesia*. Royal Tropical Institute.
13. Koenigsberger, O. H., Ingersoll, T. G., Mayhew, A., & Szokolay, S. V. (1974). *Manual of tropical housing and building: Climatic design*. Longman.
14. Kostof, S. (1991). *The city shaped: Urban patterns and meanings through history*. Thames & Hudson.
15. Kropf, K. S. (1996). Urban tissue and the character of towns. *Urban Design International*, 1(3), 247–263.
<https://doi.org/10.1057/udi.1996.32>
16. Lansing, J. S. (1991). *Priests and programmers: Technologies of power in the engineered landscape of Bali*. Princeton University Press.
17. Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.
18. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
19. Lynch, K. (1960). *The image of the city*. MIT Press.
20. Mercer, J., Kelman, I., Taranis, L., & Suchet-Pearson, S. (2010). Framework for integrating indigenous and scientific knowledge for disaster risk reduction. *Disasters*, 34(1), 214–239.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2009.01126.x>
21. Moudon, A. V. (1997). Urban morphology as an emerging interdisciplinary field. *Urban Morphology*, 1(1), 3–10.
<https://doi.org/10.51347/jum.v1i1.4047>
22. Needham, B. (2006). *Planning, law and economics: The rules we make for using land*. Routledge.
23. Newman, O. (1972). *Defensible space: Crime prevention through urban design*. Macmillan.

24. Olgyay, V. (1963). *Design with climate: Bioclimatic approach to architectural regionalism*. Princeton University Press.
25. Oliver, P. (2006). *Built to meet needs: Cultural issues in vernacular architecture*. Architectural Press.
26. Oliveira, V. (2016). *Urban morphology: An introduction to the study of the physical form of cities*. Springer.
27. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
28. Parimin, A. P. (1986). *Fundamental study on spatial formation of island village: Environmental hierarchy of sacred-profane concept in Bali* (Doctoral dissertation, Osaka University).
29. Payne, G. (Ed.). (2002). *Land, rights and innovation: Improving tenure security for the urban poor*. ITDG Publishing.
30. Pendlebury, J. (2013). Conservation values, the authorised heritage discourse and the conservation-planning assemblage. *International Journal of Heritage Studies*, 19(7), 709–727.
<https://doi.org/10.1080/13527258.2012.700282>
31. Rapoport, A. (1969). *House form and culture*. Prentice-Hall.
32. Rapoport, A. (1982). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach*. SAGE Publications.
33. Rapoport, A. (1990). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach* (Rev. ed.). University of Arizona Press.
34. Reuter, T. A. (2002). *Custodians of the sacred mountains: Culture and society in the highlands of Bali*. University of Hawai'i Press.
35. Sasongko, I. (2005). Pembentukan struktur ruang permukiman berbasis budaya: Studi kasus Desa Puyung, Lombok Tengah. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 33(1), 1–8.
36. Setiawan, B. (2010). Kampung kota dan kota kampung: Tantangan perencanaan kota di Indonesia. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*. Universitas Gadjah Mada.
37. Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
38. Turner, J. F. C. (1976). *Housing by people: Towards autonomy in building environments*. Marion Boyars.
39. Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Aldine Publishing.
40. UN-Habitat. (2003). *The challenge of slums: Global report on human settlements 2003*. Earthscan.
41. UNESCO. (2011). *Recommendation on the historic urban landscape*. UNESCO.
42. Waterson, R. (1990). *The living house: An anthropology of architecture in South-East Asia*. Oxford University Press.

POKOK BAHASAN MINGGU KE-12

Teknik Kajian Ruang Kultural: observasi, wawancara, pemetaan sosial, behavioral mapping, cognitive mapping dan etika interaksi masyarakat

1. Pengertian kajian ruang kultural

Kajian ruang kultural merupakan proses sistematis untuk memahami hubungan antara kebudayaan, perilaku masyarakat, dan lingkungan spasial. Objek kajiannya tidak terbatas pada bentuk fisik, tetapi meliputi nilai, simbol, praktik sosial, aktivitas sehari-hari, ingatan kolektif, hubungan kekuasaan, dan makna yang dilekatkan masyarakat pada ruang. Oleh karena itu, kajian ruang kultural memerlukan kombinasi teknik pengamatan, percakapan, pemetaan, dokumentasi, dan interpretasi sosial-spasial (Rapoport, 1982; Low, 2017).

Ruang kultural tidak dapat dipahami hanya melalui peta penggunaan lahan atau data statistik. Sebuah jalan, halaman, pasar, sumber air, makam, atau ruang terbuka dapat mempunyai fungsi formal sekaligus makna sosial, historis, dan spiritual yang tidak terlihat pada peta. Peneliti harus mempelajari bagaimana ruang digunakan, oleh siapa, kapan digunakan, aturan apa yang berlaku, dan makna apa yang diberikan oleh kelompok masyarakat yang berbeda (Rapoport, 1990; Zeisel, 2006).

Kajian ruang kultural umumnya menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran. Pendekatan kualitatif membantu memahami pengalaman dan makna dari perspektif masyarakat, sedangkan data kuantitatif membantu menggambarkan frekuensi aktivitas, intensitas penggunaan ruang, distribusi pelaku, atau perbedaan antarkelompok. Penggunaan kedua pendekatan secara terpadu dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai hubungan manusia dan ruang (Creswell & Plano Clark, 2018; Creswell & Poth, 2018).

2. Prinsip dasar kajian lapangan

Kajian ruang kultural perlu berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat bukan sekadar objek penelitian, tetapi pemilik pengetahuan mengenai ruang hidupnya. Pengetahuan lokal mencakup nama tempat, sejarah, batas adat, jalur ritual, lokasi penting, aturan pemanfaatan sumber daya, serta perubahan lingkungan yang dialami masyarakat. Peneliti perlu mengakui pengetahuan tersebut sebagai sumber ilmiah yang harus diuji, ditafsirkan, dan dihormati (Chambers, 1994; Corbett, 2009).

Pemilihan teknik penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan kajian. Observasi digunakan untuk mengetahui perilaku dan kondisi faktual; wawancara untuk menggali pengalaman serta makna; pemetaan sosial untuk memahami distribusi kelompok dan sumber daya; *behavioral mapping* untuk merekam hubungan aktivitas dengan lokasi; sedangkan *cognitive mapping* digunakan untuk mengetahui citra dan representasi ruang dalam pikiran masyarakat (Zeisel, 2006; Groat & Wang, 2013).

Kajian yang baik menggunakan triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari beberapa teknik, sumber, waktu, dan kelompok masyarakat. Pernyataan informan mengenai aktivitas di suatu ruang, misalnya, dapat dibandingkan dengan hasil observasi, peta perilaku, dokumen sejarah, dan keterangan informan lain. Triangulasi membantu meningkatkan kredibilitas temuan sekaligus menunjukkan adanya perbedaan perspektif di dalam masyarakat (Denzin, 1978; Patton, 2015).

3. Observasi lapangan

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan sistematis terhadap lingkungan, aktivitas, perilaku, interaksi, dan peristiwa yang berlangsung di lokasi penelitian. Dalam kajian ruang kultural, observasi membantu peneliti memahami hubungan antara tata ruang, bentuk fisik, pengguna, waktu, aktivitas, dan aturan sosial yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui wawancara (Spradley, 1980; Zeisel, 2006).

Observasi dapat dibedakan menjadi observasi nonpartisipatif dan partisipatif. Dalam observasi nonpartisipatif, peneliti berusaha mengamati tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengikuti aktivitas masyarakat untuk memahami pengalaman ruang dari dalam. Tingkat keterlibatan harus dipilih berdasarkan tujuan penelitian, karakter kegiatan, dan pertimbangan etis (Spradley, 1980; Hammersley & Atkinson, 2019).

Observasi partisipatif sangat bermanfaat untuk mempelajari kegiatan budaya, seperti upacara, pasar tradisional, gotong royong, aktivitas produksi, serta penggunaan ruang komunal. Dengan terlibat secara terbatas, peneliti dapat memahami urutan kegiatan, pembagian peran, aturan perilaku, simbol, dan perubahan fungsi ruang. Namun, keterlibatan tersebut tidak boleh mengganggu jalannya kegiatan atau menyebabkan peneliti mengambil peran yang tidak diperbolehkan secara adat (Spradley, 1980; Low, 2017).

Observasi perlu dilakukan pada waktu yang berbeda karena penggunaan ruang bersifat temporal. Ruang yang sepi pada pagi hari dapat menjadi pusat aktivitas pada sore hari, sedangkan jalan yang berfungsi sebagai jalur transportasi sehari-hari dapat berubah menjadi ruang ritual pada waktu tertentu. Pengamatan idealnya mencakup hari kerja dan hari libur, pagi hingga malam, serta kondisi rutin dan peristiwa khusus (Gehl & Svarre, 2013; Rapoport, 1990).

Hal yang dapat dicatat dalam observasi meliputi jenis aktivitas, jumlah dan karakter pengguna, lokasi, durasi, pola pergerakan, interaksi, kondisi fisik, suara, aroma, pencahayaan, batas ruang, serta perubahan penggunaan ruang. Catatan juga perlu memisahkan deskripsi faktual dari interpretasi awal agar peneliti tidak mencampurkan apa yang benar-benar diamati dengan penilaiannya sendiri (Emerson et al., 2011; Patton, 2015).

A. Instrumen observasi

Komponen	Hal yang diamati
Kondisi fisik	Bangunan, jalan, vegetasi, furnitur, batas dan akses
Pengguna	Usia, gender, kelompok, pelaku lokal atau pengunjung
Aktivitas	Jenis, lokasi, waktu, durasi, intensitas
Pergerakan	Asal-tujuan, jalur, titik berhenti, hambatan
Interaksi	Individu, kelompok, pedagang, tokoh masyarakat
Teritorialitas	Penandaan wilayah, klaim ruang, ruang privat-publik
Kondisi sensorik	Suara, aroma, suhu, cahaya, tekstur
Simbol budaya	Ornamen, tanda, warna, objek ritual, nama tempat
Perubahan temporal	Perbedaan penggunaan berdasarkan waktu

4. Dokumentasi lapangan

Dokumentasi digunakan untuk merekam kondisi fisik, aktivitas, dan perubahan ruang melalui foto, video, sketsa, peta, catatan, serta rekaman suara. Dokumentasi visual membantu peneliti membandingkan kondisi antarlokasi dan antarwaktu. Akan tetapi, dokumentasi bukan pengganti observasi karena foto hanya merekam bagian tertentu dari situasi yang dipilih oleh peneliti (Rose, 2016; Zeisel, 2006).

Setiap dokumentasi sebaiknya dilengkapi tanggal, waktu, lokasi, arah pengambilan, deskripsi objek, dan konteks kegiatan. Foto tanpa informasi konteks dapat menimbulkan interpretasi yang keliru. Peneliti juga perlu mencatat apakah objek merupakan kondisi sehari-hari atau bagian dari peristiwa khusus (Emerson et al., 2011; Rose, 2016).

Pengambilan foto dan video harus memperoleh izin, terutama ketika menampilkan wajah, rumah pribadi, kegiatan keagamaan, anak-anak, atau ritual terbatas. Persetujuan untuk diwawancarai tidak secara otomatis berarti persetujuan untuk difoto atau dipublikasikan. Peneliti perlu menjelaskan tujuan dokumentasi dan kemungkinan penggunaannya (Wiles et al., 2008; Israel & Hay, 2006).

5. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dirancang untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pengetahuan, pandangan, nilai, dan makna yang dimiliki informan. Dalam kajian ruang kultural, wawancara digunakan untuk mengetahui sejarah kawasan, perubahan ruang, sistem kekerabatan, konflik pemanfaatan lahan, ruang penting, praktik ritual, serta pengalaman masyarakat terhadap pembangunan (Kvale & Brinkmann, 2009; Patton, 2015).

Wawancara dapat berbentuk terstruktur, semiterstruktur, atau tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan yang sama untuk semua informan; wawancara semiterstruktur menggunakan pedoman tetapi memberikan ruang bagi pengembangan pertanyaan; sedangkan wawancara tidak terstruktur menyerupai percakapan terbuka. Untuk kajian ruang kultural, wawancara semiterstruktur umumnya efektif karena menjaga fokus sekaligus memungkinkan munculnya pengetahuan yang sebelumnya tidak diperkirakan (Creswell & Poth, 2018; Kvale & Brinkmann, 2009).

Pemilihan informan sebaiknya dilakukan secara purposif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Informan dapat mencakup tokoh adat, tokoh agama, pemerintah lokal, perempuan, pemuda, pelaku usaha, penduduk lama, pendatang, kelompok rentan, dan pengguna sementara. Keragaman informan diperlukan karena setiap kelompok dapat memiliki akses, pengalaman, dan kepentingan spasial yang berbeda (Patton, 2015; Creswell & Poth, 2018).

Wawancara yang hanya melibatkan tokoh formal berisiko menghasilkan gambaran yang mewakili kelompok dominan. Pandangan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, pendatang, penyewa, dan masyarakat miskin dapat tidak terlihat dalam narasi resmi. Karena itu, komposisi informan perlu mempertimbangkan keragaman sosial dan ketimpangan kekuasaan di dalam komunitas (Moser, 1993; Cornwall, 2003).

Teknik *walking interview* atau wawancara berjalan sangat sesuai untuk kajian ruang. Peneliti dan informan berjalan melalui kawasan sambil mendiskusikan lokasi, pengalaman, batas, perubahan, dan makna ruang. Kehadiran langsung di lokasi membantu memunculkan ingatan yang mungkin tidak muncul dalam wawancara di dalam ruangan (Evans & Jones, 2011; Kusenbach, 2003).

Pertanyaan wawancara sebaiknya bersifat terbuka, netral, dan tidak mengarahkan jawaban. Contohnya adalah: "Ruang mana yang paling penting bagi masyarakat?", "Bagaimana penggunaan tempat ini berubah?", atau "Siapa saja yang boleh menggunakan ruang tersebut?" Pertanyaan lanjutan dapat digunakan untuk meminta contoh, waktu kejadian, pelaku, alasan, dan konsekuensi spasialnya (Kvale & Brinkmann, 2009; Patton, 2015).

A. Contoh pedoman wawancara

Tema	Contoh pertanyaan
Sejarah	Bagaimana awal terbentuknya permukiman ini?
Identitas	Tempat apa yang paling mewakili identitas kawasan?
Aktivitas	Kegiatan apa yang rutin dilakukan dan di mana lokasinya?
Nilai budaya	Adakah aturan adat dalam membangun atau menggunakan ruang?
Ruang penting	Tempat apa yang dianggap sakral, bersejarah, atau bernilai?
Perubahan	Perubahan ruang apa yang paling dirasakan masyarakat?
Konflik	Apakah terdapat perebutan atau perbedaan kepentingan ruang?
Kelompok sosial	Apakah semua kelompok memiliki akses yang sama?
Aspirasi	Ruang seperti apa yang ingin dipertahankan atau diperbaiki?

6. Pemetaan sosial

Pemetaan sosial merupakan teknik untuk menggambarkan distribusi kelompok masyarakat, kelembagaan, sumber daya, hubungan sosial, kegiatan, masalah, dan potensi dalam suatu wilayah. Berbeda dari peta fisik yang menekankan lokasi objek, peta sosial menunjukkan siapa yang menggunakan, menguasai, mengelola, memperoleh manfaat, atau mengalami hambatan dalam mengakses ruang (Chambers, 1994; Corbett, 2009).

Unsur yang dapat dipetakan meliputi persebaran kelompok sosial, rumah tokoh masyarakat, fasilitas umum, ruang komunal, wilayah kerja, lokasi konflik, kelompok rentan, jaringan pertolongan, batas adat, serta lokasi yang dianggap

penting. Peta tersebut dapat menunjukkan bahwa kedekatan secara geografis tidak selalu berarti kedekatan sosial dan bahwa batas sosial tidak selalu sama dengan batas administratif (Chambers, 1994; Low, 2017).

Pemetaan sosial sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan objek, simbol, batas, dan kategori yang digunakan. Masyarakat dapat menggambar peta di atas kertas, citra udara, atau media sederhana. Proses diskusi ketika peta dibuat sama pentingnya dengan produk petanya karena mengungkap perbedaan pengetahuan, kepentingan, dan persepsi antarpeserta (Chambers, 2006; Rambaldi et al., 2006).

Tahapan pemetaan sosial meliputi penentuan tujuan, identifikasi peserta, penyediaan peta dasar, penentuan legenda, penggambaran unsur, diskusi dan klarifikasi, verifikasi lapangan, serta digitalisasi apabila diperlukan. Hasil pemetaan harus dikonfirmasi kembali kepada masyarakat untuk memastikan bahwa peneliti tidak salah menggambarkan lokasi atau makna suatu ruang (Corbett, 2009; IFAD, 2009).

Pemetaan sosial mengandung dimensi kekuasaan. Pihak yang menentukan nama, kategori, dan batas pada peta dapat memengaruhi pengakuan terhadap hak serta identitas kelompok. Ruang yang tidak dimasukkan ke peta berisiko dianggap tidak ada, sedangkan informasi yang dipublikasikan dapat digunakan oleh pihak lain untuk menguasai sumber daya. Karena itu, proses pemetaan perlu mengatur kepemilikan, akses, kerahasiaan, dan penggunaan data (Harley, 1989; Rambaldi et al., 2006).

7. Behavioral mapping

Behavioral mapping atau pemetaan perilaku adalah teknik untuk merekam lokasi dan pola aktivitas manusia pada suatu lingkungan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui siapa melakukan apa, di mana, kapan, berapa lama, bersama siapa, dan dalam kondisi ruang seperti apa. Hasilnya dapat menunjukkan hubungan antara konfigurasi fisik dan perilaku pengguna (Ittelson et al., 1970; Sommer & Sommer, 2001).

Dalam kajian lingkungan dan perilaku, terdapat dua bentuk utama pemetaan, yaitu *place-centered mapping* dan *person-centered mapping*. *Place-centered mapping* memusatkan pengamatan pada satu lokasi untuk mencatat berbagai pengguna dan aktivitas yang terjadi. *Person-centered mapping* mengikuti individu atau kelompok tertentu untuk mencatat pergerakan, titik berhenti, dan penggunaan ruangnya (Sommer & Sommer, 2001; Haryadi & Setiawan, 2010).

Place-centered mapping sesuai untuk mengkaji alun-alun, taman, pasar, halaman komunal, tempat ibadah, dan persimpangan. Lokasi dibagi menjadi beberapa zona pengamatan, kemudian jenis aktivitas dan karakter pengguna dicatat dalam interval waktu tertentu. Hasilnya dapat memperlihatkan ruang yang aktif, tidak aktif, didominasi kelompok tertentu, atau berubah fungsi berdasarkan waktu (Gehl & Svarre, 2013; Zeisel, 2006).

Person-centered mapping digunakan ketika peneliti ingin memahami pola pergerakan seseorang atau kelompok, misalnya pedagang, anak-anak, perempuan, wisatawan, atau peserta ritual. Teknik ini dapat memperlihatkan

rute, jarak, hambatan, pilihan jalur, titik interaksi, serta ruang yang dihindari. Pelaksanaannya harus memperhatikan privasi dan tidak dilakukan secara tersembunyi pada kondisi yang dapat merugikan subjek (Sommer & Sommer, 2001; Israel & Hay, 2006).

Pemetaan perilaku membutuhkan kategori operasional yang jelas. Aktivitas dapat dikelompokkan menjadi berjalan, duduk, berdiri, berdagang, bermain, berbincang, bekerja, beribadah, dan aktivitas budaya. Peneliti juga dapat mencatat usia perkiraan, gender yang teramati, ukuran kelompok, durasi, serta elemen ruang yang digunakan. Kategori harus relevan dengan tujuan penelitian dan tidak boleh menghasilkan stereotip (Gehl & Svarre, 2013; Haryadi & Setiawan, 2010).

Hasil *behavioral mapping* dapat disajikan dalam peta titik, garis pergerakan, zona intensitas, atau tabel waktu. Peta perlu dibaca bersama catatan lapangan karena konsentrasi aktivitas tidak selalu menunjukkan kualitas ruang yang baik; konsentrasi tersebut mungkin muncul akibat keterbatasan pilihan, kewajiban ekonomi, atau tidak tersedianya ruang alternatif (Zeisel, 2006; Low, 2017).

A. Format pencatatan *behavioral mapping*

Variabel	Contoh kategori
Hari dan waktu	Hari kerja/libur; pagi/siang/sore/malam
Lokasi	Zona atau titik pengamatan
Aktivitas	Berjalan, duduk, berdagang, bermain, ritual
Pelaku	Individu/kelompok; anak/dewasa/lansia
Durasi	Singkat, sedang, lama atau dalam menit
Pergerakan	Asal, tujuan, jalur, titik berhenti
Elemen pendukung	Bangku, pohon, teras, tangga, naungan
Interaksi	Sendiri, keluarga, teman, pembeli-pedagang
Kondisi ruang	Panas, teduh, ramai, sepi, terhalang

8. *Cognitive mapping*

Cognitive mapping atau pemetaan kognitif merupakan teknik untuk mempelajari representasi ruang dalam pikiran seseorang. Peta kognitif menunjukkan bagaimana manusia mengenali lokasi, arah, jarak, hubungan, batas, pusat, dan landmark. Representasi tersebut tidak selalu sama dengan peta kartografis karena dipengaruhi pengalaman, pengetahuan, usia, aktivitas, budaya, dan rasa aman (Downs & Stea, 1973; Kitchin, 1994).

Salah satu teknik *cognitive mapping* adalah meminta responden menggambar peta kawasan berdasarkan ingatan. Peta dapat menggambarkan jalur yang sering digunakan, tempat penting, batas, kawasan, simpul, dan landmark. Lima elemen citra kota—*paths*, *edges*, *districts*, *nodes*, dan *landmarks*—dapat digunakan sebagai kerangka awal untuk membaca hasil gambar responden (Lynch, 1960; Purwanto, 2001).

Peta kognitif tidak dinilai berdasarkan ketepatan skala atau kemampuan menggambar. Distorsi, ukuran objek, penghilangan lokasi, dan penekanan pada elemen tertentu justru dapat menunjukkan tingkat kepentingan, pengalaman, atau keterikatan responden. Objek yang digambar besar mungkin dianggap

penting, sedangkan area yang tidak digambar dapat menunjukkan ketidaktahuan, keterbatasan akses, atau rasa tidak aman (Downs & Stea, 1973; Kitchin, 1994).

Teknik ini dapat dilakukan melalui *sketch map*, penyusunan urutan lokasi, pemberian peringkat tempat penting, penandaan rute, atau wawancara berbasis peta. Untuk kelompok yang kurang nyaman menggambar, peneliti dapat menggunakan peta dasar, foto, kartu lokasi, atau model tiga dimensi. Penyesuaian instrumen membantu memastikan bahwa kemampuan menggambar tidak menjadi hambatan partisipasi (Corbett, 2009; Zeisel, 2006).

Perbandingan peta kognitif antarkelompok dapat mengungkap perbedaan pengalaman spasial. Anak-anak mungkin menekankan ruang bermain; pedagang menekankan jalur pelanggan; perempuan dapat menunjukkan ruang yang dianggap aman atau tidak aman; sedangkan tokoh adat menekankan situs sejarah dan batas budaya. Perbedaan tersebut merupakan data penting dan tidak perlu dipaksakan menjadi satu gambaran tunggal (Lynch, 1960; Low, 2017).

9. Perbedaan pemetaan sosial, perilaku, dan kognitif

Teknik	Fokus utama	Sumber data	Produk
Pemetaan sosial	Kelompok, relasi, sumber daya dan akses	Diskusi dan pengetahuan masyarakat	Peta sosial-spasial
<i>Behavioral mapping</i>	Aktivitas nyata dalam ruang	Observasi langsung	Peta aktivitas dan pergerakan
<i>Cognitive mapping</i>	Persepsi dan citra mental ruang	Ingatan serta pengalaman responden	Peta mental
Pemetaan fisik	Kondisi objektif lingkungan	Survei dan pengukuran	Peta bangunan, jalan, lahan
Pemetaan partisipatif	Pengetahuan lokal dan aspirasi	Proses bersama masyarakat	Peta yang disepakati peserta

Pemetaan sosial menjawab pertanyaan “siapa dan bagaimana hubungan sosialnya”; *behavioral mapping* menjawab “apa yang dilakukan dan di mana”; sedangkan *cognitive mapping* menjawab “bagaimana ruang dipersepsikan dan diingat”. Ketiga teknik saling melengkapi dan sebaiknya dihubungkan dengan pemetaan fisik agar perencana dapat membandingkan bentuk ruang, penggunaan aktual, dan persepsi masyarakat (Lynch, 1960; Zeisel, 2006).

10. Integrasi dan analisis data

Data observasi dapat dianalisis melalui pengelompokan aktivitas, pola waktu, penggunaan elemen ruang, dan bentuk interaksi. Data wawancara dapat ditranskripsikan, diberi kode, dan dikelompokkan menjadi tema, seperti sejarah, nilai, akses, konflik, identitas, dan perubahan ruang. Peta sosial, peta perilaku, dan peta kognitif kemudian ditumpangtindihkan untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan antardata (Miles et al., 2020; Saldaña, 2021).

Contohnya, suatu lapangan mungkin tercatat sebagai ruang publik dalam peta fisik, tetapi hasil observasi menunjukkan bahwa ruang tersebut hanya digunakan oleh kelompok tertentu. Wawancara dapat menjelaskan adanya

aturan tidak tertulis, sedangkan peta kognitif kelompok lain mungkin menunjukkan bahwa lapangan tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari ruang mereka. Integrasi data seperti ini membantu mengungkap dimensi sosial yang tidak terlihat melalui satu teknik saja (Low, 2017; Creswell & Plano Clark, 2018).

Analisis perlu mencari pola dominan sekaligus kasus yang berbeda. Apabila sebagian besar informan menyatakan sebuah tempat penting, tetapi satu kelompok menganggapnya tidak aman, perbedaan tersebut tidak boleh dihapus sebagai penyimpangan. Perspektif minoritas dapat menunjukkan ketimpangan akses, konflik, diskriminasi, atau pengalaman spasial yang belum diperhatikan (Patton, 2015; Creswell & Poth, 2018).

Temuan lapangan sebaiknya divalidasi melalui *member checking* atau konfirmasi kepada masyarakat. Peneliti dapat mempresentasikan peta, diagram, atau ringkasan temuan dan meminta peserta memperbaiki kesalahan serta memberikan interpretasi tambahan. Namun, validasi tidak selalu berarti semua peserta harus menyetujui satu versi karena perbedaan pandangan merupakan bagian dari realitas sosial (Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Poth, 2018).

11. Etika interaksi dengan masyarakat

Etika penelitian merupakan prinsip untuk melindungi hak, keselamatan, martabat, privasi, dan kepentingan masyarakat yang terlibat dalam kajian. Tiga prinsip dasarnya adalah penghormatan terhadap individu, kemanfaatan, dan keadilan. Penelitian tidak boleh menempatkan kepentingan akademik di atas keselamatan atau hak masyarakat (National Commission, 1979; Israel & Hay, 2006).

Sebelum pengumpulan data, peneliti perlu memperoleh persetujuan setelah pemberian informasi atau *informed consent*. Calon partisipan harus memahami identitas peneliti, tujuan kajian, bentuk keterlibatan, cara penggunaan data, kemungkinan risiko, dan hak untuk menolak atau menghentikan partisipasi. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau lisan sesuai konteks, tetapi prosesnya harus didokumentasikan (Kvale & Brinkmann, 2009; Orb et al., 2001).

Persetujuan dari pemerintah, tokoh adat, atau ketua lingkungan tidak menggantikan persetujuan individual. Izin kelembagaan memberikan akses kepada kawasan, sedangkan setiap orang tetap mempunyai hak untuk menentukan apakah dirinya bersedia diwawancarai, direkam, difoto, atau dipetakan. Prinsip tersebut penting untuk mencegah tekanan dari struktur kekuasaan lokal (Israel & Hay, 2006; American Anthropological Association, 2012).

Peneliti harus menjaga kerahasiaan identitas dan data sensitif. Nama informan dapat diganti dengan kode, sedangkan lokasi tertentu dapat disamarkan apabila publikasinya berisiko menimbulkan konflik, stigmatisasi, perampasan tanah, atau kerusakan situs budaya. Data harus disimpan secara aman dan aksesnya dibatasi sesuai persetujuan partisipan (Kaiser, 2009; Wiles et al., 2008).

Informasi mengenai lokasi sakral, pengetahuan ritual, sumber daya, konflik tanah, atau kelompok rentan tidak selalu boleh dimasukkan ke dalam peta publik. Masyarakat perlu menentukan informasi yang boleh dipublikasikan,

disimpan secara terbatas, atau tidak direkam. Etika pemetaan menuntut peneliti mempertimbangkan siapa yang menguasai data dan siapa yang mungkin memperoleh manfaat atau mengalami kerugian (Rambaldi et al., 2006; Corbett, 2009).

Peneliti perlu peka terhadap norma komunikasi, waktu, pakaian, bahasa, gender, hierarki, dan tata cara memasuki ruang. Wawancara dengan kelompok tertentu mungkin membutuhkan pendamping, penerjemah, peneliti dengan gender yang sesuai, atau waktu yang tidak mengganggu pekerjaan dan ibadah. Penghormatan terhadap tata cara lokal merupakan bagian dari kualitas metodologis sekaligus etika penelitian (Hammersley & Atkinson, 2019; Low, 2017).

Pemberian uang, hadiah, konsumsi, atau penggantian biaya harus dikelola secara wajar dan transparan. Kompensasi tidak boleh terlalu besar sehingga berubah menjadi tekanan untuk berpartisipasi. Peneliti juga tidak boleh memberikan janji pembangunan atau bantuan yang berada di luar kewenangannya karena dapat menimbulkan harapan palsu (Israel & Hay, 2006; American Anthropological Association, 2012).

Hubungan etis tidak berakhir setelah data diperoleh. Masyarakat sebaiknya memperoleh penjelasan mengenai hasil kajian dalam bentuk yang dapat dipahami, misalnya peta sederhana, diskusi, poster, atau laporan ringkas. Pengembalian hasil merupakan bentuk akuntabilitas dan membantu masyarakat memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka berikan (Chambers, 2006; Corbett, 2009).

12. Potensi bias dalam kajian

Bias pengamatan dapat terjadi ketika kehadiran peneliti mengubah perilaku masyarakat. Bias interpretasi muncul ketika peneliti menafsirkan ruang hanya berdasarkan kerangka pemikirannya sendiri. Bias informan dapat muncul karena informan ingin memberikan jawaban yang dianggap baik atau aman. Bias seleksi terjadi apabila penelitian hanya melibatkan orang yang mudah ditemui atau memiliki posisi dominan (Patton, 2015; Hammersley & Atkinson, 2019).

Upaya mengurangi bias dapat dilakukan melalui pengamatan berulang, variasi informan, penggunaan beberapa peneliti, pencatatan reflektif, triangulasi, dan konfirmasi temuan. Peneliti juga perlu menuliskan posisi atau *positionality*-nya, termasuk latar belakang, hubungan dengan masyarakat, asumsi, serta kepentingan yang mungkin memengaruhi penelitian (Creswell & Poth, 2018; Finlay, 2002).

Peta juga tidak bebas nilai. Pemilihan skala, simbol, kategori, batas, dan informasi yang ditampilkan merupakan keputusan yang dapat menguatkan atau mengabaikan kelompok tertentu. Karena itu, peta perlu dibaca sebagai representasi selektif, bukan sebagai gambaran realitas yang sepenuhnya objektif (Harley, 1989; Crampton, 2001).

13. Rancangan kegiatan lapangan mahasiswa

Kajian lapangan dapat dimulai dengan studi awal mengenai sejarah dan kondisi kawasan, dilanjutkan dengan penentuan pertanyaan, pemilihan informan, penyusunan instrumen, pengurusan izin, serta pembagian tugas.

Mahasiswa perlu melakukan simulasi wawancara dan observasi sebelum berinteraksi dengan masyarakat agar pertanyaan, sikap, dan prosedur dokumentasinya sesuai (Groat & Wang, 2013; Creswell & Poth, 2018).

Pada tahap pengumpulan data, setiap kelompok dapat menggabungkan observasi, wawancara, pemetaan sosial, *behavioral mapping*, dan *cognitive mapping*. Data perlu dikumpulkan pada waktu berbeda serta melibatkan kelompok masyarakat yang beragam. Setiap temuan harus disertai catatan waktu, lokasi, sumber, dan konteks agar dapat ditelusuri kembali (Gehl & Svarre, 2013; Patton, 2015).

Tahap analisis dilakukan dengan menyusun transkrip, mengode tema, menggambar peta, membandingkan data, dan merumuskan interpretasi. Mahasiswa selanjutnya menyelenggarakan validasi sederhana bersama perwakilan masyarakat sebelum menyusun rekomendasi. Rekomendasi harus didasarkan pada bukti lapangan dan tidak boleh hanya mencerminkan preferensi desain mahasiswa (Miles et al., 2020; Saldaña, 2021).

Alur kegiatan

Persiapan → perizinan dan persetujuan → observasi awal → wawancara → pemetaan sosial → *behavioral mapping* → *cognitive mapping* → triangulasi → validasi masyarakat → analisis → rekomendasi

Alur tersebut bersifat iteratif. Informasi dari wawancara dapat mengarahkan observasi tambahan, sedangkan hasil pemetaan dapat menimbulkan pertanyaan baru. Penelitian lapangan yang baik memungkinkan peneliti kembali ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki dan memperdalam data (Creswell & Poth, 2018; Patton, 2015).

14. Matriks pemilihan teknik

Tujuan kajian	Teknik utama	Teknik pendukung	Hasil
Memahami penggunaan ruang	Observasi	Dokumentasi	Deskripsi aktivitas
Menggali sejarah dan makna	Wawancara	Sejarah lisan	Narasi ruang
Mengetahui kelompok dan akses	Pemetaan sosial	FGD	Peta sosial
Mengetahui pola aktivitas	<i>Behavioral mapping</i>	Observasi waktu	Peta perilaku
Mengetahui citra kawasan	<i>Cognitive mapping</i>	Wawancara peta	Peta mental
Mengetahui perubahan ruang	Wawancara dan dokumen	Peta temporal	Kronologi perubahan
Mengetahui konflik	Wawancara multipihak	Pemetaan aktor	Peta kepentingan
Menilai ruang budaya	Metode gabungan	Triangulasi	Interpretasi sosial-spasial

15. Kesimpulan

Teknik kajian ruang kultural digunakan untuk memahami ruang sebagai lingkungan fisik sekaligus produk sosial dan budaya. Observasi memperlihatkan kondisi serta aktivitas nyata; wawancara menggali pengalaman dan makna; pemetaan sosial menunjukkan kelompok, hubungan, sumber daya, serta akses; *behavioral mapping* merekam perilaku dalam ruang; sedangkan *cognitive mapping* menjelaskan citra ruang dalam pikiran masyarakat (Lynch, 1960; Zeisel, 2006). Tidak ada satu teknik yang mampu menjelaskan seluruh realitas ruang kultural. Penggabungan beberapa teknik melalui triangulasi memberikan pemahaman yang lebih kuat mengenai hubungan antara bentuk fisik, perilaku, persepsi, nilai, dan kekuasaan. Seluruh proses harus dilaksanakan secara etis dengan menghormati persetujuan, privasi, pengetahuan lokal, hak atas data, serta kepentingan masyarakat (Patton, 2015; Rambaldi et al., 2006).

A. Pertanyaan diskusi mahasiswa

1. Mengapa observasi saja belum cukup untuk memahami ruang kultural?
2. Apa perbedaan *place-centered mapping* dan *person-centered mapping*?
3. Mengapa peta kognitif tidak dinilai berdasarkan ketepatan skalanya?
4. Bagaimana pemetaan sosial dapat mengungkap ketimpangan akses ruang?
5. Apakah seluruh lokasi sakral boleh dicantumkan pada peta publik?
6. Bagaimana melibatkan kelompok rentan dalam penelitian lapangan?
7. Apa yang harus dilakukan apabila informasi dari wawancara bertentangan dengan observasi?
8. Siapa yang seharusnya memiliki data hasil pemetaan partisipatif?

DAFTAR PUSTAKA

1. American Anthropological Association. (2012). *Principles of professional responsibility*. American Anthropological Association.
2. Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
3. Chambers, R. (2006). Participatory mapping and geographic information systems: Whose map? Who is empowered and who disempowered? Who gains and who loses? *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 25(1), 1–11. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2006.tb00163.x>
4. Corbett, J. (2009). *Good practices in participatory mapping: A review prepared for the International Fund for Agricultural Development*. IFAD.
5. Cornwall, A. (2003). Whose voices? Whose choices? Reflections on gender and participatory development. *World Development*, 31(8), 1325–1342. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00086-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00086-X)
6. Crampton, J. W. (2001). Maps as social constructions: Power, communication and visualization. *Progress in Human Geography*, 25(2), 235–252. <https://doi.org/10.1191/030913201678580494>
7. Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.

8. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
9. Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
10. Downs, R. M., & Stea, D. (Eds.). (1973). *Image and environment: Cognitive mapping and spatial behavior*. Aldine.
11. Emerson, R. M., Fretz, R. I., & Shaw, L. L. (2011). *Writing ethnographic fieldnotes* (2nd ed.). University of Chicago Press.
12. Evans, J., & Jones, P. (2011). The walking interview: Methodology, mobility and place. *Applied Geography*, 31(2), 849–858.
<https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.09.005>
13. Finlay, L. (2002). "Outing" the researcher: The provenance, process, and practice of reflexivity. *Qualitative Health Research*, 12(4), 531–545.
<https://doi.org/10.1177/104973202129120052>
14. Gehl, J., & Svarre, B. (2013). *How to study public life*. Island Press.
15. Groat, L. N., & Wang, D. (2013). *Architectural research methods* (2nd ed.). Wiley.
16. Hammersley, M., & Atkinson, P. (2019). *Ethnography: Principles in practice* (4th ed.). Routledge.
17. Harley, J. B. (1989). Deconstructing the map. *Cartographica*, 26(2), 1–20. <https://doi.org/10.3138/E635-7827-1757-9T53>
18. Haryadi, & Setiawan, B. (2010). *Arsitektur, lingkungan dan perilaku: Pengantar ke teori, metodologi dan aplikasi*. Gadjah Mada University Press.
19. International Fund for Agricultural Development. (2009). *Good practices in participatory mapping*. IFAD.
20. Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists*. SAGE Publications.
21. Ittelson, W. H., Proshansky, H. M., Rivlin, L. G., & Winkel, G. H. (1970). *An introduction to environmental psychology*. Holt, Rinehart and Winston.
22. Kaiser, K. (2009). Protecting respondent confidentiality in qualitative research. *Qualitative Health Research*, 19(11), 1632–1641.
<https://doi.org/10.1177/1049732309350879>
23. Kitchin, R. M. (1994). Cognitive maps: What are they and why study them? *Journal of Environmental Psychology*, 14(1), 1–19.
[https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(05\)80194-X](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80194-X)
24. Kusenbach, M. (2003). Street phenomenology: The go-along as ethnographic research tool. *Ethnography*, 4(3), 455–485.
<https://doi.org/10.1177/146613810343007>
25. Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). SAGE Publications.
26. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
27. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
28. Lynch, K. (1960). *The image of the city*. MIT Press.

29. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
30. Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.
31. National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. (1979). *The Belmont report*. U.S. Government Printing Office.
32. Orb, A., Eisenhauer, L., & Wynaden, D. (2001). Ethics in qualitative research. *Journal of Nursing Scholarship*, 33(1), 93–96.
<https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2001.00093.x>
33. Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
34. Purwanto, E. (2001). Pendekatan pemahaman citra lingkungan perkotaan melalui kemampuan peta mental pengamat. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 29(1), 85–92.
35. Rambaldi, G., Chambers, R., McCall, M., & Fox, J. (2006). Practical ethics for PGIS practitioners, facilitators, technology intermediaries and researchers. *Participatory Learning and Action*, 54, 106–113.
36. Rapoport, A. (1982). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach*. SAGE Publications.
37. Rapoport, A. (1990). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach* (Rev. ed.). University of Arizona Press.
38. Rose, G. (2016). *Visual methodologies: An introduction to researching with visual materials* (4th ed.). SAGE Publications.
39. Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
40. Sommer, R., & Sommer, B. B. (2001). *A practical guide to behavioral research: Tools and techniques* (5th ed.). Oxford University Press.
41. Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
42. Wiles, R., Clark, A., & Prosser, J. (2008). Visual research ethics at the crossroads. *NCRM Working Paper*. National Centre for Research Methods.
43. Zeisel, J. (2006). *Inquiry by design: Environment/behavior/neuroscience in architecture, interiors, landscape, and planning* (Rev. ed.). W. W. Norton.

POKOK BAHASAN MINGGU KE-13

Survei/Observasi Ruang Kultural dan Pemetaan: pengumpulan, pengorganisasian, interpretasi data sosial-spasial

1. Pengertian survei ruang kultural

Survei ruang kultural adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, memetakan, dan menafsirkan data mengenai hubungan masyarakat, kebudayaan, dan ruang. Survei ini tidak hanya mendokumentasikan bangunan,

jalan, batas, serta penggunaan lahan, tetapi juga mengkaji aktivitas, nilai, simbol, ingatan, hubungan sosial, pola akses, dan makna yang diberikan masyarakat terhadap tempat tertentu (Rapoport, 1982; Low, 2017).

Dalam kajian ruang kultural, ruang dipahami sebagai hasil hubungan antara kondisi fisik, kegiatan manusia, dan sistem makna. Sebuah lapangan, jalan kampung, pasar, sumber air, atau halaman rumah dapat mempunyai fungsi berbeda menurut kelompok pengguna dan waktu pemanfaatannya. Oleh karena itu, survei perlu mencatat aspek yang tampak maupun tidak tampak, termasuk norma, larangan, sejarah, konflik, dan pengetahuan lokal (Zeisel, 2006; Groat & Wang, 2013).

Survei ruang kultural bertujuan membangun pemahaman kontekstual sebelum suatu kawasan direncanakan, ditata, atau dikembangkan. Tanpa pemahaman tersebut, keputusan perencanaan berisiko menghilangkan ruang penting, memutus jalur aktivitas, mengabaikan kelompok tertentu, atau mengubah tempat bermakna menjadi ruang yang hanya bernilai secara ekonomi (Smith, 2006; UNESCO, 2011).

2. Pengertian data sosial-spasial

Data sosial-spasial merupakan data yang menghubungkan informasi sosial dengan lokasi atau konfigurasi ruang. Data sosial dapat berupa kelompok penduduk, mata pencaharian, kekerabatan, aktivitas, kelembagaan, nilai budaya, dan persepsi. Data spasial meliputi lokasi, jarak, arah, jaringan, batas, pola, distribusi, dan hubungan antarobjek dalam ruang (Goodchild, 2007; Kwan, 2004).

Data sosial-spasial menjawab pertanyaan “siapa melakukan apa, di mana, kapan, mengapa, dan dalam kondisi apa”. Contohnya adalah lokasi aktivitas ekonomi perempuan, jalur bermain anak, tempat berkumpul warga, ruang ritual, kawasan yang dihindari pada malam hari, serta wilayah yang dianggap sebagai batas adat. Informasi semacam ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui peta penggunaan lahan formal (Kwan, 2004; Low, 2017).

Data sosial-spasial dapat berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif meliputi jumlah pengguna, frekuensi aktivitas, durasi, jarak, kepadatan, serta persentase responden. Data kualitatif mencakup narasi sejarah, pengalaman, nilai, simbol, konflik, dan persepsi ruang. Integrasi kedua jenis data memungkinkan peneliti memahami pola spasial sekaligus alasan sosial-kultural yang membentuk pola tersebut (Creswell & Plano Clark, 2018; Miles et al., 2020).

3. Prinsip penyusunan survei

Survei harus dimulai dengan rumusan masalah dan tujuan yang jelas. Peneliti perlu menentukan apakah survei ditujukan untuk mengidentifikasi ruang budaya, menganalisis pola aktivitas, memahami perubahan kawasan, memetakan konflik, atau menyusun arahan perencanaan. Tujuan tersebut menjadi dasar pemilihan lokasi, responden, teknik, variabel, waktu pengamatan, dan bentuk keluaran (Creswell & Creswell, 2018; Groat & Wang, 2013).

Unit analisis juga harus ditetapkan sejak awal. Unit tersebut dapat berupa individu, rumah tangga, kelompok sosial, aktivitas, bangunan, ruang publik, jalur, kawasan, atau peristiwa budaya. Kesalahan menentukan unit

analisis dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak mampu menjawab pertanyaan penelitian (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018).

Batas wilayah kajian sebaiknya tidak hanya mengikuti batas administratif. Batas sosial dan budaya dapat mengikuti sungai, jalan, bentang alam, wilayah adat, jalur ritual, daerah pelayanan, atau persepsi masyarakat. Karena itu, penetapan batas awal perlu diverifikasi melalui observasi dan diskusi dengan masyarakat (Lynch, 1960; Low, 2017).

Survei ruang kultural memerlukan pendekatan multiskala. Pada skala rumah, peneliti dapat mempelajari pembagian ruang domestik; pada skala lingkungan, hubungan antarhunian dan ruang komunal; pada skala kawasan, jaringan aktivitas, pusat budaya, serta hubungan dengan bentang alam. Perubahan skala membantu menunjukkan hubungan antara praktik sehari-hari dan struktur ruang yang lebih luas (Rapoport, 1990; Moudon, 1997).

4. Tahap persiapan survei

Persiapan dimulai dengan kajian literatur, penelusuran sejarah, pengumpulan peta, citra udara, data kependudukan, dokumen perencanaan, dan hasil penelitian terdahulu. Data sekunder memberikan gambaran awal mengenai kondisi kawasan dan membantu mengidentifikasi kekosongan informasi yang perlu dijawab melalui survei lapangan (Yin, 2018; Groat & Wang, 2013).

Peta dasar diperlukan sebagai media pencatatan lokasi dan hubungan spasial. Peta dapat memuat batas awal, jalan, bangunan, sungai, kontur, penggunaan lahan, serta fasilitas. Ketelitian peta harus disesuaikan dengan skala kajian; survei lingkungan membutuhkan peta lebih rinci daripada kajian tingkat kota (Longley et al., 2015; Corbett, 2009).

Peneliti kemudian menyusun variabel, indikator, dan instrumen. Instrumen dapat berupa lembar observasi, pedoman wawancara, kuesioner, daftar objek, formulir koordinat, kamera, alat perekam, serta peta kerja. Setiap instrumen perlu diuji coba untuk memastikan pertanyaan dapat dipahami dan kategori pengamatan dapat diterapkan secara konsisten (Creswell & Creswell, 2018; Patton, 2015).

Tim survei harus memperoleh pelatihan mengenai tujuan, cara mencatat, penggunaan simbol, teknik komunikasi, prosedur perizinan, dan etika interaksi. Pelatihan mengurangi perbedaan penafsiran antarpengamat dan membantu menjaga konsistensi data. Simulasi lapangan dapat digunakan untuk memperbaiki instrumen sebelum survei utama dilaksanakan (Zeisel, 2006; Gehl & Svarre, 2013).

5. Jenis data yang dikumpulkan

Data fisik mencakup bangunan, jalan, gang, ruang terbuka, vegetasi, sumber air, fasilitas, batas, topografi, material, kondisi lingkungan, serta elemen penanda. Data tersebut menjadi dasar untuk memahami wadah fisik tempat aktivitas sosial dan budaya berlangsung (Lynch, 1960; Moudon, 1997).

Data aktivitas meliputi jenis kegiatan, pelaku, lokasi, waktu, durasi, intensitas, pola pergerakan, dan elemen ruang yang digunakan. Aktivitas dapat berupa kegiatan domestik, ekonomi, sosial, pendidikan, rekreasi, keagamaan, atau ritual. Pencatatan waktu penting karena fungsi ruang dapat berubah pada

pagi, siang, sore, malam, hari kerja, hari libur, dan waktu upacara (Rapoport, 1990; Gehl & Svarre, 2013).

Data sosial meliputi karakter penduduk, struktur rumah tangga, mata pencaharian, kelompok masyarakat, hubungan kekerabatan, organisasi, kepemimpinan, dan jaringan pertolongan. Data ini membantu menjelaskan siapa yang menguasai, menggunakan, mengelola, atau tidak memiliki akses terhadap ruang tertentu (Chambers, 1994; Low, 2017).

Data budaya mencakup sejarah, tradisi, ritual, simbol, bahasa lokal, nama tempat, aturan adat, pengetahuan lingkungan, serta situs bermakna. Sebagian data budaya mungkin tidak terlihat atau tidak boleh dipublikasikan secara terbuka. Pengumpulannya harus mengikuti persetujuan dan ketentuan masyarakat (Smith, 2006; Rambaldi et al., 2006).

Data persepsi meliputi citra kawasan, rasa aman, kenyamanan, identitas, keterikatan tempat, lokasi yang disukai atau dihindari, serta aspirasi masyarakat. Data ini menjelaskan perbedaan antara kondisi yang diukur secara fisik dan cara masyarakat mengalami ruang tersebut (Lynch, 1960; Scannell & Gifford, 2010).

Data perubahan meliputi kondisi masa lalu, peristiwa penting, perkembangan bangunan, perubahan fungsi, pergeseran aktivitas, hilangnya ruang budaya, serta perubahan kelompok penduduk. Data tersebut diperoleh melalui peta temporal, foto lama, dokumen, sejarah lisan, dan perbandingan citra udara (Lynch, 1972; Oliveira, 2016).

6. Teknik pengumpulan data

Observasi langsung digunakan untuk mengenali kondisi fisik dan penggunaan ruang yang benar-benar terjadi. Pengamat dapat berjalan mengikuti rute tertentu, berhenti pada titik pengamatan, mencatat kegiatan, membuat sketsa, mengambil foto, dan menandai lokasi pada peta. Observasi perlu dilakukan secara berulang agar tidak hanya merekam kondisi sesaat (Spradley, 1980; Zeisel, 2006).

Survei transek dilakukan dengan berjalan melintasi kawasan melalui rute yang mewakili variasi kondisi. Sepanjang transek, tim mencatat perubahan fungsi lahan, karakter bangunan, aktivitas, batas, fasilitas, kondisi lingkungan, dan permasalahan. Teknik ini berguna untuk membandingkan zona pusat–pinggiran, tinggi–rendah, formal–informal, atau lama–baru (Chambers, 1994; Corbett, 2009).

Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang tidak dapat diketahui melalui pengamatan, seperti sejarah, kepemilikan, konflik, makna, perubahan, dan aturan tidak tertulis. Wawancara dapat dilakukan secara menetap atau sambil berjalan melewati lokasi yang dibicarakan. Wawancara berjalan membantu informan mengingat peristiwa dan menunjukkan lokasi secara langsung (Kusenbach, 2003; Evans & Jones, 2011).

Diskusi kelompok terarah digunakan untuk membandingkan pengalaman dan menyusun pemahaman bersama. Peserta dapat diminta membahas sejarah perkembangan, mengidentifikasi ruang penting, menilai perubahan, dan memetakan masalah. Fasilitator harus mencegah peserta dominan menguasai diskusi dan memberikan kesempatan kepada kelompok yang kurang bersuara (Krueger & Casey, 2015; Cornwall, 2003).

Kuesioner digunakan ketika peneliti membutuhkan informasi dari jumlah responden yang lebih besar, misalnya mengenai frekuensi penggunaan ruang, persepsi kenyamanan, rasa aman, atau tingkat keterikatan tempat. Pertanyaan dapat berupa pilihan tertutup, skala penilaian, maupun jawaban terbuka, dan dapat disertai peta agar responden menandai lokasi tertentu (Creswell & Creswell, 2018; Brown & Kytä, 2014).

Dokumentasi foto, video, suara, dan sketsa membantu merekam suasana serta detail ruang. Setiap dokumentasi perlu dilengkapi nomor, tanggal, waktu, lokasi, arah pandang, deskripsi, dan nama pencatat. Metadata tersebut memungkinkan dokumentasi dihubungkan kembali dengan peta dan catatan lapangan (Rose, 2016; Longley et al., 2015).

7. Sampling sosial, spasial, dan temporal

Sampling sosial berkaitan dengan pemilihan individu atau kelompok yang menjadi sumber data. Informan dapat dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, sedangkan responden survei kuantitatif dapat dipilih menggunakan teknik probability atau non-probability sesuai tujuan penelitian. Komposisinya perlu mewakili keragaman usia, gender, pekerjaan, status hunian, lama tinggal, dan kelompok sosial (Patton, 2015; Creswell & Creswell, 2018).

Sampling spasial menentukan lokasi yang diamati. Lokasi dapat dipilih berdasarkan zona fungsi, tingkat kepadatan, jarak dari pusat, karakter budaya, kondisi lingkungan, atau isu tertentu. Pengamatan dapat menggunakan titik, jalur, blok, zona, atau grid agar cakupan wilayah dapat dibandingkan secara sistematis (Zeisel, 2006; Gehl & Svarre, 2013).

Sampling temporal menentukan kapan pengamatan dilakukan. Pengamatan perlu mencakup variasi jam, hari, musim, dan peristiwa. Apabila aktivitas ritual hanya terjadi pada waktu tertentu, peneliti perlu menggabungkan pengamatan langsung dengan dokumentasi, wawancara, atau rekonstruksi kegiatan masa lalu (Rapoport, 1990; Low, 2017).

Ketiga jenis sampling perlu dirancang secara terpadu. Mengamati banyak lokasi pada satu waktu saja dapat mengabaikan variasi temporal, sedangkan mewawancarai banyak orang dari satu kelompok dapat mengabaikan variasi sosial. Desain yang seimbang membantu menghasilkan gambaran ruang kultural yang lebih representatif (Patton, 2015; Creswell & Plano Clark, 2018).

8. Pemetaan data fisik dan budaya

Pemetaan fisik dimulai dengan mengidentifikasi jalan, bangunan, kavling, ruang terbuka, vegetasi, air, topografi, fasilitas, dan batas. Objek dapat direkam sebagai titik, garis, atau poligon. Titik digunakan untuk objek tertentu, garis untuk jalur dan batas, sedangkan poligon untuk area atau zona (Longley et al., 2015; DeMers, 2009).

Pemetaan budaya menambahkan informasi mengenai situs bersejarah, ruang ritual, landmark, nama lokal, tempat penting, batas adat, jalur prosesi, lokasi kegiatan tradisional, dan kawasan bernilai. Unsur-unsur tersebut perlu diberi atribut berupa nama, fungsi, pelaku, waktu penggunaan, nilai, kondisi, dan tingkat sensitivitas informasi (Corbett, 2009; Smith, 2006).

Peta budaya tidak selalu harus menunjukkan lokasi secara presisi. Situs yang sensitif dapat digambarkan dalam zona umum atau disimpan dalam lapisan data terbatas. Keputusan mengenai tingkat ketelitian dan publikasi harus dibuat bersama masyarakat agar pemetaan tidak membahayakan situs atau membuka pengetahuan rahasia (Rambaldi et al., 2006; Ros-Tonen et al., 2021).

9. Pemetaan aktivitas dan perilaku

Pemetaan aktivitas mencatat hubungan antara jenis kegiatan dan lokasi. Peta dasar dibagi menjadi zona, kemudian pengamat mencatat aktivitas pada interval waktu tertentu. Hasilnya dapat menunjukkan ruang yang aktif, tidak aktif, digunakan bersama, didominasi kelompok tertentu, atau berubah fungsi sepanjang hari (Sommer & Sommer, 2001; Gehl & Svarre, 2013).

Place-centered mapping memusatkan pengamatan pada lokasi tertentu. Teknik ini sesuai untuk pasar, taman, plaza, halaman komunal, dan ruang ibadah. Pengamatan di plaza kampus, misalnya, dapat menggunakan pembagian zona dan interval pagi, siang, serta sore untuk menjelaskan hubungan antara preferensi duduk, elemen fisik, dan aktivitas pengguna (Marcillia & Kesumasari, 2017; Zeisel, 2006).

Person-centered mapping mengikuti pergerakan individu atau kelompok untuk mengetahui rute, titik berhenti, hambatan, interaksi, dan jangkauan aktivitas. Teknik ini dapat digunakan untuk mengkaji perjalanan anak ke sekolah, pergerakan pedagang, jalur perempuan menuju fasilitas, atau rangkaian peserta ritual (Sommer & Sommer, 2001; Haryadi & Setiawan, 2010).

Hasil pemetaan aktivitas dapat disajikan dalam bentuk titik aktivitas, garis pergerakan, diagram aliran, zona intensitas, atau *heat map*. Visualisasi harus disertai keterangan waktu dan kategori pengguna karena kepadatan aktivitas pada waktu berbeda tidak dapat langsung dibandingkan tanpa konteks yang sama (Gehl & Svarre, 2013; Longley et al., 2015).

10. Pemetaan persepsi dan nilai budaya

Pemetaan persepsi meminta responden menandai lokasi yang disukai, dianggap aman, penting, bermasalah, atau perlu dilindungi. Teknik ini dapat dilakukan menggunakan peta cetak, foto udara, aplikasi digital, atau gambar sketsa. Hasilnya membantu mengubah pengalaman subjektif menjadi informasi yang memiliki referensi spasial (Brown & Kytä, 2014; Gottwald et al., 2021).

Peta mental digunakan untuk mengetahui citra kawasan dalam pikiran masyarakat. Responden diminta menggambar jalur, batas, kawasan, simpul, dan landmark yang mereka ingat. Elemen yang sering muncul dapat menunjukkan kekuatan citra, sedangkan lokasi yang hilang atau terdistorsi dapat mengindikasikan keterbatasan pengetahuan, akses, atau keterhubungan (Lynch, 1960; Purwanto, 2001).

Pemetaan nilai lanskap dapat meminta masyarakat menandai tempat yang memiliki nilai sejarah, spiritual, sosial, estetika, ekonomi, rekreasi, atau ekologis. Peta dari berbagai responden kemudian digabungkan untuk menemukan konsentrasi nilai dan wilayah yang mempunyai makna berlapis (Brown & Raymond, 2007; García-Martín et al., 2017).

Pemetaan nilai tidak boleh menyederhanakan seluruh makna menjadi jumlah titik. Lokasi yang hanya disebut oleh sedikit orang mungkin mempunyai nilai sangat tinggi bagi kelompok minoritas atau masyarakat adat. Analisis perlu menggabungkan frekuensi, intensitas makna, karakter kelompok, dan narasi yang menyertai setiap lokasi (Low, 2017; Ros-Tonen et al., 2021).

11. Pemetaan partisipatif

Pemetaan partisipatif merupakan proses ketika masyarakat terlibat dalam menentukan objek, kategori, simbol, batas, dan makna pada peta. Tujuannya bukan hanya memperoleh informasi lokal, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, kepentingan, masalah, dan aspirasinya (Chambers, 2006; Corbett, 2009).

Pemetaan dapat dimulai dengan peta sederhana yang dibuat masyarakat, kemudian dibandingkan dengan peta dasar atau citra udara. Peserta dapat menambahkan tempat penting, wilayah aktivitas, batas adat, jalur, masalah, dan perubahan. Diskusi selama pemetaan sering menghasilkan informasi yang lebih kaya daripada produk peta akhirnya (Chambers, 1994; Rambaldi et al., 2006).

Pemetaan partisipatif berbasis GIS atau PPGIS memungkinkan masyarakat memasukkan informasi langsung pada peta digital. Teknik tersebut membantu mengumpulkan data dari banyak peserta dan mengintegrasikannya dengan data perencanaan. Namun, perangkat digital dapat mengecualikan kelompok lanjut usia atau masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi sehingga perlu disediakan alternatif nondigital (Brown & Kytä, 2014; Ducci et al., 2023).

Peta partisipatif dapat memperlihatkan perbedaan pandangan antara masyarakat, pemerintah, dan ahli. Perbedaan tersebut tidak harus segera disatukan karena dapat menunjukkan konflik nilai dan kepentingan. Dalam perencanaan lanskap budaya, hasil pemetaan warga dapat digunakan sebagai masukan bagi lokakarya *co-design* bersama perencana dan pemangku kepentingan lainnya (Gottwald et al., 2021; Ducci et al., 2023).

12. Pengorganisasian data lapangan

Pengorganisasian data dimulai dengan pemberian kode unik pada setiap unit data. Kode dapat memuat jenis data, lokasi, tanggal, dan nomor urut, misalnya OBS-Z01-1909-01 untuk observasi pertama di Zona 01. Sistem kode yang konsisten membantu menghubungkan formulir, foto, rekaman, wawancara, dan objek pada peta (Miles et al., 2020; Saldaña, 2021).

Data spasial sebaiknya dipisahkan ke dalam beberapa lapisan atau *layer*, misalnya jaringan jalan, bangunan, ruang terbuka, fasilitas, aktivitas, situs budaya, persepsi, masalah, dan usulan. Pemisahan tersebut memudahkan analisis tumpang susun, penyaringan kategori, serta pembaruan data tanpa mengubah lapisan lain (Longley et al., 2015; DeMers, 2009).

Setiap objek spasial perlu memiliki tabel atribut. Atribut dapat memuat nama, jenis, fungsi, pengguna, waktu aktivitas, status kepemilikan, nilai budaya, kondisi fisik, sumber informasi, tingkat kepercayaan, sensitivitas, dan dokumentasi terkait. Dengan struktur tersebut, peta tidak hanya menunjukkan

lokasi, tetapi menjadi basis data yang dapat dianalisis (Longley et al., 2015; Corbett, 2009).

Data kualitatif seperti wawancara dan catatan lapangan perlu ditranskripsikan, diberi kode, dan dikelompokkan menjadi tema. Tema dapat meliputi sejarah, identitas, aktivitas, akses, konflik, perubahan, nilai budaya, dan aspirasi. Setiap kutipan penting sebaiknya dihubungkan dengan lokasi atau objek spasial jika informan menyebutkan tempat tertentu (Miles et al., 2020; Saldaña, 2021).

Data kuantitatif perlu dibersihkan melalui pemeriksaan kelengkapan, keseragaman kategori, nilai ganda, dan kesalahan entri. Data spasial juga harus diperiksa terhadap koordinat yang tidak wajar, geometri tumpang tindih, objek tanpa atribut, atau perbedaan sistem koordinat. Proses pembersihan menentukan keandalan analisis berikutnya (Longley et al., 2015; Creswell & Creswell, 2018).

13. Contoh struktur basis data

Kode	Lokasi	Jenis ruang	Aktivitas	Pelaku	Waktu	Nilai budaya	Sumber	Sensitivitas
RK-01	Lapangan desa	Ruang komunal	Olahraga dan upacara	Warga	Harian/tahunan	Sosial-ritual	Observasi dan wawancara	Rendah
RK-02	Mata air	Sumber air	Mengambil air dan ritual	Keluarga tertentu	Pagi/hari khusus	Ekologis-spiritual	Wawancara	Tinggi
RK-03	Pasar	Ruang ekonomi	Perdagangan dan interaksi	Pedagang-pembeli	Pagi	Ekonomi-sosial	Observasi	Rendah
RK-04	Makam leluhur	Ruang sakral	Ziarah	Keturunan dan warga	Hari tertentu	Historis-spiritual	Tokoh adat	Tinggi
RK-05	Gang utama	Jalur	Pergerakan dan interaksi	Seluruh warga	Sepanjang hari	Sosial	Pemetaan perilaku	Rendah

Struktur data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kolom sensitivitas penting untuk membedakan data yang boleh dipublikasikan dan data yang aksesnya harus dibatasi. Kolom sumber serta tingkat kepercayaan membantu pengguna menilai apakah informasi berasal dari observasi, satu informan, beberapa informan, dokumen, atau hasil kesepakatan masyarakat (Rambaldi et al., 2006; Corbett, 2009).

14. Kendali mutu data

Validitas lokasi diperiksa dengan membandingkan catatan lapangan, koordinat, foto, dan peta dasar. Validitas sosial diperiksa melalui perbandingan informasi antarinforman, sedangkan validitas interpretasi dapat diperkuat melalui konfirmasi kepada masyarakat. Pemeriksaan berlapis membantu menghindari kesalahan teknis maupun kesalahan pemaknaan (Lincoln & Guba, 1985; Patton, 2015).

Reliabilitas observasi dapat ditingkatkan dengan memberikan definisi operasional pada setiap kategori. Misalnya, kategori “berkumpul” perlu dibedakan dari “berjalan” atau “menunggu”. Beberapa pengamat dapat mencatat lokasi yang sama dan membandingkan hasilnya untuk mengetahui konsistensi pencatatan (Zeisel, 2006; Gehl & Svarre, 2013).

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan teknik, sumber, waktu, dan peneliti. Informasi mengenai ruang yang dianggap tidak aman, misalnya, dapat diperiksa melalui wawancara, observasi malam, peta persepsi, dan data kondisi fisik. Apabila hasilnya berbeda, peneliti perlu menjelaskan konteks perbedaan, bukan sekadar memilih data yang paling sesuai dengan dugaan awal (Denzin, 1978; Patton, 2015).

Proses survei perlu dilengkapi dengan *audit trail*, yaitu dokumentasi mengenai cara data dikumpulkan, dibersihkan, dikodekan, dianalisis, dan direvisi. Dokumentasi tersebut membuat proses penelitian dapat ditelusuri dan membantu tim lain memahami dasar setiap kesimpulan (Lincoln & Guba, 1985; Miles et al., 2020).

15. Interpretasi data sosial-spasial

Interpretasi adalah proses memberikan penjelasan terhadap pola yang ditemukan. Peneliti tidak cukup menyatakan bahwa suatu tempat ramai, tetapi perlu menjelaskan siapa penggunanya, kegiatan apa yang terjadi, mengapa lokasi tersebut dipilih, kapan aktivitas berlangsung, elemen ruang apa yang mendukungnya, dan nilai apa yang melekat padanya (Rapoport, 1990; Low, 2017).

Interpretasi dimulai dengan membaca distribusi. Peneliti dapat mengidentifikasi konsentrasi aktivitas, ruang yang jarang digunakan, pola linear, pengelompokan, keterpisahan, atau tumpang tindih fungsi. Pola tersebut kemudian dibandingkan dengan jaringan jalan, bangunan, lingkungan, kelompok sosial, dan waktu penggunaan (Longley et al., 2015; Gehl & Svarre, 2013).

Hubungan spasial tidak selalu menunjukkan sebab-akibat. Konsentrasi pedagang pada satu jalan mungkin disebabkan aksesibilitas, tetapi dapat pula dipengaruhi izin, tradisi, kepemilikan tanah, atau larangan berdagang di lokasi lain. Penjelasan pola harus didukung oleh wawancara, sejarah, observasi, dan dokumen agar tidak terjebak dalam determinisme spasial (Kwan, 2004; Low, 2017).

Interpretasi juga perlu memperhatikan ketidakhadiran. Ruang yang tidak digunakan oleh perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, atau kelompok pendatang dapat menunjukkan hambatan fisik, rasa tidak aman, larangan sosial, atau dominasi kelompok tertentu. Kekosongan pada peta karena itu dapat menjadi temuan yang sama pentingnya dengan konsentrasi aktivitas (Moser, 1993; Cornwall, 2003).

Analisis temporal digunakan untuk membandingkan perubahan penggunaan ruang. Peta pagi, siang, sore, malam, hari biasa, dan hari ritual dapat memperlihatkan fungsi berganda serta pergantian pengguna. Analisis ini mencegah perencanaan menetapkan fungsi ruang hanya berdasarkan pengamatan pada satu waktu (Rapoport, 1990; Gehl & Svarre, 2013).

Interpretasi nilai budaya perlu menghubungkan objek, aktivitas, narasi, dan kelompok pemilik makna. Sebuah pohon tua tidak otomatis bernilai budaya hanya karena usianya, tetapi dapat mempunyai nilai apabila berhubungan dengan sejarah, ritual, identitas, atau ingatan masyarakat. Nilai budaya muncul melalui hubungan, bukan hanya melalui karakter fisik objek (Smith, 2006; Low, 2017).

16. Teknik analisis sosial-spasial

Analisis tumpang susun digunakan untuk membandingkan beberapa lapisan data, misalnya aktivitas, nilai budaya, kepemilikan, risiko bencana, dan rencana pembangunan. Lokasi dengan nilai budaya tinggi dan tekanan pembangunan tinggi dapat ditetapkan sebagai area prioritas perlindungan atau negosiasi (Longley et al., 2015; Malczewski & Rinner, 2015).

Analisis kedekatan digunakan untuk mengukur jarak antara hunian dan fasilitas, situs budaya dan ancaman, atau ruang aktivitas dan jaringan jalan. Namun, jarak geometris harus dibandingkan dengan akses nyata karena sungai, pagar, topografi, larangan, dan rasa tidak aman dapat membuat tempat yang dekat secara fisik menjadi sulit dijangkau (Kwan, 2004; Geurs & van Wee, 2004).

Analisis jaringan digunakan untuk mempelajari jalur pergerakan, hubungan pusat kegiatan, serta akses menuju fasilitas dan ruang budaya. Jalur yang sering digunakan belum tentu merupakan jalur terpendek karena pilihan rute juga dipengaruhi kenyamanan, keamanan, kebiasaan, interaksi sosial, dan makna budaya (Hillier & Hanson, 1984; Kwan, 2004).

Analisis kepadatan dapat digunakan untuk menunjukkan konsentrasi aktivitas, peristiwa, masalah, atau nilai. Akan tetapi, hasil *heat map* perlu dibaca secara hati-hati karena konsentrasi titik dapat dipengaruhi jumlah responden, kemudahan akses, dan tingkat pengetahuan peserta. Normalisasi atau pembobotan mungkin diperlukan agar perbandingan tidak menyesatkan (Brown & Kytä, 2014; Longley et al., 2015).

Analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan narasi wawancara menjadi tema dan menghubungkannya dengan lokasi. Contohnya, tema "kehilangan ruang komunal" dapat dipetakan pada lokasi yang berubah menjadi bangunan, sedangkan tema "rasa tidak aman" dipetakan pada jalur tertentu. Integrasi tema dan lokasi membantu mengubah narasi menjadi penjelasan sosial-spasial tanpa menghilangkan konteksnya (Miles et al., 2020; Saldaña, 2021).

17. Sintesis hasil survei

Sintesis adalah tahap menggabungkan temuan fisik, aktivitas, sosial, budaya, persepsi, dan perubahan menjadi gambaran menyeluruh. Hasil sintesis dapat dibagi menjadi potensi, masalah, konflik, nilai penting, kerentanan, dan peluang pengembangan. Setiap kesimpulan harus dapat ditelusuri ke sumber data yang mendukungnya (Miles et al., 2020; Groat & Wang, 2013).

Ruang bernilai budaya dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan, cakupan pengguna, frekuensi aktivitas, kedalaman makna, kondisi fisik, dan tingkat ancaman. Klasifikasi bukan dimaksudkan untuk mengurangi

nilai ruang menjadi angka, tetapi membantu menentukan prioritas kebijakan secara transparan (Smith, 2006; UNESCO, 2011).

Zona prioritas dapat mencakup zona perlindungan, penguatan aktivitas, peningkatan akses, mitigasi konflik, revitalisasi, atau pengembangan terbatas. Penetapan zona perlu dibahas bersama masyarakat karena rekomendasi spasial akan memengaruhi hak, kegiatan, dan masa depan kawasan (Ros-Tonen et al., 2021; Ducci et al., 2023).

18. Penyajian hasil

Hasil survei dapat disajikan melalui peta tematik, diagram, tabel, foto beranotasi, penampang, kronologi, dan narasi. Peta memperlihatkan distribusi dan hubungan, sedangkan narasi menjelaskan alasan, pengalaman, serta makna. Penggunaan keduanya mencegah hasil kajian menjadi terlalu teknis atau terlalu deskriptif (Tufte, 2001; Rose, 2016).

Peta harus memuat judul, legenda, arah utara, skala, sumber, tanggal, dan sistem koordinat apabila diperlukan. Simbol perlu mudah dibedakan dan tidak menggunakan kategori berlebihan. Peta untuk masyarakat sebaiknya menggunakan bahasa, simbol, dan media yang mudah dipahami, sedangkan peta teknis dapat memuat informasi lebih rinci (Krygier & Wood, 2016; Corbett, 2009).

Data sensitif harus disajikan secara terbatas. Lokasi sakral, kelompok rentan, konflik tanah, dan identitas informan dapat digeneralisasi atau dihilangkan dari peta publik. Peta lengkap hanya diberikan kepada pihak yang disepakati dan memiliki kewenangan untuk mengaksesnya (Rambaldi et al., 2006; Israel & Hay, 2006).

19. Etika survei dan pengelolaan data

Pengumpulan data harus didahului persetujuan partisipan setelah mereka memperoleh informasi mengenai tujuan, proses, penggunaan data, dan hak untuk menolak. Izin pemerintah atau tokoh masyarakat tidak menggantikan persetujuan individual untuk diwawancarai, direkam, atau difoto (Israel & Hay, 2006; American Anthropological Association, 2012).

Peneliti harus menjaga kerahasiaan identitas dan keamanan data. Data digital perlu disimpan dengan pengaturan akses, sedangkan daftar identitas dipisahkan dari data analisis. Informasi yang dapat menimbulkan konflik atau merugikan masyarakat tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan yang jelas (Kaiser, 2009; Wiles et al., 2008).

Masyarakat perlu dilibatkan dalam memeriksa hasil dan menentukan pemanfaatannya. Pengembalian hasil dapat dilakukan melalui diskusi, pameran peta, poster, atau laporan ringkas. Praktik tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan membantu memastikan bahwa data masyarakat tidak hanya digunakan untuk kepentingan akademik peneliti (Chambers, 2006; Corbett, 2009).

20. Alur survei dan pemetaan

Perumusan tujuan → kajian data sekunder → penetapan unit dan batas → penyusunan instrumen → perizinan dan persetujuan → uji coba → pengumpulan data → pemeriksaan harian → pengkodean → pembuatan basis data → pemetaan → analisis sosial-spasial → triangulasi → validasi masyarakat → sintesis → rekomendasi

Alur tersebut bersifat iteratif. Temuan awal dapat menunjukkan perlunya menambah informan, mengubah batas, mengulang observasi, atau memperbaiki kategori data. Fleksibilitas diperlukan, tetapi setiap perubahan prosedur harus didokumentasikan agar proses penelitian tetap transparan (Creswell & Poth, 2018; Miles et al., 2020).

21. Contoh matriks analisis

Temuan	Bukti fisik	Bukti sosial	Bukti spasial	Interpretasi	Arahan
Lapangan aktif pada sore hari	Ruang terbuka dan teduh	Digunakan anak dan keluarga	Konsentrasi aktivitas sore	Ruang sosial penting	Pertahankan dan tambah fasilitas
Jalur tertentu dihindari malam hari	Penerangan terbatas	Dianggap tidak aman	Peta persepsi negatif	Hambatan akses temporal	Perbaikan cahaya dan pengawasan
Mata air bernilai spiritual	Struktur dan vegetasi tua	Digunakan dalam ritual	Terhubung jalur adat	Nilai ekologis-spiritual	Perlindungan dan zona penyangga
Pasar meluas ke jalan	Kios informal	Kebutuhan ekonomi warga	Mengganggu sekaligus menghidupkan jalur	Konflik mobilitas-ekonomi	Penataan waktu dan ruang
Ruang komunal menyusut	Bangunan baru	Warga kehilangan tempat berkumpul	Penurunan luas ruang bersama	Tekanan pemadatan	Penyediaan ruang pengganti

22. Tugas lapangan mahasiswa

Mahasiswa dapat dibagi dalam kelompok untuk memilih satu kawasan, menentukan pertanyaan kajian, dan membuat peta dasar. Setiap kelompok melakukan observasi pada minimal tiga periode waktu, wawancara dengan kelompok pengguna berbeda, pemetaan aktivitas, pemetaan persepsi, dan dokumentasi kondisi ruang. Hasil pengumpulan data kemudian disusun dalam basis data sosial-spasial (Gehl & Svarre, 2013; Groat & Wang, 2013).

Produk tugas dapat berupa profil kawasan, peta fisik, peta aktivitas, peta nilai budaya, peta masalah, analisis perubahan, dan arahan perencanaan. Setiap peta harus disertai metode, waktu pengumpulan, jumlah sumber, keterbatasan, serta narasi interpretatif agar tidak dianggap sebagai gambaran yang sepenuhnya objektif (Harley, 1989; Krygier & Wood, 2016).

Penilaian tugas perlu mempertimbangkan ketepatan metode, kelengkapan data, integrasi sosial-spasial, kedalaman interpretasi, kejelasan visualisasi, penghormatan terhadap etika, dan kemampuan menghubungkan temuan dengan rekomendasi. Kualitas tugas tidak hanya ditentukan oleh tampilan peta, tetapi oleh kekuatan bukti dan ketepatan penalarannya (Creswell & Plano Clark, 2018; Miles et al., 2020).

23. Kesimpulan

Survei dan observasi ruang kultural merupakan proses menghubungkan kondisi fisik, aktivitas, masyarakat, nilai, persepsi, dan perubahan ke dalam data sosial-spasial. Pengumpulan data harus dirancang berdasarkan tujuan, unit analisis, variasi sosial, lokasi, dan waktu. Penggunaan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, serta pemetaan partisipatif menghasilkan data yang saling melengkapi (Rapoport, 1990; Zeisel, 2006).

Pengorganisasian data dilakukan melalui pengkodean, metadata, tabel atribut, transkripsi, pelapisan peta, dan pemeriksaan mutu. Interpretasi kemudian dilakukan dengan membaca distribusi, hubungan, tumpang tindih, perbedaan waktu, ketidakhadiran kelompok, serta makna yang menjelaskan pola spasial. Tahap akhirnya adalah validasi bersama masyarakat dan penyusunan arahan perencanaan yang berbasis bukti serta menghormati nilai budaya (Longley et al., 2015; Low, 2017).

A. Pertanyaan diskusi mahasiswa

1. Apa perbedaan data sosial, data spasial, dan data sosial-spasial?
2. Mengapa survei ruang kultural perlu dilakukan pada waktu yang berbeda?
3. Bagaimana menentukan batas kajian apabila batas budaya berbeda dari batas administratif?
4. Mengapa lokasi yang ramai belum tentu merupakan ruang publik yang inklusif?
5. Bagaimana mengintegrasikan wawancara dengan peta?
6. Apa arti ruang yang tidak pernah digunakan oleh kelompok tertentu?
7. Apakah semakin banyak titik pada peta berarti semakin tinggi nilai budaya suatu tempat?
8. Bagaimana memperlakukan informasi mengenai situs sakral atau konflik tanah?
9. Mengapa masyarakat perlu memvalidasi hasil pemetaan?
10. Bagaimana menerjemahkan temuan sosial-spasial menjadi arahan perencanaan?

DAFTAR PUSTAKA

1. American Anthropological Association. (2012). *Principles of professional responsibility*. American Anthropological Association.
2. Brown, G., & Kytä, M. (2014). Key issues and research priorities for public participation GIS: A synthesis based on empirical research. *Applied Geography*, 46, 122–136.
<https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.11.004>

3. Brown, G., & Raymond, C. (2007). The relationship between place attachment and landscape values: Toward mapping place attachment. *Applied Geography*, 27(2), 89–111.
<https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2006.11.002>
4. Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
[https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
5. Chambers, R. (2006). Participatory mapping and geographic information systems: Whose map? Who is empowered and who disempowered? Who gains and who loses? *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 25(1), 1–11. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2006.tb00163.x>
6. Corbett, J. (2009). *Good practices in participatory mapping*. International Fund for Agricultural Development.
7. Cornwall, A. (2003). Whose voices? Whose choices? Reflections on gender and participatory development. *World Development*, 31(8), 1325–1342. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00086-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00086-X)
8. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
9. Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
10. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
11. DeMers, M. N. (2009). *Fundamentals of geographic information systems* (4th ed.). Wiley.
12. Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
13. Ducci, M., Janssen, R., Burgers, G.-J., & Rotondo, F. (2023). Co-design workshops for cultural landscape planning. *Landscape Research*, 48(7), 900–916. <https://doi.org/10.1080/01426397.2023.2204222>
14. Evans, J., & Jones, P. (2011). The walking interview: Methodology, mobility and place. *Applied Geography*, 31(2), 849–858.
<https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.09.005>
15. García-Martín, M., Fagerholm, N., Bieling, C., Gounaridis, D., Kizos, T., Printsmann, A., Müller, M., Lieskovský, J., & Plieninger, T. (2017). Participatory mapping of landscape values in a Pan-European perspective. *Landscape Ecology*, 32(11), 2133–2150.
<https://doi.org/10.1007/s10980-017-0531-x>
16. Gehl, J., & Svarre, B. (2013). *How to study public life*. Island Press.
17. Geurs, K. T., & van Wee, B. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: Review and research directions. *Journal of Transport Geography*, 12(2), 127–140.
<https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.10.005>
18. Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: The world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221.
<https://doi.org/10.1007/s10708-007-9111-y>

19. Gottwald, S., Brenner, J., Albert, C., & Janssen, R. (2021). Integrating sense of place into participatory landscape planning: Merging mapping surveys and geodesign workshops. *Landscape Research*, 46(8), 1041–1056. <https://doi.org/10.1080/01426397.2021.1939288>
20. Groat, L. N., & Wang, D. (2013). *Architectural research methods* (2nd ed.). Wiley.
21. Harley, J. B. (1989). Deconstructing the map. *Cartographica*, 26(2), 1–20. <https://doi.org/10.3138/E635-7827-1757-9T53>
22. Haryadi, & Setiawan, B. (2010). *Arsitektur, lingkungan dan perilaku: Pengantar ke teori, metodologi dan aplikasi*. Gadjah Mada University Press.
23. Hillier, B., & Hanson, J. (1984). *The social logic of space*. Cambridge University Press.
24. Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists*. SAGE Publications.
25. Kaiser, K. (2009). Protecting respondent confidentiality in qualitative research. *Qualitative Health Research*, 19(11), 1632–1641. <https://doi.org/10.1177/1049732309350879>
26. Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). SAGE Publications.
27. Krygier, J., & Wood, D. (2016). *Making maps: A visual guide to map design for GIS* (3rd ed.). Guilford Press.
28. Kusenbach, M. (2003). Street phenomenology: The go-along as ethnographic research tool. *Ethnography*, 4(3), 455–485. <https://doi.org/10.1177/146613810343007>
29. Kwan, M.-P. (2004). GIS methods in time-geographic research: Geocomputation and geovisualization of human activity patterns. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 86(4), 267–280. <https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00167.x>
30. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
31. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic information science and systems* (4th ed.). Wiley.
32. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
33. Lynch, K. (1960). *The image of the city*. MIT Press.
34. Lynch, K. (1972). *What time is this place?* MIT Press.
35. Malczewski, J., & Rinner, C. (2015). *Multicriteria decision analysis in geographic information science*. Springer.
36. Marcillia, S. R., & Kesumasari, D. (2017). Students' sitting preferences at plaza in educational institution. *DIMENSI: Journal of Architecture and Built Environment*, 44(2), 179–188. <https://doi.org/10.9744/dimensi.44.2.179-188>
37. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
38. Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.

39. Moudon, A. V. (1997). Urban morphology as an emerging interdisciplinary field. *Urban Morphology*, 1(1), 3–10.
<https://doi.org/10.51347/jum.v1i1.4047>
40. Oliveira, V. (2016). *Urban morphology: An introduction to the study of the physical form of cities*. Springer.
41. Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
42. Purwanto, E. (2001). Pendekatan pemahaman citra lingkungan perkotaan melalui kemampuan peta mental pengamat. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 29(1), 85–92.
43. Rambaldi, G., Chambers, R., McCall, M., & Fox, J. (2006). Practical ethics for PGIS practitioners, facilitators, technology intermediaries and researchers. *Participatory Learning and Action*, 54, 106–113.
44. Rapoport, A. (1982). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach*. SAGE Publications.
45. Rapoport, A. (1990). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach* (Rev. ed.). University of Arizona Press.
46. Ros-Tonen, M. A. F., Willemen, L., & McCall, M. K. (2021). Spatial tools for integrated and inclusive landscape governance: Toward a new research agenda. *Environmental Management*, 68, 611–618.
<https://doi.org/10.1007/s00267-021-01547-x>
47. Rose, G. (2016). *Visual methodologies: An introduction to researching with visual materials* (4th ed.). SAGE Publications.
48. Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
49. Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. *Journal of Environmental Psychology*, 30(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.006>
50. Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
51. Sommer, R., & Sommer, B. B. (2001). *A practical guide to behavioral research: Tools and techniques* (5th ed.). Oxford University Press.
52. Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
53. Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (2nd ed.). Graphics Press.
54. UNESCO. (2011). *Recommendation on the historic urban landscape*. UNESCO.
55. Wiles, R., Clark, A., & Prosser, J. (2008). *Visual research ethics at the crossroads*. National Centre for Research Methods.
56. Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
57. Zeisel, J. (2006). *Inquiry by design: Environment/behavior/neuroscience in architecture, interiors, landscape, and planning* (Rev. ed.). W. W. Norton.

POKOK BAHASAN MINGGU KE-14

Analisis dan Perumusan Konsep Perencanaan Ruang

Kultural: potensi, masalah, nilai budaya, kebutuhan masyarakat, konsep pengembangan

1. Pengertian analisis perencanaan ruang kultural

Analisis perencanaan ruang kultural merupakan proses mengolah data fisik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan menjadi pemahaman yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Analisis tidak berhenti pada deskripsi kondisi, tetapi menjelaskan hubungan sebab-akibat, kepentingan para pelaku, nilai yang perlu dilindungi, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta perubahan yang mungkin terjadi pada suatu kawasan (Rapoport, 1982; Low, 2017).

Perencanaan ruang kultural menempatkan ruang sebagai lingkungan hidup yang dibentuk oleh aktivitas, sejarah, nilai, simbol, identitas, dan pengalaman masyarakat. Sebuah pasar, kampung, tempat ibadah, lapangan, jalur ritual, atau bentang alam tidak hanya dinilai berdasarkan kondisi fisik, tetapi juga berdasarkan fungsi sosial dan makna yang dimilikinya bagi masyarakat (Smith, 2006; UNESCO, 2011).

Analisis menjadi penghubung antara tahap pengumpulan data dan tahap perumusan konsep. Data survei yang belum dianalisis hanya menghasilkan daftar fakta, sedangkan konsep yang tidak didasarkan pada analisis berisiko menjadi gagasan normatif yang tidak sesuai dengan kondisi kawasan. Oleh karena itu, setiap arahan pengembangan harus dapat ditelusuri kembali kepada potensi, masalah, nilai, dan kebutuhan yang ditemukan di lapangan (Groat & Wang, 2013; Patton, 2015).

2. Kedudukan konsep dalam proses perencanaan

Konsep perencanaan merupakan gagasan utama yang mengarahkan cara suatu kawasan dipertahankan, diperbaiki, dikembangkan, dan dikelola. Konsep berada di antara hasil analisis dan rancangan rinci. Konsep belum berupa desain teknis, tetapi harus cukup jelas untuk menjelaskan tujuan, struktur ruang, hubungan fungsi, prinsip desain, prioritas program, dan mekanisme pelaksanaan (Shirvani, 1985; Carmona et al., 2010).

Konsep perencanaan ruang kultural harus menjawab lima pertanyaan: nilai apa yang dipertahankan; masalah apa yang diselesaikan; kebutuhan siapa yang dipenuhi; perubahan apa yang diperbolehkan; dan bagaimana perubahan tersebut dikelola. Dengan demikian, konsep bukan sekadar slogan, tetapi kerangka keputusan yang menghubungkan nilai budaya dengan kebutuhan pembangunan (Mason, 2002; UNESCO, 2011).

Konsep yang baik memiliki kesesuaian dengan karakter tempat, dapat dilaksanakan, diterima masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan memiliki indikator keberhasilan. Konsep juga harus dapat diterjemahkan ke dalam peta

struktur ruang, zonasi, program, desain kawasan, kelembagaan, pembiayaan, dan tahapan implementasi (Healey, 1997; Hall & Tewdwr-Jones, 2020).

3. Kerangka analisis

Analisis ruang kultural dapat disusun melalui lima komponen utama, yaitu kondisi eksisting, potensi, masalah, nilai budaya, dan kebutuhan masyarakat. Kelima komponen tersebut kemudian disintesis untuk merumuskan isu strategis, tujuan, prinsip, alternatif, dan konsep pengembangan kawasan (UNESCO, 2011; Australian ICOMOS, 2013).

Data eksisting → potensi dan masalah → nilai budaya → kebutuhan masyarakat → isu strategis → tujuan → alternatif → konsep pengembangan → program dan indikator

Alur tersebut bersifat iteratif. Ketika konsep awal dibahas dengan masyarakat, dapat muncul informasi baru yang mengharuskan perencana meninjau kembali analisis potensi, masalah, atau kebutuhan. Perencanaan partisipatif karena itu bukan proses linear, tetapi proses pembelajaran dan perundingan yang berlangsung secara berulang (Healey, 1997; Forester, 1999).

4. Identifikasi potensi kawasan

Potensi adalah kondisi, sumber daya, kemampuan, dan nilai yang dapat digunakan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas kawasan. Potensi ruang kultural dapat berupa bangunan bersejarah, lanskap, tradisi, pengetahuan lokal, aktivitas ekonomi, jaringan sosial, ruang publik, kelembagaan, aksesibilitas, serta keterampilan masyarakat (Smith, 2006; UNESCO, 2011).

Potensi fisik meliputi struktur ruang, bangunan tradisional, pola jalan, ruang terbuka, vegetasi, sumber air, material lokal, panorama, dan landmark. Unsur tersebut dapat menjadi dasar pelestarian identitas, peningkatan kualitas lingkungan, pembentukan jalur budaya, serta pengembangan ruang publik yang kontekstual (Lynch, 1960; Norberg-Schulz, 1980).

Potensi sosial mencakup jaringan kekerabatan, gotong royong, organisasi lokal, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, serta mekanisme penyelesaian masalah. Modal sosial tersebut dapat mendukung pengelolaan ruang bersama, pemeliharaan lingkungan, penyelenggaraan kegiatan budaya, dan pengawasan pembangunan (Putnam, 1993; Ostrom, 1990).

Potensi budaya mencakup tradisi, ritual, cerita lokal, bahasa, seni, keterampilan, kuliner, pengetahuan lingkungan, dan identitas tempat. Potensi budaya tidak selalu berbentuk objek; praktik, pengetahuan, dan hubungan sosial yang menghidupkan tempat juga merupakan bagian penting dari warisan budaya (Smith, 2006; UNESCO, 2003).

Potensi ekonomi dapat berupa pasar tradisional, kerajinan, pertanian, kuliner, jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis masyarakat. Pengembangannya perlu menjaga hubungan antara kegiatan ekonomi, pelaku lokal, dan karakter tempat agar manfaat ekonomi tidak justru meminggirkan

masyarakat atau mengubah budaya menjadi komoditas semata (Zukin, 1995; Timothy & Boyd, 2003).

Potensi ekologis meliputi kesesuaian iklim, vegetasi lokal, badan air, lahan produktif, koridor ekologis, serta pengetahuan masyarakat dalam mengelola lingkungan. Integrasi nilai ekologis dan budaya penting karena banyak lanskap kultural terbentuk melalui hubungan jangka panjang antara masyarakat dan alam (Plieninger et al., 2015; Taylor & Lennon, 2011).

Potensi kelembagaan meliputi aturan adat, organisasi pengelola, perangkat pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, dan jaringan kerja sama. Potensi ini menentukan kemampuan kawasan untuk melaksanakan dan mempertahankan program. Konsep yang baik dapat gagal apabila tidak didukung pembagian peran, kapasitas organisasi, dan mekanisme pengelolaan yang jelas (Ostrom, 1990; Healey, 1997).

5. Analisis masalah

Masalah adalah kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan. Dalam ruang kultural, masalah dapat berbentuk kerusakan fisik, hilangnya aktivitas tradisional, konflik lahan, tekanan pembangunan, akses yang tidak merata, menurunnya kualitas lingkungan, lemahnya kelembagaan, dan terputusnya pewarisan budaya (UNESCO, 2011; Pendlebury, 2013).

Masalah perlu dibedakan antara gejala dan akar penyebab. Berkurangnya kegiatan budaya, misalnya, merupakan gejala yang dapat disebabkan oleh hilangnya ruang, menurunnya jumlah pelaku, kurangnya regenerasi, perubahan mata pencaharian, atau pembatasan akses. Konsep yang hanya mengatasi gejala cenderung menghasilkan program yang tidak berkelanjutan (Patton, 2015; Bryson, 2018).

Analisis masalah dapat menggunakan pohon masalah. Batang menggambarkan masalah utama, akar menunjukkan penyebab, sedangkan cabang menunjukkan dampak. Teknik ini membantu mahasiswa menghindari rekomendasi yang terlalu cepat dan menghubungkan persoalan fisik dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan (Bryson, 2018; Chambers, 1994).

Masalah fisik dapat mencakup kerusakan bangunan, ketidaksesuaian bangunan baru, berkurangnya ruang terbuka, terputusnya jalur tradisional, buruknya sanitasi, dan ancaman bencana. Namun, penanganannya harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta fungsi budaya bangunan agar peningkatan kualitas tidak menghasilkan pemindahan penduduk atau kehilangan identitas (Pendlebury, 2013; UNESCO, 2011).

Masalah sosial dapat berupa konflik kelompok, ketimpangan akses, menurunnya interaksi, eksklusi perempuan atau kelompok rentan, dan melemahnya gotong royong. Masalah tersebut mungkin tidak terlihat secara fisik, tetapi dapat diketahui melalui wawancara, observasi perilaku, pemetaan sosial, dan analisis pemangku kepentingan (Low, 2017; Cornwall, 2003).

Masalah budaya dapat berupa hilangnya pengetahuan, perubahan makna, komersialisasi ritual, penggunaan simbol tanpa konteks, serta terputusnya hubungan antara aktivitas dan tempat. Pelestarian yang hanya mempertahankan bentuk bangunan tanpa menjaga komunitas dan kegiatan

dapat menghasilkan kawasan yang tampak bersejarah tetapi kehilangan kehidupan budayanya (Smith, 2006; Zukin, 1995).

Konflik ruang dapat muncul karena suatu lokasi memiliki beberapa fungsi dan makna. Jalan dapat menjadi jalur transportasi sekaligus ruang perdagangan dan prosesi; lapangan dapat menjadi ruang olahraga sekaligus ruang ritual. Perencanaan perlu memahami variasi penggunaan berdasarkan waktu agar tidak menghilangkan fungsi budaya atas nama efisiensi tunggal (Rapoport, 1990; Low, 2017).

6. Analisis nilai budaya

Nilai budaya adalah kualitas penting yang diberikan masyarakat kepada objek, tempat, aktivitas, pengetahuan, atau lanskap. Nilai tersebut dapat bersifat historis, sosial, spiritual, estetis, ilmiah, ekologis, ekonomi, dan simbolis. Sebuah tempat dapat memiliki beberapa nilai sekaligus dan setiap kelompok dapat memberikan penilaian yang berbeda (Mason, 2002; Australian ICOMOS, 2013).

Nilai historis berkaitan dengan peristiwa, tokoh, periode, atau perkembangan kawasan. Nilai sosial muncul dari hubungan, penggunaan, dan rasa memiliki masyarakat. Nilai spiritual berhubungan dengan kepercayaan, ritual, dan kesucian, sedangkan nilai estetis berkaitan dengan kualitas bentuk, komposisi, suasana, dan pengalaman inderawi (Mason, 2002; de la Torre, 2002).

Nilai budaya tidak hanya terdapat pada objek yang tua atau monumental. Warung, gang, halaman, pohon, sungai, atau tempat berkumpul dapat memiliki nilai tinggi karena menjadi bagian dari kehidupan dan ingatan masyarakat. Karena itu, proses penilaian perlu mengakui warisan resmi maupun warisan sehari-hari yang dianggap penting oleh komunitas (Smith, 2006; Harrison, 2013).

Penilaian nilai dapat menggunakan beberapa kriteria, yaitu tingkat kepentingan, kelangkaan, keterwakilan, keaslian, integritas, keberlanjutan fungsi, keterikatan masyarakat, dan tingkat ancaman. Kriteria tersebut harus digunakan sebagai alat bantu diskusi, bukan sebagai formula yang menggantikan pertimbangan sosial dan budaya (Mason, 2002; Australian ICOMOS, 2013).

Keaslian tidak hanya berkaitan dengan material lama. Dalam tradisi hidup, keaslian dapat terletak pada fungsi, teknik, pengetahuan, lokasi, bahasa, suasana, atau keberlanjutan praktik. Bangunan yang mengalami perubahan material dapat tetap bermakna apabila fungsi, hubungan sosial, dan pengetahuan budaya yang mendasarinya masih bertahan (ICOMOS, 1994; UNESCO, 2003).

Integritas mengacu pada kelengkapan unsur serta hubungan yang diperlukan agar nilai suatu tempat dapat dipahami. Tempat ibadah, misalnya, dapat kehilangan integritas apabila jalur ritual, ruang berkumpul, bentang pandang, atau komunitas penggunaanya terputus. Perlindungan perlu diarahkan pada sistem tempat, bukan hanya satu objek (UNESCO, 2011; Taylor & Lennon, 2011).

7. Matriks penilaian nilai budaya

Objek atau ruang	Nilai utama	Pemilik/pengguna nilai	Kondisi	Ancaman	Tingkat kepentingan	Arahan awal
Bangunan adat	Historis dan simbolis	Masyarakat adat	Sedang	Perubahan bentuk	Tinggi	Konservasi adaptif
Lapangan komunal	Sosial dan ritual	Seluruh warga	Baik	Alih fungsi	Tinggi	Perlindungan fungsi
Pasar tradisional	Ekonomi dan sosial	Pedagang–warga	Kurang	Modernisasi	Tinggi	Revitalisasi inklusif
Mata air	Ekologis dan spiritual	Kelompok adat	Rentan	Pencemaran	Sangat tinggi	Zona perlindungan
Gang lama	Historis dan sosial	Penduduk	Sedang	Pelebaran jalan	Sedang–tinggi	Pengelolaan lalu lintas
Kerajinan lokal	Pengetahuan dan ekonomi	Perajin	Menurun	Kurang regenerasi	Tinggi	Regenerasi dan pemasaran

Matriks harus disusun melalui gabungan data observasi, wawancara, sejarah, pemetaan, dan diskusi masyarakat. Nilai tidak boleh ditentukan sepihak oleh perencana karena masyarakat lokal dapat memiliki pengetahuan serta hubungan emosional yang tidak terlihat oleh pengamat luar (Mason, 2002; Smith, 2006).

8. Analisis kebutuhan masyarakat

Kebutuhan masyarakat adalah kondisi, fasilitas, akses, dan kesempatan yang diperlukan agar warga dapat hidup, bekerja, berinteraksi, mempertahankan identitas, serta mengembangkan kapasitasnya. Kebutuhan dapat bersifat dasar, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, keamanan, dan kelembagaan (Maslow, 1943; Max-Neef, 1991).

Kebutuhan dasar meliputi perumahan layak, air, sanitasi, kesehatan, pendidikan, mobilitas, dan keamanan. Dalam kawasan budaya, pemenuhan kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan pola ruang serta praktik lokal. Penyediaan infrastruktur yang seragam dapat merusak struktur, tampilan, atau ruang budaya apabila tidak dirancang secara kontekstual (Turner, 1976; UNESCO, 2011).

Kebutuhan sosial meliputi ruang pertemuan, akses yang adil, rasa aman, keterlibatan dalam keputusan, dan penguatan hubungan komunitas. Ruang komunal harus dapat digunakan oleh kelompok usia, gender, kemampuan, dan status sosial yang berbeda agar tidak hanya melayani kelompok dominan (Gehl, 2011; Low et al., 2005).

Kebutuhan budaya meliputi ruang untuk ritual, seni, pembelajaran, transmisi pengetahuan, penyimpanan artefak, serta penguatan bahasa dan identitas lokal. Kebutuhan tersebut sering tidak tercatat dalam standar pelayanan

umum sehingga harus digali melalui pendekatan partisipatif (UNESCO, 2003; Smith, 2006).

Kebutuhan ekonomi mencakup ruang produksi, perdagangan, penyimpanan, pelatihan, akses pasar, dan dukungan terhadap usaha lokal. Konsep pengembangan perlu mencegah kenaikan harga tanah dan sewa yang dapat menggeser pelaku lokal setelah kawasan menjadi lebih menarik secara ekonomi (Zukin, 1995; Lees et al., 2008).

Kebutuhan yang dinyatakan masyarakat perlu dibedakan dari kebutuhan normatif, komparatif, dan laten. Kebutuhan yang dinyatakan muncul langsung dari warga; kebutuhan normatif didasarkan pada standar; kebutuhan komparatif diketahui melalui perbandingan wilayah; sedangkan kebutuhan laten belum disadari atau belum dapat disuarakan masyarakat (Bradshaw, 1972; Ife, 2013).

Analisis kebutuhan harus memperhatikan kelompok yang suaranya kurang terwakili. Perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, penyewa, pendatang, dan pekerja informal dapat mengalami ruang secara berbeda. Keterlibatan mereka membantu mencegah konsep pembangunan yang hanya mencerminkan kepentingan pemilik lahan atau tokoh formal (Cornwall, 2003; Moser, 1993).

9. Analisis pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau lembaga yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh perencanaan. Mereka dapat mencakup masyarakat, tokoh adat, pemerintah, pemilik tanah, pelaku usaha, komunitas budaya, akademisi, wisatawan, dan pengembang. Setiap pihak memiliki kepentingan, sumber daya, pengetahuan, dan tingkat kekuasaan yang berbeda (Bryson, 2004; Reed et al., 2009).

Analisis dapat menggunakan matriks kepentingan–pengaruh. Pihak berkepentingan tinggi dan berpengaruh tinggi perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan; pihak berkepentingan tinggi tetapi kurang berpengaruh perlu diberdayakan; pihak berpengaruh tetapi berkepentingan rendah perlu dijaga keterlibatannya; sedangkan pihak dengan kepentingan dan pengaruh rendah tetap perlu dipantau (Bryson, 2004; Reed et al., 2009).

Analisis pemangku kepentingan tidak boleh hanya menghasilkan daftar aktor. Perencana perlu mengkaji hubungan, konflik, aliansi, akses informasi, serta kelompok yang tidak diakui secara formal. Hal ini penting karena partisipasi dapat terlihat terbuka, tetapi hasilnya tetap dikuasai oleh kelompok yang memiliki sumber daya dan posisi lebih kuat (Arnstein, 1969; Forester, 1999).

10. Analisis potensi dan masalah secara terpadu

Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengelompokkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Dalam ruang kultural, kekuatan dapat berupa tradisi hidup, kelembagaan, dan identitas kuat; kelemahan berupa infrastruktur buruk atau regenerasi rendah; peluang berupa dukungan kebijakan dan pasar; sedangkan ancaman dapat berupa alih fungsi, bencana, dan komersialisasi (Gürel & Tat, 2017; Bryson, 2018).

SWOT tidak boleh berhenti pada pembuatan daftar. Analisis harus menghasilkan strategi, misalnya menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan

peluang, menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman, mengatasi kelemahan melalui peluang, dan mengurangi kelemahan yang berhadapan dengan ancaman. Setiap strategi harus dikaitkan dengan lokasi, pelaku, sumber daya, serta waktu pelaksanaan (Gürel & Tat, 2017; Bryson, 2018).

Metode lain adalah analisis *problem–potential linkage*. Setiap masalah dipasangkan dengan potensi yang dapat digunakan untuk menanganinya. Misalnya, menurunnya kegiatan budaya dapat diatasi melalui potensi kelompok pemuda, ruang komunal, sekolah, dan tokoh budaya. Pendekatan ini mencegah konsep pengembangan terlalu bergantung pada sumber daya eksternal (Chambers, 1994; Ife, 2013).

11. Perumusan isu strategis

Isu strategis merupakan persoalan atau peluang utama yang mempunyai dampak luas, berjangka panjang, membutuhkan tindakan lintas pihak, dan menentukan masa depan kawasan. Isu strategis bukan daftar semua masalah, tetapi hasil pemilihan terhadap kondisi yang paling penting untuk ditangani (Bryson, 2018; Healey, 1997).

Kriteria penentuan isu dapat mencakup besarnya dampak, jumlah kelompok terdampak, nilai budaya yang terancam, tingkat urgensi, kemungkinan tidak dapat dipulihkan, keterkaitan dengan masalah lain, dan peluang penyelesaian. Isu yang menyangkut hilangnya situs sakral atau pemindahan komunitas dapat memperoleh prioritas tinggi karena dampaknya sulit dibalik (Mason, 2002; UNESCO, 2011).

Contoh isu strategis adalah melemahnya identitas akibat pembangunan seragam, terputusnya jalur budaya, menurunnya regenerasi pelaku tradisi, konflik antara pariwisata dan kehidupan warga, serta meningkatnya risiko bencana terhadap permukiman tradisional. Isu tersebut harus dirumuskan secara spesifik agar dapat diterjemahkan menjadi tujuan dan strategi (Smith, 2006; Pendlebury, 2013).

12. Perumusan visi dan tujuan

Visi merupakan gambaran kondisi masa depan yang ingin diwujudkan. Visi ruang kultural perlu menggambarkan hubungan antara pelestarian identitas, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, inklusivitas, dan kemampuan beradaptasi. Visi sebaiknya dirumuskan melalui proses partisipatif agar menjadi komitmen bersama, bukan hanya pernyataan teknis perencanaan (Healey, 1997; Forester, 1999).

Contoh visi adalah: **“Terwujudnya kawasan ruang kultural yang hidup, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan melalui perlindungan nilai budaya, penguatan kehidupan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal yang kontekstual.”** Visi tersebut perlu diterjemahkan menjadi tujuan yang lebih operasional dan dapat dievaluasi (Bryson, 2018; UNESCO, 2011).

Tujuan dapat meliputi perlindungan situs dan lanskap budaya, keberlanjutan praktik tradisional, peningkatan kualitas lingkungan, penguatan akses masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Setiap tujuan harus memiliki kelompok

penerima manfaat, lokasi, indikator, serta jangka waktu (Hall & Tewdwr-Jones, 2020; Bryson, 2018).

13. Prinsip perencanaan ruang kultural

Prinsip pertama adalah keberlanjutan budaya, yaitu memastikan bahwa nilai, pengetahuan, aktivitas, dan komunitas dapat bertahan serta berkembang. Pelestarian tidak berarti membekukan kawasan, tetapi mengarahkan perubahan agar tidak merusak unsur dan hubungan yang membentuk makna tempat (Smith, 2006; Australian ICOMOS, 2013).

Prinsip kedua adalah berpusat pada masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam penilaian nilai, penentuan prioritas, pemilihan alternatif, pelaksanaan, dan evaluasi. Partisipasi bermakna memberikan pengaruh terhadap keputusan, bukan sekadar menghadiri pertemuan atau menerima informasi (Arnstein, 1969; Healey, 1997).

Prinsip ketiga adalah perlindungan berbasis kawasan. Perlindungan tidak hanya diarahkan pada bangunan, tetapi juga pola jalan, ruang terbuka, jalur ritual, bentang pandang, aktivitas, lingkungan alam, dan hubungan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep lanskap kota bersejarah yang melihat warisan sebagai sistem berlapis (UNESCO, 2011; Taylor & Lennon, 2011).

Prinsip keempat adalah adaptasi dan kompatibilitas. Fungsi baru dapat diterapkan apabila tidak menghilangkan nilai utama dan tetap sesuai dengan skala, karakter, kapasitas, serta kehidupan masyarakat. Adaptasi harus dapat dibedakan dari pemalsuan sejarah dan tidak merusak bukti penting (Australian ICOMOS, 2013; Plevoets & Van Cleempoel, 2019).

Prinsip kelima adalah keadilan spasial. Manfaat dan beban pembangunan harus didistribusikan secara adil. Konsep perlu memastikan bahwa masyarakat lokal tetap dapat tinggal, bekerja, mengakses ruang, dan memperoleh manfaat ekonomi setelah kawasan dikembangkan (Fainstein, 2010; Soja, 2010).

Prinsip keenam adalah ketahanan. Kawasan budaya harus mampu menghadapi bencana, perubahan iklim, tekanan ekonomi, dan perubahan sosial tanpa kehilangan fungsi serta nilai utamanya. Ketahanan mencakup bangunan, infrastruktur, mata pencaharian, jaringan sosial, dan kapasitas kelembagaan (Vale & Campanella, 2005; UNESCO, 2011).

14. Penyusunan alternatif konsep

Alternatif konsep merupakan beberapa pilihan strategi yang menunjukkan cara berbeda untuk mencapai tujuan. Alternatif dapat berupa konservasi ketat, revitalisasi berbasis komunitas, pengembangan ekonomi budaya, adaptasi fungsi, atau kombinasi beberapa pendekatan. Penyusunan alternatif mencegah perencana langsung memilih satu gagasan tanpa membandingkan konsekuensinya (Steinitz, 2012; Malczewski & Rinner, 2015).

Setiap alternatif perlu menunjukkan struktur ruang, zona, jaringan, pusat kegiatan, program, kebutuhan biaya, dampak sosial, dampak budaya, dampak lingkungan, dan mekanisme pengelolaan. Alternatif yang menarik secara visual belum tentu paling sesuai jika berisiko menggusur warga atau menghilangkan praktik budaya (Carmona et al., 2010; Fainstein, 2010).

Evaluasi alternatif dapat menggunakan kriteria pelestarian nilai budaya, pemenuhan kebutuhan masyarakat, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dampak lingkungan, penerimaan sosial, ketahanan, dan kemudahan pelaksanaan. Bobot kriteria sebaiknya dibahas bersama masyarakat dan pemangku kepentingan agar keputusan tidak sepenuhnya ditentukan oleh ahli (Malczewski & Rinner, 2015; Reed et al., 2009).

15. Bentuk konsep pengembangan

A. Konsep perlindungan

Konsep perlindungan menetapkan objek, ruang, hubungan, dan aktivitas yang harus dipertahankan. Instrumennya dapat berupa zona inti, zona penyangga, perlindungan koridor pandang, pengendalian ketinggian, perlindungan jalur ritual, serta aturan perubahan bangunan. Tingkat pengendalian harus disesuaikan dengan nilai dan tingkat kerentanan setiap unsur (Mason, 2002; UNESCO, 2011).

B. Konsep revitalisasi

Revitalisasi bertujuan menghidupkan kembali kawasan yang mengalami penurunan fisik, sosial, atau ekonomi. Revitalisasi ruang kultural perlu memperkuat komunitas dan aktivitas lokal, bukan hanya memperbaiki fasad atau meningkatkan nilai properti. Program dapat berupa perbaikan ruang publik, dukungan usaha lokal, penggunaan kembali bangunan, dan penguatan acara budaya (Tiesdell et al., 1996; Pendlebury, 2013).

C. Konsep adaptasi fungsi

Adaptasi fungsi memberikan kegunaan baru kepada bangunan atau ruang lama agar tetap terpelihara. Fungsi baru harus sesuai dengan kapasitas, karakter, nilai, dan lingkungan sosial. Contohnya adalah pemanfaatan rumah lama sebagai pusat pembelajaran budaya, galeri komunitas, ruang kerja perajin, atau penginapan yang dikelola warga (Plevoets & Van Cleempoel, 2019; Australian ICOMOS, 2013).

D. Konsep pengembangan ekonomi budaya

Pengembangan ekonomi budaya menghubungkan warisan, kreativitas, dan mata pencaharian. Program dapat mencakup penguatan kerajinan, kuliner, pasar budaya, festival, pelatihan, serta jalur wisata. Manfaat ekonomi harus diarahkan kepada masyarakat lokal dan tidak mengubah aktivitas budaya menjadi pertunjukan yang kehilangan makna (Timothy & Boyd, 2003; Smith, 2006).

E. Konsep jaringan ruang budaya

Konsep jaringan menghubungkan situs, aktivitas, ruang publik, lanskap, dan pusat ekonomi melalui jalur pejalan kaki, jalur sepeda, rute ritual, informasi, dan interpretasi. Pendekatan jaringan mencegah pelestarian terpecah menjadi objek yang berdiri sendiri dan membantu pengunjung memahami hubungan antartempat (Lynch, 1960; UNESCO, 2011).

F. Konsep penguatan komunitas

Penguatan komunitas meliputi peningkatan kapasitas organisasi, regenerasi pelaku budaya, pendidikan, dokumentasi, pengelolaan bersama, serta dukungan terhadap kelompok rentan. Keberlanjutan ruang kultural bergantung pada masyarakat yang menghidupkannya sehingga investasi sosial sama pentingnya dengan pembangunan fisik (Ife, 2013; Ostrom, 1990).

16. Konsep spasial

Konsep spasial menerjemahkan visi dan prinsip ke dalam susunan ruang. Komponennya dapat berupa pusat budaya, subpusat kegiatan, jaringan penghubung, zona perlindungan, zona kehidupan masyarakat, zona ekonomi lokal, ruang publik, koridor ekologis, dan kawasan pengembangan terbatas (Lynch, 1960; Shirvani, 1985).

Pusat budaya tidak harus berupa bangunan baru. Pusat tersebut dapat berupa pasar, balai adat, lapangan, tempat ibadah, atau kelompok ruang yang telah memiliki aktivitas serta makna. Perencana sebaiknya memperkuat pusat yang hidup sebelum menciptakan pusat baru yang belum tentu digunakan masyarakat (Rapoport, 1990; Gehl, 2011).

Zona perlindungan dapat dibedakan berdasarkan tingkat nilai dan sensitivitas. Zona inti melindungi nilai utama; zona penyangga menjaga konteks visual, ekologis, dan sosial; sedangkan zona transisi mengatur bentuk pengembangan baru. Zonasi perlu menghindari pemisahan yang menghilangkan hubungan fungsional antara situs budaya dan masyarakatnya (UNESCO, 2011; Australian ICOMOS, 2013).

Jaringan budaya menghubungkan titik-titik penting melalui jalur yang aman, terbaca, nyaman, dan bermakna. Jaringan dapat mengikuti jalan lama, jalur air, rute perdagangan, atau prosesi tradisional. Pengembangan jaringan perlu mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari, tidak hanya pergerakan wisatawan (Lynch, 1960; Gehl, 2011).

17. Contoh rumusan konsep

Konsep utama: "Pelestarian ruang kultural yang hidup melalui penguatan jaringan budaya, revitalisasi ruang komunal, pengembangan ekonomi lokal, dan pengelolaan berbasis masyarakat."

Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penghuni kawasan. Nilai budaya dilindungi melalui keberlanjutan penggunaan, pewarisan pengetahuan, dan pemeliharaan hubungan antarunsur ruang. Pembangunan baru diarahkan untuk memperkuat kehidupan lokal serta meningkatkan kualitas lingkungan tanpa menghapus karakter tempat (Smith, 2006; UNESCO, 2011).

A. Struktur konsep

Unsur konsep	Arah pengembangan
Zona inti budaya	Perlindungan nilai, fungsi, dan aktivitas utama
Zona penyangga	Pengendalian skala, bentuk, akses, dan bentang pandang
Pusat budaya	Penguatan balai, pasar, lapangan, dan tempat pembelajaran
Jaringan budaya	Jalur sejarah, ritual, pejalan kaki, dan sepeda
Ruang komunal	Revitalisasi ruang pertemuan dan kegiatan
Ekonomi lokal	Dukungan kerajinan, kuliner, pasar, dan usaha warga
Lingkungan	Perlindungan air, vegetasi, lanskap, dan mitigasi risiko
Kelembagaan	Pengelolaan bersama pemerintah, komunitas, dan pelaku lokal
Interpretasi	Informasi sejarah, penanda, pendidikan, dan dokumentasi

18. Perumusan program

Program merupakan tindakan yang menerjemahkan konsep menjadi kegiatan. Program dapat dikelompokkan menjadi program fisik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Pengelompokan tersebut mencegah perencanaan terlalu berorientasi pada pembangunan fisik (Hall & Tewdwr-Jones, 2020; Ife, 2013).

Program fisik dapat mencakup konservasi bangunan, perbaikan jalan, peningkatan sanitasi, penataan ruang publik, dan mitigasi bencana. Program sosial-budaya dapat berupa pendidikan, dokumentasi, festival, regenerasi pelaku, dan penguatan kelompok. Program ekonomi meliputi pelatihan, pemasaran, pembiayaan usaha, dan pengelolaan wisata berbasis masyarakat (UNESCO, 2011; Timothy & Boyd, 2003).

Program perlu dibedakan menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Program jangka pendek dapat berupa pendataan serta kegiatan cepat; jangka menengah meliputi revitalisasi dan penguatan kelembagaan; sedangkan jangka panjang mencakup regenerasi budaya, pengendalian perkembangan, dan pembentukan ekonomi kawasan yang berkelanjutan (Bryson, 2018; Hall & Tewdwr-Jones, 2020).

19. Indikator keberhasilan

Indikator fisik dapat mencakup jumlah bangunan terpelihara, luas ruang komunal, kualitas akses, kondisi lingkungan, dan berkurangnya area rawan. Indikator fisik harus dikaitkan dengan penggunaan dan manfaatnya agar keberhasilan tidak hanya diukur melalui penyelesaian konstruksi (UNESCO, 2011; Carmona et al., 2010).

Indikator sosial-budaya dapat mencakup jumlah kegiatan yang berlangsung, keterlibatan generasi muda, keberlanjutan praktik tradisional, keterwakilan kelompok, rasa memiliki, dan tingkat kepuasan masyarakat. Pengukuran dapat menggabungkan data frekuensi, survei persepsi, observasi, dan wawancara (Scannell & Gifford, 2010; Brown & Raymond, 2007).

Indikator ekonomi dapat meliputi peningkatan pendapatan pelaku lokal, keberlangsungan usaha, persentase manfaat yang diterima masyarakat, dan stabilitas biaya hunian. Indikator tersebut penting untuk memastikan revitalisasi tidak menghasilkan perpindahan penduduk atau dominasi investor eksternal (Fainstein, 2010; Lees et al., 2008).

Indikator kelembagaan dapat mencakup keberadaan pengelola, keteraturan pertemuan, mekanisme konflik, transparansi pembiayaan, partisipasi, dan kemampuan memperbaiki program. Kelembagaan yang berfungsi memungkinkan konsep bertahan setelah proyek fisik selesai (Ostrom, 1990; Healey, 1997).

20. Etika perumusan konsep

Konsep tidak boleh menggunakan budaya masyarakat tanpa persetujuan atau hanya sebagai strategi pemasaran kawasan. Simbol, pengetahuan, cerita, dan praktik budaya memiliki pemilik serta aturan penggunaan. Masyarakat harus memiliki kendali terhadap cara budaya mereka direpresentasikan dan dimanfaatkan (Smith, 2006; UNESCO, 2003).

Perencana harus transparan mengenai pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung beban. Apabila pengembangan meningkatkan harga tanah, pajak, atau sewa, perlu disiapkan perlindungan bagi warga dan pelaku lokal. Keadilan proses harus berjalan bersama keadilan hasil (Fainstein, 2010; Soja, 2010).

Informasi mengenai ruang sakral, konflik tanah, atau kelompok rentan harus dikelola secara hati-hati. Tidak seluruh data hasil pemetaan perlu ditampilkan pada peta publik. Tingkat keterbukaan data harus disepakati dengan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan kerugian (Rambaldi et al., 2006; Corbett, 2009).

21. Matriks sintesis perencanaan

Potensi	Masalah	Nilai budaya	Kebutuhan	Konsep/strategi
Bangunan tradisional	Kerusakan dan perubahan bentuk	Historis dan arsitektural	Hunian layak	Konservasi adaptif
Lapangan komunal	Ancaman alih fungsi	Sosial dan ritual	Ruang interaksi	Perlindungan fungsi dan revitalisasi
Kerajinan lokal	Regenerasi rendah	Pengetahuan dan identitas	Pelatihan dan pasar	Pusat pembelajaran dan ekonomi kreatif
Mata air	Pencemaran	Ekologis dan spiritual	Air bersih	Zona perlindungan dan pengelolaan warga
Pasar tradisional	Infrastruktur buruk	Ekonomi dan sosial	Ruang usaha layak	Revitalisasi inklusif
Jalur sejarah	Terputus dan tidak terbaca	Historis dan simbolis	Mobilitas aman	Jaringan budaya
Organisasi lokal	Kapasitas terbatas	Modal sosial	Pendampingan	Penguatan kelembagaan
Tradisi ritual	Partisipasi pemuda menurun	Spiritual dan identitas	Regenerasi	Pendidikan dan dokumentasi budaya

Matriks sintesis membantu memastikan bahwa konsep merupakan jawaban atas hasil analisis. Setiap strategi harus menunjukkan potensi yang digunakan, masalah yang ditangani, nilai yang dijaga, serta kebutuhan yang dipenuhi. Apabila hubungan tersebut tidak jelas, strategi perlu ditinjau kembali (Bryson, 2018; Mason, 2002).

22. Tugas mahasiswa

Mahasiswa dapat menggunakan hasil survei Minggu ke-13 untuk menyusun analisis potensi, masalah, nilai budaya, kebutuhan, dan pemangku kepentingan. Hasilnya disajikan dalam peta, pohon masalah, matriks nilai, matriks kebutuhan, serta rumusan tiga sampai lima isu strategis (Groat & Wang, 2013; Patton, 2015).

Tahap berikutnya adalah menyusun visi, tujuan, prinsip, serta minimal tiga alternatif konsep. Setiap alternatif harus dilengkapi diagram spasial, program utama, manfaat, risiko, kelompok terdampak, dan kriteria evaluasi. Alternatif terpilih kemudian dikembangkan menjadi konsep ruang kultural yang lebih utuh (Steinitz, 2012; Malczewski & Rinner, 2015).

Penilaian tugas dapat mencakup ketepatan analisis, hubungan data dan konsep, keterwakilan masyarakat, perlindungan nilai budaya, kelayakan, inovasi, kejelasan visual, dan kemampuan menjelaskan konsekuensi pilihan. Konsep terbaik bukan yang paling rumit, tetapi yang paling sesuai dengan bukti, nilai tempat, dan kebutuhan masyarakat (Carmona et al., 2010; Healey, 1997).

23. Kesimpulan

Analisis perencanaan ruang kultural mengintegrasikan potensi, masalah, nilai budaya, kebutuhan masyarakat, dan hubungan pemangku kepentingan. Potensi menunjukkan sumber daya yang dapat dikembangkan, masalah menunjukkan kesenjangan dan akar penyebab, nilai budaya menentukan unsur yang perlu dijaga, sedangkan kebutuhan masyarakat memberikan dasar bagi tujuan pembangunan (Mason, 2002; UNESCO, 2011).

Konsep pengembangan merupakan sintesis yang menerjemahkan hasil analisis menjadi visi, tujuan, prinsip, struktur ruang, zona, jaringan, program, kelembagaan, dan indikator. Konsep harus kontekstual, partisipatif, adil, adaptif, dan dapat dilaksanakan agar pelestarian budaya berjalan bersama peningkatan kualitas hidup masyarakat (Healey, 1997; Fainstein, 2010).

B. Pertanyaan diskusi mahasiswa

1. Apa perbedaan antara potensi, masalah, dan isu strategis?
2. Mengapa masalah perlu dibedakan dari gejalanya?
3. Siapa yang berhak menentukan nilai budaya sebuah tempat?
4. Apakah bangunan yang telah berubah material masih dapat dianggap autentik?
5. Bagaimana membedakan kebutuhan masyarakat dan keinginan sesaat?
6. Bagaimana melindungi nilai budaya tanpa membekukan perkembangan kawasan?
7. Apa risiko pengembangan pariwisata pada ruang kultural?
8. Bagaimana menilai alternatif konsep secara transparan?
9. Apa perbedaan konservasi, revitalisasi, dan adaptasi fungsi?
10. Bagaimana memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat pengembangan?

DAFTAR PUSTAKA

1. Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
2. Australian ICOMOS. (2013). *The Burra Charter: The Australia ICOMOS charter for places of cultural significance*. Australia ICOMOS.
3. Bradshaw, J. (1972). A taxonomy of social need. In G. McLachlan (Ed.), *Problems and progress in medical care* (pp. 71–82). Oxford University Press.
4. Brown, G., & Raymond, C. (2007). The relationship between place attachment and landscape values: Toward mapping place attachment. *Applied Geography*, 27(2), 89–111.
<https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2006.11.002>
5. Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
6. Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Wiley.
7. Carmona, M., Tiesdell, S., Heath, T., & Oc, T. (2010). *Public places, urban spaces: The dimensions of urban design* (2nd ed.). Routledge.
8. Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
[https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
9. Corbett, J. (2009). *Good practices in participatory mapping*. International Fund for Agricultural Development.
10. Cornwall, A. (2003). Whose voices? Whose choices? Reflections on gender and participatory development. *World Development*, 31(8), 1325–1342. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00086-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00086-X)
11. de la Torre, M. (Ed.). (2002). *Assessing the values of cultural heritage*. Getty Conservation Institute.
12. Fainstein, S. S. (2010). *The just city*. Cornell University Press.
13. Forester, J. (1999). *The deliberative practitioner: Encouraging participatory planning processes*. MIT Press.
14. Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
15. Groat, L. N., & Wang, D. (2013). *Architectural research methods* (2nd ed.). Wiley.
16. Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. *The Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006.
<https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1832>
17. Hall, P., & Tewdwr-Jones, M. (2020). *Urban and regional planning* (6th ed.). Routledge.
18. Harrison, R. (2013). *Heritage: Critical approaches*. Routledge.
19. Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. Macmillan.
20. ICOMOS. (1994). *The Nara document on authenticity*. ICOMOS.
21. Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.

22. Lees, L., Slater, T., & Wyly, E. (2008). *Gentrification*. Routledge.
23. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
24. Low, S., Taplin, D., & Scheld, S. (2005). *Rethinking urban parks: Public space and cultural diversity*. University of Texas Press.
25. Lynch, K. (1960). *The image of the city*. MIT Press.
26. Malczewski, J., & Rinner, C. (2015). *Multicriteria decision analysis in geographic information science*. Springer.
27. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
28. Mason, R. (2002). Assessing values in conservation planning: Methodological issues and choices. In M. de la Torre (Ed.), *Assessing the values of cultural heritage* (pp. 5–30). Getty Conservation Institute.
29. Max-Neef, M. A. (1991). *Human scale development: Conception, application and further reflections*. Apex Press.
30. Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.
31. Norberg-Schulz, C. (1980). *Genius loci: Towards a phenomenology of architecture*. Rizzoli.
32. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
33. Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
34. Pendlebury, J. (2013). Conservation values, the authorised heritage discourse and the conservation-planning assemblage. *International Journal of Heritage Studies*, 19(7), 709–727. <https://doi.org/10.1080/13527258.2012.700282>
35. Plevoets, B., & Van Cleempoel, K. (2019). *Adaptive reuse of the built heritage: Concepts and cases of an emerging discipline*. Routledge.
36. Plieninger, T., Kizos, T., Bieling, C., Le Dû-Blayo, L., Budniok, M.-A., Bürgi, M., Crumley, C. L., Girod, G., Howard, P., Kolen, J., Kuemmerle, T., Milcinski, G., Palang, H., Trommler, K., & Verburg, P. H. (2015). Exploring ecosystem-change and society through a landscape lens: Recent progress in European landscape research. *Ecology and Society*, 20(2), Article 5. <https://doi.org/10.5751/ES-07443-200205>
37. Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
38. Rambaldi, G., Chambers, R., McCall, M., & Fox, J. (2006). Practical ethics for PGIS practitioners, facilitators, technology intermediaries and researchers. *Participatory Learning and Action*, 54, 106–113.
39. Rapoport, A. (1982). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach*. SAGE Publications.
40. Rapoport, A. (1990). *The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach* (Rev. ed.). University of Arizona Press.
41. Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods. *Journal of Environmental*

- Management*, 90(5), 1933–1949.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
42. Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. *Journal of Environmental Psychology*, 30(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.006>
43. Shirvani, H. (1985). *The urban design process*. Van Nostrand Reinhold.
44. Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
45. Soja, E. W. (2010). *Seeking spatial justice*. University of Minnesota Press.
46. Steinitz, C. (2012). *A framework for geodesign: Changing geography by design*. Esri Press.
47. Taylor, K., & Lennon, J. (2011). Cultural landscapes: A bridge between culture and nature? *International Journal of Heritage Studies*, 17(6), 537–554. <https://doi.org/10.1080/13527258.2011.618246>
48. Tiesdell, S., Oc, T., & Heath, T. (1996). *Revitalizing historic urban quarters*. Architectural Press.
49. Timothy, D. J., & Boyd, S. W. (2003). *Heritage tourism*. Pearson Education.
50. Turner, J. F. C. (1976). *Housing by people: Towards autonomy in building environments*. Marion Boyars.
51. UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. UNESCO.
52. UNESCO. (2011). *Recommendation on the historic urban landscape*. UNESCO.
53. Vale, L. J., & Campanella, T. J. (Eds.). (2005). *The resilient city: How modern cities recover from disaster*. Oxford University Press.
54. Zukin, S. (1995). *The cultures of cities*. Blackwell.

POKOK BAHASAN MINGGU KE-15

Presentasi Produk Perencanaan Ruang Kultural: komunikasi kepada pemangku kepentingan dan masvarakat: refleksi dan evaluasi

1. Pengertian presentasi produk perencanaan

Presentasi produk perencanaan ruang kultural adalah proses menyampaikan hasil kajian, konsep, alternatif, dan arahan pengembangan kepada pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh rencana. Presentasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi bagian dari proses komunikasi, pembelajaran, negosiasi, validasi, dan pembentukan kesepakatan mengenai masa depan suatu kawasan (Healey, 1997; Forester, 1999).

Produk yang dipresentasikan dapat berupa profil kawasan, peta potensi dan masalah, penilaian nilai budaya, kebutuhan masyarakat, visi, konsep spasial, zonasi, program, tahapan, dan indikator. Setiap bagian harus membentuk alur argumentasi yang menunjukkan hubungan antara data, analisis, keputusan, dan konsekuensi rencana (Steinitz, 2012; Carmona et al., 2010).

Presentasi yang baik tidak hanya menjelaskan bentuk rencana, tetapi juga dasar pemilihannya. Audiens perlu mengetahui data yang digunakan, kelompok yang dilibatkan, nilai yang dipertahankan, alternatif yang dibandingkan, serta alasan suatu konsep dipilih. Transparansi tersebut memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan menilai kualitas proses perencanaan (Innes, 1995; Bryson, 2018).

2. Presentasi sebagai proses komunikasi perencanaan

Dalam pendekatan komunikatif, perencanaan dipahami sebagai proses membangun pengertian bersama melalui dialog. Pengetahuan perencana, pengalaman masyarakat, kepentingan pemerintah, dan sumber daya pelaku usaha perlu dipertemukan agar keputusan tidak hanya didasarkan pada kewenangan teknis atau politik salah satu pihak (Healey, 1997; Innes & Booher, 2004).

Komunikasi perencanaan tidak bersifat satu arah. Presentasi yang hanya memindahkan informasi dari perencana kepada audiens belum dapat disebut partisipatif. Komunikasi yang bermakna menyediakan kesempatan untuk bertanya, mengoreksi data, menyampaikan keberatan, menawarkan alternatif, dan mengetahui bagaimana masukan digunakan dalam keputusan (Arnstein, 1969; Forester, 1999).

Dalam perencanaan ruang kultural, masyarakat memiliki pengetahuan mengenai sejarah, makna, aktivitas, aturan, dan perubahan ruang. Perencana memiliki kemampuan mengolah data, menyusun alternatif, dan memvisualisasikan konsekuensi. Presentasi perlu mempertemukan kedua bentuk pengetahuan tersebut tanpa menempatkan pengetahuan profesional sebagai satu-satunya kebenaran (Smith, 2006; Low, 2017).

3. Tujuan presentasi produk

Tujuan informatif adalah menyampaikan kondisi kawasan, hasil analisis, konsep, dan program secara jelas. Audiens perlu memahami apa yang ditemukan, mengapa suatu isu dianggap penting, dan perubahan apa yang diusulkan. Informasi yang terlalu teknis dapat menghambat pemahaman sehingga perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai dengan audiens (Alley, 2013; Tufte, 2001).

Tujuan validatif adalah memeriksa kembali ketepatan data dan interpretasi. Masyarakat dapat mengoreksi nama tempat, batas, sejarah, penggunaan ruang, atau kelompok yang belum terwakili. Validasi penting karena peta dan laporan merupakan hasil seleksi serta interpretasi, bukan representasi realitas yang sepenuhnya netral (Harley, 1989; Lincoln & Guba, 1985).

Tujuan deliberatif adalah membahas pilihan dan konsekuensi. Audiens tidak hanya diminta menyetujui rencana, tetapi diajak membandingkan alternatif, mempertimbangkan manfaat dan risiko, serta menentukan prioritas. Proses deliberatif membuat keputusan lebih dapat dipertanggungjawabkan karena pertimbangan yang mendasarinya dibuka kepada publik (Forester, 1999; Innes & Booher, 2004).

Tujuan mobilisasi adalah membangun komitmen terhadap pelaksanaan. Rencana ruang kultural biasanya memerlukan kontribusi pemerintah,

masyarakat, pelaku usaha, organisasi budaya, dan akademisi. Presentasi perlu menunjukkan peran masing-masing pihak, sumber daya yang dibutuhkan, serta mekanisme kerja sama setelah rencana disepakati (Bryson, 2004; Ostrom, 1990).

4. Mengenali audiens

Pemangku kepentingan dapat mencakup masyarakat lokal, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, pemilik tanah, pelaku usaha, organisasi budaya, akademisi, kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan pengunjung. Setiap kelompok memiliki pengetahuan, kepentingan, bahasa, serta kemampuan membaca dokumen perencanaan yang berbeda (Bryson, 2004; Reed et al., 2009).

Analisis audiens perlu dilakukan sebelum menentukan isi dan media presentasi. Tim perlu mengetahui siapa yang hadir, informasi apa yang telah mereka ketahui, keputusan apa yang dapat mereka pengaruhi, kekhawatiran mereka, dan hambatan partisipasinya. Informasi tersebut membantu menentukan tingkat teknis, durasi, bahasa, ilustrasi, serta bentuk diskusi (Duarte, 2010; Forester, 1999).

Presentasi kepada pemerintah dapat menekankan kesesuaian kebijakan, legalitas, program, biaya, dan indikator. Presentasi kepada masyarakat lebih tepat menekankan perubahan nyata terhadap kehidupan, ruang yang dipertahankan, manfaat, risiko, dan peran warga. Walaupun penekanannya berbeda, substansi dasar tidak boleh dimanipulasi atau disembunyikan (Innes, 1995; Alley, 2013).

Kelompok yang kurang memiliki kekuasaan mungkin enggan berbicara dalam forum besar. Karena itu, presentasi umum dapat dilengkapi dengan diskusi kelompok kecil, konsultasi khusus, pameran terbuka, atau formulir masukan. Diversifikasi media dan forum membantu memperluas keterwakilan (Cornwall, 2003; Fung, 2006).

5. Struktur materi presentasi

Presentasi sebaiknya dimulai dengan konteks: lokasi, karakter kawasan, tujuan kajian, metode, dan pihak yang dilibatkan. Bagian awal menjelaskan alasan rencana disusun dan pertanyaan apa yang hendak dijawab. Pembukaan yang jelas membantu audiens memahami posisi setiap informasi berikutnya (Alley, 2013; Duarte, 2010).

Bagian kedua menyajikan temuan utama, bukan seluruh data. Temuan dapat dikelompokkan menjadi potensi, masalah, nilai budaya, kebutuhan masyarakat, dan isu strategis. Setiap temuan harus disertai bukti berupa peta, foto, data, hasil observasi, atau pernyataan masyarakat (Tufte, 2001; Miles et al., 2020).

Bagian ketiga menjelaskan visi, tujuan, dan prinsip perencanaan. Audiens perlu mengetahui kondisi masa depan yang hendak dicapai serta prinsip yang membatasi intervensi, seperti perlindungan nilai budaya, keadilan, keberlanjutan, partisipasi, dan ketahanan (Healey, 1997; UNESCO, 2011).

Bagian keempat memperlihatkan alternatif konsep dan alasan pemilihannya. Setiap alternatif perlu menjelaskan manfaat, risiko, dampak terhadap kelompok masyarakat, kebutuhan sumber daya, dan kemungkinan

pelaksanaan. Penyajian hanya satu alternatif dapat menimbulkan kesan bahwa keputusan telah ditetapkan sebelum konsultasi dilakukan (Steinitz, 2012; Malczewski & Rinner, 2015).

Bagian kelima menyampaikan konsep terpilih dalam bentuk struktur ruang, zona, jaringan, program, tahap pelaksanaan, pembagian peran, dan indikator. Presentasi ditutup dengan pertanyaan yang masih terbuka serta bentuk keputusan atau masukan yang diharapkan dari audiens (Bryson, 2018; Hall & Tewdwr-Jones, 2020).

A. Susunan presentasi yang disarankan

1. Judul dan identitas kawasan.
2. Latar belakang dan tujuan.
3. Metode serta partisipan.
4. Profil singkat kawasan.
5. Potensi dan masalah.
6. Nilai budaya dan kebutuhan masyarakat.
7. Isu strategis.
8. Visi, tujuan, dan prinsip.
9. Alternatif konsep.
10. Konsep terpilih dan alasan pemilihan.
11. Struktur ruang, zona, dan jaringan.
12. Program prioritas dan tahapan.
13. Aktor pelaksana dan pembiayaan.
14. Risiko dan langkah mitigasi.
15. Indikator keberhasilan.
16. Pertanyaan dan mekanisme umpan balik.

Struktur tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan forum. Presentasi akademik dapat memberikan perhatian lebih pada metode dan argumentasi, sedangkan konsultasi masyarakat perlu memberikan waktu lebih banyak untuk membahas dampak, pilihan, dan umpan balik (Alley, 2013; Forester, 1999).

6. Penyusunan narasi perencanaan

Narasi presentasi harus memperlihatkan hubungan yang konsisten antara masalah, bukti, konsep, dan tindakan. Formula sederhananya adalah: **kondisi** → **makna** → **konsekuensi** → **pilihan** → **keputusan** → **tindakan**. Struktur tersebut membantu audiens mengikuti alasan perencanaan tanpa harus memahami seluruh istilah teknis (Duarte, 2010; Alley, 2013).

Narasi perlu berpusat pada manusia dan tempat. Data mengenai berkurangnya ruang komunal, misalnya, dapat dijelaskan melalui perubahan luas, aktivitas yang hilang, kelompok yang terdampak, dan risiko terhadap kehidupan sosial. Pendekatan ini tidak mengurangi objektivitas, tetapi menghubungkan data dengan konsekuensi nyata (Sandercock, 2003; Forester, 1999).

Istilah seperti zonasi, morfologi, integrasi, konektivitas, dan konservasi adaptif perlu dijelaskan dengan bahasa sederhana. Jika istilah teknis tetap digunakan, presenter dapat memberikan contoh lokal agar maknanya mudah dipahami. Bahasa yang sulit dapat menghasilkan ketimpangan pengetahuan dan

mengurangi kemampuan masyarakat untuk menilai rencana (Innes, 1995; Cornwall, 2003).

7. Visualisasi produk perencanaan

Visualisasi membantu audiens memahami hubungan lokasi, pola, prioritas, dan perubahan. Produk visual dapat berupa peta, diagram, foto, penampang, ilustrasi, model tiga dimensi, infografik, dan simulasi. Pemilihan media harus mengikuti informasi yang ingin disampaikan, bukan sekadar untuk membuat presentasi terlihat menarik (Tufte, 2001; Krygier & Wood, 2016).

Peta kondisi eksisting sebaiknya dipisahkan dari peta analisis dan peta konsep. Peta kondisi memperlihatkan fakta; peta analisis menunjukkan nilai, masalah, dan hubungan; sedangkan peta konsep memperlihatkan keputusan serta arah perubahan. Pemisahan ini membantu audiens membedakan data dari usulan (Krygier & Wood, 2016; Steinitz, 2012).

Setiap peta harus mempunyai judul, legenda, arah utara, skala, batas, sumber data, dan tanggal. Simbol harus konsisten serta dapat dibedakan, sedangkan warna perlu digunakan secara terbatas. Warna merah dapat menunjukkan masalah atau perlindungan ketat, tetapi pemaknaannya harus dijelaskan dalam legenda (Monmonier, 1996; Krygier & Wood, 2016).

Visualisasi perlu menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi. Perbandingan dapat menggunakan peta berdampingan, diagram urutan, potongan kawasan, atau simulasi sederhana. Namun, visualisasi masa depan harus diberi label sebagai usulan atau simulasi agar tidak dianggap sebagai kondisi yang pasti terjadi (Sheppard, 2005; Steinitz, 2012).

Foto dan ilustrasi perlu dipilih secara etis. Gambar tidak boleh hanya menampilkan kawasan sebagai tempat kosong yang menunggu pembangunan atau menghapus keberadaan masyarakat. Wajah, rumah privat, kegiatan ritual, dan situs sensitif memerlukan persetujuan serta penjelasan konteks (Rose, 2016; Wiles et al., 2008).

8. Peta untuk komunikasi masyarakat

Peta untuk masyarakat sebaiknya menggunakan nama tempat lokal, landmark yang dikenal, simbol sederhana, dan skala yang sesuai dengan pengalaman warga. Citra udara dapat membantu orientasi, tetapi tidak semua peserta mampu membacanya sehingga perlu dilengkapi foto, sketsa, atau model (Corbett, 2009; Chambers, 2006).

Peta partisipatif dapat ditampilkan berdampingan dengan peta teknis. Perbandingan tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat dan perencana memahami kawasan. Perbedaan batas, lokasi penting, dan prioritas tidak perlu disembunyikan karena dapat menjadi dasar pembahasan (Rambaldi et al., 2006; Brown & Kyttä, 2014).

Data sensitif, seperti lokasi sakral, konflik tanah, atau identitas kelompok rentan, tidak boleh dipresentasikan secara terbuka tanpa persetujuan. Peta publik dapat menggunakan zona umum atau menghilangkan atribut tertentu, sedangkan data rinci disimpan dengan akses terbatas (Rambaldi et al., 2006; Israel & Hay, 2006).

9. Media presentasi

Slide digunakan untuk menyajikan alur utama dan visual yang dapat dilihat bersama. Satu slide sebaiknya menyampaikan satu gagasan utama dengan teks yang ringkas, ukuran huruf terbaca, dan visual yang relevan. Slide yang padat memaksa audiens membaca dan mendengarkan secara bersamaan sehingga mengurangi pemahaman (Alley, 2013; Reynolds, 2011).

Panel atau poster cocok untuk pameran dan diskusi terbuka. Media tersebut memungkinkan peserta mengamati materi sesuai kecepatannya, membandingkan alternatif, dan memberikan komentar langsung pada peta. Setiap panel perlu memiliki hierarki informasi yang jelas dari konteks, temuan, konsep, hingga program (Tufte, 2001; Krygier & Wood, 2016).

Model fisik atau tiga dimensi membantu masyarakat memahami skala, ketinggian, jarak, dan hubungan ruang. Namun, model yang sangat realistis dapat memberikan kesan bahwa desain sudah final. Presenter harus menjelaskan bagian yang masih dapat diubah dan asumsi yang digunakan (Sheppard, 2005; Al-Kodmany, 2002).

Video atau animasi dapat menunjukkan perjalanan melalui kawasan dan perubahan berdasarkan waktu. Media tersebut efektif untuk menjelaskan jalur budaya, kegiatan ritual, atau urutan implementasi, tetapi durasinya harus singkat dan tidak menggantikan kesempatan dialog (Sheppard, 2005; Rose, 2016).

10. Teknik penyampaian

Presenter harus menjelaskan tujuan forum dan hasil yang diharapkan sejak awal. Audiens perlu mengetahui apakah pertemuan bertujuan memberi informasi, memvalidasi data, memilih alternatif, atau menyepakati program. Kejelasan tersebut mencegah partisipasi semu dan harapan yang tidak dapat dipenuhi (Rowe & Frewer, 2000; Fung, 2006).

Penyampaian perlu menggunakan kecepatan, volume, dan bahasa yang dapat diikuti audiens. Presenter sebaiknya menghindari membaca seluruh teks slide dan lebih banyak menjelaskan hubungan antara visual dan gagasan utama. Istilah lokal digunakan secara tepat sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas kawasan (Alley, 2013; Reynolds, 2011).

Presenter perlu membedakan data, interpretasi, dan keputusan. Pernyataan "hasil observasi menunjukkan" berbeda dari "tim menafsirkan" dan "kami mengusulkan". Pembedaan tersebut membuat audiens mengetahui bagian yang bersifat faktual, analitis, atau normatif (Patton, 2015; Steinitz, 2012).

Ketidakpastian dan keterbatasan perlu disampaikan secara terbuka. Data yang belum lengkap, estimasi biaya awal, lokasi yang belum diverifikasi, atau dampak yang masih perlu dikaji tidak boleh disajikan sebagai kepastian. Pengakuan terhadap keterbatasan meningkatkan kredibilitas dan membuka ruang penyempurnaan (Tufte, 2001; Flyvbjerg, 2006).

11. Fasilitasi dialog dan umpan balik

Sesi tanya jawab perlu diperlakukan sebagai bagian utama presentasi, bukan sekadar pelengkap. Waktu yang cukup harus disediakan agar peserta dapat menyampaikan pertanyaan, koreksi, keberatan, dan alternatif. Moderator

membantu menjaga fokus, pemerataan kesempatan, dan suasana yang saling menghormati (Forester, 1999; Krueger & Casey, 2015).

Umpan balik dapat dikumpulkan melalui diskusi pleno, kelompok kecil, formulir, kartu komentar, penandaan peta, pemungutan suara, atau wawancara singkat. Penggunaan beberapa cara diperlukan karena tidak semua peserta nyaman berbicara di depan umum (Fung, 2006; Rowe & Frewer, 2000).

Setiap masukan sebaiknya dicatat berdasarkan isi, pengusul, lokasi, alasan, dan tindak lanjutnya. Masukan dapat dikelompokkan menjadi diterima, diterima dengan penyesuaian, memerlukan kajian, atau tidak diterima. Alasan keputusan harus didokumentasikan agar proses dapat dipertanggungjawabkan (Innes & Booher, 2004; Laurian & Shaw, 2009).

Umpan balik tidak selalu harus menghasilkan kesepakatan penuh. Konflik dapat mencerminkan perbedaan kepentingan, nilai, dan pengalaman yang nyata. Tujuan dialog adalah membuat perbedaan tersebut terlihat, dipahami, dan dikelola melalui prosedur yang adil (Forester, 1999; Mouffe, 2000).

12. Komunikasi dengan pemangku kepentingan

Komunikasi dengan pemerintah perlu menunjukkan kesesuaian konsep dengan kebijakan, kebutuhan koordinasi, implikasi anggaran, tahapan, dan indikator. Peta perlu dilengkapi informasi mengenai kewenangan serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain agar konsep dapat diintegrasikan ke dalam program formal (Hall & Tewdwr-Jones, 2020; Bryson, 2018).

Komunikasi dengan masyarakat perlu menekankan manfaat, dampak, hak, risiko, perubahan akses, dan kemungkinan perpindahan kegiatan. Informasi mengenai konsekuensi negatif tidak boleh disembunyikan karena persetujuan yang bermakna hanya dapat terbentuk apabila masyarakat memperoleh informasi yang cukup (Arnstein, 1969; Israel & Hay, 2006).

Komunikasi dengan pelaku usaha perlu menjelaskan peluang serta batas pengembangan. Investasi harus mematuhi nilai budaya, daya dukung, bentuk ruang, dan pembagian manfaat bagi masyarakat. Presentasi tidak boleh hanya mempromosikan potensi ekonomi tanpa menjelaskan kewajiban sosial dan lingkungan (Timothy & Boyd, 2003; Fainstein, 2010).

Komunikasi dengan tokoh adat dan pelaku budaya perlu menghormati protokol, bahasa, kepemilikan pengetahuan, dan batas informasi. Tidak semua simbol, cerita, atau lokasi boleh digunakan dalam media promosi. Perencana perlu membedakan konsultasi administratif dari persetujuan budaya (Smith, 2006; UNESCO, 2003).

13. Penanganan pertanyaan dan keberatan

Pertanyaan perlu didengarkan sampai selesai dan dirumuskan kembali apabila belum jelas. Presenter sebaiknya menjawab berdasarkan data, menyebutkan apabila informasi belum tersedia, dan menghindari jawaban defensif. Pertanyaan kritis dapat menunjukkan kelemahan konsep yang perlu diperbaiki (Forester, 1999; Alley, 2013).

Keberatan perlu dipisahkan antara persoalan data, nilai, kepentingan, dan distribusi dampak. Perbedaan data dapat diperiksa melalui survei, perbedaan nilai memerlukan dialog, konflik kepentingan membutuhkan negosiasi,

sedangkan ketidakadilan dampak memerlukan perubahan konsep atau mekanisme kompensasi (Innes & Booher, 2004; Fainstein, 2010).

Presenter tidak boleh menjanjikan hal yang berada di luar kewenangannya. Jika keputusan bergantung pada pemerintah, pemilik tanah, atau proses hukum, batas kewenangan tersebut harus dijelaskan. Kejujuran mengenai kewenangan mencegah terbentuknya harapan palsu (Bryson, 2004; Israel & Hay, 2006).

14. Refleksi proses perencanaan

Refleksi adalah proses meninjau kembali pengalaman untuk memahami apa yang dilakukan, alasan tindakan, hasil yang diperoleh, serta perbaikan yang diperlukan. Refleksi membedakan praktik profesional dari sekadar pelaksanaan prosedur karena mahasiswa belajar dari situasi nyata dan ketidakpastian yang dihadapinya (Schön, 1983; Kolb, 1984).

Reflection-in-action dilakukan ketika kegiatan sedang berlangsung, misalnya ketika presenter menyesuaikan bahasa setelah melihat audiens tidak memahami peta. *Reflection-on-action* dilakukan setelah kegiatan untuk menilai kekuatan, kekurangan, asumsi, dan dampak presentasi (Schön, 1983).

Refleksi perlu membahas posisi dan bias tim. Mahasiswa perlu menilai apakah mereka lebih mempercayai data teknis daripada pengalaman warga, apakah kelompok tertentu lebih banyak didengar, dan apakah konsep dipengaruhi oleh preferensi desain pribadi. Kesadaran reflektif membantu menghasilkan praktik perencanaan yang lebih etis (Finlay, 2002; Forester, 1999).

Refleksi juga perlu menilai perjalanan pembelajaran sejak survei hingga konsep. Mahasiswa dapat membandingkan asumsi awal dengan temuan, menunjukkan perubahan pemahaman, dan menjelaskan keputusan yang direvisi. Proses tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan merupakan kegiatan pembelajaran, bukan penerapan rumus secara mekanis (Kolb, 1984; Schön, 1983).

15. Model refleksi

Model refleksi dapat menggunakan enam tahap: deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan rencana tindakan. Mahasiswa pertama-tama mendeskripsikan kejadian, kemudian menilai respons dirinya, mengidentifikasi hal yang berhasil atau gagal, menjelaskan penyebabnya, menarik pelajaran, dan menentukan perbaikan (Gibbs, 1988).

A. Pertanyaan reflektif

Tahap	Pertanyaan
Deskripsi	Apa yang terjadi selama presentasi?
Respons	Bagaimana tim dan audiens merespons?
Evaluasi	Apa yang berjalan baik dan tidak baik?
Analisis	Mengapa hal tersebut terjadi?
Kesimpulan	Pelajaran apa yang diperoleh?
Tindakan	Apa yang akan diperbaiki?

Refleksi tidak cukup berupa pernyataan “presentasi berjalan baik”. Setiap penilaian harus didukung bukti, seperti jumlah kelompok yang terlibat, jenis pertanyaan, bagian yang tidak dipahami, perubahan konsep, atau masukan yang belum terselesaikan (Gibbs, 1988; Patton, 2015).

16. Evaluasi presentasi

Evaluasi presentasi menilai sejauh mana informasi dapat dipahami, audiens terlibat, masukan terkumpul, dan keputusan menjadi lebih baik. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi, formulir, wawancara singkat, analisis pertanyaan, serta penilaian terhadap perubahan konsep setelah forum (Rowe & Frewer, 2000; Laurian & Shaw, 2009).

Kriteria komunikasi meliputi kejelasan tujuan, struktur, bahasa, peta, visual, waktu, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Kriteria partisipasi mencakup keterwakilan, pemerataan kesempatan, kenyamanan menyampaikan pendapat, dan pengaruh masukan terhadap hasil (Rowe & Frewer, 2000; Chess & Purcell, 1999).

Kriteria substansi meliputi ketepatan data, konsistensi analisis, relevansi konsep, perlindungan nilai budaya, pemenuhan kebutuhan, kelayakan program, dan kejelasan indikator. Produk yang menarik secara visual belum dapat dinilai baik apabila hubungan data dan konsepnya lemah (Steinitz, 2012; Carmona et al., 2010).

Kriteria etika mencakup persetujuan penggunaan informasi, perlindungan data sensitif, kejujuran mengenai dampak, keterwakilan kelompok, dan pembagian manfaat. Evaluasi etika diperlukan karena presentasi dapat memperkuat atau melemahkan posisi kelompok tertentu (Rambaldi et al., 2006; Fainstein, 2010).

17. Evaluasi proses partisipasi

Partisipasi dapat dievaluasi berdasarkan akses, representasi, kualitas dialog, transparansi, pengaruh, dan umpan balik. Kehadiran banyak peserta tidak otomatis menunjukkan partisipasi berkualitas apabila keputusan sudah ditetapkan atau hanya kelompok dominan yang berbicara (Arnstein, 1969; Fung, 2006).

Evaluasi perlu membandingkan siapa yang diundang, hadir, berbicara, didengar, dan memengaruhi keputusan. Perbedaan pada setiap tahap dapat menunjukkan adanya hambatan waktu, lokasi, bahasa, status sosial, gender, atau akses informasi (Cornwall, 2003; Rowe & Frewer, 2000).

Peserta perlu memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut masukannya. Tanpa mekanisme tersebut, konsultasi dapat menimbulkan kelelahan dan ketidakpercayaan. Laporan tanggapan dapat menunjukkan masukan, perubahan yang dilakukan, dan alasan apabila suatu usulan tidak diterima (Laurian & Shaw, 2009; Innes & Booher, 2004).

18. Evaluasi produk perencanaan

Produk perencanaan dapat dievaluasi berdasarkan relevansi, konsistensi, kelayakan, efektivitas potensial, dampak, keberlanjutan, dan keadilan. Relevansi menilai kesesuaian dengan masalah; konsistensi menilai hubungan

antarkomponen; kelayakan menilai sumber daya; dampak menilai konsekuensi; sedangkan keberlanjutan menilai kemampuan manfaat untuk bertahan (Rossi et al., 2019; Bryson, 2018).

Produk juga perlu dievaluasi berdasarkan sensitivitas budaya. Pertanyaan utamanya adalah apakah konsep menjaga nilai utama, mendukung praktik hidup, menghormati hak komunitas, serta menghindari komersialisasi berlebihan. Evaluasi harus dilakukan bersama pemilik dan pengguna nilai budaya (Mason, 2002; Smith, 2006).

Evaluasi spasial menilai hubungan pusat, zona, jaringan, akses, fungsi, dan bentang alam. Konsep harus dibaca pada beberapa skala dan waktu untuk mengetahui dampaknya terhadap kehidupan harian, kegiatan ritual, mobilitas, lingkungan, serta perkembangan jangka panjang (Steinitz, 2012; UNESCO, 2011).

19. Rubrik presentasi mahasiswa

Aspek	Bobot	Indikator
Ketepatan substansi	20%	Data, analisis, dan isu strategis dapat dipertanggungjawabkan
Konsistensi konsep	20%	Konsep menjawab potensi, masalah, nilai, dan kebutuhan
Komunikasi visual	15%	Peta dan diagram jelas, akurat, dan terbaca
Komunikasi lisan	10%	Alur, bahasa, waktu, dan penjelasan efektif
Partisipasi dan respons	10%	Mampu mendengar, menjawab, dan mencatat masukan
Sensitivitas budaya	10%	Menghormati nilai, hak, simbol, dan data sensitif
Kelayakan implementasi	10%	Program, aktor, tahapan, dan indikator jelas
Refleksi	5%	Mengidentifikasi pelajaran dan perbaikan berbasis bukti

Rubrik sebaiknya diberikan sebelum presentasi agar mahasiswa memahami standar yang harus dicapai. Penilaian dapat menggabungkan dosen, teman sejawat, dan perwakilan masyarakat, tetapi bobot serta peran setiap penilai harus dijelaskan secara transparan (Boud & Falchikov, 2007; Andrade, 2005).

20. Produk akhir mahasiswa

Produk akhir dapat terdiri atas laporan ringkas, peta konsep, panel, slide presentasi, matriks program, dan lembar refleksi. Seluruh produk harus menggunakan data yang konsisten, legenda yang sama, serta istilah yang seragam agar tidak menimbulkan kebingungan (Krygier & Wood, 2016; Tufte, 2001). Laporan revisi perlu menyertakan matriks tindak lanjut umpan balik. Matriks tersebut berisi masukan, sumber, kategori, keputusan, alasan, dan bagian produk yang diperbaiki. Dokumentasi ini menunjukkan bahwa partisipasi benar-benar memengaruhi produk (Innes & Booher, 2004; Laurian & Shaw, 2009).

A. Contoh matriks tindak lanjut

Masukan	Sumber	Kategori	Keputusan	Tindak lanjut
Jalur ritual belum dipetakan	Tokoh adat	Data	Diterima	Tambahkan dengan akses terbatas
Area perdagangan terlalu kecil	Pedagang	Kebutuhan	Direvisi	Perluas zona dan atur waktu
Bangunan baru terlalu tinggi	Warga	Karakter	Diterima	Turunkan batas ketinggian
Parkir di zona inti	Pengunjung	Akses	Tidak diterima	Dialihkan ke zona penyangga
Ruang pemuda belum tersedia	Kelompok pemuda	Program	Diterima	Adaptasi bangunan komunitas

Matriks membantu tim membedakan masukan yang langsung diterapkan, memerlukan penelitian, atau tidak dapat diterima. Penolakan harus diberikan alasan substantif, bukan hanya karena bertentangan dengan desain awal tim (Forester, 1999; Bryson, 2018).

21. Alur presentasi, evaluasi, dan revisi

Persiapan audiens → penyusunan pesan → visualisasi produk → uji coba → presentasi → dialog → dokumentasi umpan balik → evaluasi → refleksi → revisi → konfirmasi → finalisasi

Alur tersebut menunjukkan bahwa presentasi bukan akhir dari proses. Produk baru dapat dianggap selesai setelah masukan diperiksa, keputusan revisi dijelaskan, dan konsep dikonfirmasi kembali kepada pihak terkait (Innes & Booher, 2004; Laurian & Shaw, 2009).

22. Kesalahan yang perlu dihindari

Kesalahan pertama adalah menampilkan terlalu banyak data tanpa menentukan pesan utama. Kesalahan kedua adalah menggunakan teks kecil, peta tanpa legenda, warna berlebihan, atau diagram yang tidak menjelaskan hubungan. Visualisasi yang rumit dapat menyembunyikan informasi penting dan menciptakan kesan kepastian yang tidak didukung data (Tufte, 2001; Monmonier, 1996).

Kesalahan ketiga adalah menggunakan istilah teknis tanpa penjelasan. Kesalahan keempat adalah menjadikan forum sebagai sarana memperoleh persetujuan formal setelah keputusan dibuat. Kesalahan kelima adalah hanya melibatkan tokoh formal dan mengabaikan kelompok yang mengalami dampak langsung (Arnstein, 1969; Cornwall, 2003).

Kesalahan keenam adalah menjanjikan manfaat tanpa menjelaskan risiko, biaya, dan kewenangan. Kesalahan ketujuh adalah menggunakan cerita, foto, atau simbol budaya tanpa izin. Kesalahan kedelapan adalah mengumpulkan masukan tanpa memberikan informasi mengenai tindak lanjut (Smith, 2006; Rambaldi et al., 2006).

23. Kesimpulan

Presentasi produk perencanaan ruang kultural merupakan proses komunikasi, validasi, deliberasi, dan pembentukan komitmen. Presentasi harus menunjukkan hubungan antara data, potensi, masalah, nilai budaya, kebutuhan, konsep, program, serta konsekuensi. Materi perlu disesuaikan dengan audiens tanpa mengurangi ketepatan dan transparansinya (Healey, 1997; Forester, 1999).

Komunikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan harus berlangsung dua arah serta menyediakan mekanisme umpan balik yang dapat ditelusuri. Peta, diagram, model, dan narasi digunakan untuk membantu pemahaman, bukan untuk menyembunyikan ketidakpastian atau memaksakan keputusan (Tufte, 2001; Innes & Booher, 2004).

Refleksi membantu mahasiswa memahami kekuatan, kelemahan, bias, dan pelajaran selama proses perencanaan. Evaluasi menilai kualitas komunikasi, partisipasi, substansi, etika, serta kelayakan produk. Hasil refleksi dan evaluasi selanjutnya digunakan untuk merevisi konsep sehingga lebih kontekstual, inklusif, adil, dan dapat dilaksanakan (Schön, 1983; Rowe & Frewer, 2000).

A. Pertanyaan diskusi mahasiswa

1. Mengapa presentasi produk perencanaan tidak boleh hanya bersifat satu arah?
2. Apa perbedaan tujuan informatif, validatif, deliberatif, dan mobilisasi?
3. Bagaimana menyederhanakan informasi tanpa menghilangkan substansi?
4. Mengapa alternatif konsep perlu ditampilkan kepada masyarakat?
5. Bagaimana menghadapi penolakan terhadap konsep yang dipresentasikan?
6. Apakah jumlah peserta dapat menjadi ukuran keberhasilan partisipasi?
7. Bagaimana memastikan masukan masyarakat memengaruhi produk?
8. Apa perbedaan refleksi dan evaluasi?
9. Bagaimana menjaga kerahasiaan informasi budaya dalam presentasi publik?
10. Kapan produk perencanaan dapat dinyatakan final?

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Kodmany, K. (2002). Visualization tools and methods in community planning: From freehand sketches to virtual reality. *Journal of Planning Literature*, 17(2), 189–211.
<https://doi.org/10.1177/088541202762475946>
2. Alley, M. (2013). *The craft of scientific presentations: Critical steps to succeed and critical errors to avoid* (2nd ed.). Springer.
3. Andrade, H. G. (2005). Teaching with rubrics: The good, the bad, and the ugly. *College Teaching*, 53(1), 27–31.
<https://doi.org/10.3200/CTCH.53.1.27-31>
4. Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

5. Boud, D., & Falchikov, N. (Eds.). (2007). *Rethinking assessment in higher education: Learning for the longer term*. Routledge.
6. Brown, G., & Kyttä, M. (2014). Key issues and research priorities for public participation GIS: A synthesis based on empirical research. *Applied Geography*, 46, 122–136.
<https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.11.004>
7. Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
8. Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Wiley.
9. Carmona, M., Tiesdell, S., Heath, T., & Oc, T. (2010). *Public places, urban spaces: The dimensions of urban design* (2nd ed.). Routledge.
10. Chambers, R. (2006). Participatory mapping and geographic information systems: Whose map? Who is empowered and who disempowered? Who gains and who loses? *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 25(1), 1–11. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2006.tb00163.x>
11. Chess, C., & Purcell, K. (1999). Public participation and the environment: Do we know what works? *Environmental Science & Technology*, 33(16), 2685–2692. <https://doi.org/10.1021/es980500g>
12. Corbett, J. (2009). *Good practices in participatory mapping*. International Fund for Agricultural Development.
13. Cornwall, A. (2003). Whose voices? Whose choices? Reflections on gender and participatory development. *World Development*, 31(8), 1325–1342. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00086-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00086-X)
14. Duarte, N. (2010). *Resonate: Present visual stories that transform audiences*. Wiley.
15. Fainstein, S. S. (2010). *The just city*. Cornell University Press.
16. Finlay, L. (2002). "Outing" the researcher: The provenance, process, and practice of reflexivity. *Qualitative Health Research*, 12(4), 531–545. <https://doi.org/10.1177/104973202129120052>
17. Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219–245. <https://doi.org/10.1177/1077800405284363>
18. Forester, J. (1999). *The deliberative practitioner: Encouraging participatory planning processes*. MIT Press.
19. Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(S1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
20. Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
21. Gibbs, G. (1988). *Learning by doing: A guide to teaching and learning methods*. Further Education Unit.
22. Hall, P., & Tewdwr-Jones, M. (2020). *Urban and regional planning* (6th ed.). Routledge.
23. Harley, J. B. (1989). Deconstructing the map. *Cartographica*, 26(2), 1–20. <https://doi.org/10.3138/E635-7827-1757-9T53>

24. Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. Macmillan.
25. Innes, J. E. (1995). Planning theory's emerging paradigm: Communicative action and interactive practice. *Journal of Planning Education and Research*, 14(3), 183–189.
<https://doi.org/10.1177/0739456X9501400307>
26. Innes, J. E., & Booher, D. E. (2004). Reframing public participation: Strategies for the 21st century. *Planning Theory & Practice*, 5(4), 419–436. <https://doi.org/10.1080/1464935042000293170>
27. Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists*. SAGE Publications.
28. Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
29. Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). SAGE Publications.
30. Krygier, J., & Wood, D. (2016). *Making maps: A visual guide to map design for GIS* (3rd ed.). Guilford Press.
31. Laurian, L., & Shaw, M. M. (2009). Evaluation of public participation: The practices of certified planners. *Journal of Planning Education and Research*, 28(3), 293–309. <https://doi.org/10.1177/0739456X08326532>
32. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
33. Low, S. M. (2017). *Spatializing culture: The ethnography of space and place*. Routledge.
34. Malczewski, J., & Rinner, C. (2015). *Multicriteria decision analysis in geographic information science*. Springer.
35. Mason, R. (2002). Assessing values in conservation planning: Methodological issues and choices. In M. de la Torre (Ed.), *Assessing the values of cultural heritage* (pp. 5–30). Getty Conservation Institute.
36. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
37. Monmonier, M. (1996). *How to lie with maps* (2nd ed.). University of Chicago Press.
38. Mouffe, C. (2000). *The democratic paradox*. Verso.
39. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
40. Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
41. Rambaldi, G., Chambers, R., McCall, M., & Fox, J. (2006). Practical ethics for PGIS practitioners, facilitators, technology intermediaries and researchers. *Participatory Learning and Action*, 54, 106–113.
42. Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>

43. Reynolds, G. (2011). *Presentation zen: Simple ideas on presentation design and delivery* (2nd ed.). New Riders.
44. Rose, G. (2016). *Visual methodologies: An introduction to researching with visual materials* (4th ed.). SAGE Publications.
45. Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). SAGE Publications.
46. Rowe, G., & Frewer, L. J. (2000). Public participation methods: A framework for evaluation. *Science, Technology, & Human Values*, 25(1), 3–29. <https://doi.org/10.1177/016224390002500101>
47. Sandercock, L. (2003). *Out of the closet: The importance of stories and storytelling in planning practice*. *Planning Theory & Practice*, 4(1), 11–28. <https://doi.org/10.1080/1464935032000057209>
48. Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
49. Sheppard, S. R. J. (2005). Landscape visualisation and climate change: The potential for influencing perceptions and behaviour. *Environmental Science & Policy*, 8(6), 637–654. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2005.08.002>
50. Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
51. Steinitz, C. (2012). *A framework for geodesign: Changing geography by design*. Esri Press.
52. Timothy, D. J., & Boyd, S. W. (2003). *Heritage tourism*. Pearson Education.
53. Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (2nd ed.). Graphics Press.
54. UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. UNESCO.
55. UNESCO. (2011). *Recommendation on the historic urban landscape*. UNESCO.
56. Wiles, R., Clark, A., & Prosser, J. (2008). *Visual research ethics at the crossroads*. National Centre for Research Methods.

PERTEMUAN MINGGU KE 16
Studi Kasus Komprehensif
Sintesis konsep budaya, masyarakat,
ruang dan perencanaan
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

